



BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan per-Undang- Undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.



1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 056 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;



3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan – LRA
 2. Belanja
 3. Transfer
 4. Pembiayaan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa



5. Laporan Arus Kas
 - a. Arus Kas dari Operasi
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk mengetahui tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Brebes dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. Dari perbandingan total PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi belum dapat dijadikan dasar sepenuhnya untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun jika diikuti dengan perkembangan penduduknya yang tinggi maka tingkat kemakmuran masyarakat belum dikatakan tinggi. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat digunakan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, jika dilihat dari segi konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kuantitasnya.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) 2016-2020, atas dasar harga konstan secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016-2020 fluktuatif, berturut-turut sebesar 5,08%, 5,65%, 5,22, 5,86% dan -0,59. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,60	1,75	2,43	0,64	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	6,09	6,72	6,04	3,84	1,38
C	Industri Pengolahan	7,01	8,17	5,08	13,09	-0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,61	5,30	5,33	5,71	2,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	3,19	5,07	4,64	3,43
F	Konstruksi	-0,98	5,3	6,08	5,2	-2,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	7,06	5,75	6,35	-4,83
H	Transportasi dan Pergudangan	6,69	6,27	7,07	8,91	-30,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,80	12,10	8,50	10,36	-4,83
J	Informasi dan Komunikasi	8,31	16,25	14,52	12,2	11,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,32	6,15	3,69	3,73	0,96
L	Real Estate	6,80	2,38	5,74	5,81	-0,51
M, N	Jasa Perusahaan	10,62	9,44	10,05	11,07	-4,43



Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	4,44	3,66	3,12	-0,92
P	Jasa Pendidikan	7,64	7,53	8,58	7,97	-0,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	6,68	9,35	7,06	7,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,62	8,08	10,12	9,48	-4,89
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,08	5,65	5,22	5,86	-0,59

Sumber : BPS Kab, Brebes

Stabilitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat berdasarkan tingkat kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa di daerah tersebut, Untuk mengukur tingkat kestabilan harga komoditas barang dan jasa secara umum digunakan angka inflasi yang menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu dan dalam ruang lingkup tertentu, Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa pada keadaan tertentu, seperti hari raya Idul Fitri, tahun baru ajaran sekolah, tahun baru masehi, maupun musim hajatan bagi penduduk setempat, Perkembangan inflasi di Kabupaten Brebes selama 3 tahun terakhir berdasarkan kelompok pengeluaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Inflasi Tahunan Kabupaten Brebes, Tahun 2017-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Umum	4,24	3,09	2,28
1	Bahan Makanan	5,52	6,23	4,07
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok Dan Tembakau	1,79	0,83	1,55
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,64	2,76	2,66
4	Sandang	3,58	5,38	5,07
5	Kesehatan	4,83	2,27	1,22
6	Pendidikan, rekreasi, dan Olahraga	7,01	1,64	1,39
7	Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	4,55	3,50	0,21

Sumber : BPS Kab, Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut United Nations Development Programme (UNDP) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia, Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan (3) tiga dimensi dasar yang diukur dari 4 (empat) indikator, Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah :

1) Kesehatan

Untuk dimensi kesehatan yaitu berupa umur panjang dan hidup sehat (*a long life and healthy life*), Indikator yang diukur adalah (a) Angka Harapan Hidup (AHH).



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2) Pendidikan

Yaitu berupa pengetahuan (*knowledge*), Indikator yang diukur adalah (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years of Schooling (MYS) dan (c) Harapan Lama Sekolah (HLS) / Expected Years of Schooling (EYS).

3) Pengeluaran per kapita

Yaitu berupa standar hidup layak (*decent standard living*), Indikator yang diukur adalah (d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), sebagai ukuran kinerja pemerintah serta untuk daerah juga dijadikan sebagai dasar untuk alokator Dana Alokasi Umum (DAU).

Perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Brebes selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perkembangan Data IPM Kabupaten Brebes

Tahun	IPM	AHH	HLS / EYS	RLS / MYS	Pengeluaran per Kapita
2017	64,86	68,61	11,69	6,18	9554
2018	65,68	68,84	12,02	6,19	9,89
2019	66,12	69,04	12,03	6,20	10,233

Sumber : BPS Kab. Brebes

Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari BPS angka pengangguran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif. Angka Pengangguran pada tahun 2017 sebesar 8,04%, kemudian pada tahun berikutnya, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,20% dengan rincian dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)			2020
	2017	2018	2019	
Kabupaten Brebes	8.04	7.20	7.43	9.83

Sumber : BPS Kab. Brebes



2. Kebijakan Keuangan

a. Landasan Hukum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Landasan hukum dalam penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2020, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005



- tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 12) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - 13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019,

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, Penyusunan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada:

- a) Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017– 2022;
- b) Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Prioritas Kegiatan Pembangunan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Brebes Tahun 2020;
- d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- e) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.

b. Struktur APBD Tahun Anggaran 2020

- 1) Pendapatan Daerah :



- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah;
 - b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Darurat;
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2) Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, kelompok, dan ekonomi (jenis belanja).

- a) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan.
- c) Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran disesuaikan dengan susunan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Brebes.
- d) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e) Klasifikasi belanja menurut kelompok dan ekonomi (jenis) adalah pengelompokan belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan, Klasifikasi kelompok belanja untuk Pemerintah Kabupaten Brebes meliputi belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan, Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga; dan kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, Setiap jenis belanja dibagi menurut obyek belanja dan setiap obyek belanja dibagi menurut rincian obyek belanja.



3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan, Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

c. Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020

Penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tahap-tahap sebagai berikut: Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) APBD, PPAS dan PPA, KUA APBD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran Renstra Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, yang dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian visi, misi dan tujuan Kabupaten Brebes, Penyusunan KUA APBD TA 2020 didasarkan pada hasil penjabaran aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan Renstra, sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, mengacu pada:

1) Prinsip Penyusunan APBD

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- e) Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran;
- f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.



2) Ketentuan Umum

- a) Struktur APBD TA 2020 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- b) Penyusunan APBD dilakukan secara partisipatif dan didasarkan atas analisis keuangan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- c) Belanja DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan mendapat pembahasan yang sama dengan pos belanja lainnya;
- d) Belanja Kepala Daerah mencerminkan penghematan dan berorientasi prioritas peningkatan kinerja koordinasi dan pembinaan masyarakat;
- e) Alokasi anggaran untuk kegiatan eksekutif tidak dapat dipergunakan untuk membiayai anggota legislatif;
- f) Semua gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peruntukannya;
- g) Neraca Daerah disusun berdasarkan penghitungan/penilaian terhadap aset-aset daerah;

d. Kondisi dan Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2020

1) Pendapatan Daerah

a) Estimasi pendapatan daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pendapatan daerah sebesar Rp3.004.837.514.000,00 terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp363.130.149.000,00
- (2) Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.735.149.441.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp906.557.924.000,00

b) Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk memacu kegiatan, penggalan, pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan memiliki implikasi terhadap meningkatnya belanja daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

(1) Pajak Daerah

a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.

b. Peningkatan *Law Enforcement*

Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.



- c. Intensifikasi Pajak Daerah
 - 1) Optimalisasi system informasi pajak daerah terkonsolidasi
 - 2) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek Pajak
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah
 - d. Ekstensifikasi Pajak Daerah
 - 1) Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah
 - 2) Melakukan perluasan basis Pajak Daerah
 - 3) Melakukan reklasifikasi obyek penerimaan pajak
 - (2) Retribusi Daerah
 - a. Peningkatan kemudahan system pembayaran pelayanan retribusi daerah
 - b. Peningkatan *Law Enforcement*
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah,
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD
 - b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - (4) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - Melakukan koordinasi untuk kelancaran pencairan Hibah
- 2) Belanja Daerah
 - a) Estimasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan belanja daerah sebesar Rp3.132.984.182.000,00 terdiri dari :

 - (1) Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp1.821.022.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.010.320.316.000,00
 - (b) Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00
 - (c) Belanja Hibah sebesar Rp51.437.856.000,00
 - (d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp43.567.400.000,00
 - (e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp15.304.388.000,00
 - (f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp684.452.408.000,00
 - (g) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp14.190.000.000,00
 - (2) Belanja Langsung sebesar Rp1.311.961.814.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Belanja Pegawai sebesar Rp81.538.546.000,00
 - (b) Belanja Barang dan Jasa Rp770.553.342.190,00
 - (c) Belanja Modal Rp459.869.925.810,00



b) Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam proses penganggaran belanja diupayakan pada pencapaian hasil melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintah kabupaten baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dengan kebijakan pengelolaan belanja tahun 2020 diarahkan pada :

- (1) Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan
- (2) Prioritas anggaran belanja adalah menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya
- (3) Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (4) Besarnya plafond anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja
- (5) Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan SKPD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang berlaku.

3) Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Brebes merencanakan anggaran pembiayaan daerah surplus sebesar Rp128.146.668.000,00 yang meliputi rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp166.146.668.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp38.000.000.000,00.

e. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Belanja Daerah sebesar Rp3.132.984.182.000,00 dialokasikan untuk 4 urusan pemerintahan, yakni Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Fungsi Penunjang,

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp1.884.300.751.675,00 terdiri atas:

- (a) Urusan Wajib Pendidikan dianggarkan sebesar Rp982.371.148.656,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- (b) Urusan Wajib Kesehatan dianggarkan sebesar Rp546.362.519.245,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes & RSUD Bumiayu;
- (c) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp313.122.871.414,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- (d) Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp17.239.077.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;



- (e) Urusan Wajib Ketrentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan dianggarkan sebesar Rp20.342.521.520,00 dilaksanakan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (f) Urusan Wajib Sosial dianggarkan sebesar Rp4.862.613.840,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial;
- 2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp114.873.573.210,00 terdiri atas :
- a) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp539.231.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp11.414.840.420,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - c) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp18.229.872.780,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah;
 - d) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil dianggarkan sebesar Rp12.780.115.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - e) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan sebesar Rp5.806.134.500,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - f) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp511.184.080,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - g) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan dianggarkan sebesar Rp22.856.136.670,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan;
 - h) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp6.495.026.750,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
 - i) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp13.171.827.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan;
 - j) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp5.615.890.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - k) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp7.109.892.680,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - l) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp6.770.552.330,00 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;



- m) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp306.352.560,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - n) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan dianggarkan sebesar Rp3.266.517.440,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- 3) Urusan Pilihan dianggarkan sebesar Rp51.588.022.565,00 terdiri atas :
- a) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp13.146.093.495,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan;
 - b) Urusan Pilihan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp2.961.167.670,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Urusan Pilihan Pertanian dianggarkan sebesar Rp26.990.880.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d) Urusan Pilihan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp3.397.381.400,00 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan;
 - e) Urusan Pilihan Perindustrian dianggarkan sebesar Rp5.092.500.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dianggarkan sebesar Rp1.082.221.834.550,00 terdiri atas:
- a) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp168.219.318.411,00 dilaksanakan oleh SKPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem;
 - b) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp7.905.164.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Inspektorat;
 - c) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp7.739.975.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan dianggarkan sebesar Rp874.136.497.139,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - e) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp21.893.805.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah;
 - f) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp1.929.392.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah;



- g) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp397.683.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

Alokasi anggaran untuk masing-masing Urusan Pemerintahan tersebut, sudah termasuk belanja gaji PNS, honorarium tenaga harian lepas dan upah tenaga kontrak, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga,

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Brebes telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp3.008.370.717.507,14 dari yang ditargetkan sebesar Rp3.004.837.514.000,00 atau 100,12 %,

Sedangkan realisasi belanja dan transfer untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.955.050.373.005,00 dari anggaran sebesar Rp3.132.984.182.000,00 atau 94,32 %, secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan yang berkaitan dengan realisasi APBD selama Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Rekap Anggaran dan Realisasi APBD Kab, Brebes
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	3.533.203.507,14	100,12
	Pendapatan Asli Daerah	363.130.149.000,00	392.541.730.819,14	29.411.581.819,14	108,10
	Pendapatan Transfer	1.954.288.941.000,00	1.928.552.252.688,00	(25.736.688.312,00)	98,68
	Lain-lain pendapatan yg Sah	687.418.424.000,00	687.276.734.000,00	(141.690.000,00)	99,98
2	Belanja	3.132.984.182.000,00	2.955.050.373.005,00	(177.933.808.995,00)	94,32
	Belanja Operasi	1.959.167.460.190,00	1.824.812.030.370,00	(134.355.429.820,00)	93,14
	Belanja Modal	459.869.925.810,00	432.556.254.864,00	(27.313.670.946,00)	94,06
	Belanja Tak Terduga	14.190.000.000,00	2.673.910.400,00	(11.516.089.600,00)	18,84
	Transfer	699.756.796.000,00	695.008.177.371,00	(4.748.618.629,00)	99,32
	Surplus / (Defisit)	(128.146.668.000,00)	53.320.344.502,14	181.467.012.502,14	(41,61)
3	Pembiayaan Netto	128.146.668.000,00	128.162.123.044,43	15.455.044,43	100,01
	Penerimaan Daerah	166.146.668.000,00	166.162.123.044,43	15.455.044,43	100,01
	Pengeluaran Daerah	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	-	100,00
	Sisa Lebih Pemb. Anggaran (Silpa)	-	181.482.467.546,57	181.482.467.546,57	100,00



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun,

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada 4 urusan yaitu urusan wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari 12 SKPD, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 10 SKPD, Urusan Pilihan terdiri dari 4 SKPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 25 SKPD,

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan pendapatan sebesar Rp3.004.837.514.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.008.370.717.507,14 atau sebesar 100,12%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 yang sebesar Rp3.096.826.845.150,05 realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp88.456.127.642,91 atau sebesar 2,86% dari realisasi pendapatan tahun lalu,

Sementara dari sisi belanja dan transfer untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan sebesar Rp3.132.984.182.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.955.050.373.005,00 atau sebesar 94,32%, Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 yang sebesar Rp3.132.251.740.580,00 realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp177.201.367.575,00 atau sebesar 5,66%. Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 dan 2019 beserta realisasinya dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pendapatan	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	100,12	3.096.826.845.150,00
2	Belanja Daerah	3.132.984.182.000,00	2.955.050.373.005,00	94,32	3.132.251.740.580,00
	Belanja Tidak Langsung	1.821.022.368.000,00	1.728.974.280.959,00	94,95	1.753.675.757.741,00
	Belanja Langsung	1.311.961.814.000,00	1.226.160.042.046,00	93,46	1.378.575.982.839,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	DINDIKPORA	216.000.000,00	40.205.000,00	18,61	34.783.000,00
2	DINAS KESEHATAN			-	
3	UPTD PUSK. BREBES	21.748.964.000,00	21.487.153.312,00	98,80	21.357.058.597,00
4	UPTD PUSK. TANJUNG	25.936.000.000,00	27.291.084.682,00	105,22	27.487.451.184,00
5	UPTD PUSK. BANJARHARJO	34.582.350.000,00	35.853.550.919,00	103,68	37.461.533.114,00
6	UPTD PUSK. PAGUYANGAN	15.249.000.000,00	13.444.257.217,00	88,16	13.651.972.610,00
7	UPTD PUSK. BUMIAYU	15.329.277.000,00	14.844.396.108,00	96,84	15.905.916.278,00
8	UPTD LABKESDA	160.000.000,00	227.698.000,00	142,31	231.934.500,00
9	UPTD BP PARU & KUSTA	52.000.000,00	60.688.000,00	116,71	90.554.500,00
10	RSUD BREBES	95.000.000.000,00	109.933.040.934,14	115,72	88.677.258.106,00
11	RSUD BUMIAYU	16.000.000.000,00	20.544.354.438,00	128,40	19.726.934.468,00
12	DPU	-	190.417.500,00	100,00	300.117.500,00
13	DLHPS	180.000.000,00	263.636.000,00	146,46	248.897.000,00
14	DINDUKPIL	-	-	-	
15	DINPERMADES	-	1.000.000,00	100,00	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.680.000.000,00	2.239.849.730,00	133,32	1.949.459.150,00
17	DINKOMINFOTIK	521.952.000,00	628.640.000,00	120,44	414.034.000,00
18	DINKOPUMDAG	4.480.000.000,00	5.050.135.500,00	112,73	5.393.107.000,00
19	DPMTSP	4.000.000.000,00	4.873.676.484,00	121,84	1.705.590.486,00
20	DINBUDPAR	1.249.734.450,00	1.205.662.250,00	96,47	2.039.793.800,00
21	DINAS PERTANIAN & KP	-	31.709.000,00	100,00	-
22	DINAS PERIKANAN	351.475.000,00	276.440.240,00	78,65	296.267.045,00
23	DPKH	136.000.000,00	177.421.100,00	130,46	155.406.700,00
24	DINPERINAKER	-	333.300,00	100,00	1.399.900,00
25	SETDA	595.000.000,00	623.678.560,00	104,82	692.474.860,00
26	SEKRETARIAT DPRD	-	5.000.000,00	100,00	-
27	KEC. BREBES	4.800.000,00	2.848.300,00	59,34	9.463.130,00
28	KEC. JATIBARANG	4.000.000,00	3.384.500,00	84,61	6.769.500,00
29	KEC. WANASARI	3.200.000,00	3.531.000,00	110,34	6.109.100,00
30	KEC. SONGGOM	2.400.000,00	2.220.000,00	92,50	1.319.000,00
31	KEC. BULAKAMBA	1.600.000,00	1.849.000,00	115,56	1.623.000,00
32	KEC. TANJUNG	4.000.000,00	740.000,00	18,50	1.204.750,00
33	KEC. LOSARI	3.200.000,00	1.365.000,00	42,66	970.000,00
34	KEC. KERSANA	800.000,00	460.000,00	57,50	500.000,00
35	KEC. KETANGGUNGAN	2.000.000,00	1.200.250,00	60,01	941.000,00
36	KEC. BANJARHARJO	-	582.000,00	100,00	100.000,00
37	KEC. LARANGAN	4.800.000,00	1.220.000,00	25,42	5.049.000,00
38	KEC. TONJONG	2.000.000,00	469.000,00	23,45	461.000,00
39	KEC. BUMIAYU	6.400.000,00	983.000,00	15,36	2.248.000,00
40	KEC. PAGUYANGAN	1.600.000,00	481.339,00	30,08	40.000,00
41	KEC. SIRAMPOG	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33	1.100.000,00
42	KEC. BANTARKAWUNG	1.600.000,00	1.842.200,00	115,14	1.317.062,00
43	KEC. SALEM	3.600.000,00	2.965.000,00	82,36	2.106.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
44	BPPKAD	116.566.499.550,00	123.146.903.826,00	105,65	131.231.791.111,00
45	PPKD	2.650.756.062.000,00	2.625.902.717.507,14	99,07	2.727.731.789.699,00
		3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	100,12	3.096.826.845.150,00

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	DINDIKPORA	989.481.041.336,00	947.018.374.863,00	95,71	1.017.455.522.555,00
2	DINAS KESEHATAN	202.027.615.056,00	177.215.908.056,00	87,72	155.112.390.367,00
3	UPTD PUSK. BREBES	33.607.968.000,00	29.777.120.444,00	88,60	23.864.364.282,00
4	UPTD PUSK. TANJUNG	40.013.157.419,00	33.448.650.234,00	83,59	26.402.854.204,00
5	UPTD PUSK. BANJARHARJO	47.050.064.000,00	45.726.780.264,00	97,19	41.174.484.130,00
6	UPTD PUSK. PAGUYANGAN	20.824.775.000,00	18.232.777.054,00	87,55	13.337.215.383,00
7	UPTD PUSK. BUMIAYU	21.444.652.000,00	18.183.239.192,00	84,79	16.186.817.191,00
8	UPTD LABKESDA	683.325.000,00	614.737.802,00	89,96	1.097.244.479,00
9	UPTD BP PARU & KUSTA	450.725.000,00	386.191.963,00	85,68	514.179.641,00
10	RSUD BREBES	139.353.623.368,00	134.043.617.134,00	96,19	120.372.282.432,00
11	RSUD BUMIAYU	40.906.614.402,00	39.638.906.452,00	96,90	74.801.004.977,00
12	DPU	248.951.746.587,00	231.579.579.031,00	93,02	289.160.906.554,00
13	DPSDAPR	64.171.124.827,00	62.290.274.245,00	97,07	78.390.438.945,00
14	DINPERWASKIM	17.239.077.000,00	15.702.393.821,00	91,09	14.298.733.169,00
15	SATPOL PP	7.779.943.550,00	7.353.352.931,00	94,52	12.494.073.437,00
16	KESBANGPOL	3.373.279.390,00	3.181.099.819,00	94,30	3.881.417.844,00
17	PLH BNK	1.920.100.480,00	1.704.771.846,00	88,79	2.588.111.344,00
18	BPBD	7.269.198.100,00	6.446.795.983,00	88,69	4.950.063.978,00
19	DINAS SOSIAL	4.862.613.840,00	4.641.799.074,00	95,46	5.784.528.696,00
20	DP3KB	11.926.024.500,00	10.629.857.445,00	89,13	13.780.531.158,00
21	DLHPS	18.229.872.780,00	17.594.030.916,00	96,51	30.485.855.876,00
22	DINDUKPIL	12.780.115.000,00	11.161.352.218,00	87,33	11.325.033.879,00
23	DINPERMADES	5.806.134.500,00	5.437.580.600,00	93,65	6.630.524.724,00
24	DINAS PERHUBUNGAN	22.856.136.670,00	20.866.887.820,00	91,30	26.767.675.593,00
25	DINKOMINFOTIK	6.495.026.750,00	6.200.581.151,00	95,47	5.940.491.069,00
26	DINKOPUMDAG	16.569.208.400,00	15.705.821.672,00	94,79	23.333.369.893,00
27	DPMPTSP	5.615.890.000,00	5.129.428.905,00	91,34	6.993.724.544,00
28	DINBUDPAR	9.731.720.000,00	8.293.326.194,00	85,22	15.652.764.425,00
29	DINARPUK	3.572.870.000,00	3.415.787.454,00	95,60	4.415.467.569,00
30	DINAS PERIKANAN	13.146.093.495,00	12.705.505.495,00	96,65	20.376.946.310,00
31	DINAS PERTANIAN & KP	18.946.710.000,00	17.520.508.985,00	92,47	25.381.919.735,00
32	DPKH	8.044.170.000,00	7.209.930.745,00	89,63	10.317.919.750,00
33	DINPERINAKER	5.631.731.000,00	4.900.276.256,00	87,01	5.675.396.067,00
34	DPRD	26.662.762.000,00	25.843.135.804,00	96,93	24.259.027.080,00
35	KDH DAN WAKIL KDH	756.939.000,00	743.537.564,00	98,23	761.312.640,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
36	SETDA	50.752.139.650,00	47.185.830.193,00	92,97	55.887.132.679,00
37	SEKRETARIAT DPRD	31.796.913.000,00	29.829.629.115,00	93,81	29.589.778.361,00
38	KEC. BREBES	11.811.035.053,00	10.695.560.994,00	90,56	9.432.778.358,00
39	KEC. JATIBARANG	2.940.812.000,00	2.749.935.175,00	93,51	2.675.613.401,00
40	KEC. WANASARI	2.343.274.000,00	2.153.017.025,00	91,88	2.766.105.087,00
41	KEC. SONGGOM	2.358.150.000,00	2.115.753.207,00	89,72	2.829.857.979,00
42	KEC. BULAKAMBA	3.383.264.500,00	3.136.220.426,00	92,70	2.669.619.844,00
43	KEC. TANJUNG	2.773.040.000,00	2.439.718.216,00	87,98	2.795.655.723,00
44	KEC. LOSARI	3.146.753.710,00	2.769.283.285,00	88,00	2.666.684.778,00
45	KEC. KERSANA	2.481.995.330,00	2.369.345.797,00	95,46	2.555.808.623,00
46	KEC. KETANGGUNGAN	3.006.973.240,00	2.729.784.061,00	90,78	3.198.332.414,00
47	KEC. BANJARHARJO	3.161.093.020,00	2.939.568.619,00	92,99	2.931.841.934,00
48	KEC. LARANGAN	2.713.889.500,00	2.542.301.718,00	93,68	2.735.940.861,00
49	KEC. TONJONG	2.740.573.000,00	2.560.804.056,00	93,44	2.667.509.996,00
50	KEC. BUMIAYU	3.085.754.000,00	2.707.839.553,00	87,75	2.817.603.647,00
51	KEC. PAGUYANGAN	2.897.066.808,00	2.686.454.643,00	92,73	2.758.027.801,00
52	KEC. SIRAMPOG	2.245.655.500,00	2.058.215.653,00	91,65	2.551.346.352,00
53	KEC. BANTARKAWUNG	3.662.363.000,00	3.423.054.530,00	93,47	3.196.473.291,00
54	KEC. SALEM	3.498.872.100,00	3.292.811.766,00	94,11	3.170.386.885,00
55	INSPEKTORAT	7.905.164.000,00	7.610.183.311,00	96,27	9.256.404.314,00
56	BAPERLITBANGDA	8.137.658.000,00	7.722.626.682,00	94,90	9.575.790.195,00
57	BPPKAD	63.434.445.139,00	61.067.300.396,00	96,27	64.341.574.941,00
58	PPKD	810.702.052.000,00	786.246.739.943,00	96,98	735.036.099.194,00
59	BKPSDMD	23.823.197.000,00	11.474.475.209,00	48,17	40.180.780.002,00
		3.132.984.182.000,00	2.955.050.373.005,00	94,32	3.132.251.740.580,00

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut. rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	DINDIKPORA	674.013.015.000,00	636.018.980.394,00	94,36	681.552.922.818,00
2	DINAS KESEHATAN	85.778.930.000,00	84.543.306.501,00	98,56	81.187.915.350,00
3	UPTD PUSK. BREBES	-	-	-	-
4	UPTD PUSK. TANJUNG	-	-	-	-
5	UPTD PUSK. BANJARHARJO	-	-	-	-
6	UPTD PUSK. PAGUYANGAN	-	-	-	-
7	UPTD PUSK. BUMIAYU	-	-	-	-
8	UPTD LABKESDA	10.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	UPTD BP PARU & KUSTA	-	-	-	-
10	RSUD BREBES	25.204.087.000,00	24.723.615.544,00	98,09	24.183.927.968,00
11	RSUD BUMIAYU	4.295.387.000,00	4.200.150.698,00	97,78	3.484.889.787,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
12	DPU	8.489.424.000,00	7.880.208.076,00	92,82	8.361.257.585,00
13	DPSDAPR	11.288.645.000,00	10.744.483.127,00	95,18	11.748.171.836,00
14	DINPERWASKIM	2.570.602.000,00	2.366.269.796,00	92,05	2.449.561.699,00
15	SATPOL PP	4.062.384.000,00	3.734.026.674,00	91,92	4.109.206.010,00
16	KESBANGPOL	1.363.960.000,00	1.258.089.633,00	92,24	1.352.632.645,00
17	PLH BNK	1.235.633.000,00	1.042.101.315,00	84,34	1.345.532.320,00
18	BPBD	2.126.746.000,00	1.987.941.130,00	93,47	2.102.052.605,00
19	DINAS SOSIAL	1.982.911.000,00	1.821.595.799,00	91,86	2.113.053.817,00
20	DP3KB	2.959.087.000,00	2.624.493.563,00	88,69	3.621.558.949,00
21	DLHPS	8.042.820.000,00	7.518.059.348,00	93,48	7.681.066.123,00
22	DINDUKPIL	3.692.269.000,00	3.357.036.063,00	90,92	3.552.920.743,00
23	DINPERMADES	3.109.383.000,00	2.927.519.976,00	94,15	2.876.385.747,00
24	DINAS PERHUBUNGAN	4.785.703.000,00	4.541.654.292,00	94,90	4.667.524.808,00
25	DINKOMINFOTIK	3.687.636.000,00	3.429.174.196,00	92,99	3.219.545.961,00
26	DINKOPUMDAG	11.608.602.000,00	10.887.849.325,00	93,79	11.887.487.787,00
27	DPMPTSP	3.535.782.000,00	3.060.328.981,00	86,55	3.182.850.590,00
28	DINBUDPAR	4.473.719.000,00	3.895.558.290,00	87,08	4.489.158.763,00
29	DINARPUK	2.083.290.000,00	1.947.614.224,00	93,49	2.282.342.920,00
30	DINAS PERIKANAN	2.189.331.000,00	2.008.222.172,00	91,73	2.405.263.597,00
31	DINAS PERTANIAN & KP	9.994.597.000,00	9.003.748.845,00	90,09	10.215.692.646,00
32	DPKH	4.072.818.000,00	3.368.520.816,00	82,71	3.728.563.550,00
33	DINPERINAKER	3.183.179.000,00	2.939.342.822,00	92,34	3.248.769.171,00
34	DPKD	26.662.762.000,00	25.843.135.804,00	96,93	24.259.027.080,00
35	KDH DAN WAKIL KDH	756.939.000,00	743.537.564,00	98,23	761.312.640,00
36	SETDA	12.599.563.000,00	11.677.729.140,00	92,68	12.248.847.803,00
37	SEKRETARIAT DPRD	4.352.995.000,00	4.154.058.304,00	95,43	4.650.934.944,00
38	KEC. BREBES	5.123.123.000,00	4.358.479.468,00	85,07	4.911.304.229,00
39	KEC. JATIBARANG	2.162.356.000,00	1.991.935.294,00	92,12	1.928.705.726,00
40	KEC. WANASARI	1.638.381.000,00	1.497.661.850,00	91,41	1.766.993.678,00
41	KEC. SONGGOM	1.726.353.000,00	1.534.681.659,00	88,90	1.689.777.608,00
42	KEC. BULAKAMBA	2.065.609.000,00	1.844.842.476,00	89,31	1.778.541.987,00
43	KEC. TANJUNG	2.098.464.000,00	1.797.607.319,00	85,66	1.890.563.514,00
44	KEC. LOSARI	1.923.785.000,00	1.591.992.149,00	82,75	1.857.219.738,00
45	KEC. KERSANA	1.668.898.000,00	1.579.994.711,00	94,67	1.659.622.338,00
46	KEC. KETANGGUNGAN	2.024.266.000,00	1.786.202.368,00	88,24	2.019.148.572,00
47	KEC. BANJARHARJO	2.092.235.000,00	1.909.111.191,00	91,25	1.808.075.835,00
48	KEC. LARANGAN	1.928.012.000,00	1.777.113.070,00	92,17	1.915.467.030,00
49	KEC. TONJONG	1.958.022.000,00	1.857.210.840,00	94,85	1.947.909.022,00
50	KEC. BUMIAYU	2.281.652.000,00	1.929.410.861,00	84,56	2.086.911.427,00
51	KEC. PAGUYANGAN	2.013.618.000,00	1.834.401.497,00	91,10	1.969.206.636,00
52	KEC. SIRAMPOG	1.407.167.000,00	1.310.859.372,00	93,16	1.741.660.842,00
53	KEC. BANTARKAWUNG	2.191.474.000,00	1.984.395.602,00	90,55	2.208.185.859,00
54	KEC. SALEM	2.494.371.000,00	2.358.726.183,00	94,56	2.244.246.862,00
55	INSPEKTORAT	5.345.253.000,00	5.113.566.543,00	95,67	5.256.426.091,00
56	BAPERLITBANGDA	4.066.853.000,00	3.737.174.384,00	91,89	4.105.372.723,00
57	BPPKAD	13.021.013.000,00	11.852.999.021,00	91,03	11.899.136.608,00
58	PPKD	810.702.052.000,00	786.246.739.943,00	96,98	735.036.099.194,00
59	BKPSDMD	16.877.212.000,00	4.803.622.746,00	28,46	28.982.803.960,00
		1.821.022.368.000,00	1.728.947.080.959,00	94,94	1.753.675.757.741,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	DINDIKPORA	315.468.026.336,00	310.999.394.469,00	98,58	335.902.599.737,00
2	DINAS KESEHATAN	116.248.685.056,00	92.672.601.555,00	79,72	73.924.475.017,00
3	UPTD PUSK. BREBES	33.607.968.000,00	29.777.120.444,00	88,60	23.864.364.282,00
4	UPTD PUSK. TANJUNG	40.013.157.419,00	33.448.650.234,00	83,59	26.402.854.204,00
5	UPTD PUSK. BANJARHARJO	47.050.064.000,00	45.726.780.264,00	97,19	41.174.484.130,00
6	UPTD PUSK.PAGUYANGAN	20.824.775.000,00	18.232.777.054,00	87,55	13.337.215.383,00
7	UPTD PUSK. BUMIAYU	21.444.652.000,00	18.183.239.192,00	84,79	16.186.817.191,00
8	UPTD LABKESDA	673.325.000,00	614.737.802,00	91,30	1.095.244.479,00
9	UPTD BP PARU & KUSTA	450.725.000,00	386.191.963,00	85,68	514.179.641,00
10	RSUD BREBES	114.149.536.368,00	109.320.001.590,00	95,77	96.188.354.464,00
11	RSUD BUMIAYU	36.611.227.402,00	35.438.755.754,00	96,80	71.316.115.190,00
12	DPU	240.462.322.587,00	223.699.370.955,00	93,03	280.799.648.969,00
13	DPSDAPR	52.882.479.827,00	51.545.791.118,00	97,47	66.642.267.109,00
14	DINPERWASKIM	14.668.475.000,00	13.336.124.025,00	90,92	11.849.171.470,00
15	SATPOL PP	3.717.559.550,00	3.619.326.257,00	97,36	8.384.867.427,00
16	KESBANGPOL	2.009.319.390,00	1.923.010.186,00	95,70	2.528.785.199,00
17	PLH BNK	684.467.480,00	662.670.531,00	96,82	1.242.579.024,00
18	BPBD	5.142.452.100,00	4.458.854.853,00	86,71	2.848.011.373,00
19	DINAS SOSIAL	2.879.702.840,00	2.820.203.275,00	97,93	3.671.474.879,00
20	DP3KB	8.966.937.500,00	8.005.363.882,00	89,28	10.158.972.209,00
21	DLHPS	10.187.052.780,00	10.075.971.568,00	98,91	22.804.789.753,00
22	DINDUKPIL	9.087.846.000,00	7.804.316.155,00	85,88	7.772.113.136,00
23	DINPERMADES	2.696.751.500,00	2.510.060.624,00	93,08	3.754.138.977,00
24	DINAS PERHUBUNGAN	18.070.433.670,00	16.325.233.528,00	90,34	22.100.150.785,00
25	DINKOMINFOTIK	2.807.390.750,00	2.771.406.955,00	98,72	2.720.945.108,00
26	DINKOPUMDAG	4.960.606.400,00	4.817.972.347,00	97,12	11.445.882.106,00
27	DPMPTSP	2.080.108.000,00	2.069.099.924,00	99,47	3.810.873.954,00
28	DINBUDPAR	5.258.001.000,00	4.397.767.904,00	83,64	11.163.605.662,00
29	DINARPUS	1.489.580.000,00	1.468.173.230,00	98,56	2.133.124.649,00
30	DINAS PERIKANAN	10.956.762.495,00	10.697.283.323,00	97,63	17.971.682.713,00
31	DINAS PERTANIAN & KP	8.952.113.000,00	8.516.760.140,00	95,14	15.166.227.089,00
32	DPKH	3.971.352.000,00	3.841.409.929,00	96,73	6.589.356.200,00
33	DINPERINAKER	2.448.552.000,00	1.960.933.434,00	80,09	2.426.626.896,00
34	DPRD			-	
35	KDH DAN WAKIL KDH			-	
36	SETDA	38.152.576.650,00	35.508.101.053,00	93,07	43.638.284.876,00
37	SEKRETARIAT DPRD	27.443.918.000,00	25.675.570.811,00	93,56	24.938.843.417,00
38	KEC. BREBES	6.687.912.053,00	6.337.081.526,00	94,75	4.521.474.129,00
39	KEC. JATIBARANG	778.456.000,00	757.999.881,00	97,37	746.907.675,00
40	KEC. WANASARI	704.893.000,00	655.355.175,00	92,97	999.111.409,00
41	KEC. SONGGOM	631.797.000,00	581.071.548,00	91,97	1.140.080.371,00
42	KEC. BULAKAMBA	1.317.655.500,00	1.291.377.950,00	98,01	891.077.857,00
43	KEC. TANJUNG	674.576.000,00	642.110.897,00	95,19	905.092.209,00
44	KEC. LOSARI	1.222.968.710,00	1.177.291.136,00	96,27	809.465.040,00
45	KEC. KERSANA	813.097.330,00	789.351.086,00	97,08	896.186.285,00



No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
46	KEC. KETANGGUNGAN	982.707.240,00	943.581.693,00	96,02	1.179.183.842,00
47	KEC. BANJARHARJO	1.068.858.020,00	1.030.457.428,00	96,41	1.123.766.099,00
48	KEC. LARANGAN	785.877.500,00	765.188.648,00	97,37	820.473.831,00
49	KEC. TONJONG	782.551.000,00	703.593.216,00	89,91	719.600.974,00
50	KEC. BUMIAYU	804.102.000,00	778.428.692,00	96,81	730.692.220,00
51	KEC. PAGUYANGAN	883.448.808,00	852.053.146,00	96,45	788.821.165,00
52	KEC. SIRAMPOG	838.488.500,00	747.356.281,00	89,13	809.685.510,00
53	KEC. BANTARKAWUNG	1.470.889.000,00	1.438.658.928,00	97,81	988.287.432,00
54	KEC. SALEM	1.004.501.100,00	934.085.583,00	92,99	926.140.023,00
55	INSPEKTORAT	2.559.911.000,00	2.496.616.768,00	97,53	3.999.978.223,00
56	BAPERLITBANGDA	4.070.805.000,00	3.985.452.298,00	97,90	5.470.417.472,00
57	BPPKAD	50.413.432.139,00	49.214.301.375,00	97,62	52.442.438.333,00
58	PPKD			-	
59	BKPSDMD	6.945.985.000,00	6.670.852.463,00	96,04	11.197.976.042,00
		1.311.961.814.000,00	1.226.103.292.046,00	93,46	1.378.575.982.839,00

2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya peran serta, kesadaran serta dukungan masyarakat khususnya wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan khususnya PAD.
- Keterbatasan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.
- Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai.
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah relatif masih kurang.
- Kurang tertibnya administrasi pengelolaan di masing-masing SKPD pengelola pendapatan.
- Kurang akuratnya basis data pendapatan, khususnya PAD pada unit-unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian target pendapatan.
- Masih rendahnya kontribusi Perusda terhadap PAD, disebabkan belum optimalnya Perusahaan Daerah dalam mengelola usahanya.

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya adalah :

- Pengelolaan keuangan yang terdesentralisasikan di setiap SKPD maka menuntut kesiapan SDM untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD. Permasalahan yang dihadapi pada setiap SKPD adalah SDM yang ada belum



sepenuhnya siap. mulai dari perencanaan anggaran. pelaksanaan sampai dengan pelaporannya.

- b. Kurang cermatnya beberapa SKPD dalam perencanaan penganggaran. hal ini akan berakibat adanya beberapa belanja / kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan harus menunggu perubahan APBD.
- c. Kebutuhan belanja daerah yang diajukan oleh satuan kerja belum seluruhnya dapat dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena keterbatasan pendapatan daerah.
- d. Program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas kegiatan pembangunan setiap tahun belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan. karena alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi harapan.
- e. Dana bantuan baik dari Provinsi maupun Pusat (Dana Alokasi Khusus) yang terprogram untuk biaya kegiatan daerah. sering mengalami perubahan atau bahkan tidak mendapatkan alokasi dana.
- f. Masih adanya SKPD yang kurang disiplin atas anggaran kas yang sudah ditetapkan dengan SPD (Surat Penyediaan Dana) per triwulan. yang berakibat pencairan dana tidak sesuai dengan penyediaan dana sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan daerah.
- g. Program aplikasi sistem informasi keuangan daerah SIMDA dari BPKP yang digunakan masih belum sepenuhnya bisa dipahami oleh masing-masing operator SIMDA di setiap SKPD.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan yaitu:

- a. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
- c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran. antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 056 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes. dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan entitas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 yaitu basis akrual. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten perlu menyajikan kembali Neraca tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Pendapatan.

Dalam penerapannya pendapatan dipilah menjadi 2 (dua) yakni:



1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi. Pendapatan ini diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD. Pendapatan ini meliputi :

(a) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

(b) Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah.

b. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui



berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

c. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. sedangkan transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional. pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. sedangkan beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

e. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank. sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di kas Daerah
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 3) Kas di Bendahara Penerimaan
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- 5) Kas di dana BOS

Setara kas terdiri dari:

- 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan
- 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka



dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Pengukuran piutang ditentukan sebagai berikut :

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan :

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding
- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan :

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(e) Pengukuran piutang transfer

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku

- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima



(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

(f) Pengukuran Piutang ganti rugi

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis. yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0.5% (setengah persen);
 - (b) Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (c) Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (d) Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 3) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 4) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - (a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai atau lunas.
 - (b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut :

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah. sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).



(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

(c) Penghapustagihan (write off)

(d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

g. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya pengangkutan. biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



h. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengukuran Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Investasi Jangka Pendek

Untuk investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar maka dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Sedangkan untuk investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Investasi Jangka Panjang

Pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sedangkan pengukuran untuk investasi non permanen adalah sebagai berikut:

- (a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
- (b) Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- (d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

1) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

2) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

i. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang



dimaksudkan. Biaya perolehan di luar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.

j. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

k. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

l. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Diukur sebesar nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset yang diserahkan atau diterima oleh Pemerintah dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih atau nilai wajar yang tercatat pada saat perjanjian atau



pada saat penerimaan aset. dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehannya, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

5) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

m. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1) Kewajiban Jangka Pendek. merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek meliputi :

(a) Utang perhitungan fihak ketiga

Kewajiban ini dicantumkan sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(b) Utang bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

(c) Bagian lancar utang jangka panjang

Kewajiban ini diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.

(d) Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Pendapatan diterima di muka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.



(e) Utang beban

Kewajiban ini diukur sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

(f) Utang jangka pendek lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

2) Kewajiban Jangka Panjang. merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi:

(a) Utang dalam negeri

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk kewajiban ini adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

(b) Utang luar negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

(c) Utang jangka panjang lainnya

Kewajiban ini diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar.

n. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih). Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Koreksi Kesalahan.

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



1) Kesalahan Tidak Berulang

- (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
 - (2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 - (3) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan beban, mempengaruhi posisi kas namun tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.
 - (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - (7) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - (8) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3.008.370.717.507,14	3.096.826.845.150,05

SKPD yang mengelola pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2020 per SKPD

NO	SKPD	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	216.000.000,00	40.205.000,00	18,61
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	UPTD PUSKESMAS BREBES	21.748.964.000,00	21.487.153.312,00	98,80
4	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	25.936.000.000,00	27.291.084.682,00	105,22
5	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	34.582.350.000,00	35.853.550.919,00	103,68
6	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	15.249.000.000,00	13.444.257.217,00	88,16
7	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	15.329.277.000,00	14.844.396.108,00	96,84
8	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	160.000.000,00	227.698.000,00	142,31
9	UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	52.000.000,00	60.688.000,00	116,71
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	95.000.000.000,00	109.933.040.934,14	115,72
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	16.000.000.000,00	20.544.354.438,00	128,40
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	190.417.500,00	100,00
13	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & PR	-	-	-
14	DINPERWASKIM	-	-	-
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
16	KANTOR KESBANG & POLITIK	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	SKPD	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%
17	PLH BNK	-	-	-
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
19	DINAS SOSIAL	-	-	-
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
20	DP3KB	-	-	-
21	DLHPS	180.000.000,00	263.636.000,00	146,46
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATANGAN SIPIL	-	-	-
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	1.000.000,00	100,00
24	DINAS PERHUBUNGAN	1.680.000.000,00	2.239.849.730,00	133,32
25	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	521.952.000,00	628.640.000,00	120,44
26	DINAS KOPERASI, UMDAG	4.480.000.000,00	5.050.135.500,00	112,73
27	DPMPTSP	4.000.000.000,00	4.873.676.484,00	121,84
28	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.249.734.450,00	1.205.662.250,00	96,47
29	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
URUSAN PILIHAN				
30	DINAS PERIKANAN	351.475.000,00	276.440.240,00	78,65
31	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	31.709.000,00	100,00
32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	136.000.000,00	177.421.100,00	130,46
33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	333.300,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				
34	DPRD	-	-	-
35	KDH DAN WAKIL KDH	-	-	-
36	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-	-	-
37	BAGIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	-	-	-
38	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-
39	BAGIAN PEREKONOMIAN	567.000.000,00	593.249.760,00	104,63
40	BAGIAN PEMBANGUNAN	-	-	-
41	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-
42	BAGIAN HUKUM	-	-	-
43	BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	-	-	-
44	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	-	-	-
45	BAGIAN UMUM	28.000.000,00	30.428.800,00	108,67
46	SEKRETARIAT DPRD	-	5.000.000,00	100,00
47	KECAMATAN BREBES	4.800.000,00	2.848.300,00	59,34
48	KECAMATAN JATIBARANG	4.000.000,00	3.384.500,00	84,61
49	KECAMATAN WANASARI	3.200.000,00	3.531.000,00	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	SKPD	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%
				110,34
50	KECAMATAN SONGGOM	2.400.000,00	2.220.000,00	92,50
51	KECAMATAN BULAKAMBA	1.600.000,00	1.849.000,00	115,56
52	KECAMATAN TANJUNG	4.000.000,00	740.000,00	18,50
53	KECAMATAN LOSARI	3.200.000,00	1.365.000,00	42,66
54	KECAMATAN KERSANA	800.000,00	460.000,00	57,50
55	KECAMATAN KETANGGUNGAN	2.000.000,00	1.200.250,00	60,01
56	KECAMATAN BANJARHARJO	-	582.000,00	100,00
57	KECAMATAN LARANGAN	4.800.000,00	1.220.000,00	25,42
58	KECAMATAN TONJONG	2.000.000,00	469.000,00	23,45
59	KECAMATAN BUMIAYU	6.400.000,00	983.000,00	15,36
60	KECAMATAN PAGUYANGAN	1.600.000,00	481.339,00	30,08
61	KECAMATAN SIRAMPOG	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
62	KECAMATAN BANTARKAWUNG	1.600.000,00	1.842.200,00	115,14
63	KECAMATAN SALEM	3.600.000,00	2.965.000,00	82,36
64	INSPEKTORAT	-	-	-
65	BAPERLITBANGDA	-	-	-
66	BPPKAD	116.566.499.550,00	123.146.903.826,00	105,65
67	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	2.650.756.062.000,00	2.625.902.644.818,00	99,06
68	BKPSDMD	-	-	-
		3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	100,12

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.004.837.514.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.008.370.717.507,14 atau sebesar 100,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 yang sebesar Rp3.096.826.845.150,05, realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp88.456.127.642,91 atau sebesar -2,86%.

Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	363.130.149.000,00	392.541.730.819,14	108,10	379.091.298.714,05
2	Pendapatan Transfer	1.954.288.941.000,00	1.928.552.252.688,00	98,68	2.106.133.167.436,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	687.418.424.000,00	687.276.734.000,00	99,98	611.602.379.000,00
	Jumlah	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	100,12	3.096.826.845.150,05

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp392.541.730.819,14 atau 108% dari anggaran sebesar Rp363.130.149.000,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pajak Daerah	101.716.500.000,00	108.613.189.681,00	106,78	112.680.315.150,00
2	Retribusi Daerah	13.144.986.000,00	15.467.594.652,00	117,67	13.224.912.333,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.048.697.000,00	9.142.949.901,00	101,04	7.227.845.627,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	239.219.966.000,00	259.317.996.585,14	108,40	245.958.225.604,05
	Jumlah	363.130.149.000,00	392.541.730.819,14	108,10	379.091.298.714,05

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah di Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp108.613.189.681,00 atau sebesar 106,78% dari anggaran Rp101.716.500.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	135.000.000,00	117.626.800,00	87,13	141.368.300,00
2	Pajak Restoran	2.475.000.000,00	2.427.388.662,00	98,08	3.226.476.954,00
3	Pajak Hiburan	157.500.000,00	91.573.950,00	58,14	214.449.550,00
4	Pajak Reklame	2.250.000.000,00	2.708.916.091,00	120,40	2.408.552.951,00
5	Pajak Penerangan Jalan	47.700.000.000,00	48.654.063.049,00	102,00	52.335.501.310,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	100.000.000,00	166.703.565,00	166,70	103.856.350,00
7	Pajak Parkir	99.000.000,00	100.784.400,00	101,80	122.622.500,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000,00	683.163.935,00	136,63	399.768.772,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.300.000.000,00	35.081.706.997,00	105,35	36.890.272.047,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000,00	18.581.262.232,00	123,88	16.837.446.416,00
	Jumlah	101.716.500.000,00	108.613.189.681,00	106,78	112.680.315.150,00

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah di Kabupaten Brebes adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp15.467.594.652,00 atau sebesar 117,67% dari anggaran Rp13.144.986.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.5
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.332.752.000,00	3.193.805.730,00	136,91	2.751.097.150,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.865.034.000,00	7.464.921.599,00	108,74	8.836.743.655,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.947.200.000,00	4.808.867.323,00	121,83	1.637.071.528,00
	Jumlah	13.144.986.000,00	15.467.594.652,00	117,67	13.224.912.333,00

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.332.752.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.193.805.730,00 atau sebesar 136,91%. Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.6
 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	-	-	-	-
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan	160.000.000,00	288.386.000,00	180,24	322.489.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	52.000.000,00	0,00	-	-
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	180.000.000,00	263.636.000,00	146,46	248.897.000,00
5	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	-
6	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	766.400.000,00	968.260.000,00	126,34	966.793.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	-	-	-	-
8	Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Minibus	800.000.000,00	1.144.833.730,00	143,10	834.312.150,00
9	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	374.352.000,00	528.690.000,00	141,23	378.606.000,00
	Jumlah	2.332.752.000,00	3.193.805.730,00	136,91	2.751.097.150,00

**(2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp6.865.034.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp7.464.921.599,00 atau sebesar 108,74%. Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	485.199.550,00	538.487.009,00	110,98	568.032.217,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan	-	0,00		1.211.693,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	-	184.505.000,00	100,00	280.930.000,00
4	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	4.480.000.000,00	5.021.411.500,00	112,09	5.393.107.000,00
5	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	194.100.000,00	182.617.740,00	94,08	215.125.245,00
6	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	112.000.000,00	124.946.000,00	111,56	146.368.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	340.000.000,00	345.975.000,00	101,76	349.125.000,00
8	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	98.400.000,00	130.171.100,00	132,29	118.555.700,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.600.000,00	1.810.000,00	113,13	1.986.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi	841.845.000,00	859.687.250,00	102,12	1.690.668.800,00
11	Retribusi Tempat Pariwisata	67.889.450,00	0,00	-	-
12	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	216.000.000,00	40.205.000,00	18,61	34.783.000,00
13	Retribusi Pasar Hewan	28.000.000,00	35.106.000,00	125,38	36.851.000,00
	Jumlah	6.865.034.000,00	7.464.921.599,00	108,74	8.836.743.655,00

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebesar Rp3.947.200.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.808.867.323,00 atau sebesar 121,83%. Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.905.000.000,00	4.778.225.823,00	122,36	1.598.340.028,00
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan kepada Orang Pribadi	800.000,00	0,00	-	-
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	12.800.000,00	13.200.000,00	103,13	10.650.000,00
4	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	28.600.000,00	17.441.500,00	60,98	28.081.500,00
	Jumlah	3.947.200.000,00	4.808.867.323,00	121,83	1.637.071.528,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini direncanakan dari Deviden Bank Jateng, PD. BPR-BKK Banjarharjo, PD. BPR Puspa Kencana, PD. BKK Brebes yang dianggarkan sebesar Rp9.048.697.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp9.142.949.901,00 atau 101,04% yang merupakan penerimaan dari deviden Bank Jateng, deviden PD. BPR Bank Brebes dan deviden PD. BPR BKK Banjarharjo. Anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD :	9.048.697.000,00	9.142.949.901,00	101,04	7.227.845.627,00
	- Deviden Bank Jateng	7.925.000.000,00	7.925.392.752,00	100,00	6.122.662.234,00
	- PD. BPR BKK Banjarharjo	660.760.000,00	759.150.834,00	100,00	621.302.598,00
	- Deviden Bank Brebes	462.937.000,00	456.321.990,00	100,00	483.880.795,00
	- Laba PT. PRPP Jateng Th. 2019	-	2.084.325,00	100,00	-
	Jumlah	9.048.697.000,00	9.142.949.901,00	101,04	7.227.845.627,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp259.317.996.585,14 atau sebesar 108,40% dari anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rp239.219.966.000,00. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.10
 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	901.420.487,00	200,32	984.920.150,00
2	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.548.273.097,00	110,97	7.092.216.422,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	5.700.000.000,00	7.785.818.602,00	136,59	10.185.958.639,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	-	8.559.000,00	100,00	8.000.000,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	55.647.786,00	100,00	315.535.347,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	28.724.000,00	100,00	-
7	Pendapatan Dari Pengembalian	-	340.654.696,00	100,00	471.904.711,00
8	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	567.000.000,00	593.249.760,00	104,63	666.818.700,00
9	Pendapatan BLUD	142.546.963.500,00	152.712.135.160,14	107,13	128.719.766.477,05
10	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	-	333.300,00	100,00	1.399.900,00
11	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	100,00	277.000.000,00
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.657.375.000,00	657.478.247,00	17,98	1.186.347.378,00
13	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	-	-	500.000.000,00
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	81.298.627.500,00	90.685.702.450,00	111,55	95.548.357.880,00
	Jumlah	239.219.966.000,00	259.317.996.585,14	108,40	245.958.225.604,05

Rincian dari masing-masing Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Hasil penjualan dari Aset Daerah yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp901.420.487,00 dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00 merupakan penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat, penjualan drum bekas aspal serta penjualan barang bekas bangunan. Adapun Hasil penjualan dari Aset Daerah yang tidak dipisahkan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.11
 Rincian penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	-	65.702.250,00	100,00	7.205.000,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000,00	93.950.000,00	187,90	169.321.373,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	100.000.000,00	544.731.720,00	544,73	258.492.600,00
4	Penjualan Drum Bekas	-	5.912.500,00	100,00	19.187.500,00
5	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	300.000.000,00	191.124.017,00	63,71	530.713.677,00
	Jumlah	450.000.000,00	901.420.487,00	200,32	984.920.150,00

Untuk Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai merupakan penjualan atas Peralatan/Peralatan kantor yang kondisinya rusak berat/yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Adapun penerimaan tersebut merupakan penerimaan dari SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai TA. 2020

No	SKPD	Jumlah (Rp.)
1	Sekretariat Daerah	14.100.000,00
2	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.396.500,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.190.000,00
4	DP3KB	1.705.000,00
5	Kecamatan Wanasari	230.000,00
6	RSUD Bumiayu	12.000.000,00
7	Kecamatan Bumiayu	1.300.000,00
8	Kecamatan Songgom	1.196.500,00
9	DINPERWASKIM	680.000,00
10	Kecamatan Brebes	88.000,00
11	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo	17.991.250,00
12	BPPKAD	2.500.000,00
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	550.000,00
15	UPTD puskesmas Paguyangan	4.675.000,00
16	Sekretariat DPRD	6.000.000,00
	Jumlah	65.702.250,00

Untuk penjualan kendaraan dinas roda dua terealisasi sebesar Rp93.950.000,00 atau 187,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00, sedangkan realisasi penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp544.731.720,00 atau 544,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. Adapun untuk penjualan bahan-bahan bekas bangunan terealisasi sebesar Rp191.124.017,00 atau 63,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.



Untuk penerimaan penjualan kendaraan dinas roda dua/roda empat dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan ini dikelola oleh BPPKAD Kab. Brebes

Kemudian untuk penjualan drum bekas terealisasi sebesar Rp5.912.500,00 yang dikelola oleh DPU Kab. Brebes

- (2) Untuk Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp5.548.273.097,00 merupakan penerimaan jasa giro dari kas daerah dan jasa giro pemegang kas.
- (3) Penerimaan dari Bunga Deposito Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.785.818.602,00 atau 136,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.700.000.000,00 merupakan penerimaan bunga deposito pada :
- Bank Jateng sebesar Rp6.683.657.473,00
 - Bank Mandiri sebesar Rp100.273.972,00
 - Bank BNI sebesar Rp142.808.218,00
 - Bank BRI sebesar Rp739.585.791,00
 - Bank BTN sebesar Rp119.493.148,00
- (4) Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp8.559.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Rincian penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Tahun 2020

No	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp).
1	Setoran TPTGR an. Bambang Priambodo	DPKP	1.209.000,00
2	Setoran TPTGR an. Abdul Gofir	Set. DPRD	2.500.000,00
3	Setoran TPTGR an. Indah Margiasih	Kec. Kersana	100.000,00
4	Setoran TPTGR an. Bambang Setiyawan	Dinpermades	500.000,00
5	Setoran TPTGR an. Bambang Priambodo	DPKP	2.500.000,00
6	Setoran TPTGR an. Bambang Setiyawan	Dinpermades	500.000,00
7	Setoran TPTGR an. Sodikun	PPKD	1.250.000,00
		Jumlah	8.559.000,00

- (5) Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp55.647.786,00 merupakan pendapatan atas denda keterlambatan atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga selama Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.14
 Rincian penerimaan Pendapatan Denda Keterlambatan
 Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bidang Pendidikan	-	1.966.112,00	100,00	22.865.400,00
2	Bidang Kesehatan	-	29.511.164,00	100,00	212.337.196,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	-	24.170.510,00	100,00	71.350.348,00
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	134.413,00
5	Bidang Penataan Ruang	-	-	-	3.776.880,00
6	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	5.071.110,00
	Jumlah	-	55.647.786,00	100,00	315.535.347,00

- (6) Pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang realisasi sebesar Rp28.724.000,00 yang merupakan penerimaan yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, realisasi penerimaan ini dimasukkan ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dikarenakan untuk Tahun Anggaran 2020 ini belum dianggarkan.
- (7) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp340.654.696,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan penerimaan pengembalian lainnya atas kegiatan tahun-tahun lalu serta semua penerimaan lain-lain baik dari penyetoran dari SKPD maupun dari pihak ketiga, dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.1.
- (8) Penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas sosial umum terealisasi sebesar Rp593.249.760,00 atau 104,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp567.000.000,00 merupakan setoran penerimaan dana kompensasi Sumber Air Kaligiri dari PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
- (9) Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp152.712.135.160,14 atau 107,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.546.963.500,00 merupakan penerimaan pada BLUD RSUD Brebes, RSUD Bumiayu dan penerimaan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab. Brebes. Untuk Pendapatan BLUD terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD dan Pendapatan Lain-Lain BLUD, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.15
 Rincian Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	139.546.963.500,00	150.161.448.041,00	107,61	128.719.752.981,05



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00	2.550.687.119,14	85,02	13.496,00
	Jumlah	142.546.963.500,00	152.712.135.160,14	107,13	128.719.766.477,05

Adapun rincian penerimaan untuk masing-masing BLUD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.16
 Rincian Pendapatan masing-masing BLUD Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
	BLUD RSUD Brebes :	95.000.000.000,00	109.933.040.934,14	115,72
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	92.000.000.000,00	107.382.353.815,00	116,72
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00	2.550.687.119,14	85,02
	BLUD RSUD Bumiayu :	16.000.000.000,00	20.544.354.438,00	128,40
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	16.000.000.000,00	20.544.354.438,00	128,40
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Brebes :	3.948.165.000,00	2.381.347.662,00	60,32
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.948.165.000,00	2.381.347.662,00	60,32
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Tanjung :	7.560.670.000,00	5.554.558.807,00	73,47
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	7.560.670.000,00	5.554.558.807,00	73,47
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo :	12.671.019.500,00	10.134.079.769,00	79,98
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	12.671.019.500,00	10.134.079.769,00	79,98
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu :	2.686.424.000,00	2.207.181.783,00	82,47
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.676.424.000,00	2.207.181.783,00	82,47
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan :	4.690.685.000,00	1.957.571.767,00	41,73
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	4.690.685.000,00	1.957.571.767,00	41,73
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
	Jumlah	142.546.963.500,00	152.712.135.160,14	107,13



- (10) Hasil dari pengelolaan dana bergulir terealisasi sebesar Rp333.300,00 merupakan setoran penerimaan dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (11) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp657.478.247,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.657.375.000,00. Penerimaan ini terdiri dari :
- Penerimaan dari Dinas Perikanan yang merupakan Penjualan hasil Produksi Usaha Daerah (BBI Malahayu dan Tambak Dinas) pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp93.822.500,00 atau 59,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.375.000,00.
 - Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan realisasi sebesar Rp30.500.000,00 yang merupakan hasil usaha tani benih padi di Desa Kaliwadas Kec. Bumiayu.
 - Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah lainnya pada PPKD sebesar Rp533.155.747,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.2.
- (12) Pendapatan dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp90.685.702.450,00 atau 111,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.298.627.500,00 merupakan dana jaminan kesehatan masyarakat yang diterima oleh BLUD Puskesmas se Kabupaten Brebes dengan rincian untuk masing-masing BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.17
Pendapatan Dana Kapitasi JKN

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	UPTD Puskesmas Brebes	17.800.799.000,00	19.105.805.650,00	107,33
2	UPTD Puskesmas Tanjung	18.375.330.000,00	21.736.525.875,00	118,29
3	UPTD Puskesmas Banjarharjo	21.911.330.500,00	25.719.471.150,00	117,38
4	UPTD Puskesmas Paguyangan	10.558.315.000,00	11.486.685.450,00	108,79
5	UPTD Puskesmas Bumiayu	12.652.853.000,00	12.637.214.325,00	99,88
	Jumlah	81.298.627.500,00	90.685.702.450,00	111,55

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.928.552.252.688,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp1.954.288.941.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.18
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.735.149.441.000,00	1.708.279.450.821,00	98,45	1.876.097.637.787,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	178.385.500.000,00	181.020.663.531,00	101,48	178.608.761.544,00
4	Bantuan Keuangan	40.754.000.000,00	39.252.138.336,00	96,31	51.426.768.105,00
	Jumlah	1.954.288.941.000,00	1.928.552.252.688,00	98,68	2.106.133.167.436,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.708.279.450.821,00 atau sebesar 98,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.735.149.441.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.19
 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	37.325.825.940,00	34.439.264.481,00	92,27	27.428.663.358,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.822.516.060,00	3.309.163.650,00	117,24	1.666.438.971,00
3	Dana Alokasi Umum	1.261.293.035.000,00	1.241.906.073.000,00	98,46	1.373.396.371.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	433.708.064.000,00	428.624.949.690,00	98,83	473.606.164.458,00
	Jumlah	1.735.149.441.000,00	1.708.279.450.821,00	98,45	1.876.097.637.787,00

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak adalah sebesar Rp37.325.825.940,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp34.439.264.481,00 atau sebesar 92,27%. Anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.20
 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	13.307.676.330,00	5.146.082.921,00	38,67	7.832.607.451,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	17.084.438.610,00	18.050.447.991,00	105,65	9.654.595.615,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	-	151.368.000,00	100,00	464.944.070,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	4.511.255.604,00	100,00	2.755.258.074,00
5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.933.711.000,00	6.580.109.965,00	94,90	6.721.258.148,00
	Jumlah	37.325.825.940,00	34.439.264.481,00	92,27	27.428.663.358,00

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam adalah sebesar Rp2.822.516.060,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.309.163.650,00 atau sebesar 117,24%. Anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.21
 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	345.500.100,00
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	940.671.420,00	695.072.930,00	73,89	104.365.306,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	78.400,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.588.988.903,00	788.276.289,00	49,61	590.155.800,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	191.810.642,00	56.090.685,00	29,24	95.052.100,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	1.688.496.493,00	100,00	419.934.900,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	99.994.000,00	80.716.100,00	80,72	111.293.565,00
8	Bagi Hasil Dari Minerba	1.051.095,00	511.153,00	48,63	58.800,00
	Jumlah	2.822.516.060,00	3.309.163.650,00	117,24	1.666.438.971,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.261.293.035.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.241.906.073.000,00 atau 98,46%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp131.490.298.000,00 atau 9,57% dari realisasi Tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.373.396.371.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp433.708.064.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp428.624.949.690,00 atau sebesar 98,83%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp44.981.214.768,00 atau 9,50% dari realisasi Tahun anggaran 2019 sebesar Rp473.606.164.458,00 Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.22
 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	78.878.522.000,00	77.839.710.310,00	98,68	113.565.239.608,00
2	DAK Bidang Kesehatan	31.136.035.000,00	30.053.597.561,00	96,52	18.207.643.136,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	-	-	-	17.133.286.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.100.000.000,00	1.644.363.000,00	78,30	10.036.311.000,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	664.047.000,00	341.725.000,00	51,46	5.673.301.198,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	829.920.000,00	755.730.065,00	91,06	870.701.000,00
7	DAK Bidang Pertanian	2.247.000.000,00	2.200.000.000,00	97,91	5.474.211.000,00
8	DAK Bidang Lingkungan Hidup	-	0,00	-	791.779.999,00
9	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.291.523.000,00	1.110.354.000,00	85,97	-
10	DAK Bidang Perdagangan	-	-	-	3.877.658.796,00
11	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.336.592.000,00	4.336.592.000,00	100,00	2.972.290.000,00
12	DAK Bidang Pariwisata	2.268.301.000,00	1.817.450.000,00	80,12	2.645.822.000,00
13	Penurunan AKI-AKB	186.735.000,00	132.983.148,00	71,21	-
14	Penguatan Intervensi Stunting	653.684.000,00	606.130.273,00	92,73	-
15	Penurunan Stunting	40.375.000,00	39.875.000,00	98,76	-
16	Pengendalian Penyakit	3.450.310.000,00	3.379.118.422,00	97,94	-
17	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	209.825.032.000,00	209.825.032.000,00	100,00	218.360.340.570,00
18	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	2.326.362.500,00
19	Dana Tunjangan Khusus Guru	-	-	-	958.234.000,00
20	Dana Akreditasi Puskesmas	1.317.540.000,00	-	-	-
21	Dana Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	-
22	Dana Akreditasi Labkesda	-	-	-	-
23	Dana Jaminan Persalinan	6.898.237.000,00	-	-	-
24	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	41.662.547.000,00	49.934.163.000,00	119,85	30.056.001.062,00
25	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.412.350.000,00	5.041.722.388,00	93,15	5.052.900.465,00
26	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.755.425.000,00	5.160.553.523,00	89,66	4.445.700.124,00
27	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	9.006.600.000,00	8.861.700.000,00	98,39	9.130.600.000,00
28	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	25.247.400.000,00	25.100.100.000,00	99,42	21.952.710.000,00
29	Dana Pelayanan Kepariwisata	444.050.000,00	444.050.000,00	100,00	75.072.000,00
30	Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	-	-	-
	Jumlah	433.708.064.000,00	428.624.949.690,00	98,83	473.606.164.458,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun Anggaran 2020 adalah Nihil.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp181.020.663.531,00 atau sebesar 101,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp178.385.500.000,00. Pendapatan transfer pemerintah daerah Lainnya dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.23
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	178.385.500.000,00	181.020.663.531,00	101,48	178.608.761.544,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	178.385.500.000,00	181.020.663.531,00	101,48	178.608.761.544,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.24
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	42.768.100.000,00	36.873.320.879,00	86,22	44.691.001.460,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.292.400.000,00	22.304.298.656,00	67,00	34.731.506.108,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.728.200.000,00	38.167.696.357,00	85,33	52.005.225.017,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	94.800.000,00	102.472.194,00	108,09	116.636.836,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	57.502.000.000,00	83.572.875.445,00	145,34	47.064.392.123,00
6	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-		-
	Jumlah	178.385.500.000,00	181.020.663.531,00	101,48	178.608.761.544,00

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2020 adalah sebesar Rp39.252.138.336,00 atau 96,31%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.174.629.769,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp51.426.768.105,00 Bantuan Keuangan terdiri dari :

5.1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Yaitu berupa dana Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan realisasi sebesar Rp39.252.138.336,00 atau 96,31% dari anggaran sebesar Rp40.754.000.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp687.276.734.000,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp687.418.424.000,00. Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.25
 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.3.1	Pendapatan Hibah	194.939.920.000,00	194.798.230.000,00	99,93	170.592.920.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	492.478.504.000,00	492.478.504.000,00	100,00	441.009.459.000,00
	Jumlah	687.418.424.000,00	687.276.734.000,00	99,98	611.602.379.000,00

5.1.1.3.1 Pendapatan hibah

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp194.798.230.000,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp194.939.920.000,00 merupakan pendapatan hibah air minum untuk perkotaan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Pendapatan hibah Dana BOS sebesar Rp188.798.230.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan hibah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.26
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Banjarharjo	12.527.080.000,00	12.501.580.000,00	99,80	11.193.680.000,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Bantarkawung	8.318.480.000,00	8.328.560.000,00	100,12	7.649.920.000,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Brebes	18.680.030.000,00	18.676.850.000,00	99,98	17.014.560.000,00
5	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Bulakamba	14.268.440.000,00	14.358.170.000,00	100,63	13.060.880.000,00
6	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Bumiayu	9.328.630.000,00	9.311.260.000,00	99,81	8.508.640.000,00
7	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Jatibarang	8.710.090.000,00	8.689.690.000,00	99,77	7.908.640.000,00
8	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Kersana	7.392.700.000,00	7.389.580.000,00	99,96	6.681.520.000,00
9	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Ketanggungan	11.757.370.000,00	11.676.010.000,00	99,31	10.526.600.000,00
10	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Larangan	11.410.850.000,00	11.358.830.000,00	99,54	10.268.000.000,00
11	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Losari	11.990.990.000,00	12.016.940.000,00	100,22	10.912.000.000,00
12	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Paguyangan	9.336.790.000,00	9.330.700.000,00	99,93	8.493.360.000,00
13	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Salem	6.207.620.000,00	6.193.160.000,00	99,77	5.642.800.000,00
14	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Sirampog	5.292.390.000,00	5.295.570.000,00	100,06	4.803.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
15	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Songgom	7.546.800.000,00	7.540.050.000,00	99,91	6.849.600.000,00
16	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Tanjung	12.156.900.000,00	12.155.130.000,00	99,99	10.891.280.000,00
17	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Tonjong	6.141.820.000,00	6.130.720.000,00	99,82	5.645.120.000,00
18	Pendapatan Hibah Dana BOS Wilayah Kec. Wanasari	12.932.940.000,00	12.905.430.000,00	99,79	11.637.520.000,00
19	Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi	9.120.000.000,00	9.120.000.000,00	100,00	5.362.000.000,00
21	Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi BOS Kinerja	5.820.000.000,00	5.820.000.000,00	100,00	4.543.000.000,00
	Jumlah	194.939.920.000,00	194.798.230.000,00	99,93	170.592.920.000,00

5.1.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat untuk Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.

5.1.1.3.3 Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp492.478.504.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp492.478.504.000,00. Pendapatan Lainnya ini terdiri dari penerimaan dana desa dari pemerintah pusat.

5.1.2 Belanja

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.260.042.195.634,00	2.471.256.601.337,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun Anggaran 2020 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dengan realisasi sebesar Rp2.260.042.195.634,00 atau 92,88 % dari anggaran belanja sebesar Rp2.433.227.386.000,00 dan turun 8,55% dari realisasi tahun lalu dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.27
 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.959.167.460.190,00	1.824.812.030.370,00	93,14	1.848.070.004.521,00
2	Belanja Modal	459.869.925.810,00	432.556.254.864,00	94,06	621.919.531.365,00
3	Belanja Tak Terduga	14.190.000.000,00	2.673.910.400,00	18,84	1.267.065.451,00
	Jumlah	2.433.227.386.000,00	2.260.042.195.634,00	92,88	2.471.256.601.337,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri



atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.824.812.030.370,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.037.781.795.051,00	966.466.706.851,00	93,13	1.022.322.106.547,00
2	Belanja Barang dan Jasa	824.630.409.139,00	769.780.671.347,00	93,35	752.974.003.474,00
3	Belanja Bunga	1.750.000.000,00	1.232.296.972,00	70,42	254.662.800,00
4	Belanja Hibah	51.437.856.000,00	49.199.705.200,00	95,65	51.263.570.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	43.567.400.000,00	38.132.650.000,00	87,53	21.255.661.700,00
	Jumlah	1.959.167.460.190,00	1.824.812.030.370,00	93,14	1.848.070.004.521,00

Rincian masing-masing jenis belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp966.466.706.851,00 atau 93,13 % dari anggaran sebesar Rp1.037.781.795.051,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.29
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	925.551.316.000,00	873.776.097.436,00	94,41	925.167.301.242,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.764.756.000,00	57.543.361.896,00	79,08	78.951.004.068,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.971.940.000,00	9.813.000.000,00	98,41	9.754.900.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.808.604.000,00	1.431.045.684,00	79,12	4.372.698.945,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	223.700.000,00	136.836.000,00	61,17	393.754.292,00
6	Belanja Uang Lembur	4.252.958.051,00	3.892.511.000,00	91,52	3.682.448.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	23.208.521.000,00	19.873.854.835,00	85,63	-
	Jumlah	1.037.781.795.051,00	966.466.706.851,00	93,13	1.022.322.106.547,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp769.780.671.347,00 atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp824.630.409.139,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.30
 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	32.077.515.381,00	29.826.727.474,00	92,98	16.784.997.544,00
2	Belanja Bahan/Material	21.983.589.597,00	21.243.778.080,00	96,63	17.150.142.653,00
3	Belanja Jasa Kantor	223.037.226.106,00	206.765.970.923,00	92,70	179.134.927.838,00
4	Belanja Premi Asuransi	27.058.821.130,00	15.053.110.500,00	55,63	7.766.733.859,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.841.183.826,00	5.208.245.613,00	89,16	6.598.025.957,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.878.314.930,00	7.296.648.556,00	92,62	11.424.658.244,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.580.052.000,00	1.274.538.700,00	80,66	2.151.287.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	804.035.220,00	661.803.000,00	82,31	1.726.720.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	150.669.840,00	150.240.000,00	-	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.641.933.190,00	1.404.532.000,00	85,54	2.492.705.400,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.698.920,00	19.499.874.604,00	90,69	25.776.741.950,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.078.535.310,00	905.150.400,00	83,92	1.557.582.500,00
13	Belanja Pakaian Kerja	162.446.970,00	154.293.600,00	94,98	1.375.616.896,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.785.883.670,00	1.707.255.513,00	95,60	2.664.598.250,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	47.478.794.800,00	43.678.809.293,00	92,00	56.482.859.585,00
16	Belanja Pemeliharaan	36.801.490.664,00	35.997.203.383,00	97,81	24.770.975.839,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	6.294.510.000,00	5.677.834.000,00	90,20	7.136.797.268,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.315.809.170,00	24.459.391.739,00	96,62	46.528.218.140,00
19	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	374.300.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.497.374.670,00	2.325.263.359,00	93,11	5.592.927.221,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	-
22	Belanja Honorarium PNS	2.918.000.000,00	2.673.620.000,00	91,63	5.981.282.300,00
23	Belanja Honorarium Non PNS	1.866.500.000,00	1.807.800.000,00	96,86	2.349.225.000,00
24	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	-
25	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	49.248.166.949,00	49.245.111.518,00	99,99	28.407.283.331,00
26	Belanja Barang Dana BOS	93.942.973.927,00	93.680.160.955,00	99,72	90.639.626.840,00
27	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	17.726.089.390,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	205.189.612.419,00	193.444.704.039,00	94,28	182.579.249.747,00
29	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.016.445.000,00	1.958.928.000,00	97,15	2.374.509.722,00
30	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.471.425.450,00	3.671.276.098,00	82,11	5.425.921.000,00
	Jumlah	824.630.409.139,00	769.780.671.347,00	93,35	752.974.003.474,00

Anggaran dan realisasi belanja pada BLUD untuk masing-masing BLUD dirinci dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.31
 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
	<u>BLUD RSUD Brebes :</u>	<u>96.862.387.000,00</u>	<u>93.953.725.255,00</u>	97,00
1	Belanja Pegawai	7.577.944.000,00	7.229.103.829,00	95,40
2	Belanja Barang dan Jasa	89.284.443.000,00	86.724.621.426,00	97,13
	<u>BLUD RSUD Bumiayu :</u>	<u>14.520.000.000,00</u>	<u>14.505.051.271,00</u>	99,90
1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	58.000.000,00	79,89
2	Belanja Barang dan Jasa	14.447.400.000,00	14.447.051.271,00	100,00
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Brebes :</u>	<u>23.199.039.000,00</u>	<u>20.279.856.165,00</u>	87,42
1	Belanja Pegawai	2.525.250.000,00	2.231.468.420,00	88,37
2	Belanja Barang dan Jasa	20.673.789.000,00	18.048.387.745,00	87,30
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Tanjung :</u>	<u>27.556.757.419,00</u>	<u>23.836.480.681,00</u>	86,50
1	Belanja Pegawai	4.297.517.000,00	2.750.550.418,00	64,00
2	Belanja Barang dan Jasa	23.259.240.419,00	21.085.930.263,00	90,66
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo :</u>	<u>34.671.950.000,00</u>	<u>34.161.147.630,00</u>	98,53
1	Belanja Pegawai	4.609.750.000,00	4.118.250.333,00	89,34
2	Belanja Barang dan Jasa	30.062.200.000,00	30.042.897.297,00	99,94
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu :</u>	<u>16.279.277.000,00</u>	<u>13.599.898.111,00</u>	83,54
1	Belanja Pegawai	1.619.700.000,00	1.413.627.335,00	87,28
2	Belanja Barang dan Jasa	14.659.577.000,00	12.186.270.776,00	83,13
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan :</u>	<u>15.308.723.000,00</u>	<u>12.982.399.761,00</u>	84,80
1	Belanja Pegawai	2.505.760.000,00	2.072.854.500,00	82,72
2	Belanja Barang dan Jasa	12.802.963.000,00	10.909.545.261,00	85,21
	Jumlah	228.398.133.419,00	213.318.558.874,00	93,40

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas utang Pemda kepada lembaga keuangan bank, pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp1.750.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.232.296.972,00 atau 70,42%.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja subsidi tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan



5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Realisasi Belanja hibah sebesar Rp49.199.705.200,00 merupakan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA. 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi	42.809.856.000,00	41.658.705.200,00	97,31	44.824.370.000,00
2	Belanja Hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat	8.628.000.000,00	7.541.000.000,00	87,40	6.439.200.000,00
	Jumlah	51.437.856.000,00	49.199.705.200,00	95,65	51.263.570.000,00

Realisasi Belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.658.705.200,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.33
Rincian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi TA 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
1	Hibah kepada Fasilitas Keaksaraan Dasar (KD) Sebanyak 7 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020 (DDL)	220.500.000,00
2	Hibah kepada Fasilitas Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Sebanyak 4 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020 (DDL)	144.000.000,00
3	Hibah Kepada 3 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020. (DDL)	64.000.000,00
4	Hibah untuk Fasilitas Penguatan PKBM Sebanyak 10 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020 (DDL)	300.000.000,00
5	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B Sebanyak 34 Lembaga di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020. (DAK Non Fisik)	1.329.750.000,00
6	Hibah kepada BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Sebanyak 39 Lembaga di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020. (DAK Non Fisik)	2.753.100.000,00
7	Hibah untuk BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Sebanyak 12 Lembaga di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020. (DAK Non Fisik)	160.550.000,00
8	Hibah untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Raudatul Atfal (RA) Sebanyak 20 Lembaga di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020. (DDL)	724.000.000,00
9	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kec. Tonjong Sebanyak 57 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	561.300.000,00
10	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Kec. Jatibarang Sebanyak 55 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	645.300.000,00
11	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Jatibarang Sebanyak 29 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	384.300.000,00
12	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Larangan Sebanyak 43 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	778.500.000,00
13	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Bantarkawung Sebanyak 59 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	681.300.000,00
14	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Paguyangan Sebanyak 49 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	550.800.000,00
15	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Bulakamba Sebanyak 58 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	874.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
16	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Wanasari Sebanyak 76 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	1.061.400.000,00
17	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Banjarharjo Sebanyak 40 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	576.000.000,00
18	Hibah kepada KONI Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020. (DDL)	3.200.000.000,00
19	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Tanjung Sebanyak 42 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	661.200.000,00
20	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Songgom Sebanyak 40 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	546.300.000,00
21	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Salem Sebanyak 52 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	487.200.000,00
22	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Ketanggungan Sebanyak 59 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	891.900.000,00
23	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Kec. Bumiayu Sebanyak 79 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	874.500.000,00
24	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Sirampog Sebanyak 53 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	716.100.000,00
25	Hibah Keuangan Untuk 2 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020. (DDL)	104.000.000,00
26	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Losari Sebanyak 62 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	841.800.000,00
27	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Kec. Brebes Sebanyak 108 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	1.188.900.000,00
28	Hibah kepada 6 Lembaga di Kab. Brebes (DDL)	316.000.000,00
29	Hibah kepada 8 Lembaga di Kab. Brebes (DDL)	280.000.000,00
30	Hibah kepada 13 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes (DDL)	440.000.000,00
31	Hibah kepada 7 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes (DDL)	236.000.000,00
32	Hibah kepada 3 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes (DDL)	200.000.000,00
33	Hibah kepada 3 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes (DDL)	48.000.000,00
34	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Bulakamba Sebanyak 58 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	826.500.000,00
35	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Tanjung Sebanyak 42 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	603.900.000,00
36	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Kersana Sebanyak 29 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	379.800.000,00
37	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Tonjong Sebanyak 55 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	543.900.000,00
38	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Ketanggungan Sebanyak 58 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	782.400.000,00
39	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Banjarharjo Sebanyak 40 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	549.000.000,00
40	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Larangan Sebanyak 43 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	724.500.000,00
41	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Salem Sebanyak 52 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	481.500.000,00
42	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Paguyangan Sebanyak 18 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	204.000.000,00
43	DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Wanasari Sebanyak 74 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	1.027.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
44	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Kec. Songgom Sebanyak 40 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	524.400.000,00
45	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Sirampog Sebanyak 53 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	704.100.000,00
46	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Bantarkawung Sebanyak 58 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	649.500.000,00
47	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kec. Losari Sebanyak 61 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	822.000.000,00
48	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Kec. Jatibarang Sebanyak 53 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	587.100.000,00
49	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Kec. Bumiayu Sebanyak 78 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	766.500.000,00
50	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) Kec. Paguyangan Sebanyak 31 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	348.300.000,00
51	Hibah DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Sebanyak 8 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020. (DAK Non Fisik)	86.450.000,00
52	Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Kec. Brebes Sebanyak 107 Lembaga TA. 2020. (DAK Non Fisik)	1.063.200.000,00
53	Hibah kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Sebanyak 13 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020. (DDL)	675.000.000,00
54	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B Sebanyak 37 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020. (DAK Non Fisik)	1.309.500.000,00
55	Hibah DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Sebanyak 39 Lembaga di Kab. Brebes TA. 2020. (DAK Non Fisik)	2.826.000.000,00
56	Hibah Keuangan Untuk 19 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes. (DDL)	540.755.200,00
57	Hibah Keuangan Untuk 50 Lembaga di Kab. Brebes. (DDL)	838.000.000,00
58	Hibah Keuangan Untuk 9 Lembaga di Kab. Brebes. (DDL)	171.000.000,00
59	Hibah Keuangan Untuk 40 Lembaga di Kab. Brebes. (DDL)	783.000.000,00
	JUMLAH	41.658.705.200,00

Realisasi Belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.541.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.34

Rincian Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat TA 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah Kepada Masjid Jami Uswatun Hasanah Desa Dukuhmaja Kec. Songgom Kab.Brebes	80.000.000,00
2	Hibah kepada 13 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	176.000.000,00
3	Hibah kepada 12 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	212.000.000,00
4	Hibah kepada 17 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	268.000.000,00
5	Hibah kepada 12 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	206.000.000,00
6	Hibah kepada 12 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	172.000.000,00
7	Hibah kepada 15 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	204.000.000,00
8	Hibah kepada 16 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	296.000.000,00
9	Hibah kepada 15 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	216.000.000,00
10	Hibah kepada 8 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	88.000.000,00
11	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Kelompok Tani Temak Mandiri Desa Sawojajar Kec. Wanasari Kec. Brebes.	20.000.000,00
12	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Kelompok Tani Temah Moga	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Berkah Desa Sawojajar Kec. Wanasari Kec. Brebes	
13	Hibah kepada 3 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	32.000.000,00
14	Hibah kepada 5 Anggota/Kelompok Masyarakat di Kab.Brebes	64.000.000,00
15	Hibah kepada 5 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	116.000.000,00
16	Hibah kepada 2 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	32.000.000,00
17	Hibah kepada 2 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	20.000.000,00
18	Hibah Keuangan Untuk 6 Lembaga.	380.000.000,00
19	Hibah kepada 21 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	464.000.000,00
20	Hibah kepada 8 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	440.000.000,00
21	Hibah kepada 3 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	35.000.000,00
22	Bantuan Hibah Keuangan Untuk 9 Lembaga di Kab. Brebes.	1.305.000.000,00
23	Hibah kepada 6 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	350.000.000,00
24	Hibah kepada 12 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	375.000.000,00
25	Hibah kepada 10 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	400.000.000,00
26	Hibah kepada 12 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	285.000.000,00
27	Hibah kepada 7 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	110.000.000,00
28	Hibah Kepada Lembaga MI Mafatihul Huda Desa Padakaton Kec. Ketanggungan Kab.Brebes	140.000.000,00
29	Hibah Kepada Jam'iyah Lailiyah Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab.Brebes	10.000.000,00
30	Hibah kepada 10 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	210.000.000,00
31	Bantuan Hibah Keuangan Untuk 8 Lembaga di Kab. Brebes.	650.000.000,00
32	Hibah Kepada Kelompok Santri Tani Milenial Al Hasaniyah Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab.Brebes	70.000.000,00
33	Hibah kepada 2 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab.Brebes	95.000.000,00
	JUMLAH	7.541.000.000,00

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp38.132.650.000 atau 87,52 % dari anggaran sebesar Rp43.567.400.000,00 yang merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.35
Rincian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Untuk 1135 Orang Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	1.135.000.000,00
2	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Anak 150 Penyandang Disabilitas Sosial di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	150.000.000,00
3	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 40 orang Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	40.000.000,00
4	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 20 orang Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	20.000.000,00
5	Bantuan Sosial Yang Direncanakan Untuk Anak Yatim Piatu di Luar Panti Asuhan di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	1.785.000.000,00
6	Bantuan Sosial Yang Direncanakan Untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebanyak 510 Orang di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	510.000.000,00
7	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Orang Tidak Mampu di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	35.000.000,00
8	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 12 Orang Terlantar di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	2.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
9	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 7 Orang Eks Balai Rehabilitasi Sosial Anak "Wira Adhi Karya" Ungaran Tahun Anggaran 2020.	7.000.000,00
10	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Untuk 1143 Orang Pada 11 Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.	1.143.000.000,00
11	Bantuan Sosial Yang Direncanakan Untuk Bantuan Sosial Tunai Biaya Hidup Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 di Kab. Brebes.	3.475.000.000,00
12	Bantuan Sosial Yang Direncanakan Untuk Bantuan Sosial Tunai Biaya Hidup Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 di Kab. Brebes.	4.121.200.000,00
13	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 60 Orang Lanjut Usia Terlantar Tahun 2020 di Kab. Brebes	60.000.000,00
14	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 60 Orang Eks NAPZA Tahun 2020 di Kab. Brebes	60.000.000,00
15	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 15 Orang Terlantar Tahun 2020 di Kab. Brebes	3.950.000,00
16	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 18 Orang Eks Balai Rehabilitasi Sosial Anak "Wira Adhi Karya" Ungaran"(DDL)	18.000.000,00
17	Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Ekonomi (BST-JPSE) Tahap ke II (Dua) Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Kab. Brebes TA. 2020.	8.424.800.000,00
18	Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Ekonomi (BST-JPSE) Tahap ke I (Pertama) Kloter II Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Kab. Brebes TA. 2020.	792.600.000,00
19	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 21 Orang Bantuan Transport Kelayan Keluar Daerah Tahun 2020.	15.750.000,00
20	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 6 Orang Tidak Mampu di Kab. Brebes Tahun 2020.	7.000.000,00
21	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Perumahan APBD Untuk 181 Orang di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020.	1.810.000.000,00
22	Bantuan Sosial Tunai Jaring Oengaman Sosial Ekonomi (BST-JPSE) Tahap ke III (Tiga) Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Kab. Brebes TA. 2020.	8.472.800.000,00
23	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 4 Orang Tidak Mampu di Kab. Brebes Tahun 2020.	8.000.000,00
24	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 13 Orang Terlantar di Kab. Brebes Tahun 2020.	3.850.000,00
25	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Anak 16 Orang Bantuan Transport Kelayakan Keluar Daerah Tahun 2020.	12.000.000,00
26	Bantuan Sosial Bidikmisi Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi TA. 2020	1.977.500.000,00
27	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin 502 Orang Pada 4 Kecamatan di Kab. Brebes Tahun 2020.	502.000.000,00
28	Bantuan Sosial Untuk Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Sebanyak 1100 Orang di Kab. Brebes	1.187.200.000,00
29	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin 897 Orang Pada 6 Kecamatan di Kab. Brebes Tahun 2020.	897.000.000,00
30	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Perumahan APBD Untuk 92 Orang di Kab. Brebes Tahun Anggaran 2020.	945.000.000,00
31	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Orang Terlantar Sebanyak 11 Orang di Kab. Brebes Tahun 2020.	3.450.000,00
32	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Orang Tidak Mampu Sebanyak 20 Orang di Kab. Brebes Tahun 2020.	23.500.000,00
33	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin 473 Orang Pada 8 Kecamatan di Kab. Brebes Tahun 2020.	473.000.000,00
34	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Orang Terlantar Sebanyak 4 Orang di Kab. Brebes Tahun 2020.	1.550.000,00
35	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Bantuan Transport Kelayan Ke Luar Daerah Sebanyak 13 Orang di Kab. Brebes Tahun 2020.	9.750.000,00
	Jumlah	38.132.650.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan



bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lain-lain. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp432.556.254.864,00 atau 9,4% dari anggaran sebesar Rp459.869.925.810,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.36
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	2.321.546.500,00	1.279.002.500,00	55,09	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.444.381.674,00	53.408.412.957,00	94,62	74.972.089.705,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.026.022.906,00	140.092.056.315,00	92,15	155.062.627.657,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	170.608.699.338,00	165.653.855.296,00	97,10	299.426.343.258,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	78.469.275.392,00	72.122.927.796,00	91,91	92.458.470.745,00
	Jumlah	459.869.925.810,00	432.556.254.864,00	94,06	621.919.531.365,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.321.546.500,00 dan ada realisasi sebesar Rp1.279.002.500,00 atau 55,09% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.36a
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	916.141.500,00	801.137.500,00	87,45	-
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.405.405.000,00	477.865.000,00	34,00	-
	Jumlah	2.321.546.500,00	1.279.002.500,00	55,09	-

Belanja modal tanah untuk tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- Pengadaan Tanah untuk bangunan Tempat Kerja/Jasa realisasi sebesar Rp801.137.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Sertifikat tanah milik pemerintah daerah (PNBP Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia dan PNBP Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah) sebesar Rp135.419.320,00.
 - Belanja Sertifikat Tanah Asset Pemerintah Daerah (Biaya Notaris Tanah Pemerintah Daerah) sebesar Rp26.000.000,00.



- Uang saku / transport untuk pengukuran, pemeriksaan dan pemberkasan persyaratan penyertifikatan tanah dan biaya operasional/administrasi lainnya sebesar Rp589.218.180,00.
- Belanja honor tim percepatan legalisasi / sertifikasi tanah milik Pemerintah sebesar Rp50.500.000,00.
- Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan realisasi sebesar Rp477.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Pengadaan Tanah untuk pelebaran Jalan Sigempol sebesar Rp311.400.000,00
 - Belanja Sertifikasi Tanah Jalan Sigempol Rp9.000.000,00
 - Belanja Jasa Appraisal Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Sigempol sebesar Rp49.005.000,00
 - Belanja Jasa Appraisal Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Jembatan Sungai Rambatan Baru Kec. Larangan sebesar Rp59.235.000,00
 - Belanja Jasa Appraisal Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Pamulihan – Jemasih sebesar Rp49.225.000,00

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.408.412.957,00 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp56.444.381.674,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	5.426.568.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	181.433.450,00	180.652.000,00	99,57	1.292.351.100,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.522.844.410,00	6.234.493.000,00	95,58	11.471.739.975,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	80.000.000,00	79.500.000,00	99,38	25.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-	-	-	375.875.500,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	56.775.480,00	54.650.000,00	96,26	27.905.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	18.914.500,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	238.185.299,00	234.332.280,00	98,38	1.034.606.500,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	-	-	-	447.253.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.868.000,00	3.700.000,00	95,66	175.907.800,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.316.925.050,00	2.257.910.060,00	97,45	2.765.891.080,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.708.155.192,00	5.468.138.242,00	95,80	22.044.499.205,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.580.459.764,00	12.324.241.852,00	97,96	10.573.366.287,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	561.898.048,00	528.255.100,00	94,01	1.127.342.252,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.955.532.700,00	1.815.404.740,00	92,83	1.641.812.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	252.649.770,00	248.275.000,00	98,27	89.490.000,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	50.000.000,00	48.522.000,00	97,04	
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	21.927.246.041,00	20.270.149.683,00	92,44	8.431.676.244,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	684.030.000,00	595.330.000,00	87,03	2.854.933.147,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	77.800.000,00	76.690.000,00	98,57	1.780.412.950,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.567.600.000,00	2.352.193.000,00	91,61	889.024.600,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	2.353.080.000,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	602.950.000,00	560.426.000,00	92,95	2.334.000,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	71.028.470,00	70.550.000,00	99,33	122.106.565,00
	Jumlah	56.444.381.674,00	53.408.412.957,00	94,62	74.972.089.705,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar
Rp140.092.056.315,00 atau 92,15% dari anggaran sebesar
Rp152.026.022.906,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.38
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.688.897.906,00	138.814.963.315,00	92,12	150.902.916.657,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	846.150.000,00	842.420.000,00	99,56	77.350.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	-	-	-	1.751.400.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	-	603.450.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	101.475.000,00	99.275.000,00	97,83	74.999.000,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	389.500.000,00	335.398.000,00	86,11	1.652.512.000,00
	Jumlah	152.026.022.906,00	140.092.056.315,00	92,15	155.062.627.657,00



5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp165.653.855.296,00 atau 97,1% dari anggaran sebesar Rp170.608.699.338,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.39
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	134.159.184.911,00	131.139.429.716,00	97,75	205.081.181.992,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.220.625.000,00	3.565.619.080,00	84,48	22.926.434.766,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.599.050.817,00	8.086.592.000,00	94,04	17.846.162.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	200.000.000,00	198.950.000,00	99,48	342.390.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan BA	14.868.670.610,00	14.714.742.000,00	98,96	39.967.727.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	600.000.000,00	596.710.000,00	99,45	806.945.000,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	532.811.500,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	50.000.000,00	49.667.000,00	-	-
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	800.000.000,00	794.090.000,00	99,26	648.950.000,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	-	-	130.600.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	365.215.000,00	321.460.000,00	88,02	332.123.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	-
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	60.000.000,00	59.730.000,00	99,55	200.808.000,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	-	-
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	-	-	-	-
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	-	10.610.210.000,00
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	-	-	-	-
18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	6.685.953.000,00	6.126.865.500,00	91,64	-
	Jumlah	170.608.699.338,00	165.653.855.296,00	97,10	299.426.343.258,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp72.122.927.796,00 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp78.469.275.392,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.40
 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.763.945.000,00	1.758.497.391,00	99,69	12.472.884.547,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	12.000.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	1.705.000.000,00	1.246.013.000,00	73,08	1.085.260.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	1.292.000.000,00	1.031.000.000,00	79,80	
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	-	-	-	397.535.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
7	Belanja Modal BLUD	26.460.206.000,00	21.514.024.978,00	81,31	30.781.879.597,00
8	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dana Bos	19.482.602.465,00	19.433.410.763,00	99,75	47.708.911.601,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.756.521.927,00	27.131.231.664,00	97,75	-
	Jumlah	78.469.275.392,00	72.122.927.796,00	91,91	92.458.470.745,00

Realisasi Belanja Modal BLUD untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.514.024.978,00 atau 81,31% dari anggaran sebesar Rp26.460.206.000,00.

Anggaran dan realisasi untuk belanja modal BLUD pada masing-masing BLUD dirinci sesuai tabel berikut ini :

Tabel 5.41
 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
	<u>BLUD RSUD Brebes :</u>	<u>2.911.100.000,00</u>	<u>2.551.467.650,00</u>	87,65
1	Belanja Modal	2.911.100.000,00	2.551.467.650,00	87,65
	<u>BLUD RSUD Bumiayu :</u>	<u>1.480.000.000,00</u>	<u>1.479.746.073,00</u>	99,98
1	Belanja Modal	1.480.000.000,00	1.479.746.073,00	99,98
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Brebes :</u>	<u>4.808.929.000,00</u>	<u>4.095.806.499,00</u>	85,17
1	Belanja Modal	4.808.929.000,00	4.095.806.499,00	85,17
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Tanjung :</u>	<u>6.936.000.000,00</u>	<u>4.301.149.688,00</u>	62,01
1	Belanja Modal	6.936.000.000,00	4.301.149.688,00	62,01
	<u>BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo :</u>	<u>6.488.050.000,00</u>	<u>5.734.456.873,00</u>	88,38
1	Belanja Modal	6.488.050.000,00	5.734.456.873,00	88,38



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu :	1.452.475.000,00	1.141.785.622,00	78,61
	Belanja Modal	1.452.475.000,00	1.141.785.622,00	78,61
1	BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan :	2.383.652.000,00	2.209.612.573,00	92,70
	Belanja Modal	2.383.652.000,00	2.209.612.573,00	92,70
	Jumlah	26.460.206.000,00	21.514.024.978,00	81,31

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi belanja tak terduga selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.673.910.400,00 atau 18,84% dari anggaran sebesar Rp14.190.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.42
 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020

No	Lokasi	Uraian	SK Tanggap Darurat / Penetapan Bencana	Realisasi (Rp.)
1	Desa Jemasih Kec. Ketanggungan	Pembuatan Jalan Darurat ruas Pamulihan- Ketanggungan- Jemasih	No. 360/050 Tahun 2020 tgl. 17 Januari 2020	87.204.650,00
2	Desa Prapag Kidul Kec. Losari	Pembuatan Tanggul Bronjong Darurat Sungai Tanjung Kulon (Sipin)	No. 360/091 Tahun 2020 tgl. 24 Februari 2020	209.015.819,00
3	Desa Galuhtimur Kec. Tonjong	Pembuatan Jalan Darurat di dusun Kalipucung	No. 360/112 Tahun 2020 tgl. 2 Maret 2020	133.330.455,00
4	Desa Cinanas Kec. Bantarkawung	Pembuatan Jalan Darurat	No. 360/166 Tahun 2020 tgl. 1 April 2020	106.921.950,00
5	Kab. Brebes	Pembayaran Uang Lelah (UL) TNI dan POLRI Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19.		171.600.000,00
6	Kab. Brebes	Pembayaran Uang Saku Satgas Pengamanan Orang Dengan Resiko (ODR) Kodim 0713 Brebes.		200.000.000,00
7	Kab. Brebes	Pembelian Masker Kain dan Multivitamin dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19		69.000.000,00
8	Kab. Brebes	Pembayaran Uang Transport Operasi Pendisiplinan Gakkum Prokes Covid 19 Anggota Polres Brebes, Kodim 0713 Brebes, Satpol PP Brebesdan Sub Denpom 1-4 Brebes Kab. Brebes		158.437.526,00
9	Kab. Brebes	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Alat Kesehatan Penanganan Covid-19 Kab. Brebes		1.500.000.000,00
10	Kab Brebes	Pengembalian Dana BOS ke Pusat TA 2019-LRA		38.400.000,00
		Jumlah		2.673.910.400,00

5.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



Belanja transfer terbagi menjadi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Realisasi transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp695.008.177.371,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp699.756.796.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.43
Rincian Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.304.388.000,00	11.436.066.371,00	74,72	10.569.843.224,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	684.452.408.000,00	683.572.111.000,00	99,87	650.425.296.019,00
	Jumlah	699.756.796.000,00	695.008.177.371,00	99,32	660.995.139.243,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp11.436.066.371,00 atau 74,72% dari anggaran sebesar Rp15.304.388.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

5.1.3.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa di Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp13.178.331.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.162.840.363,00 atau 77,12%, dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.3.

5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.126.057.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.273.226.008,00 atau 59,89%.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Provinsi, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.926.057.000,00	1.104.903.208,00	57,37	712.496.846,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Provinsi	200.000.000,00	168.322.800,00	84,16	184.430.700,00
	Jumlah	2.126.057.000,00	1.273.226.008,00	59,89	896.927.546,00



Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Desa merupakan bagi hasil retribusi daerah kepada desa dengan rincian anggaran dan realisasi disajikan dalam lampiran 5.4.

Anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Provinsi dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Kepada Provinsi Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Retribusi Pasar Kalierang Kec. Bumiayu kepada BPKAD Prov. Jawa Tengah	100.000.000,00	68.547.300,00	68,55	84.552.600,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Provinsi untuk pengelolaan Obyek Wisata Waduk Malahayu	100.000.000,00	99.775.500,00	99,78	99.878.100,00
	Jumlah	200.000.000,00	168.322.800,00	84,16	184.430.700,00

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp684.452.408.000,00 dan realisasi sebesar Rp683.572.111.000,00 atau 99,87 %. Anggaran dan realisasi transfer bantuan keuangan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.46
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	682.990.301.500,00	682.110.004.500,00	99,87	649.116.313.529,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.462.106.500,00	1.462.106.500,00	100,00	1.308.982.490,00
	Jumlah	684.452.408.000,00	683.572.111.000,00	99,87	650.425.296.019,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp682.110.004.500,00 atau 99,87 % dari anggaran sebesar Rp682.990.301.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.47
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dana Desa (DD)	492.478.504.000,00	492.478.504.000,00	100,00	441.009.459.000,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	130.000.000.000,00	129.999.703.800,00	100,00	140.450.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Untuk Membayar Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Perangkat Desa	315.000.000,00	-	-	302.854.529,00
4	Bantuan Keuangan utk TMMD	2.400.000.000,00	2.350.000.000,00	97,92	4.395.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Desa, Jamban Sehat, Pendampingan Pamsimas	57.796.797.500,00	57.281.796.700,00	99,11	51.439.000.000,00
6	Bantuan Parimarga bagi Kepala Desa/Aparat Desa	-	-	-	1.660.000.000,00
7	Bantuan Keuangan untuk Pilkades	-	-	-	9.860.000.000,00
	Jumlah	682.990.301.500,00	682.110.004.500,00	99,87	649.116.313.529,00

(1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pedoman Pembagian/Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp492.478.504.000,00 atau 100% sesuai dengan yang dianggarkan. Untuk anggaran dan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk 17 Kecamatan/292 Desa dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.5.

(2) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa.



Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp129.999.703.800,00 atau 99,99 % dari anggaran sebesar Rp130.000.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.6.

- (3) Realisasi Bantuan Keuangan Untuk Membayar Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Perangkat Desa adalah Rp. 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 315.000.000,00.

- (4) Bantuan Keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Bantuan Keuangan TMMD Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp2.350.000.000,00 atau 97,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00 Bantuan Keuangan TMMD Tahun Anggaran 2020 diperuntukkan bagi kegiatan TMMD Sengkuyung I di Desa Linggapura Kec. Tonjong, TMMD Sengkuyung II di Desa Pengaradan Kec. Tanjung, Karya Bhakti di Desa Jubang Kec. Bulakamba dan TMMD Reguler 109 di Desa Kalinusu di Kec. Bumiayu.

- (5) Bantuan Keuangan Desa untuk infrastruktur, jamban sehat dan pendampingan pamsimas

Bantuan Keuangan ini terealisasi sebesar Rp57.281.796.700,00 atau 99,11 % dari anggaran sebesar Rp57.796.797.500,00 Bantuan keuangan ini adalah bantuan keuangan kepada desa/lembaga/kelompok/ perorangan yang sudah ditentukan peruntukannya/kegiatannya baik itu untuk kegiatan fisik/ infrastruktur/non infrastruktur lainnya dan untuk pendampingan pamsimas.

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.462.106.500,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.462.106.500,00.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya adalah transfer bantuan keuangan kepada partai politik yang ada di Kabupaten Brebes, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.48
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik :				
	PDI PERJUANGAN	390.546.000,00	390.546.000,00	100,00	308.607.000,00
	PKB	257.737.500,00	257.737.500,00	100,00	206.292.000,00
	GOLKAR	203.200.500,00	203.200.500,00	100,00	196.120.490,00
	GERINDRA	158.662.500,00	158.662.500,00	100,00	124.308.000,00
	PAN	108.526.500,00	108.526.500,00	100,00	119.490.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	PKS	98.658.000,00	98.658.000,00	100,00	117.493.500,00
	DEMOKRAT	98.536.500,00	98.536.500,00	100,00	93.414.000,00
	PPP	91.000.500,00	91.000.500,00	100,00	89.991.000,00
	HANURA	16.957.500,00	16.957.500,00	100,00	53.266.500,00
	Kekurangan Bantuan Parpol Tahun 2019	38.281.000,00	38.281.000,00	100,00	-
	Jumlah	1.462.106.500,00	1.462.106.500,00	100,00	1.308.982.490,00

Surplus/(Defisit) LRA	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	53.320.344.502,14	(35.424.895.429,95)

Realisasi Surplus/(Defisit) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp53.320.344.502,14 dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.49
Surplus / (Defisit) LRA Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	100,12
2	Belanja dan Transfer	3.132.984.182.000,00	2.955.050.373.005,00	94,32
	Surplus / (Defisit)	(128.146.668.000,00)	53.320.344.502,14	(41,61)

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp166.162.123.044,43 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp166.146.668.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.50
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Penggunaan SiLPA	166.136.668.000,00	166.136.668.498,43	100,00
2	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	10.000.000,00	25.454.546,00	100,00
	Jumlah	166.146.668.000,00	166.162.123.044,43	100,01



- a) Realisasi penggunaan Silpa merupakan Silpa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp166.136.668.000,00.
- b) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.454.546,00 adalah pengembalian piutang yang berasal dari Investasi Non Permanen Lainnya yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.000.000.000,00 atau 100 % dari anggaran merupakan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis, PT. Bank Jateng, PD. BKK Jateng Cabang Brebes, Perumda BPR Bank Brebes, PD. BKK Banjarharjo, Perusda Percetakan Puspa Grafika dan pengeluaran atas pembayaran pokok pinjaman dalam negeri/pembayaran pelunasan kredit yaitu kepada Bank Jateng, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.51
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan
Pembayaran pokok pinjaman
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah :			
	- Perumda Air Minum Tirta Baribis	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
	- Perumda BPR Bank Brebes	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- BKK Banjarharjo	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- BKK Jateng	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- PT. BPD Jateng Cab. Brebes	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
	- Perusda Percetakan Puspa Grafika	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
2	- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri :			
	- Pembayaran pelunasan kredit pemerintah Kab. Brebes kepada P.T BPD Jateng Cab. Brebes	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	100,00

5.1.4.3. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp128.162.123.044,43 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp128.146.668.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.52
 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto
 Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	166.146.668.000,00	166.162.123.044,43	100,01
2	Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	128.146.668.000,00	128.162.123.044,43	100,01

5.1.4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
181.482.467.546,57	166.136.668.498,43

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp181.482.467.546,57 dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.53
 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,14	100,12
2	Belanja dan Transfer	3.132.984.182.000,00	2.955.050.373.005,00	94,32
3	Surplus / (Defisit)	(128.146.668.000,00)	53.320.344.502,14	(41,61)
4	Pembiayaan Netto	128.146.668.000,00	128.162.123.044,43	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	181.482.467.546,57	100,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp181.482.467.546,57 tersebut sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.54
 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah Kas (Rp.)
1	Saldo Kas di Rekening Giro Bank Jateng A/C No. 1.028.00001.2	140.099.014.035,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Brebes	6.987.280,00
2	Saldo Kas di BLUD RSUD Brebes	18.201.335.143,67



No	Uraian	Jumlah Kas (Rp.)
3	Saldo Kas di BLUD RSUD Bumiayu	5.597.761.134,00
4	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Brebes	3.370.494.646,00
5	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Tanjung	7.710.211.732,00
6	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo	2.535.596.034,00
7	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan	695.619.900,00
8	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu	2.505.187.274,00
9	Saldo Dana BOS	760.260.367,90
	Jumlah	181.482.467.546,57

Penjelasan mengenai rincian SiLPA tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. SiLPA Tahun Anggaran 2020 Kab. Brebes sebesar Rp181.482.467.546,57 terdiri dari Saldo Kas di BUD (Rekening Kas Umum Daerah) sebesar Rp140.099.014.035,00, Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Brebes sebesar Rp. 6.987.280,00, Saldo Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebesar Rp40.616.205.863,67 dan SiLPA Dana BOS sebesar Rp760.260.367,90.
- b. SiLPA Tahun Anggaran 2020 di BUD sebesar Rp Rp140.099.014.035,00 terdiri dari dana terikat sebesar Rp29.532.965.752,00 dan dana bebas sebesar Rp110.566.048.283,00 dengan rincian sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.55
Rincian SiLPA di BUD Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Dana Terikat sebesar Rp. 25.532.965.752,00, dengan rincian :	29.532.965.752,00
a)	Dana Insentif Daerah (DID)	28.690.075,00
b)	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	72.759.385,00
c)	Dana DAK P2D2 Tahun 2016	81.343.000,00
d)	Dana DAK Tahun 2010 s/d 2016	18.352.924,00
e)	Dana DAK Tahun 2016 - DAK IPD 2016	19.224.515,00
f)	Dana DAK Fisik Tahun 2018	21.328.324,00
g)	Dana DAK Fisik Tahun 2019	3.786.185.128,00
h)	Dana DAK Fisik Tahun 2020	888.100.695,00
i)	Dana DAK Non Fisik Tahun 2020, dengan rincian :	22.901.258.508,00
	- BOP PAUD	1.209.900.000,00
	- BOP Kesetaraan	103.992.220,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	2.248.350.000,00
	- Tunjangan Khusus Guru	988.429.940,00
	- Tunjangan Profesi Guru	12.253.376.262,00
	- BOK Tambahan	110.271.610,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	- Bantuan Operasional Kesehatan	4.306.135.727,00
	- Bantuan Operasional KB	603.637.114,00
	- Dana Pelayanan Adminduk	1.009.463.735,00
	- Dana BOP Pariwisata	67.701.900,00
j)	Dana Bantuan Provinsi 2017	23.024.900,00
k)	Dana Bantuan Provinsi 2018	32.285.000,00
l)	Dana Bantuan Provinsi 2019	41.866.664,00
m)	Hutang Pemeliharaan Tahun 2010 – 2012	1.618.546.634,00
2)	Dana Bebas	110.566.048.283,00
	Jumlah	140.099.014.035,00

- c. SiLPA Tahun Anggaran 2020 di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebesar Rp40.616.205.863,67 terdiri dari :

Tabel 5.56
Rincian SiLPA di BLUD Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah Kas (Rp.)
1	Saldo Kas di BLUD RSUD Brebes	18.201.335.143,67
2	Saldo Kas di BLUD RSUD Bumiayu	5.597.761.134,00
3	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Brebes	3.370.494.646,00
4	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Tanjung	7.710.211.732,00
5	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo	2.535.596.034,00
6	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan	695.619.900,00
7	Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu	2.505.187.274,00
	Jumlah	40.616.205.863,67

- d. SILPA Tahun Anggaran 2020 yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp760.260.367,90.



5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2020 adalah sebagai berikut :

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Nilai SAL awal sebesar Rp166.136.668.498,43 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2019. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2020.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah seluruh SAL akhir tahun anggaran 2019. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp166.136.668.498,43.

5.2.3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp181.482.467.546,57.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp181.482.467.546,57.

**5.3. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

	<u>31 Des 2020</u>	<u>31 Des 2019</u>
Aset Lancar	291.491.082.782,18	280.099.963.050,70

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp291.491.082.782,18 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan dan Belanja Dibayar Dimuka, dengan rincian disajikan dalam tabel 5.57 berikut ini:

Tabel 5.57
Rincian Aset Lancar

ASET LANCAR	TH. 2020	TH. 2019
Kas di Kas Daerah	140.099.014.035,00	132.617.932.486,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480,00	2.961.549,00
Kas di BLUD	40.616.205.863,67	32.050.952.105,53
Kas di Bendahara FKTP	-	-
Kas di Bendahara BOS	760.260.367,90	1.490.345.267,90
Kas Lainnya	-	-
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pendapatan	73.089.630.204,82	88.379.353.684,38
Piutang Lainnya	2.886.224.402,00	2.910.368.948,00
Penyisihan Piutang	(17.689.154.238,07)	(14.394.853.231,94)
Persediaan	51.627.819.806,10	36.906.878.209,50
Beban Dibayar Dimuka	93.339.860,75	136.024.032,33
JUMLAH ASET LANCAR	291.491.082.782,18	280.099.963.050,70



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.3.1.1.1 Kas

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
KAS	181.483.222.746,57	166.162.191.408,43

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp181.483.222.746,57 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Kas Lainnya dengan rincian disajikan dalam tabel 5.58 berikut ini:

Tabel 5.58
Rincian Kas

Kas	31-Dec-20	31-Dec-19
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	140.099.014.035,00	132.617.932.486,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480,00	2.961.549,00
Kas di BLUD	40.616.205.863,67	32.050.952.105,53
Kas di Bendahara BOS	760.260.367,90	1.490.345.267,90
Kas Lainnya/Kas BOS	-	-
Jumlah	181.483.222.746,57	166.162.191.408,43

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.099.014.035. Saldo Kas tersebut dalam bentuk rekening giro di Bank Jateng Nomor 1.028.00001.2 sebagai penampungan Kas Umum dan 1.028.00404.1 sebagai penampungan Kas Non Anggaran.

Kas di Kas Daerah tahun 2020 dan 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel 5.59 berikut ini:

Tabel 5.59
Rincian Kas Daerah

Uraian		Saldo	Saldo
		per 31 Desember 2020 (Rp)	per 31 Desember 2019 (Rp)
A.			
1	Bank Jateng Rek. Giro 1.028.00001.2	140.099.014.035,00	132.595.371.125,00
Jumlah Kas Di Kas Daerah		140.099.014.035,00	132.595.371.125,00
B.	Kas Non Anggaran (Bank Jateng)		

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Uraian		Saldo	Saldo
		per 31 Desember 2020 (Rp)	per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Rek. Giro 1.028.00404.1	-	22.561.361,00
Jumlah Kas Non Anggaran		-	22.561.361,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		140.099.014.035,00	132.617.932.486,00

Penjelasan :

- Saldo Kas Umum sebesar Rp140.099.014.035,00.
- Saldo Kas Non Anggaran tahun 2020 adalah nihil.
- Jaminan Kematian dan Jaminan Kesehatan saldo tahun 2019 sebesar Rp22.561.361,00 telah disetor pada tahun 2020.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar nihil

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.742.480,00 yang merupakan Kas di tangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Brebes berupa Uang Persediaan yang belum disetor sebesar Rp6.987.280,00. Sedangkan sebesar Rp755.200,00 merupakan pajak belum disetor yaitu PPh22 sebesar Rp 80.000,00, PPh23 sebesar Rp 475.200 dan PPN sebesar Rp 200.000,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas BLUD tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp40.616.205.863,67 dan Rp32.050.952.105,53.

Tabel 5.60 menunjukkan rincian kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 dan 2019.

Tabel 5.60
Rincian Kas BLUD

Uraian	Saldo Kas BLUD 2020	Saldo Kas BLUD 2019
Puskesmas Brebes	3.370.494.646,00	6.259.003.998,00
Puskesmas Tanjung	7.710.211.732,00	8.556.757.419,00
Puskesmas Banjarharjo	2.535.596.034,00	6.577.649.618,00
Puskesmas Bumiayu	2.505.187.274,00	2.402.474.899,00
Puskesmas Paguyangan	695.619.900,00	2.443.375.017,00
RSUD BUMIAYU	5.597.761.134,00	1.038.204.040,00
RSUD BREBES	18.201.335.143,67	4.773.487.114,53
Jumlah Kas di BLUD	40.616.205.863,67	32.050.952.105,53

Kas tersebut berada pada rekening bank Kas BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas ini merupakan kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Saldo tahun 2020 sebesar Rp760.260.367,90 dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	(Rp)	(Rp)
Saldo Kas BOS 2019	1.490.345.267,90	
Pengembalian Kas BOS TA 2019 ke Pusat (-)	38.400.000,00	
Saldo Kas BOS 2019 setelah pengembalian		1.451.945.267,90
<u>Penerimaan Tahun 2020 :</u>		
Penerimaan Kas BOS Tahap I	52.203.090.000	
Penerimaan Kas BOS Tahap II	69.604.120.000	
Penerimaan Kas BOS Tahap III	52.111.020.000	
Penerimaan Kas BOS Afirmasi	9.120.000.000	
Penerimaan Kas BOS Kinerja	5.820.000.000	
Total Penerimaan Kas BOS 2020		188.858.230.000,00
<u>Pengeluaran Tahun 2020 :</u>		
SP2B Realisasi Belanja BOS Januari 2020	0,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Februari 2020	25.106.067.200,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Maret 2020	13.895.598.404,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS April 2020	13.157.317.496,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Mei 2020	15.071.254.398,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Juni 2020	26.926.738.304,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Juli 2020	13.280.263.804,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Agustus 2020	12.639.087.428,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS September 2020	2.115.782.920,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Oktober 2020	23.635.181.132,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Nopember 2020	14.297.424.353,00	
SP2B Realisasi Belanja BOS Desember 2020	<u>29.365.199.461,00</u>	
	189.489.914.900,00	
Pengembalian Kas BOS tahun 2020 ke Pemerintah Pusat	<u>60.000.000,00</u>	
Total Pengeluaran		189.549.914.900,00
SALDO KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN 2020		<u>760.260.367,90</u>

Saldo kas BOS merupakan bagian dari SILPA tahun 2020. Saldo kas tersebut berada pada SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Brebes. Pendapatan BOS dicatat sebagai Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada PPKD dan Pengeluaran Dana BOS diakui sebagai Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang Jasa BOS dan Belanja Modal BOS pada Dinas Pendidikan.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya pada tahun 2020 adalah nihil.



5.3.1.1.1.7 Setara Kas

Untuk setara kas tahun 2020 Pemerintah Kab. Brebes adalah nihil.

5.3.1.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Untuk Investasi Jangka Pendek tahun 2020 Pemerintah Kab. Brebes adalah nihil.

- **Penjelasan Perbedaan Kas Neraca 2020 dibandingkan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Sisa Kas pada Laporan Arus Kas (LAK)**

Saldo kas menurut neraca dibandingkan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menurut Laporan Realisasi Anggaran terdapat selisih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.61

Rincian Kas menurut Neraca dan SILPA di LRA

URAIAN	SALDO NERACA	SILPA	SELISIH	KETERANGAN
Kas di Kas Daerah	140.099.014.035,00			Selisih merupakan pajak belum disetor pada Kelurahan Brebes
Kas di Bendahara Penerimaan	-			
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480,00			
Kas di BLUD	40.616.205.863,67			
Kas Lainnya/Kas BOS	760.260.367,90			
JUMLAH	181.483.222.746,57	181.482.467.546,57	755.200,00	

Sedangkan saldo kas menurut neraca dibandingkan dengan Kas menurut Laporan Arus Kas (LAK) terdapat selisih dengan rincian disajikan dalam tabel 5.62 berikut ini:

Tabel 5.62

Rincian Kas menurut Neraca dan LAK

Uraian	Saldo Neraca	Kas LAK	SELISIH	KETERANGAN
Kas di Kas Daerah	140.099.014.035,00	140.099.014.035,00	-	Selisih merupakan Kas yang dibatasi penggunaannya pada BUD dan BLUD RSUD Brebes
Kas di BUD (Kas yang dibatasi penggunaannya)		3.615.801.804,00	3.615.801.804,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480,00	7.742.480,00	-	
Kas di BLUD	40.616.205.863,67	40.616.205.863,67	-	
Kas di BLUD (Kas yang dibatasi penggunaannya)		213.882.922,00	213.882.922,00	
Kas Lainnya/Kas BOS	760.260.367,90	760.260.367,90	-	
JUMLAH	181.483.222.746,57	185.312.907.472,57	3.829.684.726,00	

5.3.1.1.2 Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :



	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
PIUTANG	75.975.854.606,82	91.289.722.632,38

Dengan rincian disajikan dalam tabel 5.63 berikut ini:

Tabel 5.63
Rincian Piutang

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2020	Saldo Piutang 2019
Piutang Pendapatan	73.089.630.204,82	88.379.353.684,38
Piutang Lainnya	2.886.224.402,00	2.910.368.948,00
	75.975.854.606,82	91.289.722.632,38

Rincian Piutang Pendapatan disajikan dalam tabel 5.64 berikut ini:

Tabel 5.64
Rincian Piutang Pendapatan

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2020	Saldo Piutang 2019
Piutang Pajak	26.172.664.985,50	19.850.116.868,50
Piutang Retribusi	385.018.104,00	442.393.415,00
Piutang Pendapatan Non Pajak/retribusi	34.046.295.592,32	21.552.691.504,88
Piutang BLUD	12.485.651.523,00	46.534.151.896,00
Jumlah	73.089.630.204,82	88.379.353.684,38

Rincian Piutang Lainnya disajikan dalam tabel 5.65 berikut ini:

Tabel 5.65
Rincian Piutang Lainnya

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2020	Saldo Piutang 2019
Bagian Lancar TP TGR	1.310.000,00	-
Piutang Lainnya (ex-Dana Bergulir/Pokok)	2.884.914.402,00	2.910.368.948,00
Jumlah	2.886.224.402,00	2.910.368.948,00

5.3.1.1.2.1 Piutang Pendapatan

(a) Piutang pajak dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.66 berikut ini:

Tabel 5.66
Rincian Piutang Pajak

Uraian Piutang	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th 2020
Piutang Pajak					
Piutang BPHTB	BPPKAD	7.554.109,00			7.554.109,00
Piutang Pajak Reklame	BPPKAD	161.199.100,00	105.225.080,00	(27.574.000,00)	238.850.180,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Uraian Piutang	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th 2020
Piutang Pajak PBB-P2	BPPKAD	19.568.757.366,00	8.628.944.173,00	(2.364.242.869,00)	25.833.458.670,00
Piutang Pajak ABT	BPPKAD	112.606.293,50	47.439.800,00	(67.244.067,00)	92.802.026,50
JUMLAH		19.850.116.868,50	8.781.609.053,00	(2.459.060.936,00)	26.172.664.985,50

Penjelasan :

- Piutang BPHTB merupakan penyerahan dari KPP Pratama berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-13/WPJ.10/KP.0101/2010.
- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp238.850.180,00, dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.67

Rincian Piutang Pajak Reklame

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2020
Pajak Reklame					
Tahun Pajak 2014	21.625.000,00	-	-	-	21.625.000,00
Tahun Pajak 2015	10.815.600,00	-	-	-	10.815.600,00
Tahun Pajak 2016	15.188.000,00	-	-	-	15.188.000,00
Tahun Pajak 2017	37.500.000,00	-	(7.924.500,00)	-	29.575.500,00
Tahun Pajak 2018	9.276.000,00	-	(270.000,00)	-	9.006.000,00
Tahun Pajak 2019	66.794.500,00	-	-	(19.379.500,00)	47.415.000,00
Tahun Pajak 2020		105.225.080,00	-	-	105.225.080,00
JUMLAH	161.199.100,00	105.225.080,00	(8.194.500,00)	(19.379.500,00)	238.850.180,00

Penjelasan :

- Penambahan sebesar Rp105.225.080,00 merupakan tagihan pajak reklame th 2020 yang belum diterima pembayarannya.
- Koreksi sebesar Rp8.194.500,00 merupakan pengurangan piutang karena koreksi salah catat setoran pajak tahun 2017-2018 hasil konfirmasi dengan pihak ke-3.
- Setoran sebesar Rp 19.397.500,00 merupakan penerimaan piutang tahun 2019
- Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp25.833.458.670,00 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.68

Rincian Piutang Pajak PBB-P2

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2020
Tahun Pajak 2010-2013 (Ex-KPP)	4.534.775.070,00	-	(2.220.762,00)	(14.963.955,00)	4.517.590.353,00
Tahun Pajak 2014-2019	15.033.982.296,00	8.628.944.173,00	(85.807.362,00)	(2.276.214.275,00)	21.315.868.317,00
JUMLAH PIUTANG PBB-P2	19.568.757.366,00	8.628.944.173,00	(88.028.124,00)	(2.276.214.745,00)	25.833.458.670,00



Penjelasan :

- a. Piutang Pajak Ex-pelimpahan Kantor Pajak Pratama Tegal dapat dijelaskan bahwa nilai piutang bruto (sebelum penyisihan) sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima No. BA-03/WPJ.10/KP.01/2014 yang telah disesuaikan dengan Berita Acara Nomor. BA-11/WJP.10/KP.01/2015 tentang Pembetulan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-03/WPJ.10/KP.01/2014 tanggal 02 Januari 2014, sebesar Rp 8.655.136.327,00.
- b. Sampai dengan tahun 2020 atas saldo piutang tersebut telah diupdate melalui kegiatan cleansing secara bertahap untuk menyesuaikan data keuangan sesuai objek pajak dengan data aplikasi SISMIOP. Kegiatan cleansing tersebut mengakibatkan perubahan catatan piutang sebagaimana berita acara tersebut, dikurangi dengan setoran-setoran yang diterima selama tahun 2014 hingga tahun 2020.
- c. Piutang PBB Ex-pelimpahan tersebut yang merupakan pajak tahun 2010 s.d 2013 per 31 Desember 2020 bersaldo sebesar Rp4.517.590.353,00. Dengan rincian disajikan dalam tabel 5.69 berikut ini :

Tabel 5.69

Rincian Piutang PBB Pelimpahan KPP Pratama Tegal

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2020
PIUTANG PBB-P2 LIMPAHAN KPP PRATAMA TEGAL					
Tahun Pajak 2010	34.077.376,00	-	-	-	34.077.376,00
Tahun Pajak 2011	657.427.971,00	-	-	(2.356.992,00)	655.070.979,00
Tahun Pajak 2012	1.445.356.007,00	-	-	(1.763.510,00)	1.443.592.497,00
Tahun Pajak 2013	2.397.913.716,00	-	(2.220.762,00)	(10.843.453,00)	2.384.849.501,00
JUMLAH	4.534.775.070,00	-	(2.220.762,00)	(14.963.955,00)	4.517.590.353,00

Penjelasan :

- a. Koreksi sebesar Rp2.220.762,00 merupakan pengurangan piutang karena koreksi nilai penetapan pajak.
- b. Setoran sebesar Rp14.963.955,00 merupakan penerimaan piutang tahun 2011, 2012 dan 2013.

Saldo Piutang PBB Tahun 2014-2020 (penetapan Kabupaten Brebes) sebesar Rp21.315.868.317,00. Dengan rincian disajikan dalam tabel 5.70 berikut ini :

Tabel 5.70

Rincian Putang PBB Penetapan Kab. Brebes

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2020
PIUTANG PBB-P2 NON LIMPAHAN KPP PRATAMA					
Tahun Pajak 2014	1.230.554.799,00	-	(10.389.610,00)	(31.228.822,00)	1.188.936.367,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2020
Tahun Pajak 2015	1.635.563.199,00	-	(11.793.729,00)	(44.740.624,00)	1.579.028.846,00
Tahun Pajak 2016	1.960.927.599,00	-	(16.441.903,00)	(74.538.062,00)	1.869.947.634,00
Tahun Pajak 2017	1.357.871.829,00	-	(13.722.368,00)	(52.593.443,00)	1.291.556.018,00
Tahun Pajak 2018	2.863.815.086,00	-	(28.987.378,00)	(173.932.437,00)	2.660.895.271,00
Tahun Pajak 2019	5.985.249.784,00	-	(4.472.374,00)	(1.884.217.402,00)	4.096.560.008,00
Tahun Pajak 2020		8.628.944.173,00	-	-	8.628.944.173,00
JUMLAH	15.033.982.296,00	8.628.944.173,00	(85.807.362,00)	(2.261.250.790,00)	21.315.868.317,00

Penjelasan :

- Penambahan sebesar Rp8.628.944.173,00 merupakan pajak tahun 2020 yang belum diterima pembayarannya.
- Koreksi sebesar Rp85.807.362,00 merupakan pengurangan piutang karena koreksi nilai penetapan pajak.
- Setoran sebesar Rp2.261.250.790,00 merupakan penerimaan pajak tahun 2014-2019.

Proses *cleansing* atas perbedaan saldo pajak menurut SISMIOP dan menurut pencatatannya masih berlangsung sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini.

Piutang Pajak ABT tahun 2020 sebesar Rp92.802.026,50 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.71

Rincian Pajak Air Bawah Tanah (ABT)

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2020
Tahun Pajak 2017	9.428.782,50		(2.778.942,00)		6.649.840,50
Tahun Pajak 2018	38.363.755,00		(8.881.699,00)		29.482.056,00
Tahun Pajak 2019	64.813.756,00			(55.583.426,00)	9.230.330,00
Tahun Pajak 2020		47.439.800,00			47.439.800,00
JUMLAH	112.606.293,50	47.439.800,00	(11.660.641,00)	(55.583.426,00)	92.802.026,50

Penjelasan :

Saldo tahun 2019 sebesar Rp112.606.293,50, mendapat penambahan tahun 2020 sebesar Rp47.439.800,00, koreksi kurang sebesar Rp11.660.641,00 merupakan koreksi salah catat hasil konfirmasi dengan pihak ke-3, penerimaan/setoran piutang 2019 sebesar Rp55.583.426,00, sehingga saldo 2020 sebesar Rp92.802.026,50.

- Piutang Retribusi sebesar Rp385.018.104,00 dengan rincian disajikan dalam tabel 5.72 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.72
 Rincian Piutang Retribusi

URAIAN	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2020
RET. IMB	DPMPSTP	29.666.393,00	-	(29.666.393,00)		-
RET. REKLAME	DPMPSTP	7.350.000,00	-	(7.350.000,00)		-
RET. IJIN GANGGUAN (HO)	DPMPSTP	38.786.450,00	-	(38.786.450,00)		-
RET. IJIN TRAYEK	DPMPSTP	450.000,00	-	(450.000,00)		-
JUMLAH 1		76.252.843,00	-	(76.252.843,00)	-	-
RET. SEWA TEMPAT DI OW	DINBUDPAR	7.000.000,00	153.000.000,00	(7.000.000,00)	-	153.000.000,00
JUMLAH 2		7.000.000,00	153.000.000,00	-	(7.000.000,00)	153.000.000,00
RET. SEWA TANAH	BPPKAD	105.786.572,00	56.963.000,00	-	(41.179.468,00)	121.570.104,00
RET. MENARA	DINKOMINFO	253.354.000,00	22.688.000,00	(56.632.000,00)	(108.962.000,00)	110.448.000,00
JUMLAH 3		359.140.572,00	79.651.000,00	(56.632.000,00)	(150.141.468,00)	232.018.104,00
TOTAL		442.393.415,00	232.651.000,00	(139.884.843,00)	(150.141.468,00)	385.018.104,00

Penjelasan :

- Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Reklame, Ijin gangguan (HO) pada DPMPSTP merupakan ijin yang telah diterbitkan namun belum diambil dan oleh pihak yang mengajukan sehingga belum diterima pembayaran retribusinya. Atas saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp76.252.843,00 dilakukan koreksi karena ijin diberikan setelah pembayaran diterima sehingga tidak memenuhi ketentuan Piutang. Dengan demikian saldo tahun 2020 nihil.
- Piutang Retribusi Sewa Tempat tahun 2020 pada Dinbudpar merupakan sewa loos/kios obyek wisata Waduk Malahayu a.n Pokdarwis Geger Halang sebesar Rp153.000.000,00. Sedangkan piutang saldo tahun 2019 telah dikoreksi karena salah catat.
- Piutang Retribusi Sewa Tanah pada BPPKAD merupakan tagihan kepada penyewa perorangan yang memanfaatkan tanah ex-bengkok dan tanah persawahan milik Pemkab Brebes namun belum diterima pembayarannya. Piutang saldo tahun 2019 sebesar Rp105.786.572,00 diterima pembayaran sebesar Rp41.179.468,00 dan penambahan piutang tahun 2020 sebesar Rp56.963.000,00, sehingga saldo tahun 2020 sebesar Rp121.570.104,00.
- Piutang retribusi menara pada Dinkominfo merupakan retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kab. Brebes. Saldo tahun 2019 sebesar Rp253.354.000,00, penambahan piutang tahun 2020 sebesar Rp22.688.000,00. Koreksi karena salah pencatatan (hasil konfirmasi dengan pihak ke-3) sebesar Rp56.632.000,00. Setoran selama tahun 2020 sebesar Rp108.962.000,00, sehingga saldo 2020 sebesar Rp110.448.000,00.



(c) Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi

Piutang ini sebesar Rp34.046.295.592,32 dijelaskan sebagai berikut :

1. Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD sebesar Rp29.046.233.988,88
2. Piutang Pendapatan Non Pajak/retribusi pada SKPD sebesar Rp5.000.061.603,44

Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD dijelaskan pada tabel 5.73 berikut ini :

Tabel 5.73

Rincian Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD

Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Setoran	Saldo Th 2020
Piutang Temuan BPK-RI Audit LKPD 2011 dan Audit Belanja 2012	PPKD	236.656.870,88			236.656.870,88
Kurang Salur Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	PPKD	4.668.430.213,00	20.268.279.105,00	(4.668.430.213,00)	20.268.279.105,00
Pencatatan Kurang Bayar DBH SDA Th 2019 PMK 20/PMK.07/2020, PMK 113/PMK.07/2020	PPKD	870.798.957,00	757.253.099,00	(850.066.379,00)	777.985.677,00
Pencatatan Kurang Bayar DBH Pajak Th 2019 PMK 20/PMK.07/2020, PMK 113/PMK.07/2020	PPKD	10.938.552.564,00	9.178.408.843,00	(12.353.649.071,00)	7.763.312.336,00
Piutang Bagian Laba atas PMPD berupa Deviden BKK Banjarharjo dan Bank Brebes	PPKD	1.215.472.824,00		(1.215.472.824,00)	-
JUMLAH		17.929.911.428,88	30.203.941.047,00	(19.087.618.487,00)	29.046.233.988,88

Penjelasan :

Piutang sebesar Rp236.656.870,88 merupakan:

- a. Piutang merupakan piutang kepada penyedia jasa kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2011 sebesar Rp91.730.274,00 berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan Perpustakaan SD Negeri pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 88.491.253,73 dan kekurangan volume pekerjaan konstruksi IAP Ds Pasarbarang pada DPKP sebesar Rp 3.239.020,00.
- b. Sedangkan Piutang sebesar Rp144.926.597,15 merupakan piutang atas Belanja Tahun Anggaran 2012 berupa keterlambatan pekerjaan pengadaan sarana TIK sebesar Rp 108.447.880,00, keterlambatan pengadaan buku sebesar Rp 978.017,15, kelebihan pembayaran pada SET DPRD atas perjalanan dinas sebesar Rp 6.327.700,00, kelebihan belanja plakat sebesar Rp11.950.000,00 dan keterlambatan pengadaan hibah barang pada Dinnak & Keswan sebesar Rp 17.223.000,00.

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp20.268.279.105,00 merupakan kurang salur pajak provinsi dengan rincian dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 5.74

Rincian Piutang KB DBH Pajak Provinsi

NO	URAIAN	Th 2020 (Rp)
1	PKB	7.895.618.139,00
2	BBNKB	4.121.496.489,00
3	PBBKB	8.230.895.447,00
4	PAP	20.269.030,00
	JUMLAH	20.268.279.105

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2019 telah seluruhnya telah diterima pembayarannya.

Piutang Kurang Bayar DBH SDA tahun 2019 ditetapkan dengan PMK nomor 113/PMK.07/2020. Sedangkan Piutang Kurang Bayar DBH SDA tahun 2020 belum ditetapkan lebih lanjut. Saldo tahun 2020 sebesar Rp777.985.677,00. Adapun mutasi DBH SDA selama tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.75

Mutasi Piutang KB DBH SDA Pusat Menurut PMK 113/PMK.07/2020

No	ALOKASI TH	Saldo Piutang Th 2019	Penambahan Th 2020	Pengurangan Th 2020	Saldo Piutang Th 2020
DBH SDA					
I	DBH SDA Kehutanan	387.500.300,00	158.735.781,00	229.826.268,00	316.409.813,00
1	PSDH	387.500.300,00	158.735.781,00	229.826.268,00	316.409.813,00
2	DANA REBOISASI	-	-	-	-
II	DBH SDA Mineral Batubara	448.098,00	712.091,00	712.094,00	448.095,00
1	Iuran Tetap	-	-	-	-
2	Royalti	448.098,00	712.091,00	712.094,00	448.095,00
III	DBH SDA Perikanan	174.305.192,00	229.300.150,00	3.677.289,00	399.928.053,00
IV	DBH SDA Panas Bumi	-	24.323.074,00	-	24.323.074,00
V	DBH SDA Minyak Bumi	308.545.367,00	344.182.003,00	615.850.728,00	36.876.642,00
1	Minyak Bumi (15%)	51.467.510,00	-	30.315.903,00	21.151.607,00
2	Minyak Bumi (0,5%)	1.715.648,00	-	1.010.582,00	705.066,00
3	Gas Bumi (30%)	251.175.825,00	338.539.846,00	574.941.937,00	14.773.734,00
4	Gas Bumi (0,5%)	4.186.384,00	5.642.157,00	9.582.306,00	246.235,00
	JUMLAH DBH BUKAN PAJAK	870.798.957,00	757.253.099,00	850.066.379,00	777.985.677,00

Piutang Kurang Bayar DBH Pajak tahun 2019 ditetapkan dengan PMK nomor 113/PMK.07/2020. Sedangkan Piutang Kurang Bayar DBH Pajak tahun 2020 belum ditetapkan lebih lanjut. Saldo tahun 2020 sebesar Rp7.763.312,336,00. Adapun mutasi DBH Pajak selama tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.76
 Rincian Piutang KB DBH Pajak Pusat Menurut PMK 113/PMK.07/2020

No	ALOKASI TH	Saldo Piutang Th 2019	Penambahan Th 2020	Pengurangan Th 2020	Saldo Piutang Th 2020
DBH PAJAK					
I	DBH PBB	6.332.094.920,00	3.770.030.076,00	3.930.846.851,00	6.171.278.145,00
1	DBH PBB TH 2018	3.695.533.325,00	-	3.695.533.325,00	-
a	Bag Daerah Th 2018)	2.993.486.807,00	-	2.993.486.807,00	-
b	B. Pemungutan	116.072.184,00	-	116.072.184,00	-
c	Bagi Rata	585.974.334,00	-	585.974.334,00	-
d	Insentif PBB				
2	DBH PBB TH 2019	2.636.561.595,00	3.770.030.076,00	235.313.526,00	6.171.278.145,00
a	Bag Daerah Th 2019	2.350.589.508,00	2.519.762.676,00	235.313.526,00	4.635.038.658,00
b	B. Pemungutan	89.331.152,00	96.613.783,00	-	185.944.935,00
c	Bagi Rata	196.640.935,00	-	-	196.640.935,00
d	Insentif PBB		1.153.653.617,00	-	1.153.653.617,00
II	DBH PPH 21	4.329.364.103,00	4.411.732.374,00	7.397.653.982,00	1.343.442.495,00
III	DBH PPH 25/29	77.125.347,00	748.054.697,00	825.180.044,00	-
IV	DBHCHT	199.968.194,00	248.591.696,00	199.968.194,00	248.591.696,00
	JUMLAH DBH PAJAK	10.938.552.564,00	9.178.408.843,00	12.353.649.071,00	7.763.312.336,00

Piutang bagian laba/deviden atas PMPD kepada BUMD tahun 2019 sebesar Rp1.215.472.824,00 telah diterima, sedangkan piutang bagian laba/deviden tahun 2020 belum dicatat karena proses audit Kantor Akuntan Publik belum selesai.

Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada SKPD dijelaskan pada tabel 5.77 berikut ini :

Tabel 5.77
 Rincian Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada SKPD

Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2020
Denda Pajak PBB-P2 Tahun 2014-2018	BPPKAD	3.291.519.376,00	1.804.368.051,40	(216.195.815,96)	(210.557.408,00)	4.669.134.203,44
Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 3 th 2013 a.n CV Graha	DPU	87.455.250,00				87.455.250,00
Bunga/Jasa Kemitraan Bawang Merah Organik	DPKP	9.000.000,00				9.000.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Fasilitas Agribisnis Kentang	DPKP	6.600.000,00				6.600.000,00
Bunga pinjaman ex-bergulir keg. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Sarprodi) Th 2008	Dinas Pertanian KP	3.070.000,00				3.070.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Koperasi	DINKOP	151.978.950,00				151.978.950,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2020
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Modal/Mesin	DINPERINDAG	73.156.500,00			(333.300,00)	72.823.200,00
JUMLAH		3.622.780.076,00	1.804.368.051,40	(216.195.815,96)	(210.890.708,00)	5.000.061.603,44

Piutang Denda Pajak PBB sebesar Rp4.669.134.203,44 merupakan piutang kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 tahun pajak 2014 sampai tahun 2019, dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.78
Rincian Mutasi Piutang Denda PBB-P2

Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2020
Denda Pajak PBB-P2 Th 2014	BPPKAD	366.714.439,40	2.452.454,40	(11.337.162,70)	(1.148.821,00)	356.680.910,10
Denda Pajak PBB-P2 Th 2015	BPPKAD	487.795.892,90	2.873.690,10	(12.557.152,20)	(4.403.777,00)	473.708.653,80
Denda Pajak PBB-P2 Th 2016	BPPKAD	584.010.761,90	4.268.142,30	(22.224.895,00)	(5.069.719,00)	560.984.290,20
Denda Pajak PBB-P2 Th 2017	BPPKAD	403.245.144,10	4.116.710,40	(11.531.912,10)	(8.363.137,00)	387.466.805,40
Denda Pajak PBB-P2 Th 2018	BPPKAD	851.228.039,70	7.917.619,80	(34.195.356,20)	(26.681.722,00)	798.268.581,30
Denda Pajak PBB-P2 Th 2019	BPPKAD	598.525.098,00	919.845.017,40	(124.349.337,76)	(164.890.232,00)	1.229.130.545,64
Denda Pajak PBB-P2 Th 2020	BPPKAD		862.894.417,00	-	-	862.894.417,00
Jumlah		3.291.519.376,00	1.804.368.051,40	(216.195.815,96)	(210.557.408,00)	4.669.134.203,44

Penjelasan :

- Ketentuan pengenaan denda adalah 2% per bulan dari nilai sisa piutang pajak dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Adapun tanggal jatuh tempo pajak PBB-P2 tahun 2014-2020 adalah 30 Agustus 2014, 31 Agustus 2015, dan 30 September 2016, 31 Agustus 2017, 31 Agustus 2018, 31 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2020. Perhitungan penambahan, koreksi serta setoran denda secara otomatis dihasilkan dari aplikasi. Koreksi sebesar Rp216.195.815,96 merupakan koreksi penetapan PBB sehingga berpengaruh pula pada perhitungan dendanya.
- Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan pada DPU tahun 2013 sebesar Rp 87.455.250,00 merupakan jaminan pelaksanaan pekerjaan paket 3 (2014) putus kontrak a.n CV Graha dan sampai dengan tahun 2020 belum ada penerimaan setoran.
- Piutang Bunga/Jasa Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Pertanian & KP, Dinas Koperasi dan Dinperinaker merupakan piutang bunga/jasa ex-dana bergulir yang sebelumnya merupakan Investasi



Non Permanen yang telah dipindahbukukan ke Piutang karena macet dan telah dihentikan penyalurannya.

Piutang BLUD th 2020 sebesar Rp12.485.651.523,00 dengan rincian disajikan dalam tabel 5.79 berikut ini:

Tabel 5.79
Rincian Piutang BLUD BPJS-SKTM-COVID-19

Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th 2020
	DINAS KESEHATAN :				-
Pitang BPJS Th 2018	UPTD PUSKESMAS BREBES	10.095.000,00		(10.095.000,00)	-
Pitang BPJS Th 2019		278.700.000,00		(278.700.000,00)	-
Pitang BPJS Th 2020			217.825.000,00	(700.000,00)	217.125.000,00
Pitang BPJS Th 2019	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	627.993.000,00		(627.993.000,00)	-
Pitang BPJS Th 2020			602.999.000,00	(8.948.000,00)	594.051.000,00
Pitang BPJS Th 2015	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	10.800.000,00			10.800.000,00
Pitang BPJS Th 2016		4.848.000,00			4.848.000,00
Pitang BPJS Th 2017		188.567.500,00			188.567.500,00
Pitang BPJS Th 2018		20.473.000,00			20.473.000,00
Pitang BPJS Th 2019		1.350.992.000,00		(1.344.291.000,00)	6.701.000,00
Pitang BPJS Th 2020			1.068.713.800,00	(18.319.800,00)	1.050.394.000,00
Pitang BPJS Th 2017	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	110.929.000,00		(110.929.000,00)	-
Pitang BPJS Th 2018		132.491.000,00		(113.566.000,00)	18.925.000,00
Pitang BPJS Th 2019		356.200.000,00		(350.700.000,00)	5.500.000,00
Pitang BPJS Th 2020			185.710.000,00	(3.300.000,00)	182.410.000,00
Pitang BPJS Th 2019	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	277.113.000,00		(277.113.000,00)	-
Pitang BPJS Th 2020			268.598.000,00	(870.000,00)	267.728.000,00
Pitang BPJS + SKTM					
Piutang BPJS th 2019	RSUD BREBES	40.002.352.796,00	322.655.660,00	(40.325.008.456,00)	-
Eliminasi Piutang SKTM 2019			4.332.142.468,00	(4.332.142.468,00)	-
Piutang BPJS th 2020			9.353.480.923,00		9.353.480.923,00
Piutang COVID-19 th 2020			187.500.000,00		187.500.000,00
Eliminasi Piutang SKTM 2020			3.068.812.645,00	(3.068.812.645,00)	-
Piutang BPJS th 2019	RSUD BUMIAYU	3.162.597.600,00		(3.162.597.600,00)	-
Eliminasi Piutang			123.522.838,00	(123.522.838,00)	



Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th 2020
SKTM 2019					-
Piutang BPJS th 2020			377.148.100,00	-	377.148.100,00
Eliminasi Piutang SKTM 2020			162.776.805,00	(162.776.805,00)	-
JUMLAH		46.534.151.896,00	20.271.885.239,00	(54.320.385.612,00)	12.485.651.523,00

Piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Piutang BLUD Puskesmas Brebes

- Sebesar Rp10.095.000,00 merupakan koreksi kurang pencatatan piutang BPJS yang telah kadaluarsa tahun 2018
- Sebesar Rp287.700.000,00 merupakan pembayaran atas piutang BPJS tahun 2019 sebesar Rp278.400.000,00 dan koreksi piutang BPJS tahun 2018 sebesar Rp300.000,00
- Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2020 sebesar Rp217.825.000,00
- Piutang BPJS tidak lolos verifikasi sebesar Rp700.000,00

b. Piutang BLUD Puskesmas Tanjung :

- Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2019 sebesar Rp627.993.000,00
- Dicatat piutang atas pelayanan tahun 2020 sebesar Rp602.999.000,00
- Piutang BPJS tidak lolos verifikasi sebesar Rp8.948.000,00

c. Piutang BLUD Puskesmas Banjarharjo :

- Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2019 sebesar Rp1.344.291.000,00
- Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2020 sebesar Rp1.068.713.800,00
- Piutang BPJS tidak lolos verifikasi sebesar Rp18.319.800,00

d. Piutang BLUD Puskesmas Paguyangan :

- Diterima pembayaran atas piutang tahun BPJS 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp110.929.000,00, Rp113.566.000,00 dan Rp350.700.000,00
- Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2020 sebesar Rp356.200.000,00
- Piutang BPJS tidak lolos verifikasi sebesar Rp3.300.000,00

e. Piutang BLUD Puskesmas Bumiayu :

- Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2020 sebesar Rp277.113.000,00
- Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2020 sebesar Rp268.598.000,00
- Piutang BPJS tidak lolos verifikasi sebesar Rp870.000,00

f. Piutang RSUD Brebes:

- Koreksi salah catat saldo piutang BPJS tahun 2019 sebesar Rp322.655.660,00
- Koreksi pencatatan kembali piutang SKTM tahun 2019 sebesar Rp4.332.142.468,00



- Diterima pembayaran atas piutang SKTM tahun 2019 sebesar Rp4.332.142.468,00.
 - Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2019 sebesar Rp40.325.008.426,00.
 - Dicatat piutang atas pelayanan tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. BPJS Rp9.353.480.923,00
 - b. COVID-19 Rp187.500.000,00
 - c. SKTM Rp3.068.812.645,00
 - Dieliminasi kembali piutang pelayanan SKTM/Jamkesda tahun 2020 sebesar Rp3.068.812.645,00. Piutang tersebut merupakan klaim kepada Pemkab Brebes dhi. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu. Piutang ini telah dieliminasi terhadap Hutang Beban pada Dinas Kesehatan sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.
- g. Piutang RSUD Bumiayu:
- Koreksi pencatatan kembali piutang SKTM tahun 2019 sebesar Rp123.522.838,00
 - Diterima pembayaran atas piutang SKTM tahun 2019 sebesar Rp123.522.838,00.
 - Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2019 sebesar Rp3.162.597.600,00.
 - Dicatat piutang atas pelayanan tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. BPJS Rp377.148.100,00
 - b. SKTM Rp162.776.805,00
 - Dieliminasi kembali piutang pelayanan SKTM/Jamkesda tahun 2020 sebesar Rp162.776.805,00. Piutang tersebut merupakan klaim kepada Pemkab Brebes dhi. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu. Piutang ini telah dieliminasi terhadap Hutang Beban pada Dinas Kesehatan sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2.2 Piutang Lainnya

Piutang Lain-lain terdiri dari Piutang TP-TGR dan Piutang Ex-Dana Bergulir. Adapun rincian Piutang TP-TGR disajikan dalam tabel 5.80 berikut ini :

Tabel 5.80
Rincian Piutang TP-TGR

Nama Debitur	Bag Lancar TGR Th 2019	Penambahan	Pengurangan	Bag Lancar TGR Th 2020	Keterangan	
					SK Penetapan	Jangka Waktu
TGR a.n Sodikun (PPKD)		2.560.000,00	(1.250.000,00)	1.310.000,00	SK Bupati 970/522/2020	1 tahun
		2.560.000,00	(1.250.000,00)	1.310.000,00		



Penjelasan :

Piutang TP-TGR a.n Sodikun SH (pensiunan DPKP) merupakan TP-TGR yang ditetapkan pada tahun 2020 berupa ganti kerugian atas kehilangan sepeda motor Honda tahun 1999 Nopol G9860G sebesar Rp2.560.000,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor 970/522/2020. Selama tahun 2020 diterima setoran sebesar Rp1.250.000,00 sehingga saldo 2020 sebesar Rp1.310.000,00.

Sedangkan rincian Piutang Ex-Dana Bergulir disajikan dalam tabel 5.81 berikut ini :

Tabel 5.81
Rincian Piutang Ex-Dana Bergulir

Uraian	SKPD	Saldo Th 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th 2020
Kemitraan Bawang Merah Organik	DPKP	124.000.000,00			124.000.000,00
Perbengkelan Alsintan	DPKP	-	-	-	-
Pinjaman Modal Alsintan th2002-2007	DPKP	253.603.387,00	-	(8.772.728,00)	244.830.659,00
Pinjaman Modal Alsintan th2002-2008	DPKP	72.073.564,00	-	(727.273,00)	71.346.291,00
Pinjaman Penangkar Benih Bawang Merah	DPKP	-	-	-	-
Pinjaman Fasilitas Agribisnis Kentang	DPKP	-	-	-	-
JUMLAH I		449.676.951,00	-	(9.500.001,00)	440.176.950,00
Pokok Pinjaman Bergulir Koperasi	DINKOP	1.393.107.599,00	-	(11.500.000,00)	1.381.607.599,00
Pokok Pinjaman Bergulir Modal/Mesin	DINPERINAKER	831.168.307,00	-	(4.454.545,00)	826.713.762,00
Pokok Pinjaman Bergulir Kelompok Ternak	DINNAK	236.416.091,00	-	-	236.416.091,00
JUMLAH II		2.460.691.997,00	-	(15.954.545,00)	2.444.737.452,00
TOTAL PIUTANG EX-DANA BERGULIR		2.910.368.948,00	-	(25.454.546,00)	2.884.914.402,00

Penjelasan :

Pokok Pinjaman Bergulir merupakan pinjaman modal atau pinjaman alat/mesin kepada Kelompok Tani/Petani, Peternak, Badan Usaha Koperasi maupun Perorangan sejak tahun 2000 hingga tahun 2008. Piutang tersebut berasal dari reklasifikasi investasi non permanen lainnya ex-dana bergulir pada Dinas Pertanian KP, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinperinaker dan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar. Sedangkan **bunga pinjaman bergulir** dicatat pada Piutang Pendapatan. Selama tahun 2020 terdapat penerimaan



pembayaran pada DPKP sebesar Rp9.500.001,00, pada Dinkop Umdag sebesar Rp11.500.000,00 dan pada Dinperinaker sebesar Rp4.454.545,00.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020</u>	<u>31 Des 2019</u>
PENYISIHAN PIUTANG	17.689.154.238,07	14.394.853.231,94

Rincian penyisihan masing-masing akun piutang tahun 2020 dibagi menjadi Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.82
Penyisihan Piutang

Uraian Piutang	Penyisihan th 2020	Penyisihan th 2019
Piutang Pendapatan	14.804.233.286,07	11.484.484.283,94
Piutang Lainnya	2.884.920.952,00	2.910.368.948,00
	17.689.154.238,07	14.394.853.231,94

1. Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.83
Penyisihan Piutang Pendapatan

URAIAN	Penyisihan th 2020	Penyisihan th 2019
Piutang Pajak	9.660.890.412,52	8.037.452.683,50
Piutang Retribusi	56.039.665,40	57.918.021,83
Piutang Pendapatan Non Pajak/retribusi	4.801.019.423,03	2.983.616.611,63
Piutang BLUD	286.283.785,12	405.496.966,99
Jumlah	14.804.233.286,07	11.484.484.283,94

2. Penyisihan Piutang Lainnya dijelaskan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 5.84
Penyisihan Piutang Lainnya

URAIAN	Penyisihan th 2020	Penyisihan th 2019
Bagian Lancar TP TGR	6.550,00	-
Piutang Lainnya (ex-Dana Bergulir/Pokok)	2.884.914.402,00	2.910.368.948,00
Jumlah	2.884.920.952,00	2.910.368.948,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1) Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 5.85
 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

URAIAN	Penyisihan th 2020	Penyisihan th 2019
Piutang Pajak		
Piutang BPHTB Kurang Bayar	7.554.109,00	7.554.109,00
Piutang Pajak Reklame	61.062.575,40	33.563.172,50
Piutang Pajak PBB-P2	9.585.197.640,77	7.991.941.339,97
Piutang Pajak ABT	7.076.087,35	4.394.062,03
JUMLAH	9.660.890.412,52	8.037.452.683,50

Lebih lanjut mengenai piutang ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyisihan Piutang Pajak BPHTB

Tabel 5.86
 Penyisihan Pajak BPHTB

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Piutang Pajak				
Piutang BPHTB Kurang Bayar	7.554.109,00	>6 TH	100%	7.554.109,00

b. Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Tabel 5.87
 Penyisihan Piutang Pajak Reklame

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Pajak Reklame				
Tahun Pajak 2014	21.625.000,00	6 TH	100%	21.625.000,00
Tahun Pajak 2015	10.815.600,00	5 TH	100%	10.815.600,00
Tahun Pajak 2016	15.188.000,00	4 TH	50%	7.594.000,00
Tahun Pajak 2017	29.575.500,00	>3 TH	50%	14.787.750,00
Tahun Pajak 2018	9.006.000,00	>3 TH	50%	90.000,00
		1-3 TH	10%	882.600,00
Tahun Pajak 2019	47.415.000,00	1-3 TH	10%	4.741.500,00
Tahun Pajak 2020	105.225.080,00	<1 TH	0,5%	526.125,40
JUMLAH	238.850.180,00			61.062.575,40



c. Penyisihan Piutang Pajak ABT

Tabel 5.88

Penyisihan Piutang Pajak ABT

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Pajak ABT				
Tahun Pajak 2017	6.649.840,50	>3 TH	50%	3.261.170,25
Tahun Pajak 2017		1-3 TH	10%	12.750,00
Tahun Pajak 2018	29.482.056,00	1-3 TH	10%	2.948.205,60
Tahun Pajak 2019	9.230.330,00	>1 TH	10%	600.643,00
Tahun Pajak 2019			0,5%	16.119,50
Tahun Pajak 2020	47.439.800,00	>1 TH	0,5%	237.199,00
JUMLAH	92.802.026,50			7.076.087,35

- d. Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp9.585.197.640,77 dibagi menjadi Penyisihan Piutang Pelimpahan KPP Pratama Tegall dan Piutang Penetapan Kabupaten Brebes masing-masing sebesar Rp4.517.590.353,00 dan Rp5.067.607.287,77.

Penyisihan Piutang PBB-P2 pelimpahan KPP Pratama, dengan rincian disajikan dalam tabel 5.89 berikut ini:

Tabel 5.89

Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 (Pelimpahan KPP Pratama)

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
PIUTANG PBB-P2 EX-KPP TEGAL				
Tahun Pajak 2010	34.077.376,00	10 TH	100%	34.077.376,00
Tahun Pajak 2011	655.070.979,00	9 TH	100%	655.070.979,00
Tahun Pajak 2012	1.443.592.497,00	8 TH	100%	1.443.592.497,00
Tahun Pajak 2013	2.384.849.501,00	7 TH	100%	2.384.849.501,00
JUMLAH	4.517.590.353,00			4.517.590.353,00

Penyisihan Piutang PBB-P2 Penetapan Kab. Brebes dengan rincian disajikan dalam tabel 5.90 berikut ini :

Tabel 5.90

Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 (Penetapan Kab. Brebes)

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
PIUTANG PBB-P2 PENETAPAN PEMKAB BREBES				
Tahun Pajak 2014	1.188.936.367,00	6 th	100%	1.188.936.367,00



URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Tahun Pajak 2015	1.579.028.846,00	5 th	100%	1.579.028.846,00
Tahun Pajak 2016	1.869.947.634,00	>3-5 th	50%	934.973.817,00
Tahun Pajak 2017	1.291.556.018,00	>3-5 th	50%	645.778.009,00
Tahun Pajak 2018	2.660.895.271,00	1-3 th	10%	266.089.527,10
Tahun Pajak 2019	4.096.560.008,00	1-3 th	10%	409.656.000,80
Tahun Pajak 2020	8.628.944.173,00	<1th	0,5%	43.144.720,87
JUMLAH	21.315.868.317,00			5.067.607.287,77

2) Penyisihan Piutang Retribusi

Daftar penyisihan piutang retribusi dengan rincian disajikan dalam tabel 5.91 berikut ini:

Tabel 5.91
Penyisihan Piutang Retribusi

URAIAN	Penyisihan th 2020	Penyisihan th 2019
RET. IMB	-	2.164.068,97
RET. REKLAME	-	2.275.500,00
RET. IJIN GANGGUAN (HO)	-	34.699.950,00
RET. IJIN TRAYEK	-	2.250,00
RET. SEWA TEMPAT DI OW	765.000,00	35.000,00
RET. SEWA TANAH	24.326.825,40	8.199.022,86
RET. MENARA	30.947.840,00	10.542.230,00
TOTAL	56.039.665,40	57.918.021,83

Penyisihan piutang retribusi per-SKPD dapat dijelaskan dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

- a. Piutang perizinan pada DPMPTSP tahun 2019 dan sebelumnya dihapusbukukan/dikoreksi karena izin diberikan setelah pembayaran diterima sehingga tidak memenuhi ketentuan Piutang. Dengan adanya koreksi tersebut maka penyisihan piutang retribusi pada DPMPTSP dihapusbukukan sehingga saldo tahun 2020 adalah nihil.
- b. Penyisihan piutang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disajikan dalam tabel 5.92 berikut ini :



Tabel 5.92

Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Piutang Retribusi sewa tempat pada OW Malahayu a.n Pokdarwis Geger Halang	153.000.000,00	<1 th	0,5%	765.000,00
JUMLAH	153.000.000,00			765.000,00

- c. Penyisihan piutang BPPKAD disajikan dalam tabel 5.93 berikut ini :

Tabel 5.93

Penyisihan Piutang Retribusi pada BPPKAD

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Piutang Retribusi sewa tanah Th 2017	12.425.000,00	>3 TH	100%	12.425.000,00
Piutang Retribusi sewa tanah Th 2018	15.997.000,00	2 TH	50%	7.998.500,00
Piutang Retribusi sewa tanah Th 2019	36.185.104,00	1-2 TH	10%	3.618.510,40
Piutang Retribusi sewa tanah Th 2020	56.963.000,00	<1 TH	0,50%	284.815,00
JUMLAH	121.570.104,00			24.326.825,40

- d. Penyisihan piutang Dinkominfo dik disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.94

Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinkominfo

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Piutang Retribusi Menara Th 2018	55.146.000,00	2-3 TH	50%	27.573.000,00
Piutang Retribusi Menara Th 2019	32.614.000,00	1-2 TH	10%	3.261.400,00
Piutang Retribusi Menara Th 2020	22.688.000,00	< 1 TH	0,50%	113.440,00
JUMLAH	110.448.000,00			30.947.840,00

3) Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi

Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi dengan rincian disajikan dalam tabel 5.95 berikut ini:



Tabel 5.95

Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi

URAIAN	Penyisihan th 2020	Penyisihan th 2019
PPKD	1.192.128.067,71	325.123.143,68
SKPD	3.608.891.355,32	2.658.493.467,95
JUMLAH	4.801.019.423,03	2.983.616.611,63

- a. Penyisihan piutang yang dicatat pada PPKD dengan rincian disajikan dalam tabel 5.96 berikut ini:

Tabel 5.96

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Piutang Temuan BPK-RI Audit LKPD 2011 dan Audit Belanja 2012	236.656.870,88	>3 TH	100%	236.656.870,88
Kurang Salur Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	20.268.279.105,00	<1 TH	0,5%	101.341.395,53
Pencatatan Kurang Bayar DBH SDA Th 2019	777.985.677,00	1-2 TH	10,0%	77.798.567,70
Pencatatan Kurang Bayar DBH Pajak Th 2019	7.763.312.336,00	1-2 TH	10,0%	776.331.233,60
JUMLAH	29.046.233.988,88			1.192.128.067,71

- b. Penyisihan piutang yang dicatat pada SKPD dengan rincian disajikan dalam tabel 5.97 berikut ini:

Tabel 5.97

Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada SKPD

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Denda Pajak PBB-P2 Tahun 2014-2018	4.669.134.203,44	1-6 TH		3.277.963.955,32
Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 3 th 2013 a.n CV Graha (DPU)	87.455.250,00	7 TH	100%	87.455.250,00
Bunga/Jasa Kemitraan Bawang Merah Organik (DPKP)	9.000.000,00	16 th	100%	9.000.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Fasilitas Agribisnis Kentang (DPKP)	6.600.000,00	16 th	100%	6.600.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Bunga pinjaman ex-bergulir keg. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Sarprodi) Th 2008 (DPKP)	3.070.000,00	>3 TH	100%	3.070.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Koperasi (Dinkop)	151.978.950,00	>3 TH	100%	151.978.950,00
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Modal/Mesin (Dinperinaker)	72.823.200,00	>3 TH	100%	72.823.200,00
JUMLAH	5.000.061.603,44			3.608.891.355,32

4) Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan ini dibagi menjadi Penyisihan Piutang TP-TGR dan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir dengan rincian disajikan dalam tabel 5.98 berikut ini:

Tabel 5.98

Penyisihan Piutang TP-TGR

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
TGR a.n Sodikun	1.310.000,00	< 1th	0,5%	6.550,00
Jumlah	1.310.000,00			6.550,00

Tabel 5.99

Penyisihan Piutang Ex-Dana Bergulir

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2020
Kemitraan Bawang Merah Organik (DPKP)	124.000.000,00	17 th	100%	124.000.000,00
Pinjaman Modal Alsintan th2002-2007 (DPKP)	244.830.659,00	13-18 th	100%	244.830.659,00
Pinjaman Modal Alsintan th2002-2008 (DPKP)	71.346.291,00	12 th	100%	71.346.291,00
Pokok Pinjaman Bergulir Koperasi (Dinkop)	1.381.607.599,00	12-17 th	100%	1.381.607.599,00
Pokok Pinjaman Bergulir Modal/Mesin (Dinperinaker)	826.713.762,00	14-18 th	100%	826.713.762,00
Pokok Pinjaman Bergulir Kelompok Ternak (Dinnak)	236.416.091,00	12-19 th	100%	236.416.091,00
JUMLAH	2.884.914.402,00			2.884.914.402,00

5) Penyisihan Piutang BLUD

Rincian Penyisihan piutang BLUD disajikan dalam tabel 5.100 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.100
 Penyisihan Piutang BLUD BPJS-SKTM

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	Penyisihan %	Penyisihan th 2020
DINAS KESEHATAN :				
UPTD PUSKESMAS BREBES	217.125.000,00			1.085.625,00
Piutang BPJS Th 2020	217.125.000,00	<1 th	0,5%	1.085.625,00
UPTD PUSKESMAS TANJUNG	594.051.000,00			2.970.255,00
Piutang BPJS Th 2020	594.051.000,00	<1 th	0,50%	2.970.255,00
UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	1.281.783.500,00			220.374.070,00
Piutang BPJS Th 2015	10.800.000,00	5 th	100,00%	10.800.000,00
Piutang BPJS Th 2016	4.848.000,00	4 th	100,00%	4.848.000,00
Piutang BPJS Th 2017	188.567.500,00	3 th	100,00%	188.567.500,00
Piutang BPJS Th 2018	20.473.000,00	2-3 th	50,00%	10.236.500,00
Piutang BPJS Th 2019	6.701.000,00	1-2 th	10,00%	670.100,00
Piutang BPJS Th 2020	1.050.394.000,00	<1 th	0,50%	5.251.970,00
UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	206.835.000,00			10.924.550,00
Piutang BPJS Th 2018	18.925.000,00	2-3 th	50,00%	9.462.500,00
Piutang BPJS Th 2019	5.500.000,00	1-2 th	10,00%	550.000,00
Piutang BPJS Th 2020	182.410.000,00	<1 th	0,50%	912.050,00
UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	267.728.000,00			1.338.640,00
Piutang BPJS Th 2020	267.728.000,00	<1 th	0,50%	1.338.640,00
RSUD BREBES	9.540.980.923,00			47.704.904,62
Piutang BPJS th 2020	9.353.480.923,00	<1 th	0,50%	46.767.404,62
Piutang COVID-19 th 2020	187.500.000,00	<1 th	0,50%	937.500,00
RSUD BUMIAYU	377.148.100,00			1.885.740,50
Piutang BPJS th 2020	377.148.100,00	<1 TH	0,50%	1.885.740,50
JUMLAH	12.485.651.523,00			286.283.785,12

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Pada akhir tahun 2020 terdapat saldo beban dibayar dimuka sebesar Rp93.339.860,75.

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	93.339.860,75	136.024.032,33

Rincian Beban Dibayar Dimuka (BDDM) disajikan dalam tabel 5.101 berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.101
 Beban Dibayar Dimuka

SKPD	TH. 2020	TH. 2019
Dinas Kominfotik	3.361.615,83	482.365,67
Dinas Pertanian TPH	16.250.000,00	5.833.333,33
BLUD Banjarharjo	28.875.000,00	67.375.000,00
BLUD Brebes	36.666.666,67	41.250.000,00
BLUD Paguyangan	-	21.083.333,33
BLUD Tanjung	8.078.787,50	-
Dinas Perhubungan	107.790,75	-
Jumlah	93.339.860,75	136.024.032,33

Penjelasan Beban Dibayar di Muka Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Beban Dibayar Dimuka pada Dinkominfotik merupakan Belanja Sewa Frekuensi Radio Singosari TOP FM Paguyangan dan Radio Singosari Brebes serta Iuran Penyelenggaraan Penyiaran untuk 1 tahun. Perhitungannya disajikan dalam tabel 5.102 berikut ini:

Tabel 5.102
 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinkominfotik

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Sewa frekuensi Radio Singosari 2 TOP FM Paguyangan	2.894.194,00	25 Feb 2019-24 feb 2020	12	12	2.894.194,00	-
Sewa frekuensi Radio Singosari 2 TOP FM Paguyangan	2.894.194,00	25 Feb 2020-24 feb 2021	12	11	2.653.011,17	241.182,83
Iuran penyelenggaraan penyiaran (IPP) LPPL singosari 2 Top FM	1.375.000,00	26 April 2020-25 April 2021	12	9	1.031.250,00	343.750,00
Sewa frekuensi Radio Singosari FM Brebes	2.776.683,00	10 Januari 2021 - 09 Januari 2022	12	0	-	2.776.683,00
JUMLAH	9.940.071,00				6.578.455,17	3.361.615,83

2. Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pertanian KP sebesar Rp16.250.000,00 merupakan sewa gedung/kantor/tempat BPP Larangan dan Tonjong periode Agustus 2015 s.d Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00 yang telah berakhir. Dilanjutkan sewa tempat BPP Larangan periode September 2020 s.d Agustus 2022 dan sewa tempat BPP Tonjong periode Agustus 2020 s.d Juli 2022 masing-masing sebesar Rp10.000.000,00. Perhitungannya disajikan dalam tabel 5.103 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.103

Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pertanian KP

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Sewa tempat BPP Larangan dan Tonjong	50.000.000,00	Agustus 2015- Juli 2020	60	60	50.000.000,00	-
Sewa tempat BPP Larangan	10.000.000,00	September 2020- Agustus 2022	24	4	1.666.666,67	8.333.333,33
Sewa tempat BPP Tonjong	10.000.000,00	Agustus 2020- Juli 2022	24	5	2.083.333,33	7.916.666,67
JUMLAH	70.000.000,00				53.750.000,00	16.250.000,00

3. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Puskesmas Banjarharjo merupakan sewa gedung kantor periode periode Oktober 2019 s.d September 2021 sebesar Rp 77.000.000,00 sehingga sampai akhir tahun 2020 selama 15 bulan telah menjadi beban. Adapun saldo tahun 2020 tersisa sebesar Rp28.875.000,00. Perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.104

Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Banjarharjo

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Sewa Bangunan Kantor	77.000.000,00	Okt 2019 s.d Sep 2021	24	15	48.125.000,00	28.875.000,00
JUMLAH	77.000.000,00				48.125.000,00	28.875.000,00

4. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Puskesmas Brebes sebesar Rp Rp36.666.666,67 merupakan sewa gedung kantor periode Desember 2019 s.d November 2020 sebesar Rp 45.000.000,00. Pada tahun 2020 sewa tersebut telah habis masa berlakunya sehingga bersaldo nihil. Selanjutnya tahun 2020 dibayar kembali sewa gedung kantor untuk 1 tahun berikutnya yaitu periode Desember 2020 s.d November 2021 sebesar Rp 40.000.000,00. Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.105

Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Brebes

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Sewa Bangunan Kantor	45.000.000,00	Des 2019 s.d Nov 2020	12	12	45.000.000,00	-
Sewa Bangunan Kantor	40.000.000,00	Des 2020 s.d Nov 2021	12	1	3.333.333,33	36.666.666,67
JUMLAH	85.000.000,00				48.333.333,33	36.666.666,67

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Puskesmas Paguyangan bersaldo nihil, saldo tahun 2019 merupakan sewa gedung kantor untuk 1 tahun (periode Desember 2019 s.d November 2020) sebesar Rp 23.000.000,00 dan pada tahun 2020 telah diakui sebagai beban. Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.106

Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Paguyangan

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Sewa Bangunan Kantor	23.000.000,00	Des 2019 s.d Des 2020	12	12	23.000.000,00	-
JUMLAH	23.000.000,00				23.000.000,00	-

6. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Tanjung sebesar Rp8.078.787,50, saldo tersebut merupakan biaya premi asuransi kendaraan untuk 2 tahun yaitu periode Oktober 2020 s.d September 2022 senilai Rp9.232.900,00.

Tabel 5.107

Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Tanjung

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Premi Asuransi Kendaraan	9.232.900,00	22 Okt 2020-21 Sept 2022	24	3	1.154.112,50	8.078.787,50
JUMLAH	9.232.900,00				1.154.112,50	8.078.787,50

7. Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp107.790,75, saldo tersebut merupakan biaya Web Hosting untuk 1 tahun yaitu periode Oktober 2020 s.d September 2021 senilai Rp143.721,00. Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.108

Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Perhubungan

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bulan)	Umur per 31 Des 2020 (bulan)	Beban s.d 2020	BDDM 2020
Biaya web Hosting	143.721,00	20 Okt 2020-20 Okt 2021	12	3	35.930,25	107.790,75
JUMLAH	143.721,00				35.930,25	107.790,75



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.3.1.1.5 Persediaan

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
PERSEDIAAN	51.627.819.806,10	36.906.878.209,50

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.627.819.806,10 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.109
Rekapitulasi Persediaan

Jenis Persediaan	Th 2020	Th 2019
Persediaan Bahan	67.467.251,00	451.255.286,87
Persediaan Suku Cadang	1.844.600,00	-
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.857.426.750,00	7.470.965.471,60
Persediaan Obat-Obatan	44.378.437.918,10	28.583.697.872,74
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	61.152.000,00	88.553.750,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	87.917.420,00	-
Persediaan Natura dan Pakan	169.538.867,00	312.405.828,29
Persediaan Penelitian	4.035.000,00	-
Persediaan Dalam Proses	-	-
JUMLAH	51.627.819.806,10	36.906.878.209,50

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk di dalamnya barang kadaluarsa.

Mulai tahun 2020 penatausahaan persediaan di Kabupaten Brebes menggunakan aplikasi SIPDA dan SIMIF. Karena proses migrasi dari manual ke aplikasi tersebut mengakibatkan adanya perbedaan klasifikasi barang antara saldo awal persediaan 2020 dengan saldo akhir persediaan tahun 2019, namun secara keseluruhan tidak terdapat selisih nilai persediaan. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel 5.110 berikut ini:

Tabel 5.110
Perbedaan Klasifikasi Saldo Awal Persediaan 2020 dengan Saldo Akhir 2019

Jenis Persediaan	Saldo 01-01-2020	Saldo 31-12-2019	Selisih
Persediaan Bahan	81.613.959,60	451.255.286,87	(369.641.327,27)
Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	7.475.808.233,45	7.470.965.471,60	4.842.761,85
Persediaan Obat-Obatan	28.949.242.542,45	28.583.697.872,74	365.544.669,71
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	88.553.750,00	88.553.750,00	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	270.940.000,00	-	270.940.000,00
Persediaan Natura dan Pakan	40.719.724,00	312.405.828,29	(271.686.104,29)
Persediaan Penelitian	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jenis Persediaan	Saldo 01-01-2020	Saldo 31-12-2019	Selisih
JUMLAH	36.906.878.209,50	36.906.878.209,50	-

Mutasi tambah/kurang persediaan tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.111 sebagai berikut :

Tabel 5.111
Mutasi tambah/kurang Persediaan

URAIAN	SALDO	KETERANGAN
Saldo Awal	36.906.878.209,50	
Penambahan :		
- Koreksi (+)	489.359.424,47	Salah catat volume/harga
- Pengadaan/Pembelian	226.614.855.843,00	
- Reklasifikasi dari Belanja Tdk terduga	1.552.437.526,00	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal	478.652.573,00	
- Mutasi/Transfer Masuk	31.491.813.513,68	
- Hibah Masuk	40.608.895.103,89	
- Hutang Persediaan	2.193.572.597,00	Hutang BHP 2020
Jumlah Penambahan	303.429.586.581,04	
Pengurangan		
- Koreksi (-)	153.666.330,00	Salah catat volume/harga
- Pembayaran Hutang Tahun Lalu	13.534.221.680,00	Hutang BHP 2019
- Pemakaian	204.056.392.052,74	Beban Persediaan
- Mutasi/Transfer Keluar	31.479.847.243,89	
- Hibah Keluar	37.525.352.847,16	
- Reklas Ke Aset Tetap	871.002.000,00	
- Reklas Ke Beban Pegawai	-	
- Reklas Ke Beban Jasa	25.050.000,00	
- Reklas Ke Beban Pemeliharaan	-	
- Pindah ke Kadaluarsa/Rusak/Usang	1.063.112.830,66	
Jumlah Pengurangan	288.708.644.984,44	
Saldo Akhir	51.627.819.806,10	

Penjelasan mutasi persediaan sebagai berikut :

1. Penambahan

- Koreksi Tambah Saldo Awal sebesar Rp489.359.424,47 merupakan salah catat volume dan harga persediaan pada BLUD Puskesmas.
- Pengadaan/pembelian selama tahun 2020 sebesar Rp226.614.855.843,00
- Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.552.437.526,00 merupakan pengadaan barang persediaan pada Dinas Kesehatan dan BPBD melalui Belanja Tidak Terduga pada PPKD untuk penanganan COVID-19.
- Mutasi masuk antar SKPD/Unit Kerja sebesar Rp31.491.813.513,68.
- Hibah Masuk persediaan sebesar Rp40.608.895.103,89 merupakan penerimaan hibah barang persediaan dari pihak lain di luar instansi Pemerintah Kabupaten Brebes baik dalam rangka penanganan COVID-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

19 maupun Non COVID-19. Rinciannya dijelaskan dalam tabel 5.112 berikut ini :

Tabel 5.112
Hibah Masuk Persediaan

SKPD/UNIT	NOMINAL	PEMBERI HIBAH
DINAS KESEHATAN	2.222.520.229,00	KEMENTERIAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN	24.234.318.119,99	DINKES PROV JATENG
DINAS KESEHATAN	798.765.400,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
BLUD BREBES	52.074.900,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
BLUD TANJUNG	36.124.774,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
BLUD BANJARHARJO	77.491.500,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
BLUD PAGUYANGAN	74.232.800,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
BLUD BUMIAYU	43.699.850,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
RSUD BREBES	597.294.820,00	HIBAH PEMERINTAH PUSAT
RSUD BREBES	966.860.668,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
RSUD BREBES	1.103.428.052,90	DINKES PROV JATENG
RSUD BUMIAYU	33.906.500,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
BPBD	164.110.600,00	PEMERINTAH PROV JATENG
BPBD	38.137.500,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
DP3KB	3.777.412.890,00	BKKBN DAN DP3AKB PROV JATENG
DINKOPUMDAG	11.357.500,00	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DINKOPUMDAG	447.750.000,00	DINAS KOP UMKM DAN DINAS PERDAGANGAN PROV JATENG
BAPERLITBANGDA	5.929.409.000,00	DONASI/HIBAH DARI SWASTA/PERORANGAN
JUMLAH	40.608.895.103,89	

- f. Hutang Persediaan merupakan hutang pengadaan barang persediaan yang per tanggal 31 Desember 2020 belum dibayar karena barang telah diterima namun proses pembayarannya belum selesai. Rinciannya dijelaskan pada tabel 5.113 berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.113
 Hutang Pengadaan Persediaan

SKPD/Unit	Uraian	Tahun Hutang	Nominal (Rp)
BLUD TAJUNG	Belanja persediaan obat	2020	360.000,00
Jumlah 1			360.000,00
BLUD BUMIAYU	Obat-obatan	2020	15.338.400,00
BLUD BUMIAYU	Cetak	2020	4.934.000,00
BLUD BUMIAYU	Makanan Pokok	2020	8.320.000,00
Jumlah 2			28.592.400,00
RSUD BREBES	Bahan pakai habis Darah Pasien Jamkesda bln. Oktober 2020	2020	15.410.000,00
RSUD BREBES	Obat - Obatan	2020	450.625.000,00
RSUD BREBES	Obat - Obatan	2020	384.234.550,00
RSUD BREBES	Bahan Habis Pakai	2020	310.904.008,00
Jumlah 3			1.161.173.558,00
RSUD BUMIAYU	Utang belanja Gas Medis (Oksigen)	2020	56.299.991,00
RSUD BUMIAYU	Utang Belanja Alat Kesehatan (BHP)	2020	117.031.578,00
RSUD BUMIAYU	Utang belanja bahan obat-obatan	2020	521.764.752,00
RSUD BUMIAYU	Utang Belanja Bahan Kimia (Reagent)	2020	247.987.891,00
RSUD BUMIAYU	Utang belanja bahan makanan dan minuman pasien	2020	40.266.427,00
RSUD BUMIAYU	Utang Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2020	1.775.000,00
Jumlah 4			985.125.639,00
DINKOPUMDAG	Utang Penyediaan barang cetakan (karcis)	2020	18.321.000,00
Jumlah 5			18.321.000,00
TOTAL			2.193.572.597,00

2. Pengurangan

- Koreksi Kurang Saldo Awal sebesar Rp153.666.330,00 merupakan salah catat volume dan harga persediaan pada BLUD Puskesmas.
- Pembayaran hutang tahun 2019 sebesar Rp13.534.221.680,00 merupakan pembayaran hutang barang cetakan, obat-obatan, BHP alkes dan Bank Darah pada BLUD RSUD dan Puskesmas. Hutang ini tidak dihitung sebagai penambah nilai persediaan karena barang persediaan telah diterima pada tahun sebelumnya.
- Pemakaian persediaan tahun 2020 sebesar Rp204.056.392.052,73.
- Mutasi keluar antar SKPD/Unit Kerja sebesar Rp31.479.847.243,89.
- Hibah keluar sebesar Rp37.525.352.847,16 merupakan hibah kepada pihak di luar instansi pemerintah kabupaten Brebes untuk penanganan COVID-19 dan Non COVID-19. Rincinannya dijelaskan sesuai tabel 5.114 berikut ini :

Tabel 5.114
 Hibah Keluar Persediaan

SKPD/UNIT	NOMINAL	HIBAH KEPADA
DINAS PENDIDIKAN	6.462.937.009,00	SEKOLAH SWASTA DAN PARA SISWA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

SKPD/UNIT	NOMINAL	HIBAH KEPADA
DINAS KESEHATAN	3.877.874.829,86	RUMAH SAKIT SWASTA
BLUD BREBES	108.000.000,00	MASYARAKAT (JAMBAN)
BLUD BUMIAYU	3.594.800,00	MASYARAKAT (JAMBAN)
DPU	6.372.826.000,00	INSTANSI VERTIKAL
DINPERWASKIM	950.268.000,00	MASYARAKAT
BPBD	326.521.336,00	MASYARAKAT
DINSOS	51.003.000,00	MASYARAKAT
DP3KB	1.182.328.754,30	RS & KLINIK SWASTA
DINPERMADES	734.627.400,00	MASYARAKAT
DINKOPUMDAG	452.550.000,00	MASYARAKAT
DINAS PERIKANAN	5.807.161.565,00	MASYARAKAT
DINAS PERTANIAN & KP	4.320.761.550,00	MASYARAKAT
DINAS PETERNAKAH & KH	640.249.965,00	KELOMPOK TERNAK
KEC. BREBES	79.800.000,00	MASYARAKAT
KEC. SONGGOM	1.219.638,00	MASYARAKAT
KEC. TANJUNG	6.000.000,00	MASYARAKAT
KEC. BANTARKAWUNG	3.900.000,00	MASYARAKAT
KEC. SALEM	5.570.000,00	MASYARAKAT
BAPERLITBANGDA	5.929.409.000,00	MASYARAKAT
JUMLAH	37.316.602.847,16	

f. Reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp871.002.000,00 rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.115
Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap

SKPD/UNIT	NOMINAL	KETERANGAN
DINKES	861.000,00	Aquadest, masker, kertas saring, alkohol dll
BLUD BREBES	947.600,00	Cungkup Oksigen
BLUD TANJUNG	61.162.750,00	Reagen
BLUD BANJARHARJO	2.369.000,00	Cungkup Oksigen
BLUD PAGUYANGAN	473.800,00	Cungkup Oksigen
BLUD BUMIAYU	49.408.250,00	APD, Reagen
RSUD BUMIAYU	351.400.173,00	Bahan-bahan laboratorium
DP3KB	575.000,00	Lampu
DINAS PETERNAKAN & KH	6.140.000,00	Sepatu boots, Kabel roll, Seragam Teknisi, headset
BPPKAD	5.315.000,00	Mangkok, sendok, garpu, gelas
JUMLAH	478.652.573,00	

g. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp25.050.000,00.

h. Pindah kadaluarsa sebesar Rp1.063.112.830,66 berupa obat dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas.



5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang tahun 2020 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian disajikan dalam tabel 5.116 berikut ini:

Tabel 5.116

Rincian Investasi Jangka Panjang

URAIAN	TH. 2020	TH. 2019
a) Investasi Non Permanen	-	-
b) Investasi Permanen	156.682.034.166,58	137.025.751.152,38
Jumlah	156.682.034.166,58	137.025.751.152,38

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2020 adalah nol/nihil.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen sebagai berikut :

	<u>31 Des 2020</u>	<u>31 Des 2019</u>
Investasi Jangka Panjang Permanen	156.682.034.166,58	137.025.751.152,38

Investasi Jangka Panjang permanen sebesar Rp156.682.034.166,58 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode ekuitas dan metode biaya dengan rincian disajikan dalam tabel 5.117 berikut ini:

Tabel 5.117

Tabel Investasi Permanen- PMPD BUMD

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2020	Saldo PMPD 2019
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :		
BPD JATENG	46.102.000.000,00	38.602.000.000,00
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.070.000.000,00	12.070.000.000,00
PD. BPR BKK BANJARHARJO	9.337.589.994,13	8.558.745.091,88
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	14.685.404.805,00	13.935.839.482,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :		
PDAM TIRTA BARIBIS	70.623.914.144,94	61.635.078.902,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50
PERUSDA PERCETAKAN	2.114.867.783,00	1.502.186.554,00
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	378.325.711,00	351.969.394,00
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00
JUMLAH	156.682.034.166,58	137.025.751.152,38



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal sesuai pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

NAMA BUMD	(Rp)
PD. BPR BKK BANJARHARJO	1.000.000.000,00
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	1.000.000.000,00
PDAM TIRTA BARIBIS	7.000.000.000,00
PERUSDA PERCETAKAN	500.000.000,00
BPD JATENG	7.500.000.000,00
BKK JATENG	<u>1.000.000.000,00</u>
JUMLAH	18.000.000.000,00

Rincian perhitungan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan sesuai tabel 5.118 berikut ini :

Tabel 5.118
 Tabel Rincian PMPD BUMD

Perusahaan Daerah	Nilai PMPD s.d 2020	Nilai Ekuitas BUMD	Kepemilikan Daerah (%)	Saldo PMPD 2020	Metode Perhitungan
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :					
BPD JATENG	46.102.000.000,00		< 20%	46.102.000.000,00	BIAYA
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.070.000.000,00		< 20%	13.070.000.000,00	BIAYA
PD. BPR BKK BANJARHARJO	6.320.000.000,00	21.822.184.211,00	42,79%	9.337.589.994,13	EKUITAS
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	11.000.000.000,00	14.685.404.805,00	100%	14.685.404.805,00	EKUITAS
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :					
PDAM TIRTA BARIBIS	53.774.393.640,00	70.623.914.144,94	100%	70.623.914.144,94	EKUITAS
PERUSDA PERBENGKELAN	900.000.000,00	124.931.728,50	100%	124.931.728,50	EKUITAS
PERUSDA PERCETAKAN	2.185.000.000,00	2.114.867.783,00	100%	2.114.867.783,00	EKUITAS
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	950.000.000,00	378.325.711,00	100%	378.325.711,00	EKUITAS
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	-	< 20%	245.000.000,00	BIAYA
JUMLAH	134.546.393.640,00	109.749.628.383,44		156.682.034.166,58	

Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BKK Banjarharjo dan PD BPR Puspa Kencana/Bank Brebes serta Perusda non perbankan dicatat dengan **metode ekuitas** di mana PMPD merupakan nilai ekuitasi BUMD dikali prosentase kepemilikan. Penyertaan Modal Bank Jateng, BKK Brebes dan PRPP Jawa Tengah di mana kepemilikan Pemkab Brebes atas saham pada persahaan tersebut kurang dari 20% dicatat dengan **metode biaya**.



Saldo PMPD th 2019 sebesar Rp137.025.751.152,38. Penambahan selama tahun 2020 sesuai realisasi anggaran sebesar Rp18.000.000.000,00. Selisih PMPD hasil perhitungan ekuitas sebesar Rp1.656.283.014,19. Adapun selisih tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Nilai PMPD tahun 2020 dihitung sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
PMPD th 2019	137.025.751.152,38
Pengeluaran Pembiayaan untuk PMPD th 2020	18.000.000.000,00
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.656.283.014,19
PMPD th 2020	156.682.034.166,58

Sejak awal tahun 2012 Perusda Perbengkelen sudah tidak beroperasi karena mengalami kerugian, namun Pemkab Brebes belum menetapkan statusnya. Laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan per 31 Desember 2014 (audited).

Nilai penyertaan modal yang disajikan berdasarkan pada Laporan Keuangan BUMD unaudit tahun 2020. Sampai dengan laporan ini disusun belum ada hasil audit atas laporan keuangan BUMD dari Kantor Akuntan Publik.

5.3.1.3 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
ASET TETAP	3.163.755.772.377,60	3.597.704.587.146,60

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai tersebut diatas adalah nilai per 31 Desember 2020 dan 2019.

Mulai tahun 2019 penatausahaan aset tetap telah mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian pada Kebijakan Akuntansinya :

Mutasi aset tetap per kelompok barang tersaji dengan rincian dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.119
Rincian Aset Tetap

JENIS BARANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
TANAH	338.733.579.266,00	9.883.446.299,00	3.253.574.500,00	345.363.451.065,00
PERLATAN DAN MESIN	724.425.133.741,27	95.647.892.253,00	19.033.545.900,00	801.039.480.094,27
GEDUNG DAN BANGUNAN	1.505.249.745.826,00	196.314.919.983,00	94.274.298.691,00	1.607.290.367.118,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

JENIS BARANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.314.413.579.543,00	174.000.602.612,00	4.921.087.150,00	2.483.493.095.005,00
ASET TETAP LAINNYA	190.618.729.129,34	29.871.032.623,00	2.757.015.073,00	217.732.746.679,34
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	9.740.753.000,00	57.305.887.604,00	1.166.877.000,00	65.879.763.604,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.485.476.933.359,01)	(976.890.284.282,00)	(105.324.086.453,00)	(2.357.043.131.188,01)
TOTAL	3.597.704.587.146,60	(413.866.502.908,00)	20.082.311.861,00	3.163.755.772.377,60

5.3.1.3.1 Tanah

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
TANAH	345.363.451.065,00	338.733.579.266,00

Menurut PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa: Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 menyatakan bahwa penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum memadai diantaranya 79 bidang tanah dengan harga perolehan tidak wajar senilai Rp1.151.990,00. Penilaian tanah tahun 2020 pada SKPD Dindikpora BLUD Bumiayu, DPSDAPR, Kecamatan Brebes, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Salem.

Tanah yang tercatat dalam Neraca tahun 2020 dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp345.363.451.065,00 sebanyak 3.158 bidang. Tanah yang bersertifikat di Pemerintah Kabupaten Brebes berjumlah 855 bidang dari 3.158 bidang tanah. Selama Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaakim) telah mengajukan penyertifikatan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 416 sertifikat.

Tanah desa yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes yang di atasnya dibangun fasilitas umum berupa bangunan kesehatan dan bangunan sekolah sebanyak 756 bidang tanah terdiri dari 7 bidang tanah untuk Bangunan Kantor Pemerintah, 699 bidang tanah untuk Bangunan Pendidikan dan 50 bidang tanah untuk Bangunan Puskesmas.

Tanah sebesar Rp 345.363.451.065 dan Rp338.733.579.266,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat kenaikan saldo aset tetap tanah sebesar Rp6.629.871.799,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.120
Mutasi Aset Tetap Tanah

URAIAN	JUMLAH
Tanah	
SALDO AWAL	338.733.579.266,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	JUMLAH
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	1.950.122.100,00
HIBAH MASUK (PIHAK KE-3)	1.115.500.000,00
MUTASI MASUK	2.229.118.500,00
KOREKSI TAMBAH (INVENTARISASI BARANG BELUM TERCATAT/BERLEBIH)	3.552.045.300,00
KOREKSI TAMBAH (ATRIBUSI NILAI SERTIFIKAT TANAH TAHUN SEBELUMNYA)	110.114.388,00
KOREKSI TAMBAH (PENILAIAN ASET TETAP)	926.546.011,00
JUMLAH PENAMBAHAN	9.883.446.299,00
PENGURANGAN :	
HIBAH KELUAR	895.000.000,00
MUTASI KELUAR	2.229.118.500,00
KOREKSI KURANG (PENGHAPUSAN TAHUN SEBELUMNYA)	105.436.000,00
KOREKSI KURANG (DOBEL PENCATATAN)	24.020.000,00
JUMLAH PENGURANGAN	3.253.574.500,00
SALDO AKHIR 2020	345.363.451.065,00

Penambahan tanah sebesar Rp 9.883.446.299,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- a. Belanja Modal sebesar Rp1.950.122.100,00. Belanja Modal Pengadaan Tanah terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) sebesar Rp1.279.002.500,00 dan BLUD Brebes sebesar Rp671.119.600,00.
- b. Hibah Masuk dari Pihak Ketiga sebesar Rp1.115.500.000,00 merupakan Hibah masuk tanah pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Hibah Tanah tersebut untuk pelebaran jalan (Ruas Jl. Kretek - Kaligua) dari PT. Sejahtera Alam Energy dengan luas tanah 1.191 m².
- c. Mutasi masuk tanah sebesar Rp2.229.118.500,00 terdiri dari:
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) sebesar Rp81.680.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah sekolah sebanyak 23 bidang.
 - Mutasi masuk tanah dari Kecamatan Brebes ke Dinas Kesehatan sebesar Rp707.376.000,00 sebanyak 1 bidang tanah.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke BLUD Brebes sebesar Rp4.080.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah sebanyak 3 bidang.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke BLUD Tanjung sebesar Rp8.160.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah puskesmas sebanyak 4 bidang, tanah pustu 1 bidang, dan tanah rumah dinas 1 bidang.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke BLUD Banjarharjo sebesar Rp4.080.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah sebanyak 2 bidang tanah pustu dan satu bidang tanah puskesmas.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke BLUD Paguyangan sebesar Rp5.440.000,00 berupa sertifikasi pada 3 bidang tanah pustu dan 1 bidang tanah puskesmas.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke BLUD Bumiayu sebesar Rp6.800.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah sebanyak 5 bidang tanah.



- Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke RSUD Brebes sebesar Rp2.720.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah pada dua bidang tanah.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke DPU sebesar Rp560.865.000,00 berupa biaya sertifikasi sebanyak 2 bidang tanah bangunan kantor dan tanah jalan.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) sebesar Rp65.320.000,00 berupa biaya sertifikasi sebanyak 48 bidang tanah untuk bangunan pengembangan rawa dan polder.
 - Mutasi masuk tanah dari Kecamatan Brebes ke Dinperwaskim sebesar Rp653.520.000,00.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) sebesar 50.000.000,00 dan mutasi masuk dari Kecamatan Brebes sebesar Rp4.037.500,00.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke Dinas Perhubungan (Dinhub) sebesar Rp 6.840.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah sebanyak 5 bidang. Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag) sebesar Rp12.240.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah pasar.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) sebesar Rp4.120.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah BPP Salem, BPP Paguyangan dan BPP Sirampog.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke DPKH sebesar Rp9.520.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah pada 7 bidang tanah.
 - Mutasi masuk tanah dari Dinperwaskim ke Sekretariat Daerah sebesar Rp27.360.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah pada perumahan bhakti praja dan lapangan bulu tangkis di Bumiayu.
 - Mutasi masuk dari Dinperwaskim ke Kecamatan Ketanggungan sebesar Rp1.360.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah.
 - Mutasi masuk dari Dinperwaskim ke Kecamatan Bumiayu sebesar Rp2.720.000,00 berupa biaya sertifikasi pada dua bidang tanah.
 - Mutasi masuk dari Dinperwaskim ke Kecamatan Bantarkawung sebesar Rp2.720.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah pada dua bidang tanah.
 - Mutasi masuk dari Dinperwaskim ke Kecamatan Salem sebesar Rp8.160.000,00 berupa biaya sertifikasi tanah pada 6 bidang tanah.
- d. Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih) sebesar Rp3.552.045.300,00 terdapat pada DLHPS sebesar Rp3.519.375.300,00 pada 5 bidang tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Brebes No.050/520 Tahun 2020. Koreksi Tambah pada Dinperwaskim sebesar Rp17.466.000,00. Koreksi tambah lainnya pada Kecamatan Brebes sebesar Rp15.204.000,00 berupa tanah Masjid.
- e. Koreksi Tambah (Atribusi Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya) sebesar Rp110.114.388,00, terdapat pada SKPD RSUD Bumiayu sebesar Rp39.719.388,00, Kecamatan Wanasari sebesar Rp32.895.000,00,



Kecamatan Bulakamba sebesar Rp22.500.000,00, dan Kecamatan Kersana sebesar Rp15.000.000,00.

- f. Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap) sebesar Rp926.546.011,00 terdapat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp32.842.000,00, BLUD Bumiayu sebesar Rp2.085.000,00, DPSDAPR sebesar Rp694.708.263,00, Kecamatan Brebes sebesar Rp163.471.748,00, Kecamatan Sirampog sebesar Rp17.480.000,00, Kecamatan Salem sebesar Rp15.959.000,00.

Pengurangan saldo aset tetap tanah sebesar Rp3.253.574.500,00, berasal dari :

- Hibah Keluar sebesar Rp 895.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah berupa tanah jalan menuju MAN Brebes yang dihibahkan ke MAN 1 Brebes (Kementerian Agama).
- Mutasi Keluar sebesar Rp2.229.118.500,00 terdapat pada SKPD Diperwaskim sebesar Rp815.722.500,00, DPKH sebesar Rp50.000.000,00 dan Kecamatan Brebes sebesar Rp1.363.396.000,00.
- Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya) sebesar Rp105.436.000,00 pada Dinas Perikanan sesuai Keputusan Sekda Brebes No. 028/2976 Tahun 2020 pada 3 bidang tanah tambak yaitu Tanah Desa Ngaradaha Kecamatan Bumiayu, Tanah Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes, dan Tanah Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.
- Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan) sebesar Rp24.020.000,00 pada SKPD DPU terdiri dari Tanah eks UPTD Sirampog sebesar Rp20.000,00 dobel catat dengan Kecamatan Sirampog, Tanah eks UPTD Sirampog sebesar Rp12.000.000,00 dobel catat dengan Kecamatan Sirampog, dan Tanah eks UPTD Wanasari sebesar Rp12.000.000 dobel catat dengan SMPN 1 Wanasari (Dindikpora).

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
PERALATAN MESIN	801.039.480.094,27	724.425.133.741,27

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.121

Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
Peralatan Mesin	
SALDO AWAL 2020	724.425.133.741,27
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	84.694.029.805,00
REKLAS DARI B. PEGAWAI	53.126.000,00
REKLAS DARI B. JASA	13.425.000,00
REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	871.002.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	22.115.500,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	2.996.549.000,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PROVINSI)	498.100.000,00
HIBAH MASUK (PIHAK KE-3)	277.450.000,00
HIBAH MASUK (KOMITE SEKOLAH)	23.181.500,00
MUTASI MASUK	5.384.258.448,00
REKLAS DARI ASET LAINNYA (RUSAK BERAT/TIDAK DITEMUKAN)	21.675.000,00
REKLAS ASET TETAP DARI KDP	487.500.000,00
KOREKSI TAMBAH (INVENTARISASI BARANG BELUM TERCATAT/BERLEBIH)	17.550.000,00
KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	170.000.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	117.930.000,00
JUMLAH PENAMBAHAN	95.647.892.253,00
PENGURANGAN :	
EXTRAKOMTABLE	2.828.770.923,00
REKLAS KE B. PERSEDIAAN	478.652.573,00
REKLAS KE B. PEMELIHARAAN	6.365.000,00
REKLAS KE B. JASA	48.522.000,00
BELANJA MODAL UNTUK PEMBAYARAN HUTANG	487.500.000,00
HIBAH KELUAR	148.340.000,00
MUTASI KELUAR	5.384.258.448,00
RUSAK BERAT	2.954.706.411,00
TIDAK DITEMUKAN	61.846.354,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	5.570.952.191,00
REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	931.777.000,00
KOREKSI KURANG (PENGHAPUSAN TAHUN SEBELUMNYA)	13.925.000,00
KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	117.930.000,00
JUMLAH PENGURANGAN	19.033.545.900,00
SALDO AKHIR 2020	801.039.480.094,27

Peralatan dan Mesin sebesar Rp 801.039.480.094,27 dan Rp 724.425.133.741,27 merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat kenaikan saldo aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp76.614.346.353,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 95.647.892.253,00 disebabkan:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.694.029.805,00
- Reklasifikasi dari Belanja Pegawai sebesar Rp53.126.000,00 pada RSUD Brebes.
- Reklasifikasi dari Belanja Jasa sebesar Rp13.425.000,00 pada BLUD Banjarharjo sebesar Rp11.950.000,00 dan Dinkopumdag sebesar Rp1.475.000,00.
- Reklasifikasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp871.002.000,00 reklas belanja persediaan tersebut berasal dari belanja persediaan SKPD namun barangnya berupa aset tetap sehingga di reklas ke aset tetap kemudian dicatat



pada SIMDA BMD. Reklas belanja persediaan terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp 474.951.982,00,
 - BLUD Banjarharjo sebesar Rp4.114.000,00,
 - BLUD Paguyangan sebesar Rp8.605.000,00,
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp156.704.000,00,
 - Dinas Perhubungan(Dinhub) sebesar Rp25.108.458,00, Dinkopumdag sebesar Rp23.576.000,00,
 - Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp1.868.540,00,
 - Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) sebesar Rp16.068.500,00,
 - Dinas Perikanan (Dinkan) sebesar Rp45.427.000,00,
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) sebesar Rp4.940.000,00.
 - Reklas Belanja Persediaan lainnya pada Kecamatan Brebes sebesar Rp23.910.000,00,
 - Kecamatan Jatibarang sebesar Rp2.050.000,00, Kecamatan Bulakamba sebesar Rp2.000.000,00,
 - Kecamatan Tanjung sebesar Rp4.000.000,00,
 - Kecamatan Losari sebesar Rp4.784.000,00,
 - Kecamatan Kersana sebesar Rp8.100.000,00,
 - Kecamatan Ketanggungan sebesar Rp10.100.000,00,
 - Kecamatan Banjarharjo sebesar Rp2.000.000,00,
 - Kecamatan Larangan sebesar Rp8.100.000,00,
 - Kecamatan Tonjong sebesar Rp14.000.000,00,
 - Kecamatan Bumiayu sebesar Rp3.025.000,00,
 - Kecamatan Paguyangan sebesar Rp9.386.520,00,
 - Kecamatan Sirampog sebesar Rp5.000.000,00,
 - Kecamatan Salem sebesar Rp11.585.000,00,
 - Inspektorat sebesar Rp1.598.000,00.
- e. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp22.115.500,00 terdapat pada SKPD Dindikpora.
- f. Hibah Masuk (Pemerintah Pusat) sebesar Rp2.996.549.000,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
- Dindikpora sebesar Rp2.567.195.000,00 sebanyak 471 unit barang seperti mesin jahit, laptop, proyektor, wireless yang digunakan pada SD dan SMP.
 - Hibah Masuk (Pemerintah Pusat) dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp11.682.000,00 pada BLUD Brebes berupa termogun sebanyak 18 unit yang tersebar pada 9 puskesmas di wilayah BLUD Brebes.
 - BLUD Banjarharjo menerima Hibah Masuk (Pemerintah Pusat) dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp11.682.000,00 sebanyak 18 unit Termogun pada 9 Puskesmas di wilayah BLUD Banjarharjo.
 - BLUD Paguyangan menerima Hibah Masuk dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.490.000,00 sebanyak 10 unit Termogun pada 5 Puskesmas di wilayah BLUD Paguyangan.



- RSUD Brebes menerima Hibah Masuk (Pemerintah Pusat) Kementerian Kesehatan sebesar Rp399.500.000,00 berupa Resusitasi Bayi, Syringe Pump, Oxygen Therapy, Pulse Oxymetry, Baby Incubator, Photo Therapy Radiometer.
- g. Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ke RSUD Brebes sebesar Rp498.100.000,00 berupa 2 unit alat ventilator.
- h. Hibah Masuk (Pihak Ketiga) sebesar Rp277.450.000,00 pada SKPD Dindikpora sebesar Rp181.500.000,00, BLUD Banjarharjo sebesar Rp3.150.000,00, RSUD Brebes sebesar Rp87.300.000,00 berupa 2 unit kipas angin, 6 unit thermometer digital, 3 unit ventilator, 5 unit tong sampah dalam rangka penanganan pandemic Covid-19. Hibah Masuk (Pihak Ketiga) lainnya ke Kecamatan Bumiayu sebesar Rp5.500.000,00 berupa mimbar/podium dan 4 unit kipas angin.
- i. Hibah Masuk (Komite Sekolah) sebesar Rp23.181.500,00 pada Dindikpora.
- j. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp5.384.258.448,00 dengan rincian :
 - Dindikpora menerima mutasi masuk sebesar Rp279.380.000,00 berupa kendaraan Dinas Toyota All New Rush senilai Rp263.000.000,00 dari Sekretariat Daerah dan 1 unit sepeda motor senilai Rp16.380.000,00 dari BLUD Tanjung.
 - Mutasi masuk ke Dinas Kesehatan sebesar Rp227.000.000,00 berupa 1 unit Toyota Avanza Veloz dari Sekretariat Daerah.
 - BLUD Brebes menerima mutasi masuk sebesar Rp330.465.941,00 dari Dinas Kesehatan.
 - Mutasi masuk ke BLUD Tanjung sebesar Rp380.799.629,00 dari Dinas Kesehatan.
 - BLUD Banjarharjo menerima mutasi masuk sebesar Rp163.977.548,00 dari Dinas Kesehatan.
 - BLUD Paguyangan menerima mutasi masuk sebesar Rp121.880.195,00 dari Dinas Kesehatan berupa alat kedokteran.
 - BLUD Bumiayu menerima mutasi masuk sebesar Rp667.176.310,00 dari Dinas Kesehatan.
 - RSUD Brebes menerima mutasi masuk sebesar Rp210.000.000,00 dari Dinas Kesehatan Berupa 1 unit Saniswiss Biosanitizer Automate ahp dan 1 unit Mesin Spray Desinfektan untuk penanganan Covid-19.
 - RSUD Bumiayu menerima mutasi masuk sebesar Rp105.000.000,00 dari Dinas Kesehatan Berupa 1 unit Saniswiss Biosanitizer Automate ahp.
 - DPSDAPR menerima mutasi masuk sebesar Rp139.700.000,00 berupa 1 unit kendaraan dinas mutasi masuk dari Sekretariat Daerah.
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerima mutasi masuk sebesar Rp95.750.000,00 berupa 1 unit sepeda motor senilai Rp8.750.000,00 dari Sekretariat Daerah dan 1 unit Kijang Super senilai Rp87.000.000,00 dari BPBD
 - Mutasi masuk Dinas Sosial (Dinsos) sebesar Rp1.400.000,00 dari Dinas Kesehatan berupa 2 unit termogun.
 - Mutasi masuk ke DLHPS sebesar Rp65.848.775,00 berupa 4 unit sepeda motor mutasi dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK).



- Mutasi masuk ke Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Dinkominfotik) sebesar Rp235.995.050,00 dari Sekretariat Daerah.
 - DPMPTSP menerima mutasi masuk sebesar Rp322.960.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Honda CRV.
 - Sekretariat Daerah menerima mutasi masuk sebesar Rp720.000.000,00 dari Kecamatan Salem senilai Rp180.000.000,00 berupa 1 unit Suzuki Ertiga, Kecamatan Tonjong senilai Rp180.000.000,00 berupa 1 unit Suzuki Ertiga, Kecamatan Paguyangan senilai Rp180.000.000,00 berupa 1 unit Ertiga, Kecamatan Bantarkawung senilai Rp180.000.000,00 berupa 1 unit Ertiga.
 - Kecamatan Tonjong menerima mutasi masuk sebesar Rp250.000.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Toyota All New Rush.
 - Kecamatan Paguyangan menerima mutasi masuk sebesar Rp250.000.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Toyota All New Rush.
 - Kecamatan Bantarkawung menerima mutasi masuk sebesar Rp250.000.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Toyota All New Rush.
 - Kecamatan Salem menerima mutasi masuk sebesar Rp250.000.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Toyota All New Rush.
 - Mutasi masuk ke BPPKAD sebesar Rp274.850.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Mitsubishi XPander.
 - Mutasi masuk ke BKPSDMD sebesar Rp42.075.000,00, mutasi masuk dari Dindikpora senilai Rp12.925.000,00 berupa 1 unit sepeda motor. Mutasi masuk dari PPKD senilai Rp12.650.000,00 berupa 1 unit sepeda motor. Mutasi masuk dari Sekretariat Daerah senilai Rp16.500.000,00 berupa 1 unit sepeda motor.
 - k. Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Rusak Berat/Tidak Ditemukan) sebesar Rp21.675.000,00 pada Dindikpora berupa 1 unit sepeda motor yang dikoreksi dari RB ke kondisi baik senilai Rp12.925.000,00 sepeda motor tersebut kemudian dimutasi ke BKPSDMD. Reklasifikasi barang Rusak Berat/Tidak Ditemukan yang sudah diketahui keberadaannya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp8.750.000,00.
 - l. Reklas Aset Tetap dari KDP sebesar Rp487.500.000,00 berupa elevator/lift pada RSUD Bumiayu.
 - m. Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih) sebesar Rp17.550.000,00 pada Dindikpora pada 17 unit barang berupa televisi, meja computer, overhead projector pada SD dan SMP.
 - n. Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya) sebesar Rp170.000.000,00 pada BPBD berupa 1 unit Pick Up hibah masuk dari BNPB.
 - o. Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) sebesar Rp117.930.000,00 pada Dindikpora sebesar Rp108.680.000,00, DPSDAPR sebesar Rp5.250.000,00, dan Dinbudpar sebesar Rp4.000.000,00.
- Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.033.545.900,00 selama tahun 2020 berasal dari:



- a. Ekstrakomtable sebesar Rp2.828.770.923,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
- Dindikpora ekstrakomtable sebesar Rp2.699.046.569,00
 - Dinas Kesehatan ekstrakomtable sebesar Rp38.677.900,00
 - BLUD Tanjung ekstrakomtable sebesar Rp26.661.325,00
 - BLUD Banjarharjo ekstrakomtable sebesar Rp23.611.900,00
 - BLUD Paguyangan ekstrakomtable sebesar Rp3.723.229,00
 - RSUD Brebes ekstrakomtable sebesar Rp6.603.000,00
 - BPBD ekstrakomtable sebesar Rp2.950.000,00
 - DLHPS ekstrakomtable sebesar Rp10.450.000,00
 - Dinkominfotik ekstrakomtable sebesar Rp292.000,00
 - Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) ekstrakomtable sebesar Rp900.000,00
 - DPKP ekstrakomtable sebesar Rp1.520.000,00
 - Sekretariat Daerah ekstrakomtable sebesar Rp2.110.000,00
 - Sekretariat DPRD ekstrakomtable sebesar Rp8.950.000,00
 - Kecamatan Salem ekstrakomtable sebesar Rp800.000,00
 - Inspektorat ekstrakomtable sebesar Rp975.000,00
 - BPPKAD ekstrakomtable sebesar Rp1.500.000,00
- b. Reklasifikasi ke Beban Persediaan sebesar Rp478.652.573,00. Aset tetap yang di reklas ke beban persediaan telah dicatat pada aplikasi SIPDA pada menu penambahan koreksi tambah dengan jenis koreksi reklas dari aset tetap, terdapat pada SKPD:
- Dinas Kesehatan sebesar Rp861.000,00
 - BLUD Brebes sebesar Rp947.600,00
 - BLUD Tanjung sebesar Rp61.162.750,00
 - BLUD Banjarharjo sebesar Rp2.369.000,00
 - BLUD Paguyangan sebesar Rp473.800,00
 - BLUD Bumiayu sebesar Rp49.408.250,00
 - RSUD Bumiayu sebesar Rp351.400.173,00
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebesar Rp575.000,00
 - DPKP sebesar Rp6.140.000,00
 - BPPKAD sebesar Rp5.315.000,00.
- c. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp6.365.000,00 terdapat pada SKPD Dinkominfotik sebesar Rp5.000.000,00, Kecamatan Bantarkawung sebesar Rp700.000,00, dan BPPKAD sebesar Rp665.000,00.
- d. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp48.522.000,00 pada DPU berupa Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum, Belanja Konsultasi Manajemen Konstruksi dan Penyusunan Andal Lalin Kantor Pemerintah Terpadu.
- e. Belanja Modal untuk pembayaran hutang tahun lalu sebesar Rp487.500.000,00
- f. Hibah Keluar sebesar Rp148.340.000,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp119.950.000,00 berupa termogun sebanyak 144 unit ke Pondok Pesantren. Hibah Keluar lainnya pada Kecamatan Brebes sebesar Rp28.390.000,00



berupa tensimeter. Timbangan bayi dan timbangan badan yang diserahkan ke posyandu di wilayah keluarahan Pasarbatang.

- g. Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp5.384.258.448,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
- Dindikpora sebesar Rp12.925.000 mutasi keluar ke BKPSDMD berupa 1 unit Sepeda Motor.
 - Mutasi keluar Dinas Kesehatan sebesar Rp1.980.699.623,00 ke RSUD Brebes sebesar Rp210.000.000,00, RSUD Bumiayu sebesar Rp105.000.000,00. BLUD Brebes menerima mutasi masuk sebesar Rp330.465.941,00 dari Dinas Kesehatan. Mutasi keluar ke BLUD Tanjung sebesar Rp380.799.629,00, Mutasi keluar ke BLUD Banjarharjo sebesar Rp163.977.548,00, Mutasi keluar ke BLUD Paguyangan sebesar Rp121.880.195,00 dan Mutasi keluar ke BLUD Bumiayu sebesar Rp667.176.310,00.
 - Mutasi keluar BLUD Tanjung sebesar Rp16.380.000,00 ke Dindikpora
 - Mutasi keluar BNK sebesar Rp65.848.775,00
 - Mutasi keluar BPBD sebesar Rp87.000.000,00 ke Satpol PP
 - Mutasi keluar Dinkominfotik sebesar Rp322.960.000,00
 - Mutasi Keluar Sekretariat Daerah sebesar Rp2.026.095.050,00
 - Mutasi Keluar Sekretariat DPRD sebesar Rp139.700.000,00
 - Mutasi Keluar Kecamatan Tonjong sebesar Rp180.000.000,00
 - Mutasi Keluar Kecamatan Paguyangan sebesar Rp180.000.000,00
 - Mutasi Keluar Kecamatan Bantarkawung sebesar Rp180.000.000,00
 - Mutasi Keluar Kecamatan Salem sebesar Rp180.000.000,00
 - Mutasi Keluar PPKD sebesar Rp12.650.000,00 berupa 1 unit sepeda motor yang dimutasi ke BKPSDMD.
- h. Rusak Berat sebesar Rp2.954.706.411,00 terdapat pada SKPD:
- Dindikpora sebesar Rp1.943.611.111,00
 - DP3KB sebesar Rp91.566.000,00 sebanyak 42 unit peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:028/2904/2020 - 1/12/2020
 - Dinkominfotik sebesar Rp447.378.000,00 sebanyak 39 unit peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 028/1765/2020
 - Dinarpus sebesar Rp97.365.000,00 sebanyak 40 unit sesuai dengan Surat Keputusan SEKDA No.028/2554/2020
 - Kecamatan Bulakamba sebesar Rp99.566.000,00 sebanyak 37 unit peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:028/1796 Tahun 2020
 - BKPSDMD sebesar Rp275.220.300,00 sebanyak 57 unit peralatan dan mesin.
- i. Tidak Ditemukan sebesar Rp61.846.354,00 pada Dindikpora.
- j. Penghapusan Barang Baik dan rusak Ringan sebesar Rp5.570.952.191,00 terdapat pada SKPD:
- Dinas Kesehatan sebesar Rp65.000.000,00 berupa 1 unit sepeda motor senilai Rp 5.000.000,00 dan 1 unit Isuzu Phanter senilai Rp 60.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor: 050/465/2020.



- BLUD Tanjung sebesar Rp465.350.000,00 berupa 1 unit Sepeda Motor Viva Samson senilai Rp19.850.000,00 dan 1 unit Ambulance senilai Rp445.500.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor :050/465/2020
- BLUD Banjarharjo sebesar Rp448.250,00 berupa 1 unit Timbangan Dewasa di Puskesmas Cikesal sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor: 050/566/2020.
- RSUD Bumiayu sebesar Rp1.688.767.500,00 berupa 129 unit peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 050/559/2020
- PLH BNK sebesar Rp4.250.000,00 berupa 1 unit AC
- Dinsos sebesar Rp114.000.000,00 berupa 1 unit Daihatsu Xenia sesuai dengan Surat keputusan Penghapusan Nomor: 050/465/2020
- DP3KB sebesar Rp180.610.690,00 berupa 7 unit Sepeda Motor senilai Rp90.893.195,00 sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/465/2020 Tanggal 28 September 2020. Penghapusan peralatan lainnya sejumlah 12 unit barang sebesar Rp89.717.495,00 sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/354/2020 tanggal 6 Juli 2020.
- DLHPS sebesar Rp380.000.000,00 berupa 4 unit Dump Truck.
- Dinpermades sebesar Rp121.919.000,00 berupa 6 unit kendaraan bermotor sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor:050/465/tahun 2020.
- Dinhub sebesar Rp398.145.000,00 berupa 1 Unit Pemancar VHF/FM Stationary (tower antenna radio) sesuai dengan surat keputusan Penghapusan Nomor: 050/271/2020.
- Dinkominfotik sebesar Rp110.500.000,00 berupa 1 unit Sepeda Motor dan 1 Unit Kendaraan Daihatsu Taruna sesuai dengan SURAT Keputusan Penghapusan Nomor: 050/465/2020.
- Dinkopumdag sebesar Rp11.500.000,00 berupa 2 unit sepeda motor sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor: 050/465/2020.
- Dinarpus sebesar Rp12.000.000,00 berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor: 050/465/2020.
- DPKP sebesar Rp145.147.251,00 berupa 34 unit Peralatan Mesin senilai Rp135.147.251,00 sesuai dengan Surat keputusan penghapusan Nomor:050/270 Tahun 2020, dan 1 unit Sepeda Motor senilai Rp 10.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/465/ 2020.
- Dinperinaker sebesar Rp37.585.000,00 berupa 24 unit Peralatan dan Mesin sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/418 Tahun 2020.
- Sekretariat Daerah sebesar Rp 1.328.177.200,00 sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/101 Tahun 2020 pada 38 unit Peralatan Mesin senilai Rp432.032.500,00. Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/465 Tahun 2020 berupa 3 Sepeda Motor dan 1 unit Isuzu Phanter. Penghapusan 1 Toyota Camry senilai Rp692.600.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:050/552 Tahun 2020.



- Kecamatan Bantarkawung sebesar Rp6.000.000,00 berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor:050/465/2020.
 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Baperlitbangda) sebesar Rp 22.750.000,00 berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/465/2020.
 - BPPKAD sebesar Rp478.802.300,00 berupa 7 unit kendaraan dinas senilai Rp232.332.000,00 sesuai Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/465/2020 dan Penghapusan pada 63 unit Peralatan Mesin lainnya senilai Rp246.470.300,00 sesuai dengan Surat Keputusan penghapusan Nomor: 050/567/2020.
- k. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp931.777.000,00 terdapat pada SKPD :
- Dindikpora sebesar Rp230.950.000,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp98.000.000,00
 - BLUD Tanjung sebesar Rp63.000.000,00
 - RSUD Brebes sebesar Rp17.500.000,00
 - RSUD Bumiayu sebesar Rp120.000.000,00
 - Dinperwaskim sebesar Rp39.427.000,00
 - Kesbangpol sebesar Rp34.800.000,00
 - DPMPTSP sebesar Rp49.950.000,00
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp99.450.000,00
 - BPPKAD sebesar Rp79.500.000,00
 - BKPSDMD sebesar Rp99.200.000,00
- l. Koreksi Kurang (penghapusan tahun sebelumnya) sebesar Rp13.925.000,00 pada PPKD berupa 1 unit sepeda motor sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 050/806/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- m. Koreksi Kurang (reklasifikasi antar kode aset tetap) sebesar Rp117.930.000,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
GEDUNG DAN BANGUNAN	1.607.290.367.118,00	1.505.249.745.826,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.607.290.367.118,00 dan Rp1.505.249.745.826,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.122

Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan

URAIAN	JUMLAH
Gedung dan Bangunan	
SALDO AWAL	1.505.249.745.826,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	JUMLAH
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	100.262.838.306,00
REKLAS DARI B. PEGAWAI	28.200.000,00
REKLAS DARI B. JASA	44.854.000,00
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	569.798.000,00
HIBAH MASUK (KOMITE SEKOLAH)	284.000.000,00
MUTASI MASUK	8.672.108.000,00
REKLAS ASET TETAP DARI KDP	669.377.000,00
KOREKSI TAMBAH (INVENTARISASI BARANG BELUM TERCATAT/BERLEBIH)	438.200.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	82.958.395.156,00
KOREKSI TAMBAH (PENILAIAN ASET TETAP)	2.387.149.521,00
JUMLAH PENAMBAHAN	196.314.919.983,00
PENGURANGAN :	
REKLAS KE B. PEMELIHARAAN	894.845,00
REKLAS KE B. JASA	182.976.000,00
MUTASI KELUAR	8.672.108.000,00
RUSAK BERAT	2.241.087.190,00
TIDAK DITEMUKAN	101.500,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	118.380.000,00
KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	83.058.751.156,00
JUMLAH PENGURANGAN	94.274.298.691,00
SALDO AKHIR 2020	1.607.290.367.118,00

Terdapat kenaikan saldo aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp102.040.621.292,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2020.

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp196.314.919.983,00 disebabkan:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.262.838.306,00
- Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp28.200.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp26.500.000,00 dan Dinsos sebesar Rp1.700.000,00 berupa honorarium tim pengadaan yang telah diatribusi ke aset tetapnya.
- Reklas dari Belanja Jasa sebesar Rp44.854.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp35.729.000,00 berupa DE rehab Gudang Farmasi. Reklas dari Belanja Jasa sebesar Rp4.125.000,00 pada Dinkopumdag berupa honor tim pengadaan yang telah diatribusi ke gedung dan bangunan. Reklas dari Belanja Jasa sebesar Rp5.000.000,00 pada DPKH berupa belanja pemasangan listrik yang diatribusi ke Gedung dan Bangunan.
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp569.798.000,00 terdapat pada SKPD:
 - Reklas dari Belanja Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp233.995.000,00 berupa rehab gedung dan jaringan listrik.
 - Reklas dari Belanja Pemeliharaan pada RSUD Brebes sebesar Rp119.024.000,00 berupa penambahan ruang isolasi semi permanen dan Screening Rawat Jalan semi permanen.



- Dinsos reklas dari belanja pemeliharaan sebesar Rp50.902.000,00 berupa rehab gedung kantor.
- Dinas Perikanan reklas dari belanja pemeliharaan sebesar Rp91.425.000,00 berupa rehab bangunan gedung kantor Dinas Perikanan.
- Kecamatan Bantarkawung Reklas dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 74.452.000,00 rehab aula yang dialihfungsikan menjadi gedung paten.
- e. Hibah masuk (komite sekolah) sebesar Rp284.000.000,00.
- f. Mutasi masuk sebesar Rp8.672.108.000,00 terdapat pada:
 - Mutasi Masuk BLUD Banjarharjo sebesar Rp3.852.110.000,00 dari Dinas Kesehatan berupa rehab Puskesmas Sitanggal.
 - Mutasi Masuk BLUD Paguyangan sebesar Rp4.418.402.000,00 dari Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Ruang Laboratorium Puskesmas Sirampog senilai Rp199.144.000,00, Rehab Puskesmas Paguyangan senilai Rp4.069.810.000,00, dan Pagar Keliling Pustu Benda senilai Rp149.448.000,00.
 - Mutasi Masuk BLUD Bumiayu sebesar Rp396.596.000,00 dari Dinas Kesehatan berupa Rehab Pustu Karangpari senilai Rp160.490.200,00, Rehab Pustu Waru senilai Rp37.763.800,00, Rehab ringan Pustu Negara Daha senilai Rp160.826.500,00, Rehab ringan Pustu Pruwatan senilai Rp37.515.500,00.
 - Mutasi Masuk DLHPS sebesar Rp5.000.000,00 dari Kecamatan Brebes berupa bangunan eks kelurahan Gandasuli.
- g. Reklas Aset Tetap dari KDP sebesar Rp669.377.000,00 terdapat pada Kecamatan Ketanggungan sebesar Rp199.200.000,00 berupa Gedung Pertemuan dan Pagar Keliling Gedung Pertemuan. Kecamatan Larangan terdapat Reklas Aset Tetap dari KDP sebesar Rp470.177.000,00 berupa Rumah Dinas Kecamatan Larangan.
- h. Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang belum Tercatat/ Berlebih) sebesar Rp438.200.000,00 terdapat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp408.200.000,00 berupa 3 bangunan pagar sekolah, 2 sumur, 1 tandon air dan 3 rehab ruang kelas. Koreksi lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp30.000.000,00 berupa Sanggar Kesenian.
- i. Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) sebesar Rp82.958.395.156,00 terdapat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp9.512.263,00. BPBD sebesar Rp99.178.000,00 berupa Bangunan Gudang Tertutup dan Dinas Perhubungan sebesar Rp82.849.704.893,00 berupa jaringan listrik.
- j. Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap) sebesar Rp2.387.149.521,00. Penilaian Gedung dan Bangunan dilakukan oleh Tim Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terdapat pada SKPD:
 - Dindikpora sebesar Rp1.982.923.521,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp32.990.000,00
 - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar Rp144.950.000,00
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp156.296.000,00
 - Kecamatan Salem sebesar Rp69.990.000,00



Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.607.290.367.118,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- a. Reklas ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp894.845,00 terdapat pada SKPD BLUD Tanjung sebesar Rp173.845,00 dan Satpol PP sebesar Rp721.000,00
- b. Reklas ke Belanja Jasa sebesar Rp182.976.000,00 pada SKPD DPU.
- c. Mutasi Keluar antar SKPD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.667.108.000,00 dan Kecamatan Brebes sebesar Rp5.000.000,00.
- d. Rusak Berat sebesar Rp2.241.087.190,00 pada BLUD Banjarharjo sebesar Rp2.240.987.190,00 berupa Gedung Pustu Wanacala senilai Rp358.206.450,00, Gedung Rawat Inap Puskesmas Ketanggungan senilai Rp1.087.736.350,00, dan Gedung Rawat Jalan Puskesmas Sitanggal senilai Rp795.044.390,00. Rusak Berat lainnya pada Kecamatan Salem sebesar Rp100.000,00 berupa rumah dinas.
- e. Tidak Ditemukan sebesar Rp101.500,00 pada Dindikpora
- f. Penghapusan Barang Baik/ Rusak Ringan sebesar Rp118.380.000,00 terdapat pada SKPD:
 - Dindikpora sebesar Rp27.493.000,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp87.000,00 penghapusan garasi tahun 1992 sesuai Surat Keputusan Nomor 050/475/2020
 - Dinbudpar sebesar Rp90.800.000,00 penghapusan Bangunan gedung untuk pos jaga (Shelter PKL Curug Cantel Sirampog) tahun perolehan 2017 sesuai Surat Keputusan Nomor 050/419/2020.
- g. Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) sebesar Rp83.058.751.156,00 terdapat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp9.512.263,00. Koreksi Kurang pada Dinhub sebesar Rp82.849.704.893,00 berupa jaringan listrik dan Kecamatan Brebes sebesar Rp199.534.000,00 berupa Gedung Serbaguna Kelurahan Gandasuli.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
JALAN IRIGASI	2.483.493.095.005,00	2.314.413.579.543,00
JARINGAN		

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.483.493.095.005,00 dan Rp2.314.413.579.543,00. Mutasi selama tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.123

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan

URAIAN	JUMLAH
Peralatan dan Mesin	
SALDO AWAL	2.314.413.579.543,00
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	159.464.743.896,00
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	99.858.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	JUMLAH
HIBAH MASUK (PIHAK KE-3)	10.806.091.316,00
MUTASI MASUK	3.580.052.400,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	49.857.000,00
JUMLAH PENAMBAHAN	174.000.602.612,00
PENGURANGAN :	
REKLAS KE B. PEMELIHARAAN	46.500.000,00
MUTASI KELUAR	3.580.052.400,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	896.874.750,00
KOREKSI KURANG (HIBAH KELUAR TAHUN SEBELUMNYA)	397.660.000,00
JUMLAH PENGURANGAN	4.921.087.150,00
SALDO AKHIR 2020	2.483.493.095.005,00

Terdapat kenaikan saldo aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp169.079.515.462,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2020, yang terdiri dari:

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp174.000.602.612,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- Belanja Modal sebesar Rp159.464.743.896,00.
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp99.858.000,00 pada DPSDAPR berupa DE Saluran sekunder irigasi.
- Hibah Masuk (Pihak Ke 3) sebesar Rp10.806.091.316,00
- Mutasi Masuk sebesar Rp3.580.052.400,00 terdapat pada SKPD:
 - BLUD Brebes sebesar Rp321.460.000,00 berupa IPAL pada Puskesmas Kaligangsa mutasi masuk dari Dinas Kesehatan.
 - DPU sebesar Rp333.624.000,00 berupa Jalan Aspal Jl. Sunan Gunungjati Kelurahan LimbanganWetan senilai Rp108.535.000,00, Jalan Beton Jalan Sunan Gunungjati Kelurahan Limbangan Wetan senilai Rp180.382.000,00 dan Perbaikan saluran Drainase sebesar Rp44.707.000,00
 - Dinperwaskim sebesar Rp2.924.968.400,00 berupa 10 Jalan khusus komplek senilai Rp1.149.818.700,00 dan 14 Jalan Desa senilai Rp1.175.149.700,00 mutasi masuk dari Kecamatan Brebes.
- Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) sebesar Rp49.857.000,00 pada DPSDAPR

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.921.087.150,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- Reklas ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 46.500.000,00 pada DPSDAPR berupa honor penerima hasil pekerjaan kegiatan pemeliharaan dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- Mutasi Keluar sebesar Rp3.580.052.400,00 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp321.460.000,00 berupa IPAL pada Puskesmas Kaligangsa.



- DPU mutasi keluar sebesar Rp480.489.700,00 mutasi ke Dinperwaskim berupa Peningkatan di Jalan Kalimantan, Pembangunan Jalan Kota Baru dan Drainase Jalan Darusalam di Saditan.
- Kecamatan Brebes sebesar Rp2.778.102.700,00 mutasi keluar ke DPU sebesar Rp333.624.000,00 dan ke Dinperwaskim sebesar Rp2.444.478.700,00.
- c. Penghapusan Barang Baik dan Rusak Ringan sebesar Rp896.874.750,00 terdapat pada DPKP sebesar Rp878.858.000,00 berupa sumur pompa senilai Rp288.220.000,00 dan Bangunan Bagi senilai Rp590.638.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 050/184/2020. Penghapusan lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp18.016.750,00 berupa bangunan pengambilan dari sumur artesis dan bak penampungan air sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 050/353/2020.
- d. Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya) sebesar Rp397.660.000,00 pada Dinas Perikanan berupa bangunan pengairan pasang surut.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
ASET TETAP LAINNYA	217.732.746.679,34	190.618.729.129,34

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 217.732.746.679,34 dan Rp190.618.729.129,34 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.124

Rincian Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Lainnya	
SALDO AWAL	190.618.729.129,34
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	29.775.963.153,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	1.200.000,00
HIBAH MASUK (KOMITE SEKOLAH)	42.800.000,00
KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	51.069.470,00
JUMLAH PENAMBAHAN	29.871.032.623,00
PENGURANGAN :	
EXTRAKOMTABLE	141.844.390,00
RUSAK BERAT	2.050.734.509,00
TIDAK DITEMUKAN	189.737.014,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	225.664.160,00
KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	149.035.000,00
JUMLAH PENGURANGAN	2.757.015.073,00
SALDO AKHIR 2020	217.732.746.679,34



Terdapat kenaikan saldo aset tetap lainnya sebesar Rp27.114.017.550,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2020, yang terdiri dari:

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.871.032.623,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- a. Belanja Modal sebesar Rp29.775.963.153,00
- b. Hibah Masuk (Pemerintah Pusat) sebesar Rp1.200.000,00 pada Dindikpora berupa buku.
- c. Hibah Masuk (Komite Sekolah) sebesar Rp42.800.000,00 pada Dindikpora berupa alat music.
- d. Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun sebelumnya) sebesar Rp51.069.470,00 pada Dinarpus berupa buku hibah masuk dari CV. Naral Mitra Sejahtera sebanyak 1.000 buku sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 3.2/KABKOTA-BAST/NMS.IX/2018.

Pengurangan Aset tetap lainnya sebesar Rp2.757.015.073,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- a. Extrakomtable sebesar Rp141.844.390,00 pada Dindikpora
- b. Rusak Berat sebesar Rp2.050.734.509,00 pada SKPD Dindikpora sebesar Rp2.050.284.509,00 dan Dinarpus sebesar Rp450.000,00
- c. Tidak Ditemukan sebesar Rp189.737.014,00 pada Dindikpora
- d. Penghapusan Barang Baik dan Rusak Ringan sebesar Rp225.664.160,00 pada Dinarpus berupa buku sesuai Surat Keputusan Nomor 050/565/2020.
- e. Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) sebesar Rp149.035.000,00 terdapat pada SKPD DPSDAPR sebesar Rp49.857.000,00 berupa DE dari Rekening buku ke kode Saluran Sekunder dan BPBD sebesar Rp99.178.000,00 berupa DE ke Bangunan Gedung.

Aset Tetap Renovasi

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 bahwa aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Aset Tetap Renovasi dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.125

Daftar Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Renovasi

No	Kode Barang	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	1.3.5.07.01.01.007	1945	Jaringan Irigasi Prupuk	1	38.229.225.955,00
2	1.3.5.07.01.01.007	1999	Saluran Sekunder Tanjung	1	14.524.715.250,00
3	1.3.5.07.01.01.007	2016	Renovasi Pasar Desa Klampok	1	197.603.000,00
	Jumlah				52.951.544.205,00

1) Aset Tetap Renovasi (ATR) DPSDAPR

Aset tetap renovasi berupa konstruksi jaringan irigasi bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp52.753.941.205,00 yang tercatat di KIB E Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Rekonsiliasi atas Aset Tetap Renovasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019 dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dengan hasil bahwa 30 kegiatan sebesar Rp10.975.245.500,00 merupakan kewenangan pusat (BBWS Cimanuk Cisanggarung). Rekonsiliasi kedua telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, dengan hasil bahwa Aset Tetap Renovasi Pemerintah Kabupaten Brebes sebanyak 187 kegiatan dengan nilai Rp18.537.780.455,00 merupakan kewenangan pemerintah pusat (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana), sedangkan sisanya sebesar Rp23.240.915.250,00 merupakan kewenangan pemerintah kabupaten Brebes. Aset Tetap Renovasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat belum dilakukan proses hibah dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

2) Aset Tetap Renovasi (ATR) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Aset Tetap Renovasi yang tercatat pada KIB Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp197.603.000,00 perolehan tahun 2016 merupakan renovasi pasar pada Desa Klampok, Aset Tetap Renovasi Pasar Klampok belum dilakukan hibah dari Pemerintah Kabupaten Brebes ke Pemerintah Desa.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	65.879.763.604,00	9.740.753.000,00



Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 65.879.763.604,00 dan Rp9.740.753.000,00. Mutasi selama tahun 2020 adalah terdapat kenaikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp56.139.010.604,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2020 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.126
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	JUMLAH
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
SALDO AWAL	9.740.753.000,00
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	56.408.557.604,00
REKLAS DARI B. PEGAWAI	2.100.000,00
REKLAS DARI B. JASA	695.696.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	199.534.000,00
JUMLAH PENAMBAHAN	57.305.887.604,00
PENGURANGAN :	
REKLAS DARI KDP KE ASET TETAP	1.166.877.000,00
JUMLAH PENGURANGAN	1.166.877.000,00
SALDO AKHIR 2020	65.879.763.604,00

Penambahan KDP sebesar Rp57.305.887.604,00 selama tahun 2020 berasal dari:

- Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp56.408.557.604,00.
- Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.100.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa honor PPKOM kegiatan pembangunan RSUD Ketanggungan.
- Reklas dari Belanja Jasa sebesar Rp695.696.000,00 pada DPU berupa penyusunan DE Fisik tahun 2021 untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap sebesar Rp199.534.000,00 pada Kecamatan Brebes berupa Gedung Serbaguna Kelurahan Gandasuli.

Pengurangan KDP sebesar Rp1.166.877.000,00 selama tahun 2020 berasal dari Reklas dari KDP ke Aset Tetap sebesar Rp1.166.877.000,00 terdapat pada SKPD:

- RSUD Bumiayu sebesar Rp497.500.000,00 berupa elevator/Lift.
- Kecamatan Ketanggungan sebesar Rp199.200.000,00 berupa Gedung Pertemuan dan Pagar Gedung Pertemuan.
- Kecamatan Larangan sebesar Rp470.177.000,00 berupa Rumah Dinas Camat.



Rincian KDP dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.127

Rincian Konstruksi Dalam pengerjaan Tahun 2020 dan 2019

SKPD	NILAI KDP 2020	NILAI KDP 2019
DPU	64.305.402.604,00	8.091.910.000,00
RSUD BUMIAYU	-	497.500.000,00
KEC. LARANGAN	-	470.177.000,00
DINKOPUMDAG	610.348.000,00	481.966.000,00
KEC. KETANGGUNGAN	-	199.200.000,00
KEC. BREBES	246.507.000,00	-
DINAS KESEHATAN	163.699.000,00	-
BLUD BREBES	49.115.000,00	-
BLUD TANJUNG	85.119.000,00	-
DPSDAPR	49.650.000,00	-
DLHPS	48.900.000,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	109.257.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN	198.908.000,00	-
SET.DPRD	12.858.000,00	-
JUMLAH	65.879.763.604,00	9.740.753.000,00

Penjelasan tabel 5.134:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPU senilai Rp64.305.402.604,00 merupakan saldo KDP tahun 2019 senilai Rp8.091.910.000,00 ditambah Detail Engineering (DE) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 senilai Rp56.213.492.604,00.

Pekerjaan Pembangunan Kantor Terpadu Kabupaten Brebes Tahap I Tahun 2008 senilai Rp8.091.910.000,00 dilaksanakan oleh PT Adi Bima Pratama sesuai kontrak nomor 050/6955/SPP-TU/VI/2008 sebagai pelaksana pekerjaan fisik dan CV Karya Pratama Consultan sesuai kontrak nomor 050/9376/SSP-TU/IX/2008 sebagai pelaksana pengawasan. Di samping itu juga dilaksanakan oleh CV Kertanangga sebagai perencana bangunan Kantor BAPPEDA yang berlokasi di lingkungan Kantor Terpadu tersebut. Seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai perjanjian/kontrak.

Bangunan Kantor Terpadu direncanakan sebagai bangunan gedung 6 (enam) lantai dan pembangunannya meliputi beberapa tahap. Tahap I ini terdiri dari pekerjaan struktur bangunan bagian bawah (sub structure) berupa pondasi sarang laba-laba dan pekerjaan struktur atas (upper structure) lantai 2 dan lantai 3 yang meliputi pekerjaan pelat, balok dan kolom.

Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Kantor Terpadu Tahap I Tahun 2008 tersebut masih belum dilanjutkan pembangunannya sehingga masih tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.



- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 pada RSUD Bumiayu senilai Rp497.500.000,00 berupa pembangunan lift/elevator, yang di reklas ke aset tetap senilai Rp487.500.000,00 sedangkan yang senilai Rp10.000.000,00 di koreksi kurang karena ada perubahan nilai hutang. Kecamatan Larangan terdapat KDP berupa bangunan rumah dinas camat senilai Rp470.177.000,00 telah direklasifikasi ke Aset Tetap.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DinkopUmdag merupakan Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal tahun 2019 dan Rehab Pasar Belakang Kodim dan Pasar Seng yang belum dilanjutkan pembangunannya.
- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 pada Kecamatan Ketanggungan senilai Rp199.200.000,00 berupa rehab gedung.
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kecamatan Brebes senilai Rp246.507.000,00 berupa rehab gedung kelurahan dan pembangunan jalan di lingkungan kelurahan.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp163.699.000,00 berupa Detail Engineering (DE) pembangunan puskesmas rawat inap dan RSUD Ketanggungan.
- g. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada BLUD Brebes senilai Rp49.115.000,00 berupa Detail Engineering (DE) Pembangunan Gedung Mampu Persalinan Puskesmas Wanasari.
- h. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada BLUD Tanjung senilai Rp85.119.000,00 berupa Detail Engineering (DE)
- i. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPSDAPR senilai Rp49.650.000,00 berupa Detail Engineering (DE) Rehab Jaringan Irigasi dan Air Baku.
- j. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DLHPS senilai Rp48.900.000,00 berupa Detail Engineering (DE) Perluasan TPS Kaliwlingi.
- k. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan senilai Rp109.257.000,00 berupa Detail Engineering (DE) Pembangunan Terminal Tipe C Ketanggungan.
- l. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan senilai Rp198.908.000,00 berupa Detail Engineering (DE)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Sekretariat DPRD senilai Rp12.858.000,00 berupa Detail Engineering (DE) Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	<u>31 Des 2020</u>	<u>31 Des 2019</u>
Akumulasi Penyusutan	(2.357.043.131.188,01)	(1.485.476.933.359,01)

Saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar minus Rp2.357.043.131.188,01, sedangkan saldo akhir per tahun 2019 adalah sebesar minus Rp1.485.476.933.359,01. Adapun rincian saldo per SKPD disajikan dalam tabel 5.128 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.128
Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD

Uraian	Saldo Th 2020	Saldo Th 2019
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	(277.572.405.421,00)	(324.907.357.315,00)
DINAS KESEHATAN	(14.151.599.061,00)	(12.246.260.092,00)
UPTD PUSKESMAS BREBES	(21.352.970.371,00)	(16.038.634.424,00)
UPTD PUSKESMAS TANJUNG	(27.431.403.515,00)	(22.602.503.583,00)
UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	(26.606.540.097,00)	(21.023.153.952,00)
UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	(13.202.138.932,00)	(10.230.322.041,00)
UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	(16.340.119.387,00)	(13.345.729.584,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	(149.574.372.233,00)	(125.176.754.082,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	(54.195.080.738,00)	(44.847.571.651,00)
DINAS PEKERJAAN UMUM	(1.281.268.669.819,00)	(562.670.422.864,00)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	(209.304.960.636,00)	(106.274.158.525,00)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(26.139.013.972,00)	(21.687.818.600,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(5.126.432.633,00)	(4.572.111.959,00)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(611.246.216,00)	(521.660.684,00)
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	(414.331.025,00)	(443.278.069,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(4.170.626.859,00)	(3.726.067.896,00)
DINAS SOSIAL	(1.829.989.153,00)	(1.679.475.328,00)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(6.165.161.241,00)	(5.610.797.905,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	(22.856.769.268,00)	(19.629.113.793,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(5.903.089.069,00)	(4.825.209.363,00)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(1.610.423.016,00)	(1.514.824.683,00)
DINAS PERHUBUNGAN	(26.146.240.172,00)	(21.260.596.684,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	(5.758.050.134,00)	(5.374.130.915,00)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	(15.937.294.857,00)	(9.688.018.923,00)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	(3.075.238.736,00)	(2.185.676.946,00)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(9.808.577.269,00)	(7.460.419.292,00)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	(2.578.525.799,00)	(2.463.309.120,00)
DINAS PERIKANAN	(8.185.498.929,00)	(6.757.325.443,00)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(7.130.438.155,00)	(6.295.417.839,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(7.737.045.870,00)	(6.200.447.294,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	(3.504.087.739,00)	(2.961.510.152,00)
SEKRETARIAT DAERAH	(37.787.996.225,00)	(34.509.927.709,00)
SEKRETARIAT DPRD	(17.876.958.364,00)	(16.113.576.154,00)
KECAMATAN BREBES	(3.186.985.032,00)	(2.538.636.791,00)
KECAMATAN JATIBARANG	(1.089.691.570,00)	(874.830.220,00)
KECAMATAN WANASARI	(1.052.414.714,00)	(803.958.346,00)
KECAMATAN SONGGOM	(1.263.686.366,00)	(890.534.832,00)
KECAMATAN BULAKAMBA	(1.189.246.605,00)	(937.800.869,00)
KECAMATAN TANJUNG	(1.157.679.929,00)	(935.659.792,00)
KECAMATAN LOSARI	(970.768.518,00)	(839.768.629,00)
KECAMATAN KERSANA	(1.338.645.511,00)	(1.069.972.400,00)
KECAMATAN KETANGGUNGAN	(1.096.751.546,00)	(1.038.004.169,00)
KECAMATAN BANJARHARJO	(1.362.973.642,00)	(1.090.324.242,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Uraian	Saldo Th 2020	Saldo Th 2019
KECAMATAN LARANGAN	(1.184.240.649,00)	(1.004.284.247,00)
KECAMATAN TONJONG	(1.160.220.578,00)	(1.001.287.515,00)
KECAMATAN BUMIAYU	(1.145.533.751,00)	(908.340.145,00)
KECAMATAN PAGUYANGAN	(956.970.205,00)	(857.967.036,00)
KECAMATAN SIRAMPOG	(1.361.099.858,00)	(1.080.958.487,00)
KECAMATAN BANTARKAWUNG	(1.541.349.135,00)	(1.606.321.729,00)
KECAMATAN SALEM	(1.410.792.901,01)	(1.215.479.995,01)
INSPEKTORAT	(2.270.779.783,00)	(2.008.792.769,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(3.420.132.076,00)	(3.235.185.417,00)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(8.751.395.655,00)	(8.220.682.376,00)
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(3.479.067.359,00)	(3.463.633.439,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	(5.299.410.894,00)	(5.010.927.050,00)
JUMLAH	(2.357.043.131.188,01)	(1.485.476.933.359,01)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan asset tetap selama tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.129 berikut ini:

Tabel 5.129

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	NOMINAL
I	SALDO AWAL	1.485.476.933.359,01
II	PENAMBAHAN :	
	BEBAN PENYUSUTAN	333.744.482.487,00
	MUTASI MASUK (ANTAR SKPD)	1.521.249.994,00
	REKLASIFIKASI TAMBAH ANTAR KODE BERUPA BANGUNAN TUGU DAN BARANG BERCORAK KESENIAN	3.306.978.076,00
	KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL PEMBULATAN	1.054,00
	KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL PERUBAHAN UMUR EKONOMIS	152.783.995,00
	KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL KURANG CATAT	42.144.771.639,00
	KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL PINDAH KONDISI KE BAIK	21.675.000,00
	KOREKSI TAMBAH PROSES KAPITALISASI	595.446.565.068,00
	KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL	543.843.637,00
	KOREKSI TAMBAH SALDO AKHIR PEMECAHAN ASET JEMBATAN	7.933.332,00
	JUMLAH TAMBAH	976.890.284.282,00
III	PENGURANGAN :	
	MUTASI KELUAR (ANTAR SKPD)	1.521.249.994,00
	REKLASIFIKASI KURANG ANTAR KODE BERUPA BANGUNAN TUGU DAN BARANG BERCORAK KESENIAN	3.306.978.076,00
	PENGHAPUSAN ASET TETAP	5.848.800.783,00
	PINDAH DARI ASET TETAP B/RR KE BARANG RUSAK BERAT	3.311.452.116,00
	KOREKSI KURANG SALDO AWAL PEMBULATAN	1.118,00
	KOREKSI KURANG SALDO AWAL PERUBAHAN UMUR EKONOMIS	1.919.636.221,00
	KOREKSI KURANG PROSES KAPITALISASI	87.493.336.841,00
	KOREKSI KURANG SALDO AWAL	608.584.986,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	NOMINAL
	KOREKSI KURANG SALDO AWAL PINDAH KODE JIJ KE GEDUNG BERUPA PEMANCAR	1.314.046.318,00
IV	JUMLAH KURANG	105.324.086.453,00
V	SALDO AKHIR	2.357.043.131.188,01

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan per SKPD per jenis aset disampaikan pada lampiran 5.7, 5.8, 5.9 dan 5.10

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun 2019 adalah nihil/nol.

5.3.1.5 Aset Lainnya

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
Aset Lainnya	187.274.447.973,65	172.632.294.924,85

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp187.274.447.973,65 dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.130 berikut ini:

Tabel 5.130
Aset Lainnya

Uraian	Saldo Th. 2020	Saldo Th. 2019
Tagihan Jangka Panjang	446.158.424,00	453.467.424,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	242.975.500,00	242.975.500,00
Aset Tidak Berwujud	1.528.896.484,00	1.259.599.201,00
Aset Lain-Lain	185.056.417.565,65	170.676.252.799,85
Jumlah	187.274.447.973,65	172.632.294.924,85

Aset lainnya terdiri dari:

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp446.158.424,00 merupakan reklasifikasi dari piutang TP-TGR yang telah kadaluarsa pada tahun 2019.

Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.131
Tagihan Jangka Panjang (TP-TGR)

Nama Debitur	Saldo Aset Lainnya TGR Th 2019	Mutasi Th 2020	Saldo Aset Lainnya TGR Th 2020	Keterangan	
				SK Penetapan	Jangka Waktu
Irawati Fatmah, S.Ag	10.000.000,00		10.000.000,00	SK Bupati 970/474/2010	2 tahun
Ibnu Komara	14.718.000,00		14.718.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
H. AFS Noval Djuwawin	80.000.000,00		80.000.000,00	SK Bupati 970/736.B/2009	2 tahun
Drs H Rosichin	78.000.000,00		78.000.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
Sugianto, SIP	48.500.000,00		48.500.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun



Nama Debitur	Saldo Aset Lainnya TGR Th 2019	Mutasi Th 2020	Saldo Aset Lainnya TGR Th 2020	Keterangan	
				SK Penetapan	Jangka Waktu
Bagus Wijanarko, SE	10.816.000,00		10.816.000,00	SK Bupati 970/736.B/2009	2 tahun
Pulung Suhanda	-		-		
Anjar Asmoro P, SE	85.000.000,00		85.000.000,00	SK Bupati 970/474/2010	2 tahun
Bambang Setiawan, SP	12.200.000,00	(1.000.000,00)	11.200.000,00	SK Bupati 558 Thn 2013	2 tahun
Bambang Priambodo, SP	1.209.000,00	(1.209.000,00)	-	SK Bupati 558 Thn 2013	2 tahun
Indah Margiasih, BA	1.600.000,00	(100.000,00)	1.500.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
Sunarto	-		-	SK Bupati 970/657/2018	1 tahun
Caspin	7.900.000,00		7.900.000,00	SK Bupati 970/657/2018	1 tahun
Suharyanto	3.524.424,00		3.524.424,00	SK Bupati 970/657/2018	1 tahun
Abdul Gofur	100.000.000,00	(5.000.000,00)	95.000.000,00	SK Bupati 970/657/2018	1 tahun
JUMLAH	453.467.424,00	(7.309.000,00)	446.158.424,00		

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp242.975.500,00, merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas Bangun Kelola Serah (BKS) antara Pemkab Brebes dengan PT. Marianaguna Ekacipta Persada sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 511.3/03816 tanggal 20 Desember 1991.

Pemkab Brebes menyertakan modal berupa tanah senilai Rp232.475.500,00 terdiri atas tanah bekas terminal bus Bumiayu seluas 1.600 m², tanah Ruko Jatibarang seluas 582 m², tanah Ruko Ketanggungan seluas 620 m², tanah Ruko dan Kios Pasar Bawang Lama seluas 433 m², tanah Ruko dan Kios Pasar Bawang Klampok seluas 2.000 m² dan berupa bekas bangunan di lokasi tersebut senilai Rp.10.500.000,00.

5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Brebes berupa software memiliki saldo sebesar 5.749.710.959,00 dan akumulasi amortisasi sebesar minus Rp4.220.814.475,00 dengan mutasi yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.132
Aset Tidak Berwujud (Software)

URAIAN	Nominal
Saldo Awal	4.817.933.959,00
Penambahan :	
- Reklas AT ke ATB/Software	931.777.000,00
Pengurangan :	
- Penghapusan ATB/Software	-
Saldo Akhir	5.749.710.959,00

Penambahan software diperoleh dari belanja pengadaan software tahun 2020 yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud. Rinciannya dijelaskan sesuai tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.133
Penambahan Aset Tidak Berwujud (Software)

URAIAN	SKPD/UNIT	Saldo 2020
Aplikasi Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset	DINAS PENDIDIKAN	46.800.000,00
Microsoft [Windows Server STD CORE]	DINAS PENDIDIKAN	184.150.000,00
Aplikasi Persediaan Farmasi/SIMIF	DINAS KESEHATAN	98.000.000,00
Aplikasi SIMPUS	BLUD PUSK TANJUNG	63.000.000,00
Update Aplikasi Gizi dan Bank Darah	RSUD BREBES	7.500.000,00
Update Aplikasi SIM RS JKN Mobile	RSUD BREBES	10.000.000,00
Aplikasi SIM Rumah Sakit	RSUD BUMIAYU	120.000.000,00
Aplikasi Sistem Informasi Data Perumahan dan Kawasan	DINPERWASKIM	39.427.000,00
Website Kesbangpol Kab. Brebes	KESBANGPOLINMAS	34.800.000,00
Aplikasi Pendataan Pelaku Usaha	DPMPSTP	49.950.000,00
Aplikasi E-Monevbang	SETDA	49.750.000,00
Website JDIH	SETDA	49.700.000,00
Aplikasi SIM BPHTB	BPPKAD	79.500.000,00
Aplikasi Presensi	BKPSDMD	15.000.000,00
Aplikasi E-Kinerja	BKPSDMD	34.500.000,00
Aplikasi SIMPEG Integrasi	BKPSDMD	49.700.000,00
JUMLAH		931.777.000,00

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.134
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Software)

URAIAN	Nominal
Saldo Awal	(3.558.334.758,00)
Penambahan :	
- Beban Amortisasi	(647.479.717,00)
- Koreksi Amortisasi	(15.000.000,00)
Pengurangan :	
- Penghapusan Amortisasi ATB	-
Saldo Akhir	(4.220.814.475,00)

Penjelasan :

Beban amortisasi tahun 2020 sebesar Rp647.479.717,00

Koreksi akumulasi amortisasi sebesar Rp15.000.000,00 merupakan koreksi kurang catat Beban Amortisasi tahun 2019 pada Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset lain-lain sebesar Rp185.056.417.565,65 merupakan aset lainnya dikurangi akumulasi penyusutan (Rp385.294.195.085,00 – Rp200.237.777.519,35) dengan rincian disajikan dalam tabel 5.135 dan 5.136 berikut ini:

Tabel 5.135

Aset Lain-Lain

URAIAN	Saldo Th. 2020	Saldo Th. 2019
Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus	27.907.644.828,00	27.957.024.828,00
Aset Lain-lain Barang Rusak Berat	287.544.967.386,00	291.782.287.282,00
Aset Lain-lain lainnya	69.339.308.871,00	69.806.646.561,00
Aset Lainnya Detail Engineering (DE) belum dibangun fisiknya	502.274.000,00	502.274.000,00
Aset Tetap Belum Dinilai	-	-
JUMLAH	385.294.195.085,00	390.048.232.671,00

Tabel 5.136

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

URAIAN	SALDO 2020	Saldo Th. 2019
Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus	(28.968.710.219,98)	(28.976.823.819,98)
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/Tidak Ditemukan	(171.269.067.299,37)	(190.395.156.051,17)
JUMLAH	(200.237.777.519,35)	(219.371.979.871,15)

1. Aset Hibah Keluar Hasil Sensus belum dihapus sebesar Rp27.907.644.828,00 merupakan aset yang telah dihibahkan namun belum dihapuskan dari KIB. Rincian serta mutasinya disajikan dalam tabel 5.137 berikut ini:

Tabel 5.137

Aset Lain-Lain Lainnya –

Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus

SKPD/UNIT	Saldo Th. 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Th. 2020
DINAS KESEHATAN	1.812.954.487,00			1.812.954.487,00
DPSDAPR	4.822.041.750,00			4.822.041.750,00
DINAS PERHUBUNGAN	12.539.224.610,00			12.539.224.610,00
DINAS PERIKANAN	3.633.430.700,00			3.633.430.700,00
DINAS PERINDUSTRIAN NAKER	49.380.000,00		(49.380.000,00)	-
SEKRETARIAT DAERAH	4.867.012.781,00			4.867.012.781,00
PPKD	232.980.500,00			232.980.500,00
JUMLAH	27.957.024.828,00	-	(49.380.000,00)	27.907.644.828,00

Penjelasan :

- a. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada Dinas Kesehatan berupa posbindu kit yang telah diserahkan kepada Posyandu.



- b. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada DPSDAPR berupa jaringan listrik desa yang telah diserahkan kepada PLN.
 - c. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada Dinas Perhubungan berupa Terminal Tipe B yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
 - d. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada Dinas Perikanan berupa alat-alat produksi perikanan yang telah diserahkan kepada kelompok/masyarakat.
 - e. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada Dinas Perindustrian Tenaga Kerja saldo tahun 2019 berupa bantuan sumur dengan pompa untuk pabrik pengolahan minyak jarak telah diserahkan dan telah dihapuskan.
 - f. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.867.012.781,00 berupa Tanah Terminal dan tanah SMA/SMK yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp3.921.652.781,00, berupa Refrigerator Centrifuge sebesar Rp303.710.000,00 diserahkan kepada PMI, dan Lapangan Sepak Bola sebesar Rp641.650.000,00 diserahkan kepada Desa.
 - g. Aset Hibah Keluar Belum Dihapus pada PPKD berupa sumur resapan yang telah diserahkan kepada kelompok/masyarakat Ex-Dinas Kehutanan dan Perkebunan dimana SKPD tersebut telah dibubarkan.
2. Saldo Aset Tetap Rusak Berat/Tidak Ditemukan tahun 2020 adalah sebesar Rp287.544.967.386,00. Adapun mutasi barang rusak berat rinciannya disajikan dalam tabel 5.138 berikut ini:

Tabel 5.138

Mutasi Aset Lain-Lain - Aset Tetap Rusak Berat/Tidak Ditemukan

URAIAN	Nominal
SALDO AWAL 2020	291.782.287.282,00
PENAMBAHAN :	
PERUBAHAN KONDISI BAIK KE RUSAK BERAT/ TD	7.498.212.978,00
KOREKSI TAMBAH SALAH CATAT SALDO TAHUN LALU	23.655.457,00
JUMLAH	7.521.868.435,00
PENGURANGAN :	
PENGHAPUSAN BARANG RB DAN TD KARENA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN	(11.567.363.336,00)
REKLAS KE ASET TETAP	(21.675.000,00)
KOREKSI KURANG CATAT PENGHAPUSAN TAHUN LALU	(169.455.000,00)
KOREKSI LEBIH CATAT SALDO TAHUN LALU	(694.995,00)
JUMLAH	(11.759.188.331,00)
SALDO AKHIR 2020	287.544.967.386,00

Penjelasan :

- a. Penambahan berupa perubahan kondisi barang baik ke rusak berat selama tahun 2020 terjadi pada 8 (delapan) SKPD.
- b. Penambahan berupa koreksi tambah salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp23.655.457,00 terjadi pada Dinas Pendidikan.
- c. Pengurangan barang rusak berat karena penghapusan dan pemusnahan terjadi pada 27 (dua puluh tujuh) SKPD.



- d. Reklasifikasi Barang Rusak Berat/Tidak Ditemukan menjadi barang Baik/Rusak Ringan terjadi pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah berupa sepeda motor yang direkondisi serta sepeda motor tidak ditemukan yang telah diketahui keberadaannya.
3. Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp69.339.308.871,00 dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.139 berikut ini :

Tabel 5.139
Rincian Aset Lain-Lain Lainnya

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2020
Aset Tetap P3D yang telah diserahkan	64.278.716.395,00	-	-	64.278.716.395,00
Ex- Dana Bergulir Ternak yang berstatus macet	1.213.302.750,00	-	-	1.213.302.750,00
DE pembangunan LIFT Puskesmas Jatibarang	17.605.000,00	-	-	17.605.000,00
<u>Kas yang Dibatasi Penggunaannya :</u>				-
Retensi Jaminan Pemeliharaan (PPKD)	3.626.991.494,00	-	(11.189.690,00)	3.615.801.804,00
Retensi Jaminan Pemeliharaan (RSUD Brebes)	670.030.922,00	-	(456.148.000,00)	213.882.922,00
JUMLAH	69.806.646.561,00	-	(467.337.690,00)	69.339.308.871,00

Penjelasan :

- Aset Tetap P3D merupakan aset pada SMA/SMK yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun belum dihapuskan.
- Ex-Dana Bergulir ternak yang berstatus macet merupakan hasil reklasifikasi investasi dana bergulir berupa ternak kambing/domba dan sapi yang digulirkan pada kelompok ternak di Kabupaten Brebes pada tahun 2004 dan 2006 di mana perguliran tersebut mengalami kemacetan. Nilai awal realisasi pinjaman tersebut sebesar Rp1.591.901.000,00 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.213.302.750,00.
- Detail Engineering (DE) pembangunan lift puskesmas Jatibarang sebesar Rp17.605.000,00 belum dilaksanakan fisiknya.
- Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2020 pada PPKD sebesar Rp3.615.801.804,00 merupakan Kas Non Anggaran (bagian dari Kas Daerah) yang berupa retensi pemeliharaan pekerjaan fisik maupun Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) lainnya yang belum dibayarkan. Selama tahun 2020 Kas yang Dibatasi Penggunaannya dibayarkan kepada pihak ke-3 sebesar Rp11.189.690,00.
- Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2020 pada RSUD Brebes sebesar Rp213.882.922,00 merupakan Kas Non Anggaran (bagian dari Kas BLUD) yang berupa retensi pemeliharaan pekerjaan fisik maupun Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) lainnya yang belum dibayarkan. Selama tahun 2020 Kas yang Dibatasi Penggunaannya dibayarkan kepada pihak ke-3 sebesar Rp456.148.000,00.



4. Aset Lainnya Detail Engineering (DE) belum dibangun fisiknya sebesar Rp502.274.000,00 merupakan Aset Lainnya DE tahun 2019 pada Dinbudpar berupa DE pembuatan masterplan obyek wisata yang fisiknya belum dilaksanakan.
5. Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus sebesar tahun 2020 sebesar Rp28.968.710.219,98. Selama tahun 2020 penambahan merupakan koreksi salah catat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.750.000,00 dan pengurangan atas penghapusan sebesar Rp10.863.600,00.
6. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/Tidak Ditemukan mengalami penambahan dan pengurangan dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.140 berikut ini :

Tabel 5.140

Mutasi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/Tidak Ditemukan

URAIAN	Nominal
SALDO AWAL 2020	(190.395.156.051,17)
PENAMBAHAN :	
PERUBAHAN KONDISI BAIK KE RUSAK BERAT/ TD	(3.311.452.116,00)
KOREKSI TAMBAH SALAH CATAT SALDO TAHUN LALU	(240.046.538,34)
JUMLAH	(3.551.498.654,34)
PENGURANGAN :	
PENGHAPUSAN BARANG RB DAN TD KARENA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN	(10.054.613.906,14)
REKLAS KE ASET TETAP	(21.675.000,00)
KOREKSI KURANG CATAT PINDAH KE ASET TETAP	(12.419.060.401,00)
KOREKSI KURANG CATAT PENGHAPUSAN TAHUN LALU	(169.455.000,00)
KOREKSI LEBIH CATAT SALDO TAHUN LALU	(12.783.099,00)
JUMLAH	(22.677.587.406,14)
SALDO AKHIR 2020	(171.269.067.299,37)

Penjelasan :

- a. Penambahan karena perubahan kondisi barang baik ke rusak berat sebesar Rp3.311.452.116,00 terjadi pada 8 (delapan) SKPD.
- b. Koreksi tambah salah catat sebesar Rp240.046.538,34 terjadi pada 7 (tujuh) SKPD
- c. Pengurangan karena penghapusan/pemusnahan barang RB/TD sebesar Rp10.054.613.906,14 terjadi pada 27 (dua puluh tujuh) SKPD
- d. Pengurangan karena reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp21.675.000,00 terjadi pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan karena rekondisi sepeda motor RB menjadi baik dan barang tidak ditemukan telah diketahui keberadaannya.
- e. Pengurangan sebesar Rp12.419.060.401,00 karena pindah catat dari aset yang akan dihibahkan ke aset tetap jalan pada DPU.
- f. Pengurangan sebesar Rp169.455.000,00 merupakan koreksi kurang catat atas penghapusan kendaraan RB tahun 2019 pada PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- g. Pengurangan sebesar Rp12.783.099,00 merupakan lebih catat saldo tahun 2019 pada Dinpermades.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	61.214.357.137,45	62.461.351.932,77

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek tahun 2020 sebesar Rp61.214.337.137,45
 Rincian Kewajiban Jangka Pendek tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.141 berikut ini:

Tabel 5.141
 Rincian Kewajiban

Uraian	2020	2019
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.830.439.926,00	4.322.545.326,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	13.663.260.000,00	20.000.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.420.032.917,45	710.094.807,77
Utang Beban	39.173.267.662,00	32.146.919.040,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.127.336.632,00	5.281.792.759,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	61.214.337.137,45	62.461.351.932,77

Penjelasan Kewajiban Lancar :

- 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.142 berikut ini:

Tabel 5.142
 Rincian Mutasi Utang PFK

Uraian	SKPD	Saldo Th. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2020
Utang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan th 2013-2018	BUD/PPKD	3.626.991.494,00	13.975.560,00	(25.165.250,00)	3.615.801.804,00
Potongan Wajib Gaji th 2017-2018 dan Potongan Pajak (PPh/PPN)	BUD/PPKD	22.561.361,00		(22.561.361,00)	-
Jumlah		3.649.552.855,00	13.975.560,00	(47.726.611,00)	3.615.801.804,00
Utang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan :	RSUD Brebes	670.030.922,00		(456.148.000,00)	213.882.922,00
Jumlah		670.030.922,00	-	(456.148.000,00)	213.882.922,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Uraian	SKPD	Saldo Th. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2020
Belanja Hadiah yg telah dicairkan namun belum dibayar ke pihak ke-3	Kec. Brebes	-	755.200,00		755.200,00
Jumlah		-	755.200,00	-	755.200,00
Pajak belum dibayar	Kec. Banjarharjo	2.961.549,00	-	(2.961.549,00)	-
Jumlah		2.961.549,00	-	(2.961.549,00)	-
Jumlah Hutang PFK		4.322.545.326,00	14.730.760,00	(506.836.160,00)	3.830.439.926,00

Penjelasan :

1. Hutang PFK pada BUD/PPKD
2. Hutang Jaminan Pemeliharaan merupakan hutang kepada penyedia jasa atas pemeliharaan pekerjaan fisik (retensi 5%) yang masih berada di Kas Non Anggaran dan belum diajukan pencairannya.
3. Mulai bulan April 2019 Pemkab Brebes mulai memberlakukan sistem Bank Garansi sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan fisik. Pada tahun 2020 terdapat penambahan karena koreksi salah pembayaran kepada pihak ke-3 pada tahun 2019 dan disetor kembali ke rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp13.975.560,00. Juga terdapat pengurangan karena pembayaran hutang retensi/jaminan pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp25.165.250,00. Sehingga saldo retensi/uang pemeliharaan yang belum dicairkan tahun 2020 sebesar Rp3.615.801.804,00.
4. Mutasi Hutang Potongan Wajib Gaji tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.143 berikut ini :

Tabel 5.143

Mutasi Hutang Potongan Wajib Gaji

URAIAN	SALDO 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2020
Jaminan Kecelakaan Kerja	152.064,00		(152.064,00)	-
Jaminan Kematian	209.177,00		(209.177,00)	-
Jaminan Hari Tua	3.530.120,00		(3.530.120,00)	-
Jaminan Kesehatan	18.670.000,00		(18.670.000,00)	-
JUMLAH	22.561.361,00	-	(22.561.361,00)	-

5. Hutang PFK pada BLUD RSUD Brebes merupakan utang jaminan pemeliharaan atas pekerjaan fisik yang belum dibayarkan kepada pihak ke-3. Saldo tahun 2019 sebesar Rp670.030.922,00, dibayarkan sebesar Rp456.148.000,00 sehingga saldo tahun 2020 sebesar Rp213.882.922,00. Kas atas uang jaminan tersebut dicatat pada akun **Aset Lainnya Kas Yang Dibatasi Penggunaannya**.
6. Hutang PFK pada Kecamatan Brebes sebesar Rp755.200,00 merupakan hutang pajak yang belum disetor ke kas negara dengan rincian PPh22 sebesar Rp80.000,00, PPh23 sebesar Rp475.200,00 dan PPN sebesar Rp200.000,00.



7. Pajak saldo tahun 2019 pada Kec. Banjarharjo sebesar Rp2.961.549,00 telah disetor sehingga saldo 2020 nihil.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang Bunga tahun 2020 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2020 sebesar RP13.663.260.000,00 merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang yang direncanakan dibayar pada tahun 2021. Bagian Lancar ini direklasifikasi dari pinjaman jangka panjang kepada Bank Jateng sesuai perjanjian kredit nomor 48 tanggal 16 Juli 2019 untuk keperluan pembangunan gedung pelayanan medis (IGD, Laboratorium, VK, Kebidanan, ICU/HCU dan IBS) pada RSUD Bumiayu sebesar Rp33.663.260.000,00 dan telah dibayar sebesar Rp20.000.000.000,00 pada tahun 2020. Pinjaman tersebut berjangka waktu 24 bulan dan jatuh tempo tanggal 16 Juli 2021.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka tahun 2020 adalah

	<u>Th 2020</u>	<u>Th 2019</u>
PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	1.420.032.917,45	710.094.807,77

Tabel 5.144

Saldo Pendapatan Diterima di Muka

SKPD	Saldo 2020	Saldo 2019
Dinkopumdag	136.774.247,75	167.774.719,66
Dinbudpar	207.620.260,30	15.900.804,20
BPPKAD	1.075.638.409,40	526.419.283,91
Jumlah	1.420.032.917,45	710.094.807,77

Mutasi Pendapatan diterima di Muka masing-masing pada SKPD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi pada Dinas Koperasi UM & Perdagangan dijelaskan sesuai tabel 5.145 berikut ini :

Tabel 5.145

Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Dinkopumdag

Uraian	PDDM Sewa Loos
Saldo Awal	167.774.719,66
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2020 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	57.300.764,32
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	(88.301.236,23)
Saldo Akhir	136.774.247,75



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- b. Mutasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijelaskan sesuai tabel 5.146 berikut ini :

Tabel 5.146
 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Dinbudpar

Uraian	PPDM Sewa Tempat
Saldo Awal	15.900.804,20
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2020 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	207.620.260,30
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	(15.900.804,20)
Saldo Akhir	207.620.260,30

- c. Mutasi pada BPPKAD dijelaskan sesuai tabel 5.147 berikut ini :

Tabel 5.147
 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka BPPKAD

Uraian	Pajak Reklame	Retribusi Sewa Aset
Saldo Awal	502.023.296,61	24.395.987,30
Koreksi salah catat Pendapatan Diterima Di Muka th 2019	(2.065,57)	-
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2020 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	1.034.829.002,25	26.847.237,05
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	(502.021.231,04)	(10.433.817,20)
Saldo Akhir	1.034.829.002,25	40.809.407,15

Rincian saldo pendapatan diterima di muka pada Dinas Koperasi UM Perdagangan berupa sewa loos pasar disajikan dalam tabel 5.148 berikut ini :

Tabel 5.148
 Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Dinas Koperasi UM Perdagangan

URAIAN	PENERIMAAN KAS 2014-2020	PENDAPATAN S.D TH 2019	PENDAPATAN TH 2020	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2020
Sewa loos 2014 (5th)	59.600.000,00	59.552.161,59	47.838,41	-
Sewa loos 2015 (5th)	159.796.000,00	148.440.597,57	11.355.402,43	-
Sewa loos 2016 (5th)	108.200.000,00	84.980.788,18	17.383.964,57	5.835.247,24
Sewa loos 2017 (5th)	72.175.000,00	39.148.203,87	14.619.491,89	18.407.304,24
Sewa loos 2018 (5th)	100.430.000,00	31.748.991,88	21.392.947,49	47.288.060,63
Sewa loos 2019 (5th)	35.890.000,00	4.445.537,24	23.501.591,45	7.942.871,31
Sewa loos 2020 (5th)	64.525.000,00	-	7.224.235,68	57.300.764,32
JUMLAH	600.616.000,00	368.316.280,34	95.525.471,91	136.774.247,75



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan diterima di muka pada BPPKAD berupa retribusi sewa tanah dan bangunan serta Pajak Reklame sebesar 1.075.638.409,40 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini :

a. Sewa Tanah dan Bangunan

Tabel 5.149

Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Retribusi (BPPKAD)

Uraian	STS Nilai (Rp)	Nama Debitur	Pendapatan s.d 2019	Pendapatan Th 2020	Pendapatan Diterima Di Muka
Sewa Tanah di Ds. Bulakamba tgl 02/10/2017-01/10/2022	19.296.000,00	PT Dedy Jaya Lambang Perkasa Brebes	8.669.983,56	3.869.773,15	6.756.243,29
Sewa Tanah di Saditan Brebes tgl 08/10/2018-07/10/2023	10.351.000,00	Ponpes Assalafiyah	2.552.301,37	2.070.200,00	5.728.498,63
Sewa Tanah dan Bangunan Showroom Komplek Kantor Kec. Paguyangan. (masa sewa 2 Thn) tgl 30/04/2019-30/04/2019	9.000.000,00	DEDI ANJAR PRIYANTO, S.E	3.028.727,77	4.493.844,05	1.477.428,18
JUMLAH 1	38.647.000,00		14.251.012,70	10.433.817,20	13.962.170,10
Sewa Tanah dan Bangunan KUD Setya Budhi Brebes tgl 01/02/2020-01/02/2021	9.873.120,00	WAHADI		9.036.872,13	836.247,87
Sewa Tanah dan Bangunan Gudang Pangan Kec. Tanjung tgl 01/05/2020-30/04/2022	16.669.250,00	IRAWAN		5.602.148,49	11.067.101,51
Sewa Tanah Koperasi Garam Mutiara Sawojajar kec Wanasari 26/12/2020-26/12/2021	8.841.000,00	ARIF GHONI		145.331,51	8.695.668,49
Sewa Bangunan Desa Cigedog Kec Kersana tgl 29/12/2020-29/12/2021	6.300.000,00	AGUS ISMANTO		51.780,82	6.248.219,18
JUMLAH 2	41.683.370,00		-	14.836.132,95	26.847.237,05
Jumlah	80.330.370,00		14.251.012,70	25.269.950,15	40.809.407,15

b. Pendapatan diterima di muka Pajak Reklame dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.150 berikut ini:

Tabel 5.150

Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Pajak Reklame (BPPKAD)

URAIAN	PENERIMAAN KAS 2018-2020	PENDAPATAN S.D TH 2019	PENDAPATAN TH 2020	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2020
Pajak Reklame	4.657.425.201,00	2.121.044.517,96	1.501.551.680,78	1.034.829.002,26



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan diterima di muka pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa retribusi sewa tempat di objek wisata dengan rincian disajikan dalam tabel 5.151 berikut ini :

Tabel 5.151
 Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Dinbudpar

Uraian	STS Nilai (Rp)	Nama Debitur	Pendapatan s.d 2019	Pendapatan Th 2020	Pendapatan Diterima Di Muka
Retribusi OW. PAR-IN (3 th) tgl 06/11/2017-06/11/2020	9.000.000,00	ROKHENDAR	6.446.167,88	2.553.832,12	-
Retribusi OW. Malahayu (1 th) tgl 15/06/19-15/03/2020	23.000.000,00	CASTA	18.349.726,78	4.650.273,22	-
Retribusi OW. Malahayu (1 th) tgl 22/02/2019-22/02/2020	21.000.000,00	CASTA	18.008.219,18	2.991.780,82	-
Retribusi PAP Tirta Husada (1 th) tgl 23/06/2019-23/06/2020	12.000.000,00	M MUFANGAT	6.295.081,97	5.704.918,03	-
JUMLAH	65.000.000,00		49.099.195,80	15.900.804,20	-
Retribusi OW. Malahayu (1 th) tgl 01/01/2020-31/12/2020	23.000.000,00	CASTA	-	23.000.000,00	-
OW TIRTA HUSADA (1 th) tgl 20/01/2020-19/01/2020	9.000.000,00	SOPIAH	-	8.531.506,85	468.493,15
DTW ALAS JARAN (1 th) tgl 19/12/2019-18/12/2020	7.000.000,00	ALI SODIKIN	-	7.000.000,00	-
DTW WADUK MALAHAYU tgl 13/03/2020-07/07/2021	530.000.000,00	Pokdarwis geger halang	-	322.848.232,85	207.151.767,15
JUMLAH	569.000.000,00		-	361.379.739,70	207.620.260,30
Jumlah	634.000.000,00		49.099.195,80	377.280.543,89	207.620.260,30

5.3.2.1.5 Utang Beban

Saldo Utang beban tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut :

	<u>SALDO 2020</u>	<u>SALDO 2019</u>
UTANG BEBAN	39.173.267.662,00	32.146.919.040,00

Adapun rincian saldo utang beban tahun 2020 disajikan dalam tabel 5.152 berikut ini :

Tabel 5.152
 Rekapitulasi Utang Beban

URAIAN	TAHUN	SALDO 2020	KETERANGAN
HUTANG BEBAN PEGAWAI :			
HUTANG GAJI BLUD BULAN DESEMBER 2020	2020	1.464.540.000,00	
TUNJANGAN PROFESI GURU	2020	17.541.731.300,00	
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	2020	4.409.771.358,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URAIAN	TAHUN	SALDO 2020	KETERANGAN
UPAH PUNGUT TW IV	2020	1.013.306.098,00	
JUMLAH 1		24.429.348.756,00	
HUTANG BEBAN JASA :			
KOREKSI KURANG CATAT PIUTANG PELAYANAN SKTM (JAMKESDA)	2017	8.831.499,00	RSUD Prof Dr. Margono
KOREKSI KURANG CATAT PIUTANG PELAYANAN SKTM (JAMKESDA)	2018	4.718.543,00	RSUD Waled
HUTANG PELAYANAN SKTM (JAMKESDA)	2019	81.616.469,00	RSUD Waled
HUTANG HONOR DEWAN PENGAWAS	2020	15.800.000,00	
HUTANG HONOR TENAGA KONTRAK	2020	468.397.200,00	
HUTANG JASA AIR BAWAH TANAH	2020	296.500,00	
HUTANG JASA ASURANSI	2020	11.535.600,00	
HUTANG JASA LISTRIK	2020	3.672.710.730,00	
HUTANG JASA INTERNET	2020	131.395.049,00	
HUTANG JASA AIR/PDAM	2020	49.896.050,00	
HUTANG JASA FAX	2020	217.500,00	
HUTANG JASA SURAT KABAR	2020	2.775.000,00	
HUTANG JASA TELEPON	2020	49.784.208,00	
HUTANG JASA BANK DARAH	2020	27.780.000,00	
HUTANG JASA KEBERSIHAN	2020	6.992.601,00	
HUTANG JASA PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS	2020	18.629.401,00	
HUTANG JASA PELAYANAN/PERSALINAN	2020	7.838.616.116,00	
HUTANG RUJUKAN LABORAT	2020	1.739.950,00	
HUTANG TUNJANGAN PETUGAS RADIOLOGI	2020	2.400.000,00	
HUTANG TRANSPORT PRAMU BLUD	2020	400.000,00	
HUTANG SEWA PERALATAN KANTOR (MESIN FOTOCOPY)	2020	5.297.808,00	
PELAYANAN SKTM (JAMKESDA)	2020	3.382.100.535,00	
ELIMINASI SKTM 2020 *)	2020	(3.231.584.450,00)	
JUMLAH 2		12.550.346.309,00	
HUTANG BEBAN PERSEDIAAN :			
HUTANG PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN	2020	1.775.000,00	
HUTANG PENGADAAN KARCIS PASAR	2020	18.321.000,00	
HUTANG PENGADAAN BANK DARAH	2020	466.035.000,00	
HUTANG PENGADAAN BHP ALKES	2020	427.935.586,00	
HUTANG PENGADAAN BARANG CETAKAN	2020	4.934.000,00	
HUTANG PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN	2020	48.586.427,00	
HUTANG PENGADAAN OBAT	2020	921.697.702,00	
HUTANG PENGADAAN OKSIGEN	2020	56.299.991,00	
HUTANG PENGADAAN REGEANT	2020	247.987.891,00	
JUMLAH 3		2.193.572.597,00	
TOTAL		39.173.267.662,00	

*) Hutang Belanja dieliminasi

Penjelasan :

- a. Terdapat koreksi salah catat hutang belanja saldo tahun 2019. Koreksi tersebut secara rinci dijelaskan dalam tabel 5.153 berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.153
 Rekapitulasi Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya Saldo 2019

URAIAN	TAHUN	SALDO 2019	KOREKSI	SALDO SETELAH KOREKSI	PEMBAYARAN	SALDO 2020
HUTANG BELANJA PEGAWAI						
GAJI BLUD, koreksi salah catat	2019	1.317.027.800,00	(5.000.000,00)	1.312.027.800,00	1.312.027.800,00	-
KEKURANGAN GAJI, koreksi salah catat	2019	7.752.400,00	(372.472,00)	7.379.928,00	7.379.928,00	-
UPAH PUNGUT, koreksi salah catat	2019	1.665.589.675,00	25.627.250,00	1.691.216.925,00	1.691.216.925,00	-
HUTANG BELANJA BARANG JASA BELANJA BHP						
PENGADAAN BHP ALKES, koreksi salah catat	2019	8.049.860.352,00	60,00	8.049.860.412,00	8.049.860.412,00	-
PENGADAAN OBAT, koreksi salah catat	2019	4.652.859.104,00	(89.814,00)	4.652.769.290,00	4.652.769.290,00	-
PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN, koreksi salah catat	2019	67.408.978,00	196.000,00	67.604.978,00	67.604.978,00	-
BELANJA JASA						
BELANJA AIR, koreksi salah catat	2019	43.631.550,00	(10.000,00)	43.621.550,00	43.621.550,00	-
PELAYANAN SKTM (JAMKESDA, koreksi perubahan tagihan dari pihak ke-3	2019	4.823.983.941,00	18.482.697,00	4.842.466.638,00	4.747.300.127,00	95.166.511,00
*) ELIMINASI HUTANG SKTM + MCU (BLUD, pencatatan kembali hutang internal Pemkab Brebes yang dieliminasi	2019	(4.491.158.666,00)	4.491.158.666,00	-	-	-

- Hutang Beban atas tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet, surat kabar dan sejenisnya merupakan pemakaian tahun 2020 namun baru dibayar pada tahun 2021.
- Hutang Pengadaan Obat dan BHP Alkes merupakan hutang kepada penyedia jasa karena barang tersebut diterima oleh SKPD terkait namun masih menunggu proses penyelesaian administrasi pembayaran.
- Saldo Hutang Beban sebesar Rp39.173.267.662,00 termasuk di dalamnya Hutang Beban Jasa Kegiatan pada Dinas Kesehatan yang merupakan hutang jaminan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu yang diberikan oleh rumah sakit maupun dokter spesialis selama tahun 2020. Atas pelayanan RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu yang semula dicatat sebagai hutang jasa kegiatan, pada akhir periode akuntansi hutang tersebut dieliminasi sebesar Rp3.231.584.450,00 karena merupakan resipikal dari akun piutang pendapatan yang dicatat oleh RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu.



- e. Hutang beban tersebut belum termasuk hutang insentif tenaga kesehatan tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 karena sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun masih dalam proses perhitungan.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.154 berikut ini :

Tabel 5.154

Rekapitulasi Hutang Jangka Pendek Lainnya

HUTANG PADA	Saldo Th. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2020
PPKD	4.264.298.209,00	229.093.860,00	(1.886.049.987,00)	2.607.342.082,00
SKPD	1.017.494.550,00	446.740.000,00	(944.240.000,00)	519.994.550,00
JUMLAH	5.281.792.759,00	675.833.860,00	(2.830.289.987,00)	3.127.336.632,00

Utang jangka pendek yang dicatat di PPKD dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.155 berikut ini:

Tabel 5.155

Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya pada PPKD

Uraian	SKPD	Saldo Th. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2020
Hutang Retensi Kegiatan Fisik TA 2012	PPKD	756.586.797,00			756.586.797,00
Hutang Retensi Pengawas Pembangunan Rest Area RSUD CV Teknik Prima (Dana APBD) Th 2012	PPKD	7.300.000,00			7.300.000,00
Hutang Retensi 2010 yang belum diajukan oleh rekanan	PPKD	276.232.204,00			276.232.204,00
Hutang Retensi 2011 yang belum diajukan oleh rekanan	PPKD	578.427.130,00			578.427.130,00
Utang Lebih Bayar DBH Pusat :					
Dasar PMK 140/PMK.07/2019, PMK 113/PMK.07/2020 :					
Bagi Hasil Pajak (PBB & PPh)	PPKD	2.054.705.232,00	109.953.235,00	(1.860.057.856,00)	304.600.611,00
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	PPKD	1.903.606,00	119.140.625,00	(25.992.131,00)	95.052.100,00
Hutang Kelebihan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Bagian Laba PDAM tahun 2014 (PDAM)	PPKD	589.143.240,00			589.143.240,00
JUMLAH		4.264.298.209,00	229.093.860,00	(1.886.049.987,00)	2.607.342.082,00

Utang jangka pendek yang dicatat di SKPD dengan rincian yang disajikan dalam tabel 5.156 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.156
 Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD

Uraian	SKPD	Saldo Th. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2020
Hutang keg. TA 2013 belum terbayar	DPU	355.535.350,00			355.535.350,00
JUMLAH		355.535.350,00	-	-	355.535.350,00
Hutang keg. TA 2013 belum terbayar	DINDIK	18.000.000,00			18.000.000,00
JUMLAH		18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
Hutang keg. TA 2013 belum terbayar	DPSDAPR	39.483.000,00			39.483.000,00
JUMLAH		39.483.000,00	-	-	39.483.000,00
Hutang kegiatan TA 2013 belum dibayar kepada pihak ketiga	DINHUB	2.900.000,00			2.900.000,00
	KEC. WANASARI	12.528.550,00			12.528.550,00
	KEC. SONGGOM	2.914.500,00			2.914.500,00
	KEC. BULAKAMBA	9.737.300,00			9.737.300,00
	KEC. TANJUNG	6.897.950,00			6.897.950,00
	KEC. KETANGGN	7.302.100,00			7.302.100,00
	KEC. LARANGAN	29.089.050,00			29.089.050,00
	KEC. TONJONG	2.896.650,00			2.896.650,00
	KEC. BUMIAYU	7.932.250,00			7.932.250,00
	KEC. PAGUYANGAN	12.037.850,00			12.037.850,00
	KEC. SALEM	10.185.000,00			10.185.000,00
	D. PETERNAKAN	750.000,00			750.000,00
					-
Hutang kegiatan TA 2014 belum dicairkan dan belum dipindahbukukan ke Kas Non Anggaran :	KEC. SALEM	1.805.000,00			1.805.000,00
JUMLAH		106.976.200,00	-	-	106.976.200,00
Hutang Pekerjaan Lift Ruang Rawat Inap Kelas 3, 2 dan 1 yang Putus Kontrak tahun 2018	RSUD BUMIAYU	497.500.000,00	-	(497.500.000,00)	-
Hutang Pekerjaan Th 2019 Penyambungan Daya Listrik Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Medik dan Penunjang	RSUD BUMIAYU	-	446.740.000,00	(446.740.000,00)	-
JUMLAH		497.500.000,00	446.740.000,00	(944.240.000,00)	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Uraian	SKPD	Saldo Th. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2020
TOTAL PENCATATAN DI SKPD		1.017.494.550,00	446.740.000,00	(944.240.000,00)	519.994.550,00

Penjelasan Hutang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut :

- a. Hutang Retensi tahun 2010-2012 pada PPKD sebesar Rp756.586.797,00, Rp7.300.000,00, Rp276.232.204,00, Rp578.427.130,00 sehingga total sebesar Rp1.618.546.131,00 merupakan hutang pemeliharaan/retensi 5% kepada penyedia jasa atas pekerjaan fisik tahun 2010-2012. Pemkab Brebes memberlakukan kebijakan pengalihan pembayaran pemeliharaan 5% setelah masa pemeliharaan berakhir, yang semula dianggarkan pada SKPD kemudian dianggarkan melalui PPKD. Pembayaran 95% pekerjaan dianggarkan pada rekening Belanja yang bersangkutan dan pembayaran 5% pekerjaan dianggarkan pada rekening Pengeluaran Pembiayaan. Setelah masa pemeliharaan berakhir masih terdapat penyedia jasa yang tidak mengajukan pencairan atas pemeliharaan tersebut sehingga diakui sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.07/2020 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, Pemerintah Pusat lebih bayar atas bagi hasil PBB th 2018-2019 sebesar Rp304.600.611,00 dan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp95.052.100,00 kepada Pemkab Brebes sehingga total hutang lebih bayar sebesar Rp399.652.711,00. Saldo hutang lebih bayar tahun sebelumnya telah dipotong sesuai Perdirjen Perimbangan Keuangan No. PER-6/PK/2020 dan telah diperhitungkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak tahun 2020.

Adapun rinciannya disajikan dalam tabel 5.157 dan 5.158 berikut ini :

Tabel 5.157

Rekapitulasi Lebih Bayar Pajak Kab.Brebes menurut PMK No 113/PMK.07/2020

No	ALOKASI TH	Sisa Hutang Lebih Bayar th 2019	Penambahan th 2020	Pengurangan th 2020	Sisa Lebih Bayar th 2020
DBH PAJAK					
I	DBH PBB	15.452.049,00	109.953.235,00	15.452.049,00	109.953.235,00
1	DBH PBB Th 2018	15.452.049,00	-	15.452.049,00	-
a	Bagian Daerah	14.836.438,00	-	14.836.438,00	-
b	Biaya Pemungutan	615.611,00	-	615.611,00	-
2	DBH PBB Th 2019	-	109.953.235,00	-	109.953.235,00
a	Bagian Daerah	-	105.088.670,00	-	105.088.670,00
b	Biaya Pemungutan	-	4.864.565,00	-	4.864.565,00
II	DBH PPH 21	1.542.489.499,00	-	1.542.489.499,00	-
III	DBH PPH 25/29	496.763.684,00	-	302.116.308,00	194.647.376,00
	JUMLAH LEBIH BAYAR DBH PAJAK	2.054.705.232,00	109.953.235,00	1.860.057.856,00	304.600.611,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.158

Rekapitulasi Lebih Bayar SDA Kab.Brebes menurut PMK No 113/PMK.07/2020

No	ALOKASI TH	Sisa Hutang Lebih Bayar th 2019	Penambahan th 2020	Pengurangan th 2020	Sisa Lebih Bayar th 2020
DBH BUKAN PAJAK/SDA					
1	DBHCHT				-
2	DBH SDA Kehutanan				-
3	DBH SDA Mineral Batubara	1.903.606,00		1.903.606,00	-
4	DBH SDA Perikanan				-
5	DBH SDA Panas Bumi		24.088.525,00	24.088.525,00	-
6	DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	95.052.100,00	-	95.052.100,00
	- Minyak Bumi 15%		91.985.850,00		91.985.850,00
	- Minyak Bumi 5%		3.066.250,00		3.066.250,00
	JUMLAH LEBIH BAYAR DBH NON PAJAK	1.903.606,00	119.140.625,00	25.992.131,00	95.052.100,00

Penjelasan :

- b) Mutasi pengurangan DBH Pajak sebesar Rp1.860.057.856,00 di antaranya merupakan koreksi salah catat PPh21 sebesar Rp1.542.489.499,00 dan PPh25 sebesar Rp77.125.347,00 yang seharusnya merupakan piutang kurang bayar tercatat sebagai hutang lebih bayar DBH.
- c) Mutasi penambahan DBH SDA sebesar Rp119.140.625,00 di antaranya merupakan koreksi kurang catat sebesar Rp24.088.525,00.
- d) Mutasi penambahan selain koreksi tersebut merupakan penambahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
- e) Mutasi pengurangan selain koreksi tersebut merupakan potongan atas kurang bayar yang diterima selama tahun 2020.
- c. Hutang kegiatan tahun 2013 belum terbayar pada DPU, DPSDAPR, Dinhub, Dinas Peternakan & Keswan, serta 10 (sepuluh) kecamatan merupakan hutang pemeliharaan/retensi 5% atas pekerjaan fisik yang sampai dengan akhir tahun 2013 belum dibayarkan kepada pihak ke-3 dan per 31 Desember 2020 tidak diajukan pembayarannya ke BUD.
- d. Hutang kegiatan tahun 2013 belum terbayar pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.000.000,00 merupakan hutang atas rehab ruang kelas sekolah pada MTs Al Ikhlas Limbangan Kec. Losari. Atas pekerjaan ini pada tahun 2013 dianggarkan sebagai Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan per 31 Desember 2020 tidak diajukan pembayarannya ke BUD.
- e. Hutang kegiatan TA 2014 pada Kec. Salem sebesar Rp1.805.000,00 merupakan hutang pemeliharaan/retensi 5% yang belum dicairkan dan belum dipindahbukukan ke Kas Non Anggaran.
- f. Hutang pada RSUD Bumiayu senilai Rp497.500.000,00 merupakan hutang pekerjaan pengadaan Lift Ruang Rawat Inap Kelas 3, 2 dan 1 kepada PT LESIDO BERSINAR JAKARTA dengan kontrak nomor



050/24/L/SP/VIII/2018 senilai Rp2.720.000.000,00 dimana pekerjaan tersebut putus kontrak pada tahun 2018 dengan kemajuan pekerjaan sebesar 65,11%. Hutang tersebut dicatat pada tahun 2019 dan dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp487.500.000,00 sesuai berita acara negosiasi putus kontrak nomor 050/24/PPK/BA.NEGO/III/2020 tanggal 23 Maret 2020. Selanjutnya selisih pencatatan hutang tersebut dikoreksi sebesar Rp10.000.000,00 (Rp497.500.000,00 – Rp487.500.000,00).

- g. Penambahan hutang pada RSUD Bumiayu sebesar Rp446.740.000,00 merupakan koreksi kurang catat hutang Penyambungan Daya Listrik pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Medik dan Penunjang Medik (IGD, laboratorium, VK Kebidanan, ICU/HCU dan IBS) yang dilaksanakan oleh PT Titian Usaha Graha Utama pada tahun 2019 dan baru dibayar tahun 2020.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang untuk Tahun 2020 nihil. Saldo 2019 sebesar Rp13.663.260.000,00 telah direklasifikasi ke Hutang Lancar (Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang) dan direncanakan akan dibayar pada tahun 2021.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Nilai Ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp3.737.989.000.162,55. Penjelasan lebih rinci mengenai ekuitas dijelaskan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

**5.4 Laporan Operasional**

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut rincian penjelasan untuk masing-masing akun Laporan Operasional Tahun 2020.

5.4.1 Pendapatan LO

a. Pendapatan LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	3.049.170.269.822,24	2.713.728.066.656,51

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Rincian Saldo Laporan Operasional untuk pendapatan per SKPD Tahun 2020 dan 2019 sesuai tabel berikut ini :

Tabel 5.159

Saldo LO untuk pendapatan per SKPD Tahun 2020 dan 2019

NO	SKPD	SALDO 2020 (Rp)	SALDO 2019 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	DINDIKPORA	3.140.081.500,00	5.488.563.857,00	(2.348.482.357,00)
2	DINAS KESEHATAN	27.255.603.748,99	19.939.376.774,00	7.316.226.974,99
3	UPTD PUSK. BREBES	21.480.557.587,00	20.997.158.597,00	483.398.990,00
4	UPTD PUSK. TANJUNG	27.293.437.166,00	26.952.731.397,00	340.705.769,00
5	UPTD PUSK. BANJARHARJO	35.651.977.419,00	36.318.933.414,00	(666.955.995,00)
6	UPTD PUSK. PAGUYANGAN	13.185.313.692,00	13.529.422.610,00	(344.108.918,00)
7	UPTD PUSK. BUMIAYU	14.878.757.883,00	15.576.050.239,90	(697.292.356,90)
8	UPTD LABKESDA	227.698.000,00	231.934.500,00	(4.236.500,00)
9	UPTD BP PARU	60.688.000,00	90.554.500,00	(29.866.500,00)
10	RSUD BREBES	81.690.473.978,40	98.664.351.187,05	(16.973.877.208,65)
11	RSUD BUMIAYU	17.845.992.652,50	20.469.691.164,00	(2.623.698.511,50)
12	D P U	12.112.008.816,00	300.117.500,00	11.811.891.316,00
13	DPSDAPR			-
14	DINPERWASKIM			-
15	SATPOL PP			-
16	KANTOR KESBANG & POLITIK			-
17	PLH BNK			-
18	BPBD	202.248.100,00	-	202.248.100,00
19	DINAS SOSIAL	-	31.182.000,00	(31.182.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	SKPD	SALDO 2020 (Rp)	SALDO 2019 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
20	DP3KB	3.777.412.890,00	4.427.112.155,00	(649.699.265,00)
21	DLHPS	263.636.000,00	418.397.000,00	(154.761.000,00)
22	DINDUKPIL			-
23	DINPERMADES	-	-	-
24	DINAS PERHUBUNGAN	2.239.849.730,00	1.949.459.150,00	290.390.580,00
25	DINKOMINFOTIK	542.366.000,00	592.702.000,00	(50.336.000,00)
26	DINKOPUMDAG	5.540.243.471,91	5.448.027.301,46	92.216.170,45
27	DPMPTSP	4.873.676.484,00	1.723.778.905,00	3.149.897.579,00
28	DINBUDPAR	1.166.942.793,90	2.926.161.854,44	(1.759.219.060,54)
29	DINARPUS	-	163.073.475,00	(163.073.475,00)
	URUSAN PILIHAN			
30	DINAS PERIKANAN	276.440.240,00	712.278.045,00	(435.837.805,00)
31	D P K P	30.500.000,00	120.000.000,00	(89.500.000,00)
32	D P K H	177.421.100,00	155.406.700,00	22.014.400,00
33	DINPERINAKER	-	412.685.000,00	(412.685.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			
34	DPRD			-
35	KDH DAN WAKIL KDH			-
36	BAG. TATA PEMERINTAHAN			-
37	BAG. PENANG. KEMISKINAN			-
38	BAG. PEMERINTAHAN DESA			-
39	BAG. PEREKONOMIAN	593.249.760,00	666.818.700,00	(73.568.940,00)
40	BAG. PEMBANGUNAN			-
41	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			-
42	BAG. HUKUM			-
43	BAG. OPD			-
44	BAG. LAYANAN PENGADAAN			-
45	BAG. UMUM	16.328.800,00	7.337.045.532,00	(7.320.716.732,00)
46	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
47	KEC. BREBES	2.848.300,00	9.463.130,00	(6.614.830,00)
48	KEC. JATIBARANG	3.384.500,00	6.769.500,00	(3.385.000,00)
49	KEC. WANASARI	3.531.000,00	6.109.100,00	(2.578.100,00)
50	KEC. SONGGOM	2.220.000,00	1.319.000,00	901.000,00
51	KEC. BULAKAMBA	1.849.000,00	1.623.000,00	226.000,00
52	KEC. TANJUNG	740.000,00	1.204.750,00	(464.750,00)
53	KEC. LOSARI	1.365.000,00	970.000,00	395.000,00
54	KEC. KERSANA	360.000,00	500.000,00	(140.000,00)
55	KEC. KETANGGUNGAN	1.200.250,00	941.000,00	259.250,00
56	KEC. BANJARHARJO	582.000,00	100.000,00	482.000,00
57	KEC. LARANGAN	1.220.000,00	5.049.000,00	(3.829.000,00)
58	KEC. TONJONG	469.000,00	461.000,00	8.000,00
59	KEC. BUMIAYU	6.483.000,00	2.248.000,00	4.235.000,00
60	KEC. PAGUYANGAN	481.339,00	40.000,00	441.339,00



NO	SKPD	SALDO 2020 (Rp)	SALDO 2019 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)
61	KEC. SIRAMPOG	1.000.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)
62	KEC. BANTARKAWUNG	1.842.200,00	1.317.062,00	525.138,00
63	KEC. SALEM	2.965.000,00	2.106.000,00	859.000,00
64	INSPEKTORAT			-
65	BAPERLITBANGDA	5.929.409.000,00	-	5.929.409.000,00
66	BPPKAD	129.947.424.222,34	135.012.215.017,04	(5.064.790.794,70)
67	PPKD	2.638.737.990.198,20	2.293.031.517.539,63	345.706.472.658,57
68	BKPSDMD	-	-	-
		3.049.170.269.822,24	2.713.728.066.656,51	335.442.203.165,73

Pendapatan-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp3.049.170.269.822,24. Rincian Pendapatan-LO tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.160
Rincian Pendapatan LO

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	364.073.404.232,49	396.953.281.608,61	(32.879.877.376,12)	(8,28)
2	Pendapatan Transfer - LO	1.940.945.477.878,00	2.106.580.052.353,00	(165.634.574.475,00)	(7,86)
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO	744.151.387.711,75	210.194.732.694,90	533.956.655.016,85	254,03
	Jumlah	3.049.170.269.822,24	2.713.728.066.656,50	335.442.203.165,74	12,36

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2020 adalah sebesar Rp364.073.404.232,49. Pendapatan Asli Daerah ini memiliki proporsi sebesar 11,94 % dari keseluruhan Pendapatan-LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri - LO dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.161
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	116.104.623.935,19	116.869.124.841,27	(764.500.906,08)	(0,65)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	15.372.971.779,96	13.407.956.795,66	1.965.014.984,31	14,66
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	9.583.760.091,20	13.188.899.550,63	(3.605.139.459,43)	(27,33)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	223.012.048.426,14	253.487.300.421,05	(30.475.251.994,91)	(12,02)
	Jumlah	364.073.404.232,49	396.953.281.608,61	(32.879.877.376,12)	(8,28)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rincian masing-masing jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2020 yang diperoleh adalah sebesar Rp116.104.623.935,19. Rincian masing-masing Pendapatan Pajak Daerah- LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.162

Rincian Pajak Daerah-LO Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hotel - LO	117.626.800,00	141.368.300,00	(23.741.500,00)	(16,79)
2	Restoran - LO	935.026.496,00	1.006.467.098,00	(71.440.602,00)	(7,10)
3	Rumah Makan - LO	24.790.900,00	64.530.310,00	(39.739.410,00)	(61,58)
	Kantin - LO	685.500,00	-	685.500,00	100,00
4	Warung - LO	2.057.300,00	198.000,00	1.859.300,00	939,04
5	Jasa Boga/ Katering - LO	1.464.828.466,00	2.155.281.546,00	(690.453.080,00)	(32,04)
	Pameran - LO	236.250,00	-	236.250,00	100,00
6	Permainan Bilyar, Golf, Bowling, Futsal - LO	8.590.000,00	13.610.000,00	(5.020.000,00)	(36,88)
7	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	73.983.800,00	186.259.350,00	(112.275.550,00)	(60,28)
8	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Pusat Kebugaran dan Kolam Renang - LO	8.123.900,00	14.580.200,00	(6.456.300,00)	(44,28)
9	Pertandingan Olahraga - LO	640.000,00	-	640.000,00	100,00
10	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	1.667.775.554,79	2.311.669.065,27	(643.893.510,48)	(27,85)
11	Pajak Reklame Kain - LO	584.543.855,00	261.977.162,00	322.566.693,00	123,13
12	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	9.084.490,00	1.494.000,00	7.590.490,00	508,06
13	Pajak Reklame Berjalan - LO	550.000,00	500.000,00	50.000,00	10,00
14	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	44.107.113.541,00	52.335.501.310,00	(8.228.387.769,00)	(15,72)
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	4.546.949.508,00	-	4.546.949.508,00	100,00
15	Pajak Parkir - LO	100.784.400,00	122.622.500,00	(21.838.100,00)	(17,81)
16	Pajak Air Tanah - LO	675.020.309,00	435.428.962,00	239.591.347,00	55,02
17	Pajak Sarang Burung Walet - LO	-	-	-	-
18	Pasir dan kerikil - LO	20.850.000,00	64.784.725,00	(43.934.725,00)	(67,82)
19	Tanah Diatome - LO	135.236.250,00	10.012.500,00	125.223.750,00	1.250,67
20	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	10.617.315,00	29.059.125,00	(18.441.810,00)	(63,46)
21	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	43.028.247.068,40	40.876.334.272,00	2.151.912.796,40	5,26
22	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	15.207.250,00	4.492.388.430,00	(4.477.181.180,00)	(99,66)
23	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	18.566.054.982,00	12.345.057.986,00	6.220.996.996,00	50,39
	Jumlah	116.104.623.935,19	116.869.124.841,27	(764.500.906,08)	(0,65)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diperoleh tahun 2020 adalah sebesar Rp15.372.971.779,96.

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.163

Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Balai Pengobatan - LO	288.386.000,00	322.489.000,00	(34.103.000,00)	(10,57)
2	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	263.636.000,00	248.897.000,00	14.739.000,00	5,92
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	968.260.000,00	966.793.000,00	1.467.000,00	0,15
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Hewan - LO	35.106.000,00	36.851.000,00	(1.745.000,00)	(4,74)
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	1.144.833.730,00	834.312.150,00	310.521.580,00	37,22
6	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	442.416.000,00	466.522.000,00	(24.106.000,00)	(5,17)
7	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	537.857.121,15	593.765.404,77	(55.908.283,62)	(9,42)
8	Ruangan -LO	-	1.211.693,00	(1.211.693,00)	(100,00)
9	Kendaraan Bermotor - LO	184.505.000,00	280.930.000,00	(96.425.000,00)	(34,32)
10	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	5.052.411.971,91	5.448.027.301,46	(395.615.329,55)	(7,26)
11	Pevelangan Ikan - LO	182.617.740,00	215.125.245,00	(32.507.505,00)	(15,11)
12	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	124.946.000,00	146.368.000,00	(21.422.000,00)	(14,64)
13	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	345.975.000,00	349.125.000,00	(3.150.000,00)	(0,90)
14	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	130.171.100,00	118.555.700,00	11.615.400,00	9,80
15	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	1.810.000,00	1.986.000,00	(176.000,00)	(8,86)
16	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	820.967.793,90	1.686.055.354,43	(865.087.560,53)	(51,31)
17	Pelayanan Tempat Olahraga - LO	40.205.000,00	34.783.000,00	5.422.000,00	15,59
18	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	4.778.225.823,00	1.617.278.447,00	3.160.947.376,00	195,45
19	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	13.200.000,00	10.800.000,00	2.400.000,00	22,22
20	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO	17.441.500,00	28.081.500,00	(10.640.000,00)	(37,89)
	Jumlah	15.372.971.779,96	13.407.956.795,66	1.965.014.984,31	14,66



5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp9.583.760.091,20. Nilai ini merupakan penyesuaian saldo PMPD tahun 2020 dan penerimaan laba atau deviden. Adapun penyesuaian saldo penyertaan modal pada perusda ini diakibatkan karena penyesuaian perhitungan penyertaan modal dengan metode ekuitas. Nilai penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp1.656.283.014,20. Sedangkan, nilai untuk penerimaan laba atau deviden adalah sebagai berikut:

- Penerimaan laba dari PT PRPP Jateng tahun 2019 sebesar Rp2.084.325,00
- Penerimaan deviden sebesar Rp7.925.392.752,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2020 sebesar Rp223.012.048.426,14 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.164

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	5.912.500,00	19.187.500,00	(13.275.000,00)	(69,19)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	191.124.017,00	530.713.677,00	(339.589.660,00)	(63,99)
3	Jasa Giro Kas Daerah - LO	4.762.288.095,00	6.587.777.763,00	(1.825.489.668,00)	(27,71)
4	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	785.985.002,00	504.438.659,00	281.546.343,00	55,81
5	Rekening Deposito Pada Bank Jateng - LO	6.683.657.473,00	9.432.705.409,00	(2.749.047.936,00)	(29,14)
6	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri - LO	100.273.972,00	-	100.273.972,00	100,00
7	Rekening Deposito Pada Bank BNI - LO	142.808.218,00	-	142.808.218,00	100,00
8	Rekening Deposito Pada Bank BRI - LO	739.585.791,00	753.253.230,00	(13.667.439,00)	(1,81)
9	Rekening Deposito Pada Bank BTN - LO	119.493.148,00	-	119.493.148,00	100,00
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	2.560.000,00	-	2.560.000,00	100,00
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	1.966.112,00	22.865.400,00	(20.899.288,00)	(91,40)
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	29.511.164,00	212.337.196,00	(182.826.032,00)	(86,10)
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	24.170.510,00	71.350.348,00	(47.179.838,00)	(66,12)
14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	-	134.413,00	(134.413,00)	(100,00)
15	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO	-	3.776.880,00	(3.776.880,00)	(100,00)
16	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO	-	5.071.110,00	(5.071.110,00)	(100,00)
20	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)	100,00
21	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	-	277.000.000,00	(277.000.000,00)	(100,00)
22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	28.724.000,00	-	28.724.000,00	100,00
23	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	340.654.696,00	453.158.711,00	(112.504.015,00)	(24,83)
24	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	-	18.746.000,00	(18.746.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
25	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	114.566.216.152,00	136.658.664.663,05	(22.092.448.511,05)	(16,17)
26	Pendapatan Hibah BLUD - LO	-	34.595.504,00	-	-
27	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	-	-	-	-
28	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	2.550.687.119,14	-	2.550.687.119,14	100,00
29	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	657.478.247,00	1.186.347.378,00	(528.869.131,00)	(44,58)
30	Fasilitas Umum - LO	593.249.760,00	666.818.700,00	(73.568.940,00)	(11,03)
31	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	90.685.702.450,00	95.548.357.880,00	(4.862.655.430,00)	(5,09)
	Jumlah	223.012.048.426,14	253.487.300.421,05	(30.475.251.994,91)	(12,02)

Adapun rincian Pendapatan BLUD per sub akun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165
 Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	114.566.216.152,00	136.658.664.663,05	(22.093.318.511,05)	(16,17)
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	34.595.504,00	(34.595.504,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.550.687.119,14	-	2.550.687.119,14	-
	Jumlah	117.116.903.271,14	136.693.260.167,05	(19.577.226.895,91)	116,72

Rincian pendapatan tersebut untuk masing-masing BLUD dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.166
 Rincian Pendapatan BLUD per masing-masing BLUD

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
	<u>BLUD RSUD Brebes :</u>	<u>77.885.683.578,14</u>	<u>98.613.164.587,05</u>	<u>(20.727.481.008,91)</u>	<u>(21,02)</u>
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	75.334.996.459,00	98.578.569.083,05	(23.243.572.624,05)	(23,58)
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	34.595.504,00	(34.595.504,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.550.687.119,14	-	2.550.687.119,14	-
	<u>BLUD RSUD Bumiayu :</u>	<u>17.798.158.905,00</u>	<u>20.469.691.164,00</u>	<u>(2.671.532.259,00)</u>	<u>(13,05)</u>
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	17.798.158.905,00	20.469.691.164,00	(2.671.532.259,00)	(13,05)
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
	BLUD UPTD Puskesmas Brebes :	2.309.677.662,00	1.303.236.776,00	1.006.440.886,00	77,23
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.309.677.662,00	1.303.236.776,00	1.006.440.886,00	77,23
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Tanjung :	5.520.616.807,00	7.115.887.140,00	(1.595.270.333,00)	(22,42)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	5.520.616.807,00	7.115.887.140,00	(1.595.270.333,00)	(22,42)
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo :	9.840.182.769,00	3.578.757.621,00	6.261.425.148,00	174,96
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	9.840.182.769,00	3.578.757.621,00	6.261.425.148,00	174,96
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu :	2.196.926.783,00	2.827.612.848,00	(629.816.065,00)	(22,27)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.197.796.783,00	2.827.612.848,00	(629.816.065,00)	(22,27)
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-	-
	BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan :	1.564.786.767,00	2.784.910.031,00	(1.220.123.264,00)	(43,81)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.564.786.767,00	2.784.910.031,00	(1.220.123.264,00)	(43,81)
2	Pendapatan Hibah BLUD	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	-	-
4	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-	-
	Jumlah	117.116.903.271,14	136.693.260.167,05	(19.576.356.895,91)	(14,32)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.940.945.477.878,00 terdiri dari

Tabel 5.167
 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.705.072.827.119,00	1.880.675.303.084,00	(175.602.475.965,00)	(9,34)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	-	-	-	-
3	Pendapatan Transfer Pemerintah provinsi - LO	196.620.512.423,00	174.477.981.164,00	22.142.531.259,00	12,69



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
4	Bantuan Keuangan - LO	39.252.138.336,00	51.426.768.105,00	(12.174.629.769,00)	(23,67)
	Jumlah	1.940.945.477.878,00	2.106.580.052.353,00	(165.634.574.475,00)	(7,86)

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-LO

Transfer Pemerintah Pusat-LO merupakan transfer dana perimbangan yang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.705.072.827.119,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.168
 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	5.889.016.544,00	8.145.868.009,00	(2.256.851.465,00)	(27,71)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	51.197.214,00	344.812.852,00	(293.615.638,00)	(85,15)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	3.613.174.806,00	6.423.749.710,00	(2.810.574.904,00)	(43,75)
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	15.212.391.997,00	9.345.712.804,00	5.866.679.193,00	62,77
5	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	6.628.733.467,00	6.915.176.194,00	(286.442.727,00)	(4,14)
6	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	-	733.000.400,00	(733.000.400,00)	(100,00)
7	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	623.982.443,00	102.461.700,00	521.520.743,00	508,99
8	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	-	-	-	-
9	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	1.903.603,00	526.498,00	1.377.105,00	261,56
10	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	-	-	-	-
11	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	1.013.899.150,00	764.460.992,00	249.438.158,00	32,63
12	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	24.764.200,00	403.597.467,00	(378.833.267,00)	(93,86)
13	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	1.353.102.153,00	419.934.900,00	933.167.253,00	222,22
14	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	129.127.699,00	73.407.300,00	55.720.399,00	75,91
15	Bagi Hasil Minerba - LO	511.153,00	-	511.153,00	100,00
16	Bagi Hasil Lainnya	-	58.800,00	(58.800,00)	(100,00)
17	Dana Alokasi Umum - LO	1.241.906.073.000,00	1.373.396.371.000,00	(131.490.298.000,00)	(9,57)
18	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	-	17.133.286.000,00	(17.133.286.000,00)	(100,00)
19	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	1.644.363.000,00	10.036.311.000,00	(8.391.948.000,00)	(83,62)
20	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	341.725.000,00	5.673.301.198,00	(5.331.576.198,00)	(93,98)
21	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	4.336.592.000,00	2.972.290.000,00	1.364.302.000,00	45,90
22	DAK Bidang Kesehatan - LO	30.053.597.561,00	18.207.643.136,00	11.845.954.425,00	65,06
23	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	755.730.065,00	870.701.000,00	(114.970.935,00)	(13,20)
24	DAK Bidang Perdagangan - LO	-	3.877.658.796,00	(3.877.658.796,00)	(100,00)
25	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	-	791.779.999,00	(791.779.999,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
26	DAK Bidang Pertanian - LO	2.200.000.000,00	5.474.211.000,00	(3.274.211.000,00)	(59,81)
27	DAK Bidang Pendidikan - LO	77.839.710.310,00	113.565.239.608,00	(35.725.529.298,00)	(31,46)
28	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	1.110.354.000,00	-	1.110.354.000,00	100,00
29	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	209.825.032.000,00	218.360.340.570,00	(8.535.308.570,00)	(3,91)
30	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	-	2.326.362.500,00	(2.326.362.500,00)	(100,00)
31	Bantuan Operasional Kesehatan - LO	49.934.163.000,00	30.056.001.062,00	19.878.161.938,00	66,14
32	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LO	25.100.100.000,00	21.952.710.000,00	3.147.390.000,00	14,34
33	Bantuan Operasional KB - LO	5.041.722.388,00	5.052.900.465,00	(11.178.077,00)	(0,22)
34	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru - LO	-	958.234.000,00	(958.234.000,00)	(100,00)
35	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	5.160.553.523,00	4.445.700.124,00	714.853.399,00	16,08
36	Dana DAK Pelayanan Kepariwisata - LO	2.261.500.000,00	2.720.894.000,00	(459.394.000,00)	(16,88)
37	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenak - LO	8.861.700.000,00	9.130.600.000,00	(268.900.000,00)	(2,95)
38	Penurunan AKI-AKB - LO	132.983.148,00	-	132.983.148,00	100,00
39	Penguatan Intervensi Stunting - LO	606.130.273,00	-	606.130.273,00	100,00
40	Penurunan Stunting - LO	39.875.000,00	-	39.875.000,00	100,00
41	Pengendalian Penyakit - LO	3.379.118.422,00	-	3.379.118.422,00	100,00
	Jumlah	1.705.072.827.119,00	1.880.675.303.084,00	(175.602.475.965,00)	-9,34

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 adalah sebesar Rp31.394.514.028,00. Adapun rincian pendapatan tersebut untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.169

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Saldo2020(Rp)	Saldo2019(Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	5.889.016.544,00	8.145.868.009,00	(2.256.851.465,00)	(27,71)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	51.197.214,00	344.812.852,00	(293.615.638,00)	(85,15)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	3.613.174.806,00	6.423.749.710,00	(2.810.574.904,00)	(43,75)
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	15.212.391.997,00	9.345.712.804,00	5.866.679.193,00	62,77
5	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	6.628.733.467,00	6.915.176.194,00	(286.442.727,00)	(4,14)
	Jumlah	31.394.514.028,00	31.175.319.569,00	219.194.459,00	0,70

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Nilai Pendapatan Transfer dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2020 adalah sebesar Rp3.147.290.401,00. Nilai pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 26,02 % dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.170
 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	-	733.000.400,00	(733.000.400,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	623.982.443,00	102.461.700,00	521.520.743,00	508,99
3	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	-	-	-	-
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	1.903.603,00	526.498,00	1.377.105,00	261,56
5	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	-	-	-	-
6	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	1.013.899.150,00	764.460.992,00	249.438.158,00	32,63
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	24.764.200,00	403.597.467,00	(378.833.267,00)	(93,86)
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	1.353.102.153,00	419.934.900,00	933.167.253,00	222,22
9	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	129.127.699,00	73.407.300,00	55.720.399,00	75,91
10	Bagi Hasil Minerba - LO	511.153,00	-	511.153,00	100,00
11	Bagi Hasil Lainnya	-	58.800,00	(58.800,00)	(100,00)
	Jumlah	3.147.290.401,00	2.497.448.057,00	649.842.344,00	26,02

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.241.906.073.000,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 9,57% dari nilai Dana Alokasi Umum tahun 2019.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang merupakan Dana Alokasi Umum nilainya adalah sebesar Rp428.624.949.690,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 9,50% dari tahun 2019. Rincian nilai tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.171
 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO	-	17.133.286.000,00	(17.133.286.000,00)	(100,00)
2	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO	1.644.363.000,00	10.036.311.000,00	(8.391.948.000,00)	(83,62)
3	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO	341.725.000,00	5.673.301.198,00	(5.331.576.198,00)	(93,98)
4	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	4.336.592.000,00	2.972.290.000,00	1.364.302.000,00	45,90
5	DAK Bidang Kesehatan - LO	30.053.597.561,00	18.207.643.136,00	11.845.954.425,00	65,06
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	755.730.065,00	870.701.000,00	(114.970.935,00)	(13,20)
7	DAK Bidang Perdagangan - LO	-	3.877.658.796,00	(3.877.658.796,00)	(100,00)
8	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	-	791.779.999,00	(791.779.999,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
9	DAK Bidang Pertanian - LO	2.200.000.000,00	5.474.211.000,00	(3.274.211.000,00)	(59,81)
10	DAK Bidang Pendidikan - LO	77.839.710.310,00	113.565.239.608,00	(35.725.529.298,00)	(31,46)
11	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	1.110.354.000,00	-	1.110.354.000,00	100,00
12	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	209.825.032.000,00	218.360.340.570,00	(8.535.308.570,00)	(3,91)
13	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	-	2.326.362.500,00	(2.326.362.500,00)	(100,00)
14	Bantuan Operasional Kesehatan - LO	49.934.163.000,00	30.056.001.062,00	19.878.161.938,00	66,14
15	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LO	25.100.100.000,00	21.952.710.000,00	3.147.390.000,00	14,34
16	Bantuan Operasional KB - LO	5.041.722.388,00	5.052.900.465,00	(11.178.077,00)	(0,22)
17	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru - LO	-	958.234.000,00	(958.234.000,00)	(100,00)
18	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	5.160.553.523,00	4.445.700.124,00	714.853.399,00	16,08
19	Dana DAK Pelayanan Kepariwisata - LO	2.261.500.000,00	2.720.894.000,00	(459.394.000,00)	(16,88)
20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO	8.861.700.000,00	9.130.600.000,00	(268.900.000,00)	(2,95)
21	Penurunan AKI-AKB - LO	132.983.148,00	-	132.983.148,00	100,00
22	Penguatan Intervensi Stunting - LO	606.130.273,00	-	606.130.273,00	100,00
23	Penurunan Stunting - LO	39.875.000,00	-	39.875.000,00	100,00
24	Pengendalian Penyakit - LO	3.379.118.422,00	-	3.379.118.422,00	100,00
	Jumlah	428.624.949.690,00	473.606.164.458,00	(44.981.214.768,00)	-9,50

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Merupakan transfer dana penyesuaian yang terdiri dari :

5.4.1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

Nilai Pendapatan Dana Otonomi Khusus pada tahun 2020 adalah Nihil, sama dengan nilai pada tahun 2019.

5.4.1.2.2.2 Dana Otonomi Penyesuaian

Pendapatan Dana Otonomi Penyesuaian pada tahun 2020 nilainya adalah sebesar Nihil.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO merupakan pendapatan transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Transfer pemerintah Daerah Lainnya ini terdiri dari:

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 adalah sebesar Rp196.620.512.423,00.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.172

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	181.020.663.531,00
3	Penetapan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2020	20.268.279.105,00
2	Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi th 2019	(4.668.430.213,00)
JUMLAH		196.620.512.423,00

5.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Nihil.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan-LO tahun 2020 merupakan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi berupa Bantuan Gubernur. Nilai bantuan tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp39.252.138.336,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp744.151.387.711,75. Rincian dari pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.173

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah - LO	251.451.996.919,89	210.194.732.694,90	41.257.264.224,99	19,63
2	Dana Darurat - LO	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya - LO	492.699.390.791,86	-	492.699.390.791,86	-
Jumlah		744.151.387.711,75	210.194.732.694,90	533.956.655.016,85	254,03

Rincian masing-masing jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dijelaskan di bawah ini.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp251.451.996.919,89 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.174

Rincian Pendapatan Hibah –LO

No	Uraian	Saldo LO 2020 (Rp).	Saldo LO 2019 (Rp).	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.327.021.549,00	34.222.314.002,90	(21.895.292.453,90)	(63,98)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo LO 2020 (Rp).	Saldo LO 2019 (Rp).	Kenaikan / Penurunan	%
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	29.727.019.662,89	815.098.020,00	28.911.921.642,89	3.547,05
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	19.386.019.016,00	7.444.400.672,00	11.941.618.344,00	160,41
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	1.213.706.692,00	120.000.000,00	1.093.706.692,00	911,42
5	Pendapatan Hibah Dana BOS SD dan SMP Negeri	188.798.230.000,00	167.592.920.000,00	21.205.310.000,00	12,65
	Jumlah	251.451.996.919,89	210.194.732.694,90	41.257.264.224,99	19,63

5.4.1.3.2 Dana Darurat – LO

Pendapatan dari Dana Darurat tahun 2020 adalah sebesar nol atau nihil.

5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya – LO

Pendapatan lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp492.699.390.791,86. Rincian dari pendapatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.175
Rincian Pendapatan Lainnya-LO

No	Uraian	Saldo LO 2020 (Rp).	Saldo LO 2019 (Rp).	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Lainnya - LO	220.886.791,86	-	220.886.791,86	100
2	Dana Desa - LO	492.478.504.000,00	-	492.478.504.000,00	100
	Jumlah	492.699.390.791,86	-	492.699.390.791,86	100

Pendapatan Lainnya sebesar Rp220.886.791,86 merupakan penyesuaian penyesihan piutang BLUD.

5.4.2 Beban LO

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.892.671.633.376,56	2.372.145.890.356,69

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO tahun 2020 sebesar Rp2.892.671.633.376,56. Rincian Beban-LO tahun 2020 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.176
 Rincian Beban-LO

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai - LO	983.027.726.941,00	1.022.577.805.303,00	(39.550.078.362,00)	(3,87)
2	Beban Persediaan	204.056.392.052,74	215.042.404.226,29	(10.986.012.173,55)	(5,11)
3	Beban Jasa	428.833.973.815,58	388.368.963.576,50	40.465.010.239,08	10,42
4	Beban Pemeliharaan	61.193.121.460,00	81.917.497.685,00	(20.724.376.225,00)	(25,30)
5	Beban Perjalanan Dinas	52.470.089.423,00	73.422.897.435,00	(20.952.808.012,00)	(28,54)
6	Beban Bunga	1.232.296.972,00	254.662.800,00	977.634.172,00	-
7	Beban Subsidi	-	-	-	-
8	Beban Hibah	87.768.398.047,16	98.190.606.640,00	(10.422.208.592,84)	(10,61)
9	Beban Bantuan Sosial	38.132.650.000,00	21.269.161.700,00	16.863.488.300,00	79,29
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.391.962.204,00	224.988.162.761,00	109.403.799.443,00	48,63
11	Beban Penyisihan Piutang	3.586.229.777,08	2.406.603.265,90	1.179.626.511,18	49,02
12	Beban Lain-lain	2.970.615.313,00	23.721.444.721,00	(20.750.829.408,00)	(87,48)
13	Beban Transfer	695.008.177.371,00	219.985.680.243,00	475.022.497.128,00	215,93
	Jumlah	2.892.671.633.376,56	2.372.145.890.356,69	520.525.743.019,87	21,94

5.4.2.1 **Beban Pegawai - LO**
 Beban Pegawai-LO selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp983.027.726.941,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.177
 Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	891.310.448.808,00	925.161.350.783,00	(33.850.901.975,00)	(3,66)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	56.520.509.827,00	78.651.447.038,00	(22.130.937.211,00)	(28,14)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	9.813.000.000,00	9.754.900.000,00	58.100.000,00	0,60
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.859.955.689,00	4.787.315.870,00	(2.927.360.181,00)	(61,15)
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	192.836.000,00	211.315.042,00	(18.479.042,00)	(8,74)
6	Beban Uang Lembur - LO	4.292.089.660,00	4.011.476.570,00	280.613.090,00	7,00
7	Beban Pegawai BLUD	19.038.886.957,00	-	19.038.886.957,00	100,00
	Jumlah	983.027.726.941,00	1.022.577.805.303,00	-39.550.078.362,00	-3,87

5.4.2.2 **Beban Persediaan**
 Beban Persediaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp204.056.392.052,74 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.178
 Rincian Beban Persediaan – LO Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	58.541.144.177,41	83.040.577.458,61	(24.499.433.281,20)	(29,50)
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	76.531.096.982,63	80.058.772.827,74	(3.527.675.845,11)	(4,41)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	29.655.790.501,70	14.557.325.324,94	15.098.465.176,76	103,72
4	Beban Makanan dan Minuman	35.314.864.141,00	30.044.176.470,00	5.270.687.671,00	17,54
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.198.263.650,00	1.895.583.750,00	(697.320.100,00)	(36,79)
6	Beban Pakaian Kerja	274.855.100,00	1.375.616.896,00	(1.100.761.796,00)	(80,02)
7	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.540.377.500,00	3.696.051.499,00	(1.155.673.999,00)	(31,27)
8	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	374.300.000,00	(374.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	204.056.392.052,74	215.042.404.226,29	(10.986.012.173,55)	-5,11

5.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp428.833.973.815,58 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.179
 Rincian Beban Jasa Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	326.788.908.225,09	297.215.564.810,83	29.573.343.414,26	9,95
2	Beban Premi Asuransi	17.388.301.374,50	8.856.449.115,00	8.531.852.259,50	96,33
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.510.779.810,99	2.435.247.166,67	(924.467.355,68)	(37,96)
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	689.078.000,00	1.732.020.000,00	(1.042.942.000,00)	(60,22)
5	Beban Sewa Alat Berat	150.240.000,00	-	150.240.000,00	100,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.447.446.032,00	2.501.335.400,00	(1.053.889.368,00)	(42,13)
7	Beban Jasa Konsultasi	5.177.907.000,00	7.028.486.268,00	(1.850.579.268,00)	(26,33)
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.785.590.500,00	7.023.516.958,00	(4.237.926.458,00)	(60,34)
9	Beban Honorarium Non Pegawai	241.150.000,00	248.600.000,00	(7.450.000,00)	(3,00)
10	Beban Honorarium PNS - LO	2.956.370.000,00	5.973.107.300,00	(3.016.737.300,00)	(50,51)
11	Beban Honorarium Non PNS - LO	14.804.626.257,00	6.034.004.885,00	8.770.621.372,00	145,35
12	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	49.245.111.518,00	28.407.283.331,00	20.837.828.187,00	73,35
13	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	-	8.400.000,00	100,00
14	Beban Barang Dana BOS	-	-	-	-
15	Beban Pegawai BLUD	-	13.099.917.620,00	(13.099.917.620,00)	(100,00)
16	Beban Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.958.928.000,00	2.374.509.722,00	(415.581.722,00)	(17,50)
17	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.681.137.098,00	5.438.921.000,00	(1.757.783.902,00)	(32,32)
	Jumlah	428.833.973.815,58	388.368.963.576,50	40.465.010.239,08	10,42

**5.4.2.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar Rp61.193.121.460,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.180

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.671.058.865,00	6.814.516.547,00	(1.143.457.682,00)	(16,78)
2	Beban Pemeliharaan	55.522.062.595,00	75.102.981.138,00	(19.580.918.543,00)	(26,07)
	Jumlah	61.193.121.460,00	81.917.497.685,00	(20.724.376.225,00)	(25,30)

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp52.470.089.423,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.181

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.316.169.593,00	35.483.677.637,00	(8.167.508.044,00)	(23,02)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.153.919.830,00	37.640.697.298,00	(12.486.777.468,00)	(33,17)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	298.522.500,00	(298.522.500,00)	(100,00)
	Jumlah	52.470.089.423,00	73.422.897.435,00	(20.952.808.012,00)	(28,54)

5.4.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2020 yang merupakan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank adalah sebesar Rp1.232.296.972,00.

5.4.2.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2020 adalah nihil atau nol.

5.4.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2020 adalah sebesar Rp87.768.398.047,16 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.182

Rincian Beban Hibah Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	1.898.569.754,30	-	1.898.569.754,30	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	18.516.274.524,00	268.770.000,00	18.247.504.524,00	6.789,26
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	67.353.553.768,86	97.921.836.640,00	(30.568.282.871,14)	(31,22)
	Jumlah	87.768.398.047,16	98.190.606.640,00	(10.422.208.592,84)	(10,61)

5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 adalah sebesar Rp38.132.650.000,00. Bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan sosial, bantuan RTH, bantuan penyandang disabilitas, jaring pengaman sosial dan sebagainya.

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2020 sebesar Rp334.391.962.204,00 dengan rincian masing-masing untuk Beban Penyusutan sebesar Rp333.744.482.487,00 dan Amortisasi sebesar Rp647.479.717,00. Rincian Beban Penyusutan sebesar Rp333.744.482.487,00 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.183
 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	1.856.690.715,00
2	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	2.900.489.275,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.660.621.544,00
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	66.633.186,00
5	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	19.945.090,00
6	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	125.028.202,00
7	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	29.292.302,00
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	234.246.136,00
9	Beban Penyusutan Alat Ukur	240.223.950,00
10	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.633.317.546,00
11	Beban Penyusutan Alat Kantor	6.165.802.991,00
12	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	11.886.523.920,00
13	Beban Penyusutan Komputer	19.082.382.288,00
14	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.093.822.318,00
15	Beban Penyusutan Alat Studio	1.457.497.635,00
16	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	401.321.816,00
17	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	64.173.835,00
18	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	34.643.006.379,00
19	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	157.099.397,00
20	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
21	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.619.919.190,00
22	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	916.052,00
23	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	3.642.050,00
24	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	144.526.754,00
25	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	17.221.330,00
26	Beban Penyusutan Senjata Api	148.500,00
27	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	9.991.667,00
28	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	255.966.484,00
29	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.887.034.360,00
30	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	504.952.977,00
31	Beban Penyusutan Bangunan Menara	2.697.176,00
32	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	419.910.410,00
33	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	489.383.821,00
34	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	182.941.893,00
35	Beban Penyusutan Jalan	169.622.347.011,00
36	Beban Penyusutan Jembatan	9.608.720.263,00
37	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.528.939.797,00
38	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	65.205.160,00
39	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	891.600,00
40	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	17.690.355.237,00
41	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	17.437.422,00
42	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	444.242.986,00
43	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	76.650.357,00
44	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	102.965.651,00
45	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	378.735.377,00
46	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	695.559.273,00
47	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	9.028.737,00
48	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	87.738.961,00
49	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	1.154.500,00
50	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	10.957.003,00
51	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	36.402.428,00
52	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	3.949.500,00
53	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	3.811.910.027,00
54	Beban Penyusutan Alat Olahraga Lainnya	293.420.008,00
JUMLAH		333.744.482.487,00

Sedangkan rincian beban amortisasi tahun 2020 Rp647.479.717,00 dengan rincian untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.184
 Rincian Beban Amortisasi Tahun 2020

No	SKPD	Uraian	Jumlah
1	DINDIKPORA	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	105.294.000,00
2	DINASKESHEATAN	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.369.500,00
3	UPTDPUSKEMASTANJUNG	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	30.600.000,00
4	RSUDBREBES	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.500.000,00
5	RSUDBUMIAYU	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	62.720.000,00
6	DPSDAPR	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	19.796.000,00
7	DINPERWASKIM	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	7.885.400,00
8	KANTORKESATUANBANGSADANPOLITIK	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.960.000,00
9	DP3KB	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.800.000,00
10	DINDUKCAPIL	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	22.954.550,00
11	DINPERMADES	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.040.000,00
12	DINASPERHUBUNGAN	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	17.473.642,00
13	DINKOMINFOTIK	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.840.000,00
14	DPMPTSP	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	78.468.000,00
15	DINARPUS	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.400.000,00
16	DINASPERIKANAN	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.200.000,00
17	DPKH	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.800.000,00
18	DINPERINAKER	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	12.056.000,00
19	SETDA	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	104.532.000,00
20	SEKRETARIATDPRD	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.550.625,00
21	INSPEKTORAT	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.000.000,00
22	BPPKAD	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	57.400.000,00
23	BKPSDMD	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	32.840.000,00
		Jumlah	647.479.717,00

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp3.586.229.777,08 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.185
 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.623.437.729,02	1.628.534.323,86	(5.096.594,84)	(0,31)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	37.298.412,54	21.816.314,90	15.482.097,64	70,97
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	6.077.364,12	(6.077.364,12)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	950.731.187,37	569.312.847,55	381.418.339,82	67,00
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	795.083.043,69	27.576.192,84	767.506.850,85	2.783,22



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	77.999.244,46	-	77.999.244,46	100,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	-	
8	Beban Penyisihan Piutang BLUD	101.673.610,00	142.705.902,35	(41.032.292,35)	(28,75)
9	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan ganti Rugi	6.550,00	10.580.320,28	(10.573.770,28)	(99,94)
	Jumlah	3.586.229.777,08	2.406.603.265,90	1.179.626.511,18	49,02

5.4.2.12 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.970.615.313,00. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp20.750.829.408,00 atau sebesar 87,48%. Adapun rincian beban ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.186
 Rincian Beban Lain-Lain Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Lain-lain	-	21.748.000,00	(21.748.000,00)	(100,00)
2	Beban Barang Ekstrakomptabel	2.970.615.313,00	23.699.696.721,00	(20.729.081.408,00)	(87,47)
	Jumlah	2.970.615.313,00	23.721.444.721,00	(20.750.829.408,00)	(87,48)

Beban lain-lain sebesar Rp2.970.615.313,00 merupakan reklasifikasi aset tetap tahun 2020 yang tergolong sebagai barang ekstrakomptabel.

5.4.2.13 Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2020 adalah sebesar Rp695.008.177.371,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.187
 Rincian Beban Transfer Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	10.162.840.363,00	9.672.915.678,00	489.924.685,00	5,06
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.104.903.208,00	712.496.846,00	392.406.362,00	55,07
3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Provinsi	168.322.800,00	184.430.700,00	(16.107.900,00)	(8,73)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	682.110.004.500,00	208.106.854.529,00	474.003.149.971,00	227,77
5	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	1.462.106.500,00	1.308.982.490,00	153.124.010,00	11,70
	Jumlah	695.008.177.371,00	219.985.680.243,00	475.022.497.128,00	215,93



- 5.4.2.13.1 **Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 merupakan transfer atau bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Desa, yaitu sebesar Rp10.162.840.363,00
- 5.4.2.13.2 **Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2020 merupakan transfer atau bagi hasil retribusi daerah ke Pemerintah Desa, yaitu sebesar Rp1.104.903.208,00
- 5.4.2.13.3 **Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer bagi hasil retribusi ke provinsi. Nilainya tahun 2020 adalah sebesar Rp168.322.800,00.
- 5.4.2.13.4 **Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2020 sebesar Rp682.110.004.500,00.
- 5.4.2.13.5 **Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada tahun 2020 adalah transfer bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.462.106.500,00.

Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp156.498.636.445,68 dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.188

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan - LO	3.049.170.269.822,24	2.713.728.066.656,50	335.442.203.165,74	12,36
2	Beban - LO	2.892.671.633.376,56	2.372.145.890.356,69	520.525.743.019,87	21,94
	Surplus/Defisit dari Operasi	156.498.636.445,68	341.582.176.299,82	(185.083.539.854,14)	(54,18)

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

Dalam kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, dirinci dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.189
 Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
	SURPLUS NON OPERASIONAL	37.037.539.215,80	26.627.499.145,14	10.410.040.070,66	39,10
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	704.383.970,00	435.018.973,00	269.364.997,00	61,92
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	36.333.155.245,80	26.192.480.172,14	10.140.675.073,66	38,72
	DEFISIT NON OPERASIONAL	39.866.777.744,41	34.735.074.013,04	5.131.703.731,37	14,77
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	1.054.709.801,86	140.130.399,25	914.579.402,61	652,66
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	38.812.067.942,55	34.594.943.613,79	4.217.124.328,76	12,19
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.829.238.528,61)	(8.107.574.867,90)	5.278.336.339,29	(65,10)

5.4.3.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp37.037.539.215,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.190
 Rincian Surplus Non Operasional Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	704.383.970,00	435.018.973,00	269.364.997,00	61,92
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	36.333.155.245,80	26.192.480.172,14	10.140.675.073,66	38,72
	Jumlah	37.037.539.215,80	26.627.499.145,14	10.410.040.070,66	39,10

5.4.3.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Brebes mencatat adanya Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp704.383.970,00 yang berasal dari penjualan aset tetap. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.191
 Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

No	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	BLUD PUSK BANJARHARJO	17.991.250
2	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	BLUD PUSK PAGUYANGAN	4.675.000
3	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DINARPUS	100.000
4	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DINKOMINFOTIK	1.396.500
5	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DINPERWASKIM	680.000
6	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DISNAKERTRANS	1.190.000
7	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DP3KB	1.705.000
8	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DPKH	20.550.000
9	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	DPU	281.597.500
10	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	KEC. BREBES	88.000
11	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	KEC. BUM AYU	1.300.000
12	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	KEC. SONGGOM	1.196.500
13	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	KECAMATAN WAN SARI	230.000
14	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	RSUD BUMIAYU	12.000.000
15	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT DPRD	6.000.000
16	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT DAERAH	69.036.720
17	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	BPKAD	284.647.500
	Jumlah		704.383.970

5.4.3.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO tahun 2020 adalah nol atau nihil.

5.4.3.1.3 Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp36.333.155.245,80. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.192
 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	4.841.341.732,12	4.702.037.402,37	139.304.329,75	2,96

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
2	Surplus Mutasi Persediaan antar SKPD - LO	31.491.813.513,68	21.490.442.769,77	10.001.370.743,91	46,54
	Jumlah	36.333.155.245,80	26.192.480.172,14	10.140.675.073,66	38,72

- Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp4.841.341.732,12 yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.193

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	25.787.846
2	eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	3.231.584.450
3	Penerimaan Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga PPKD	1.552.437.526
4	Pengembalian piutang pokok ex-Dana Bergulir	25.454.546
5	Pencatatan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	6.077.364
	Jumlah	4.841.341.732,12

- Surplus Mutasi Persediaan antar SKPD-LO sebesar Rp31.491.813.513,68 merupakan pencatatan mutasi masuk barang persediaan antar SKPD.

5.4.3.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp39.866.777.744,41. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.194

Rincian Defisit Non Operasional Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	1.054.709.801,86	140.130.399,25	914.579.402,61	652,66
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-			
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	38.812.067.942,55	34.594.943.613,79	4.217.124.328,76	12,19
	Jumlah	39.866.777.744,41	34.735.074.013,04	5.131.703.731,37	14,77

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO tahun 2020 sebesar Rp1.054.709.801,86 merupakan penghapusan aset tetap karena proses penjualan. Rincian besarnya untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.195
Rincian Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2020

SKPD	Jumlah (Rp)
DINAS KESEHATAN	14.839.830,00
UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	64.757.440,00
RSUD BUMIAYU	5.476.000,00
DINPERWASKIM	1.465.000,00
PLH BNK	402.875,00
DINKOMINFOTIK	3.800.000,00
DINARPUS	1.200.000,00
DP3KB	20.588.407,00
DINPERTAN KP	608.160.612,00
DPKH	-
KECAMATAN WANASARI	274.375,00
KECAMATAN SONGGOM	2.000.000,00
KECAMATAN SALEM	1.800,00
SEKRETARIAT DPRD	-
KECAMATAN BREBES	140.000,00
DINAS PERIKANAN	331.603.462,86
SEKRETARIAT DPRD	-
Jumlah	1.054.709.801,86

5.4.3.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO adalah nihil atau nol.

5.4.3.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp38.812.067.942,55. Penjelasan disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.196
Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan aset tetap Rusak Berat	496.556.028,00
2	Penghapusan aset tetap barang Baik/Rusak Ringan	6.811.871.101,00
3	Akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	(5.848.800.783,00)
4	Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir	25.454.546,00
5	Jurnal reklasifikasi persediaan Kadaluarsa/Usang	1.063.112.830,66
6	Eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	3.231.589.450,00
7	Pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis	1.552.437.526,00
8	Mutasi keluar barang persediaan	31.479.847.243,89
	Jumlah	38.812.067.942,55



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp153.669.397.917,07 dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.197

Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	156.498.636.445,68	341.582.176.299,82	(185.083.539.854,14)	(54,18)
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.829.238.528,61)	(8.107.574.867,91)	5.278.336.339,30	(65,10)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	153.669.397.917,07	333.474.601.431,91	(179.805.203.514,84)	(53,92)

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar biasa terdiri dari :

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa – LO tahun 2020 adalah nol atau nihil.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.121.472.874,00.

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp(1.121.472.874,00) dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.198

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
2	Beban Luar Biasa	1.121.472.874,00	1.267.065.451,00	(145.592.577,00)	(11,49)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.121.472.874,00)	(1.267.065.451,00)	145.592.577,00	(11,49)

**Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp152.547.925.043,07 dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.199
Rincian Surplus/Defisit-LO Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	153.669.397.917,07	333.474.601.431,91	(179.805.203.514,84)	(53,92)
2	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.121.472.874,00)	(1.267.065.451,00)	145.592.577,00	(11,49)
	SURPLUS/DEFISIT LO	152.547.925.043,07	332.207.535.980,91	(179.659.610.937,84)	(54,08)

Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp181.482.467.546,57 memiliki perbedaan dengan jumlah nilai surplus/(defisit) Laporan Operasional Tahun 2020 yang sebesar Rp152.547.925.043,07. Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci dalam tabel berikut ini

Tabel 5.200
Hubungan LRA - LO Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
A	Surplus / (Defisit) LRA	181.482.467.546,57
B	Penambahan :	1.106.269.565.988,37
	Realisasi Belanja Modal Tahun 2019	432.556.254.864,00
a.	<u>Pendapatan Pajak Daerah :</u>	
1)	Pencatatan Piutang Pajak	41.191.464.787,00
2)	Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan LO	502.021.231,04
3)	Pencatatan Piutang Denda Pajak	1.988.854.973,40
b.	<u>Pendapatan Retribusi Daerah :</u>	
1)	Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan LO	114.635.857,63
2)	Pencatatan Piutang Retribusi baru	232.651.000,00
c.	<u>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :</u>	
1)	Pencatatan Penyesuaian saldo PMPD th 2020 akibat perhitungan dengan metode ekuitas	1.656.283.014,20



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
d.	<u>Lain-Lain PAD Yang Sah</u>	
1)	Pencatatan Piutang TGR	2.560.000,00
2)	Pencatatan Piutang BLUD	15.508.939.873,00
e.	<u>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</u>	
1)	Pembayaran Utang Lebih Bayar DBH	266.435.141,00
2)	Pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	9.178.408.843,00
3)	Pencatatan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	757.253.099,00
f.	<u>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</u>	
1)	Pencatatan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	20.268.279.105,00
g.	<u>Pendapatan Hibah</u>	
1)	Pencatatan hibah masuk aset	16.044.871.816,00
2)	Pencatatan hibah masuk persediaan	40.608.895.103,89
h.	<u>Pendapatan Lain-Lain</u>	
1)	Pengurangan penyisihan Piutang BLUD	220.886.791,86
i.	<u>Beban Pegawai</u>	
1)	Pembayaran utang beban pegawai tahun lalu	7.280.427.248,00
2)	Reklasifikasi beban BLUD	534.775.418,00
3)	<u>Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tetap</u>	53.126.000,00
j.	<u>Beban persediaan</u>	
1)	Reklasifikasi persediaan ke aset tetap	871.002.000,00
2)	Koreksi kurang saldo awal persediaan	153.666.330,00
3)	pencatatan saldo akhir persediaan	51.627.819.806,09
4)	Hibah keluar persediaan	37.525.352.847,16
5)	Mutasi keluar barang persediaan	31.479.847.243,89
6)	reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang	1.063.112.830,66
7)	reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	25.050.000,00
8)	pembayaran utang beban persediaan tahun lalu	13.534.221.680,00
-		
k.	<u>Beban Jasa</u>	
1)	Reklasifikasi beban jasa ke aset tetap	784.275.000,00
2)	Pembayaran utang beban jasa tahun lalu	15.765.674.713,00
3)		
4)	Jurnal penyesuaian Beban Jasa tahun ini yang merupakan Belanja Dibayar di Muka	64.464.860,75
4)	Reklasifikasi beban jasa BLUD	193.444.704.039,00
5)	Reklasifikasi beban jasa BOS	93.680.160.955,00
l.	<u>Beban Pemeliharaan</u>	
1)	Reklasifikasi beban pemeliharaan ke aset tetap	691.771.500,00
2)	Pembayaran utang beban pemeliharaan tahun lalu	1.441.275,00
m.	<u>Beban Luar Biasa</u>	
1)	Pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis	1.552.437.526,00
n.	<u>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</u>	
1)	Setoran Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	704.383.970,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
2)	Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	25.787.846,00
3)	eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	3.231.584.450,00
4)	Penerimaan Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga PPKD	1.552.437.526,00
5)	Pengembalian piutang pokok ex-Dana Bergulir	25.454.546,00
6)	Pencatatan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	6.077.364,12
7)	Mutasi masuk persediaanantar SKPD	31.491.813.513,68
o.	<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	38.000.000.000,00
C	Pengurangan :	1.135.204.108.491,87
a.	<u>Pendapatan Pajak Daerah</u>	
1)	Penerimaan piutang pajak tahun lalu	35.156.077.735,00
2)	Penyesuaian Pendapatan LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	1.034.829.002,25
b.	<u>Pendapatan Retribusi Daerah</u>	
1)	Penyesuaian Pendapatan LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	291.768.261,67
2)	Penerimaan piutang retribusi tahun lalu	150.141.468,00
c.	<u>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</u>	
1)	Penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD	1.215.472.824,00
d.	<u>Pendapatan Lain-Lain</u>	
1)	Penerimaan piutang TGR	8.559.000,00
2)	Penerimaan Piutang BLUD	51.046.263.362,00
3)	Pengembalian piutang jasa ex-Dana Bergulir	333.300,00
4)	Pengurangan Piutang BLUD yang tidak lolos verifikasi	57.908.400,00
5)	Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap	704.383.970,00
e.	<u>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</u>	
1)	Pencatatan Utang Lebih Bayar DBH	205.005.335,00
2)	Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	12.353.649.071,00
3)	Penerimaan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	850.066.379,00
f.	<u>Pendapatan Transfer Lainnya</u>	
1)	Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	4.668.430.213,00
g.	<u>Beban Pegawai</u>	
1)	Pencatatan Utang Beban Pegawai ini yang belum dibayar	24.429.348.756,00
h.	<u>Beban persediaan</u>	
1)	Reklasifikasi persediaan dari aset tetap	478.652.573,00
2)	Utang beban persediaan tahun 2020 yang belum dibayar	2.193.572.597,00
3)	Koreksi saldo awal persediaan	489.359.424,47
4)	Pemakaian saldo awal barang persediaan	36.906.878.209,50
5)	Mutasi masuk persediaan	31.491.813.513,68
6)	Hibah masuk barang persediaan	40.608.895.103,89
7)	Reklasifikasi beban persediaan BLUD	63.396.472.497,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
8)	Reklasifikasi beban persediaan BOS	58.125.263.380,00
9)	Penerimaan Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga PPKD	1.552.437.526,00
i.	<u>Beban Jasa</u>	
1)	Reklasifikasi aset tetap ke beban jasa	231.498.000,00
2)	Utang Beban Jasa tahun 2020 yang belum dibayar	15.686.764.248,00
3)	Belanja Dibayar di Muka tahun lalu yang telah menjadi Beban Jasa	107.149.032,33
4)	Reklasifikasi beban jasa BLUD	122.425.093.722,00
5)	reklasifikasi beban jasa BOS	14.294.405.289,00
6)	Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	25.050.000,00
j.	<u>Beban Pemeliharaan</u>	
1)	Reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	53.759.845,00
2)	Reklasifikasi beban pemeliharaan BLUD	5.454.784.947,00
3)	Reklasifikasi beban persediaan BOS	15.172.340.447,00
k.	<u>Beban Hibah</u>	
1)	Hibah keluar aset tetap	1.049.340.000,00
2)	Hibah keluar barang persediaan	37.519.352.847,16
l.	<u>Beban Penyisihan Piutang</u>	
1)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang TGR	6.550,00
2)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.623.437.729,02
3)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	950.731.187,37
4)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Retribusi	37.298.412,54
5)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang BLUD	101.673.610,00
6)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	795.083.043,69
7)	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi	77.999.244,46
m.	<u>Beban Perjalanan Dinas</u>	
1)	Reklasifikasi beban perjalanan dinas BLUD	2.703.128.291,00
2)	Reklasifikasi beban perjalananan dinas dana BOS	6.088.151.839,00
n.	<u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u>	334.391.962.204,00
m.	<u>Beban Lain-Lain</u>	
1)	Reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomtable	2.970.615.313,00
o.	<u>Defisit Non Operasional</u>	
1)	Penghapusan aset tetap Rusak Berat	496.556.028,00
2)	Penghapusan aset tetap barang Baik/Rusak Ringan	6.811.871.101,00
3)	Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap	(5.848.800.783,00)
3)	Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir	25.454.546,00
3)	Jurnal reklasifikasi persediaan Kadaluarsa/Usang	1.063.112.830,66
3)	Eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	3.231.589.450,00
4)	Pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis	1.552.437.526,00
5)	Mutasi keluar barang persediaan	31.479.847.243,89
6)	Penghapusan Aset Tetap dijual	1.054.709.801,86



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp).
p.	<u>Penerimaan Pembiayaan</u>	166.162.123.044,43
D	Surplus / (Defisit) LO (A + B - C)	152.547.925.043,07

Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LO dengan Pendapatan-LRA :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Pajak Daerah

LO	LRA	SELISIH
Rp116.104.623.935,19	Rp108.613.189.681,00	Rp7.491.434.254,19

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp7.491.434.254,19. Selisih tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.201
 Selisih antara pendapatan Pajak-LO dengan pendapatan Pajak- LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pencatatan Piutang Pajak	41.191.464.787,00
2)	Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan LO	502.021.231,04
3)	Pencatatan Piutang Denda Pajak	1.988.854.973,40
	Jumlah penambahan	43.682.340.991,44
	Pengurangan :	
1)	Penerimaan piutang pajak tahun lalu	35.156.077.735,00
2)	Penyesuaian Pendapatan LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	1.034.829.002,25
	Jumlah pengurangan	36.190.906.737,25
	jumlah selisih	7.491.434.254,19

b. Pendapatan Retribusi Daerah

LO	LRA	SELISIH
Rp15.372.971.779,96	Rp15.467.594.652,00	Rp(94.622.872,04)



Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi- LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp(94.622.872,04) yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.202

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi- LRA

No	Uraian	Jumlah
1)	Penambahan :	
	Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan LO	114.635.857,63
2)	Pencatatan Piutang Retribusi baru	232.651.000,00
	Jumlah penambahan	347.286.857,63
1)	Pengurangan :	
	Penyesuaian Pendapatan LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	291.768.261,67
2)	Penerimaan piutang retribusi tahun lalu	150.141.468,00
	Jumlah pengurangan	441.909.729,67
	jumlah selisih	(94.622.872,04)

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LO	LRA	SELISIH
Rp9.583.760.091,20	Rp9.142.949.901,00	Rp440.810.190,20

Untuk Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan – LRA terdapat selisih sebesar Rp440.810.190,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.203

Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

No	Uraian	Jumlah
1)	Penambahan :	
	Pencatatan Penyesuaian saldo PMPD th 2020 akibat perhitungan dengan metode ekuitas	1.656.283.014,20
	Jumlah penambahan	1.656.283.014,20
1)	Pengurangan :	
	Penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD	1.215.472.824,00
	Jumlah pengurangan	1.215.472.824,00
	jumlah selisih	440.810.190,20



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

LO	LRA	SELISIH
Rp223.012.048.426,14	Rp259.317.996.585,14	Rp(36.305.948.159,00)

Selisih antara pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp.(36.305.948.159,00) yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.204

Selisih antara Lain-Lain PAD yang Sah -LO dengan Lain-Lain PAD yang Sah- LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pencatatan Piutang TGR	2.560.000,00
2)	Pencatatan Piutang BLUD	15.508.939.873,00
	Jumlah penambahan	15.511.499.873,00
	Pengurangan :	
1)	Penerimaan piutang TGR	8.559.000,00
2)	Penerimaan Piutang BLUD	51.046.263.362,00
3)	Pengembalian piutang jasa ex-Dana Bergulir	333.300,00
4)	Pengurangan Piutang BLUD yang tidak lolos verifikasi	57.908.400,00
5)	Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap	704.383.970,00
	Jumlah pengurangan	51.817.448.032,00
	jumlah selisih	(36.305.948.159,00)

2. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

LO	LRA	SELISIH
Rp1.705.072.827.119,00	Rp1.708.279.450.821,00	Rp(3.206.623.702,00)

Selisih antara pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat -LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp(3.206.623.702,00) yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.205

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat -LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pembayaran Utang Lebih Bayar DBH	266.435.141,00



No	Uraian	Jumlah
2)	Pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	9.178.408.843,00
3)	Pencatatan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	757.253.099,00
	Jumlah penambahan	10.202.097.083,00
	Pengurangan :	
1)	Pencatatan Utang Lebih Bayar DBH	205.005.335,00
2)	Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	12.353.649.071,00
3)	Penerimaan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	850.066.379,00
	Jumlah pengurangan	13.408.720.785,00
	jumlah selisih	(3.206.623.702,00)

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tidak ada saldo atau nihil.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

LO	LRA	SELISIH
Rp196.620.512.423,00	Rp181.020.663.531,00	Rp15.599.848.892,00

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO merupakan penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp.15.599.848.892 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pencatatan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	20.268.279.105,00
	Jumlah penambahan	20.268.279.105,00
	Pengurangan :	
1)	Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	4.668.430.213,00
	Jumlah pengurangan	4.668.430.213,00
	jumlah selisih	15.599.848.892,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

d. Bantuan Keuangan

LO	LRA	SELISIH
Rp39.252.138.336,00	Rp39.252.138.336,00	Rp0,00

Untuk penerimaan Bantuan Keuangan – LO dengan Bantuan Keuangan - LRA tidak ada selisih yaitu sebesar Rp. 39.252.138.336,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Hibah

LO	LRA	SELISIH
Rp251.451.996.919,89	Rp194.798.230.000,00	Rp56.653.766.919,89

Selisih antara Pendapatan Hibah LRA-dengan Pendapatan Hibah LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.207

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan
Pendapatan Hibah-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencatatan hibah masuk aset	16.044.871.816,00
2	Pencatatan hibah masuk persediaan	40.608.895.103,89
	Jumlah Selisih	56.653.766.919,89

b. Pendapatan Lainnya

LO	LRA	SELISIH
Rp492.699.390.791,86	Rp492.478.504.000,00	Rp220.886.791,86

Selisih antara Pendapatan Lainnya LO dengan Pendapatan Lainnya-LRA adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.208

Selisih antara Pendapatan Lainnya-LO dengan

Pendapatan Lainnya-LRA

No	Uraian	Jumlah
1)	Penyesuaian penyisihan Piutang BLUD	220.886.791,86
	jumlah selisih	220.886.791,86

Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

1. Beban

Pada Laporan Operasional (LO) tahun 2020 nilai realisasi Beban-LO sebesar Rp2.892.671.633.376,56 sedangkan nilai belanja dan transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 sebesar Rp2.519.820.207.741,00. Oleh karena itu terdapat selisih sebesar Rp 372.851.425.635,56 dengan rincian masing-masing beban sebagai berikut :

Tabel 5.209

Selisih antara Beban -LO dengan Belanja dan Transfer-LRA

No	Uraian	Saldo LO (Rp)	Saldo LRA (Rp)	Selisih
1	Beban Pegawai - LO	983.027.726.941,00	966.466.706.851,00	16.561.020.090,00
2	Beban Persediaan	204.056.392.052,74	105.093.119.966,00	98.963.272.086,74
3	Beban Jasa	428.833.973.815,58	579.803.293.092,00	(150.969.319.276,42)
4	Beban Pemeliharaan	61.193.121.460,00	41.205.448.996,00	19.987.672.464,00
5	Beban Perjalanan Dinas	52.470.089.423,00	43.678.809.293,00	8.791.280.130,00
6	Beban Bunga	1.232.296.972,00	1.232.296.972,00	-
7	Beban Subsidi	-	-	-
8	Beban Hibah	87.768.398.047,16	49.199.705.200,00	38.568.692.847,16
9	Beban Bantuan Sosial	38.132.650.000,00	38.132.650.000,00	-
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.391.962.204,00	-	334.391.962.204,00
11	Beban Penyisihan Piutang	3.586.229.777,08	-	3.586.229.777,08
12	Beban Lain-lain	2.970.615.313,00	-	2.970.615.313,00
13	Beban Transfer	695.008.177.371,00	695.008.177.371,00	-
	Jumlah	2.892.671.633.376,56	2.519.820.207.741,00	372.851.425.635,56

Adapun rincian selisih untuk masing-masing beban sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

a. Beban Pegawai

LO	LRA	SELISIH
Rp983.027.726.941,00	Rp966.466.706.851,00	Rp16.561.020.090,00

Pada Laporan Operasional (LO) tahun 2020 nilai realisasi Beban Pegawai sebesar Rp983.027.726.941,00, sedangkan nilai belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 sebesar Rp966.466.706.851,00. Adapun selisihnya yaitu sebesar Rp16.561.020.090,00 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.210
 Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan
 Belanja Pegawai –LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penambahan :	
	Pencatatan Utang Beban Pegawai ini yang belum dibayar	24.429.348.756,00
	Jumlah Penambahan	24.429.348.756,00
1 2 3	Pengurangan :	
	Pembayaran utang beban pegawai tahun lalu	7.280.427.248,00
	Reklasifikasi beban BLUD	534.775.418,00
	Jurnal reklasifikasi beban pegawai ke aset tetap	53.126.000,00
	Jumlah Pengurangan	7.868.328.666,00
	Jumlah Selisih	16.561.020.090,00

b. Beban Persediaan

Pada Laporan Operasional (LO) tahun 2020 nilai realisasi Beban Persediaan sebesar Rp204.056.392.052,74 sedangkan nilai belanja persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp105.093.119.966,00 Adapun rincian penambahan dan pengurangan nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.211
 Selisih antara Beban Persediaan-LO dengan
 Belanja Persediaan –LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 2	Penambahan :	
	Reklasifikasi persediaan dari aset tetap	478.652.573,00
	Utang beban persediaan tahun 2020 yang belum dibayar	2.193.572.597,00
3	Koreksi saldo awal persediaan	489.359.424,47
4	Pemakaian saldo awal barang persediaan	36.906.878.209,50



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Mutasi masuk persediaan	31.491.813.513,68
6	Hibah masuk barang persediaan	40.608.895.103,89
7	Reklasifikasi beban persediaan BLUD	63.396.472.497,00
8	Reklasifikasi beban persediaan BOS	58.125.263.380,00
9	Penerimaan Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga PPKD	1.552.437.526,00
Jumlah Penambahan		235.243.344.824,54
Pengurangan :		
1	Reklasifikasi persediaan ke aset tetap	871.002.000,00
2	Koreksi kurang saldo awal persediaan	153.666.330,00
3	pencatatan saldo akhir persediaan	51.627.819.806,09
4	Hibah keluar persediaan	37.525.352.847,16
5	Mutasi keluar barang persediaan	31.479.847.243,89
6	reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang	1.063.112.830,66
7	reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	25.050.000,00
8	pembayaran utang beban persediaan tahun lalu	13.534.221.680,00
Jumlah Pengurangan		136.280.072.737,80
Jumlah Selisih		98.963.272.086,74

c. Beban Jasa

LO	LRA	SELISIH
Rp428.833.973.815,58	Rp579.803.293.092,00	Rp(150.969.319.276,42)

Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp428.833.973.815,58 sedangkan nilai Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp579.803.293.092,00. Adapun selisihnya yaitu sebesar Rp(150.969.319.276,42) dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

Tabel 5.212

Selisih antara Beban Jasa -LO dengan Belanja Jasa -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan :		
1	Reklasifikasi aset tetap ke beban jasa	231.498.000,00
2	Utang Beban Jasa tahun 2020 yang belum dibayar	15.686.764.248,00
3	Belanja Dibayar di Muka tahun lalu yang telah menjadi Beban Jasa	107.149.032,33
4	Reklasifikasi beban jasa BLUD	122.425.093.722,00
5	reklasifikasi beban jasa BOS	14.294.405.289,00
6	Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	25.050.000,00
Jumlah Penambahan		152.769.960.291,33
Pengurangan :		
1	Reklasifikasi beban jasa ke aset tetap	784.275.000,00
2	Pembayaran utang beban jasa tahun lalu	15.765.674.713,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Jurnal penyesuaian Beban Jasa tahun ini yang merupakan Belanja Dibayar di Muka	64.464.860,75
4	Reklasifikasi beban jasa BLUD	193.444.704.039,00
5	Reklasifikasi beban jasa BOS	93.680.160.955,00
	Jumlah Pengurangan	303.739.279.567,75
	Jumlah Selisih	(150.969.319.276,42)

d. Beban Pemeliharaan

LO	LRA	SELISIH
Rp61.193.121.460,00	Rp41.205.448.996,00	Rp19.987.672.464,00

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp61.193.121.460,00 sedangkan nilai Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 sebesar Rp41.205.448.996,00. Selisihnya yakni sebesar Rp19.987.672.464,00. Adapun dengan rincian penambahan dan pengurangan nya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.213
 Selisih antara Beban Pemeliharaan -LO dengan Belanja Pemeliharaan -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penambahan :	
	Reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	53.759.845,00
2	Reklasifikasi beban pemeliharaan BLUD	5.454.784.947,00
3	Reklasifikasi beban persediaan BOS	15.172.340.447,00
	Jumlah Penambahan	20.680.885.239,00
	Pengurangan :	
1	Reklasifikasi beban pemeliharaan ke aset tetap	691.771.500,00
2	Pembayaran utang beban pemeliharaan tahun lalu	1.441.275,00
	Jumlah Pengurangan	693.212.775,00
	Jumlah Selisih	19.987.672.464,00

e. Beban Perjalanan Dinas

LO	LRA	SELISIH
Rp52.470.089.423,00	Rp43.678.809.293,00	Rp8.791.280.130,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) adalah sebesar Rp52.470.089.423,00 sedangkan nilai Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp43.678.809.293,00. Selisih keduanya yaitu sebesar Rp8.791.280.130,00. Selisihnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.214

Selisih antara Beban Perjalanan Dinas -LO dengan Belanja Perjalanan Dinas -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi beban perjalanan dinas BLUD	2.703.128.291,00
2	Reklasifikasi beban perjalanan dinas dana BOS	6.088.151.839,00
	Jumlah Selisih	8.791.280.130,00

f. Beban Bunga

LO	LRA	SELISIH
Rp1.232.296.972,00	Rp1.232.296.972,00	Rp0,00

Antara Beban Bunga (LO) dengan Beban Bunga (LRA) tidak terdapat selisih.

g. Beban Subsidi

Nilai saldo Beban Subsidi tahun 2020 adalah nol atau nihil.

h. Beban Hibah

LO	LRA	SELISIH
Rp87.768.398.047,16	Rp49.199.705.200,00	Rp38.568.692.847,16

Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO) adalah sebesar Rp87.768.398.047,16 sedangkan nilai Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp49.199.705.200,00. Selisih keduanya dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.215

Selisih antara Beban Hibah-LO dengan Belanja Hibah -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan :	
1	Hibah keluar aset tetap	1.049.340.000,00
2	Hibah keluar barang persediaan	37.519.352.847,16
	Jumlah Selisih	38.568.692.847,16



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

i. Beban Bantuan Sosial

LO	LRA	SELISIH
Rp38.132.650.000,00	Rp38.132.650.000,00	Rp0,00
Antara Beban Bantuan Sosial (LO) dengan Belanja Bantuan Sosial (LRA) tidak terdapat selisih.		

j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

LO	LRA	SELISIH
Rp334.391.962.204,00	Rp0,00	Rp334.391.962.204,00

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp334.391.962.204,00 adalah beban yang terjadi akibat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu atas aset tetap pada SKPD se Kabupaten Brebes. Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui/disajikan pada Laporan Operasional.

k. Beban Penyisihan Piutang

LO	LRA	SELISIH
Rp3.586.229.777,08	Rp0,00	Rp3.586.229.777,08

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp3.586.229.777,08. Rincian dari beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.216

Penjelasan Beban Penyisihan Piutang-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang TGR	6.550,00
2	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.623.437.729,02
3	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	950.731.187,37
4	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Retribusi	37.298.412,54
5	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang BLUD	101.673.610,00
6	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	795.083.043,69
7	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi	77.999.244,46
	Jumlah selisih	3.586.229.777,08

l. Beban Lain-Lain

LO	LRA	SELISIH
Rp2.970.615.313,00	Rp0,00	Rp2.970.615.313,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban lain-lain diakui hanya pada Laporan Operasional. Pada Tahun Anggaran 2020 beban lain-lain timbul atas transaksi sebagai berikut :

Tabel 5.217
 Rincian Beban Lain-Lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomtable	2.970.615.313,00
	Jumlah selisih	2.970.615.313,00

m. Beban Transfer

LO	LRA	SELISIH
Rp695.008.177.371,00	Rp695.008.177.371,00	Rp0,00

Beban Transfer pada Laporan Operasional (LO) dan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak terdapat selisih.

n. Belanja Modal

Nilai Belanja Modal pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.432.556.254.864,00. Nilai ini tidak masuk pada Laporan Operasional karena merupakan pembelian atas aset yang pencatatannya masuk pada Neraca.

2. Defisit Non Operasional

LO	LRA	SELISIH
Rp39.866.777.744,41	Rp0,00	Rp39.866.777.744,41

Defisit Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp39.866.777.744,41 hanya diakui/dicatat pada Laporan Operasional.

3. Beban Luar Biasa

LO	LRA	SELISIH
Rp1.121.472.874,00	Rp2.673.910.400,00	Rp(1.552.437.526,00)

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Akun ini merupakan pencatatan atas Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk perbedaan Beban Luar Biasa di LO dengan di LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp(1.552.437.526,00). Ini merupakan pencatatan pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis

5. 5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.007.469.297.020,14	3.095.841.925.000,05
Arus Kas Keluar	2.522.494.118.141,00	2.510.332.209.215,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	484.975.178.879,14	585.509.715.785,05

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2020, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp484.975.178.879,14 yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp3.007.469.297.020,14 dengan arus kas keluar sebesar Rp2.522.494.118.141,00. Arus kas dari aktivitas operasi dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 218
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.1.1	Arus Kas Masuk		
5.5.1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	108.613.189.681,00	112.680.315.150,00
5.5.1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	15.467.594.652,00	13.134.160.333,00
5.5.1.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.142.949.901,00	7.227.845.627,00
5.5.1.1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	258.416.576.098,14	245.064.057.454,05
5.5.1.1.5	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	34.439.264.481,00	27.428.663.358,00
5.5.1.1.6	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	3.309.163.650,00	1.666.438.971,00
5.5.1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.241.906.073.000,00	1.373.396.371.000,00
5.5.1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	428.624.949.690,00	473.606.164.458,00
5.5.1.1.9	Penerimaan Hibah	194.798.230.000,00	170.592.920.000,00
5.5.1.1.10	Penerimaan Dana Darurat	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.1.1.11	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	181.020.663.531,00	178.608.761.544,00
5.5.1.1.12	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
5.5.1.1.13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	531.730.642.336,00	492.436.227.105,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	3.007.469.297.020,14	3.095.841.925.000,05
	5.5.1.2. Arus Kas Keluar		
5.5.1.2.1.	Pembayaran Pegawai	966.466.706.851,00	1.022.322.106.547,00
5.5.1.2.2.	Pembayaran Hibah	49.199.705.200,00	51.263.570.000,00
5.5.1.2.3.	Pembayaran Bantuan Sosial	38.132.650.000,00	21.255.661.700,00
5.5.1.2.4.	Pembayaran Bagi Hasil	11.436.066.371,00	10.569.843.224,00
5.5.1.2.5.	Pembayaran Bantuan Keuangan	683.572.111.000,00	650.425.296.019,00
5.5.1.2.6.	Pembayaran Tak Terduga	2.673.910.400,00	1.267.065.451,00
5.5.1.2.7.	Pembayaran Barang dan Jasa	769.780.671.347,00	752.974.003.474,00
5.5.1.2.8.	Pembayaran Bunga	1.232.296.972,00	254.662.800,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.522.494.118.141,00	2.510.332.209.215,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	484.975.178.879,14	585.509.715.785,05

Pada arus kas dari aktivitas operasi ini terdapat perbedaan nilai dengan nilai yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak termasuk pendapatan dari penjualan aset. Adapun rincian pendapatan yang dikurangkan untuk penjualan aset disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 219
Perhitungan Pendapatan Penjualan Aset

No	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Setda	14.100.000,00
2	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Dinkominfotik	1.396.500,00
3	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Dinperinaker	1.190.000,00
4	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	DP3KB	1.705.000,00
5	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Kec. Wanasari	230.000,00
6	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	RSUD Bumiayu	12.000.000,00
7	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Kec. Bumiayu	1.300.000,00
8	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Kec. Songgom	1.196.500,00
9	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Dinperwaskim	680.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
10	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Kec. Brebes	88.000,00
11	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo.	17.991.250,00
12	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	BPPKAD	2.500.000,00
13	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Dinarpus	100.000,00
14	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	DPKH	550.000,00
15	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	BLUD UPTD puskesmas Paguyangan	4.675.000,00
16	Penjualan atas barang-barang bekas / Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	6.000.000,00
17	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	BPPKAD	93.950.000,00
18	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	BPPKAD	544.731.720,00
19	Penjualan Drum Bekas	DPU	5.912.500,00
20	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	BPPKAD	191.124.017,00
Jumlah			901.420.487,00

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	901.420.487,00	984.920.150,00
Arus Kas Keluar	432.556.254.864,00	621.919.531.365,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(431.654.834.377,00)	(620.934.611.215,00)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp431.654.834.377,00 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp901.420.487,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp432.556.254.864,00. Aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.220
 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.2.1.	Arus Kas Masuk		
5.5.2.1.1.	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	710.296.470,00	454.206.473,00
5.5.2.1.2.	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	191.124.017,00	530.713.677,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	901.420.487,00	984.920.150,00
5.5.2.2.	Arus Kas Keluar		
5.5.2.2.1.	Perolehan Tanah	1.279.002.500,00	-
5.5.2.2.2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	53.408.412.957,00	74.972.089.705,00
5.5.2.2.3.	Perolehan Bangunan dan Gedung	140.092.056.315,00	155.062.627.657,00
5.5.2.2.4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.653.855.296,00	299.426.343.258,00
5.5.2.2.5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	72.122.927.796,00	92.458.470.745,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	432.556.254.864,00	621.919.531.365,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(431.654.834.377,00)	(620.934.611.215,00)

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	25.454.546,00	33.751.764.924,00
Arus Kas Keluar	38.000.000.000,00	10.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(37.974.545.454,00)	23.251.764.924,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus Rp37.974.545.454,00 adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas ini adalah sebesar Rp25.454.546,00, sedangkan arus kas keluarnya adalah sebesar Rp38.000.000.000,00. Aliran kas dari aktivitas pendanaan tahun 2020 dan tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.221
 Tabel Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	5.5.3.1. Arus Kas Masuk		
5.5.3.1.1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
5.5.3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	33.663.260.000,00
5.5.3.1.3.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	25.454.546,00	88.504.924,00
5.5.3.1.4.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	25.454.546,00	33.751.764.924,00
	5.5.3.2. Arus Kas Keluar		
5.5.3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
5.5.3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	10.500.000.000,00
5.5.3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000,00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	38.000.000.000,00	10.500.000.000,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(37.974.545.454,00)	23.251.764.924,00

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	14.730.760,00	25.494.670.610,00
Arus Kas Keluar	506.836.160,00	42.529.889.316,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(492.105.400,00)	(17.035.218.706,00)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(492.105.400,00) adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp14.730.760,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp506.836.160,00. Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan Tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.222
 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.4.1.1.	5.5.4.1. Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14.730.760,00	25.494.670.610,00
5.5.4.1.2.	Saldo Sisa UP	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	14.730.760,00	25.494.670.610,00
5.5.4.2.1.	5.5.4.2. Arus Kas Keluar		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	506.836.160,00	42.529.889.316,00
5.5.4.2.2.	Saldo Sisa UP	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	506.836.160,00	42.529.889.316,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(492.105.400,00)	(17.035.218.706,00)

Penambahan dan pengurangan perhitungan pihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan Retensi BLUD dan setoran pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara/Pihak Ketiga tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.223
 Tabel Rincian Perhitungan Pihak Ketiga

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Uang Jaminan Pemeliharaan	13.975.560,00	25.165.250,00
Jaminan Kecelakaan Kerja	-	152.064,00
Jaminan Kematian	-	209.177,00
Jaminan Hari Tua	-	3.530.120,00
Jaminan Kesehatan	-	18.670.000,00
Retensi BLUD	-	456.148.000,00
Pajak belum setor	755.200,00	2.961.549,00
JUMLAH	14.730.760,00	506.836.160,00

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
	14.853.693.648,14	(29.208.349.211,95)



Kenaikan/penurunan kas bersih selama periode Tahun 2020 sebesar Rp14.853.693.648,14 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2020 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.224

Tabel Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	484.975.178.879,14	585.509.715.785,05
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(431.654.834.377,00)	(620.934.611.215,00)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(37.974.545.454,00)	23.251.764.924,00
4	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	(492.105.400,00)	(17.035.218.706,00)
	Jumlah	14.853.693.648,14	(29.208.349.211,95)

5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD

	1 Jan 2020 (Rp)	1 Jan 2019 (Rp)
Saldo Awal kas di BUD	136.244.923.980,00	159.489.155.742,00

Saldo awal kas di BUD sebesar Rp. 136.244.923.980,00 merupakan saldo Kas di BUD per 1 Januari 2020.

5.5.7. Saldo Awal Kas di BLUD

	1 Jan 2020 (Rp)	1 Jan 2019 (Rp)
Saldo Awal kas di BLUD	32.720.983.027,53	39.201.452.601,48

Saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp32.720.983.027,53 merupakan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas per 1 Januari 2020. Adapun saldo kas awal di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.225
 Saldo Awal Kas di BLUD

No	SKPD	Saldo Awal 2020 (Rp)
1	BLUD UPTD Puskesmas Brebes	6.259.003.998,00
2	BLUD UPTD Puskesmas Tanjung	8.556.757.419,00
3	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo	6.577.649.618,00
4	BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu	2.402.474.899,00
5	BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan	2.443.375.017,00
6	RSUD BUMIAYU	1.038.204.040,00
7	RSUD BREBES	4.773.487.114,53
	Jumlah	32.050.952.105,53

5.5.8. Saldo Awal Kas Dana BOS

Saldo awal kas dana BOS sebesar Rp1.490.345.267,90.

5.5.9. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan adalah Rp0 atau Nihil

5.5.10. Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.961.549,00.

5.5.11. Saldo Akhir Kas di BUD

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir kas di BUD	185.312.907.472,57	170.454.368.641,43

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp185.312.907.472,57 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Brebes per tanggal 31 Desember 2020. Perhitungan saldo akhir kas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.226
 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kenaikan/penurunan kas bersih selama periode	14.853.693.648,14	(29.208.349.211,95)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2	Saldo awal kas di BUD	136.244.923.980,00	159.489.155.742,00
3	Saldo Awal Kas di BLUD	32.720.983.027,53	39.201.452.601,48
4	Saldo Awal Kas Dana BOS	1.490.345.267,90	972.109.509,90
5	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	2.961.549,00	-
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	185.312.907.472,57	170.454.368.641,43

5.5.12. Saldo Akhir Kas di BUD (Kas Daerah)

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir kas di BUD (Kas Daerah)	140.099.014.035,00	132.617.932.486,00

Saldo Akhir Kas di BUD (Kas Daerah) per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.099.014.035,00, yang terdiri dari dari saldo kas di Rekening Giro Bank Jateng A/C No. 1.028.00001.2.

5.5.13. Saldo Akhir Kas di BUD (Kas yang dibatasi penggunaannya)

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir kas di BUD (Kas yang dibatasi penggunaannya)	3.615.801.804,00	3.626.991.494,00

Kas yang dibatasi penggunaannya pada kas daerah sebesar Rp3.615.801.804,00 merupakan uang Jaminan Pemeliharaan pekerjaan/retensi yang berada pada kas daerah, kas sebesar ini dicatat pada akun aset lainnya.

5.5.14. Saldo akhir kas di BLUD

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir kas di BLUD	40.616.205.863,67	32.050.952.105,53

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp40.616.205.863,67 merupakan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas per 31 Desember 2020. Adapun rincian saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.227
 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	BLUD UPTD Puskesmas Brebes	3.370.494.646,00	6.259.003.998,00
2	BLUD UPTD Puskesmas Tanjung	7.710.211.732,00	8.556.757.419,00
3	BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo	2.535.596.034,00	6.577.649.618,00
4	BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu	695.619.900,00	2.402.474.899,00
5	BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan	2.505.187.274,00	2.443.375.017,00
6	RSUD BUMIAYU	5.597.761.134,00	1.038.204.040,00
7	RSUD BREBES	18.201.335.143,67	4.773.487.114,53
	Jumlah	40.616.205.863,67	32.050.952.105,53

5.5.15. Saldo Akhir Kas di BLUD (kas yang dibatasi penggunaannya)

Saldo Akhir kas di BLUD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
(Kas yang dibatasi penggunaannya)	213.882.922,00	670.030.922,00

Kas yang dibatasi penggunaannya pada kas BLUD sebesar Rp213.882.922,00 merupakan uang Jaminan Pemeliharaan pekerjaan pada BLUD RSUD Brebes yang masih berada pada kas BLUD, kas sebesar ini dicatat pada akun aset lainnya.

5.5.16. Saldo Akhir Kas dana BOS

Saldo Akhir kas	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dana BOS	760.260.367,90	1.490.345.267,90

Saldo Akhir Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp760.260.367,90 merupakan Saldo Dana BOS yang berada pada sekolah-sekolah.

5.5.17. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Bendahara Penerimaan	-	-

Saldo Kas di Bendahara penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Nihil..



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.5.18. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480,00	2.961.549,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.742.480,00 pada Bendahara pengeluaran Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes yang merupakan sisa Uang Persediaan sebesar Rp. 6.987.280 dan sisa pajak yang belum disetor sebesar Rp. 755.200

5.5.19. Saldo Akhir Kas

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas	185.312.907.472,57	170.459.213.824,43

Saldo Akhir Kas sebesar Rp185.312.907.472,57,00 merupakan total seluruh Saldo Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.228
Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD (Kas Daerah)	140.099.014.035,00	132.617.932.486,00
2	Saldo Akhir Kas di BUD (Kas yang dibatasi penggunaannya)	3.615.801.804,00	3.626.991.494,00
3	Saldo Akhir Kas di BLUD	40.616.205.863,67	32.050.952.105,53
4	Saldo Akhir Kas di BLUD (Kas yang dibatasi penggunaannya)	213.882.922,00	670.030.922,00
5	Saldo Akhir Kas Dana BOS	760.260.367,90	1.490.345.267,90
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480,00	2.961.549,00
	Saldo Akhir Kas	185.312.907.472,57	170.459.213.824,43

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rincian pos pada Laporan perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.229
Perubahan Ekuitas TA 2020 dan TA 2019

Uraian	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(52.896.909.222,29)	473.395.288.351,35
Koreksi Nilai Persediaan	335.693.094,47	2.106.581.319,52
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	(526.232.602.316,76)	471.288.707.031,83

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal TA 2020 sebesar Rp4.111.337.984.341,77 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 pada Laporan Neraca audited 2019. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2019 sebesar Rp3.305.735.160.009,51 terdapat peningkatan sebesar 24,37%.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdapat surplus Laporan Operasional sebesar Rp152.547.925.043,07, dan apabila dibandingkan dengan saldo surplus -LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp332.207.535.980,91 terdapat penurunan sebesar 54,08%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp(52.896.909.222,29) yang terdiri dari saldo Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp335.693.094,47 dan penambahan dan pengurangan nilai lain-lain sebesar Rp(526.232.602.316,76) sehingga jika dibandingkan saldo tahun 2019 ada penurunan sebesar 212,66%. Adapun rincian penambahan dan pengurangan nilai lain-lain disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.230
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(52.896.909.222,29)	473.395.288.351,35
Koreksi Nilai Persediaan	335.693.094,47	2.106.581.319,52
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	(526.232.602.316,76)	471.288.707.031,83



5.6.3.1 Koreksi nilai persediaan :

Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp335.693.094,47 merupakan koreksi saldo awal persediaan tahun 2020 pada delapan SKPD karena koreksi salah pencatatan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp489.359.424,47
Pengurangan	:	Rp153.666.330,00
Koreksi	:	<u>Rp335.693.094,47</u>

Rincian koreksi nilai persediaan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.231
Rincian Koreksi Nilai Persediaan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
1	Penambahan : Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	88.560,00
2	Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS BREBES	73.184.082,63
3	Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	4.706.464,00
4	Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	85.347.982,20
5	Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	326.032.335,64
	Jumlah Penambahan		489.359.424,47
1	Pengurangan : Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	1.834.030,00
2	Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	DP3KB	24.672.800,00
3	Koreksi tambah saldo persediaan awal karena salah catat / perhitungan	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	127.159.500,00
	Jumlah Pengurangan		153.666.330,00
		Jumlah Koreksi	335.693.094,47

Penambahan:

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Bumiayu senilai Rp88.560,00, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Brebes senilai Rp73.184.082,63, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan



perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Banjarharjo senilai Rp4.706.464,00, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Paguyangan senilai Rp85.347.982,20, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Tanjung senilai Rp326.032.335,64, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Pengurangan:

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Bumiayu senilai Rp1.834.030,00, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Untuk SKPD DP3KB senilai Rp24.672.800,00, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

Untuk SKPD UPTD Puskesmas Paguyangan senilai Rp127.159.500,00, merupakan koreksi nilai persediaan dikarenakan koreksi salah pencatatan perhitungan obat Tahun 2020, faktor lainnya adalah karena pencatatan persediaan obat masih manual belum menggunakan aplikasi persediaan.

5.6.3.2 Selisih revaluasi aset tetap

Tidak ada koreksi nilai selisih revaluasi aset tetap per 31 Desember 2020.

Lain-Lain

Saldo Koreksi Lain-lain tahun 2020 sebesar (Rp526.232.602.316,76), apabila dibandingkan dengan Saldo lain-lain tahun 2019 sebesar Rp471.288.707.031,83 terdapat penurunan sebesar 211,66%, berikut rincian saldo koreksi lain-lain, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.232

Rincian Koreksi Saldo Lain-lain

Uraian	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)
Lain-Lain :	(526.232.602.316,76)	471.288.707.031,83
Koreksi Equitas lainnya	0	245.000.000,00
Koreksi Nilai Kas	0	0
Koreksi Nilai Piutang	4.314.357.042,04	490.937.490,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	39.176.768,97	358.003.374,40



Uraian	2020 (Rp.)	2019 (Rp.)
Koreksi Beban Dibayar di Muka	0	0
Koreksi Nilai Investasi	0	0
Koreksi Nilai Tanah	4.459.249.699,00	55.052.121.582,00
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin	163.625.000,00	33.866.949,00
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	3.272.089.521,00	77.600.266.596,00
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	(397.660.000,00)	(76.336.477.142,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	51.069.470,00	4.848.000,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(546.966.933.041,00)	240.895.065.826,99
Koreksi Nilai Aset Lainnya	(3.922.812,00)	2.254.617.739,97
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	2.065,57	96.673.055,86
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	1.158.786.321,00	(1.119.022.071,00)
Koreksi Utang Belanja	(4.530.012.387,00)	(729.353.724,00)
Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap	-	(202.022.000,00)
Koreksi Awal Aset Tetap	-	173.629.889.865,61
Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0
Koreksi Awal Aset Lain-lain	0	(488.917.284,00)
Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain	12.207.570.035,66	(496.791.227,00)
Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya	-	-

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tidak ada koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2020.

5.6.3.4 Koreksi Nilai Kas

Tidak ada koreksi nilai kas per 31 Desember 2020.

5.6.3.5 Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp4.314.357.042,04 berasal dari pencatatan koreksi saldo awal piutang yang terjadi pada enam SKPD, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Penambahan	:	Rp4.778.320.966,00
Pengurangan	:	Rp463.963.923,96
Koreksi	:	<u>Rp4.314.357.042,04</u>

Tabel 5.233

Rincian Koreksi Nilai Piutang

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
	Penambahan :		
1	Koreksi saldo awal piutang (pencatatan kembali Piutang SKTM 2019)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	123.522.838,00
2	Koreksi salah catat saldo piutang BPJS tahun 2019	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	322.655.660,00
3	Koreksi saldo awal piutang (pencatatan kembali Piutang SKTM 2019)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	4.332.142.468,00
	Jumlah Penambahan :		4.778.320.966,00
	Pengurangan :		
1	Koreksi saldo awal piutang salah catat karena sudah dibayar tahun lalu	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.000.000,00



No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
2	Koreksi salah catat Piutang Pajak Reklame	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.194.500,00
3	Koreksi salah catat Piutang Pajak Air Bawah Tanah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.660.641,00
4	Koreksi saldo awal piutang karena salah pencatatan (hasil konfirmasi dengan pihak ke-3)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	56.632.000,00
5	Koreksi saldo awal piutang karena tidak memenuhi ketentuan piutang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	76.252.843,00
6	Koreksi perubahan penetapan pajak PBB-P2 dan Denda PBB-P2	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	304.223.939,96
	Jumlah pengurangan :		463.963.923,96
		Jumlah Koreksi	4.314.357.042,04

Penambahan:

Untuk SKPD RSUD Bumiayu koreksi nilai Piutang sebesar Rp123.522.838,00 koreksi nilai piutang tersebut terjadi karena Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang (Pencatatan kembali Piutang SKTM 2019)

Untuk SKPD RSUD Brebes koreksi nilai Piutang sebesar Rp322.655.660,00, koreksi nilai piutang tersebut terjadi karena salah catat saldo piutang BPJS tahun 2019 dan sebesar Rp4.332.142.468,00 koreksi nilai piutang tersebut terjadi karena Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang (Pencatatan kembali Piutang SKTM 2019).

Pengurangan:

Untuk SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata koreksi nilai piutang sebesar Rp7.000.000,00 dikarenakan salah pencatatan, nilai tersebut sudah dibayarkan tahun lalu sehingga perlu dihapus sebagai piutang.

Untuk SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset daerah koreksi nilai piutang sebesar Rp8.194.500,00 karena salah catat piutang pajak reklame, koreksi nilai piutang sebesar Rp11.660.641,00 karena salah catat piutang pajak air bawah tanah dan koreksi nilai piutang sebesar 304.223.939,96 karena perubahan penetapan pajak PBB-P2 dan denda PBB-P2.

Untuk SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik koreksi nilai piutang sebesar Rp56.632.000,00 dikarenakan kesalahan pencatatan nilai piutang setelah melakukan konfirmasi dengan pihak ke-3

Untuk SKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu koreksi nilai piutang sebesar Rp76.252.843,00 dikarenakan tidak memenuhi ketentuan piutang

5.6.3.6 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp39.176.768,97 berasal dari dua SKPD, adapun koreksi nilai penyisihan piutang karena koreksi saldo awal piutang. Adapun rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 5.234

Rincian Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
1	Penambahan : Koreksi saldo awal penyisihan piutang karena salah catat, sudah dibayar tahun lalu	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	35.000,00
2	Koreksi saldo awal penyisihan piutang karena tidak memenuhi ketentuan piutang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	39.141.768,97
	Jumlah Penambahan :		39.176.768,97
	Pengurangan :		
	Jumlah Pengurangan :		-
		Jumlah Koreksi	39.176.768,97

Penambahan:

Untuk SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata koreksi penyisihan piutang sebesar Rp35.000,00 karena salah catat piutang yang sudah dibayar tahun lalu.

Untuk SKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu koreksi penyisihan piutang sebesar Rp39.141.768,97 karena tidak memenuhi ketentuan.

5.6.3.7 Koreksi Beban Dibayar di Muka
Tidak ada koreksi beban dibayar di muka per 31 Desember 2020.

5.6.3.8 Koreksi Nilai Investasi
Tidak ada koreksi nilai investasi per 31 Desember 2020.

5.6.3.9 Koreksi Nilai Tanah
Koreksi Nilai Tanah sebesar Rp4.459.249.699,00 merupakan pencatatan penilaian barang berlebih, penilaian aset tetap dan atribusi sertifikat tanah yang berasal dari dua belas SKPD, dimana perhitungannya sebagai berikut :

Penambahan	:	Rp4.588.705.699,00
Pengurangan	:	Rp129.456.000,00
Koreksi	:	<u>Rp4.459.249.699,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tanah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.235

Rincian Koreksi Nilai Tanah

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Penambahan : Pencatatan penilaian aset tetap	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	2.085.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
2.	Pencatatan Atribusi Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya	KECAMATAN KERSANA	15.000.000,00
3.	Pencatatan penilaian barang berlebih dan pencatatan penilaian aset tetap	KECAMATAN BREBES	178.675.748,00
4.	Pencatatan penilaian aset tetap	KECAMATAN SALEM	15.959.000,00
5.	Pencatatan penilaian barang berlebih	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.466.000,00
6.	Pencatatan Atribusi Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya	KECAMATAN BULAKAMBA	22.500.000,00
7.	Pencatatan penilaian aset tetap	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	32.842.000,00
8.	Pencatatan Atribusi Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya	KECAMATAN WANASARI	32.895.000,00
9.	Pencatatan penilaian barang berlebih	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	3.519.375.300,00
10.	Pencatatan penilaian aset tetap	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	694.708.263,00
11.	Pencatatan Atribusi Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya	RSUD BUMIAYU	39.719.388,00
12.	Pencatatan penilaian aset tetap	KECAMATAN SIRAMPOG	17.480.000,00
Jumlah Penambahan			4.588.705.699,00
1.	Penghapusan Tahun Sebelumnya	DINAS PERIKANAN	105.436.000,00
2.	Koreksi Double Pencatatan	DINAS PEKERJAAN UMUM	24.020.000,00
Jumlah Pengurangan			129.456.000,00
Jumlah Koreksi :			4.459.249.699,00

Penambahan:

Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap) sebesar Rp926.546.011,00 terdapat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp32.842.000,00, BLUD Bumiayu sebesar Rp2.085.000,00, DPSDAPR sebesar Rp694.708.263,00, Kecamatan Brebes sebesar Rp163.471.748,00, Kecamatan Sirampog sebesar Rp17.480.000,00, Kecamatan Salem sebesar Rp15.959.000,00.

Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih) sebesar Rp3.552.045.300,00 terdapat pada DLHPS sebesar Rp3.519.375.300,00 pada 5 bidang tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Brebes No.050/520 Tahun 2020. Koreksi Tambah pada Dinperwaskim sebesar Rp17.466.000,00. Koreksi tambah lainnya pada Kecamatan Brebes sebesar Rp15.204.000,00 berupa tanah Masjid.



Koreksi Tambah (Atribusi Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya) sebesar Rp110.114.388,00, terdapat pada SKPD RSUD Bumiayu sebesar Rp39.719.388,00, Kecamatan Wanasari sebesar Rp32.895.000,00, Kecamatan Bulakamba sebesar Rp22.500.000,00, dan Kecamatan Kersana sebesar Rp15.000.000,00.

Pengurangan :

Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya) sebesar Rp105.436.000,00 pada Dinas Perikanan sesuai Keputusan Sekda Brebes No. 028/2976 Tahun 2020 pada 3 bidang tanah tambak yaitu Tanah Desa Ngaradaha Kec. Bumiayu, Tanah Desa Randusanga Wetan Kec. Brebes, dan Tanah Desa Kaliwlingi Kec. Brebes.

Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan) sebesar Rp24.020.000,00 pada SKPD DPU terdiri dari Tanah eks UPTD Sirampog sebesar Rp20.000,00 dobel catat dengan Kecamatan Sirampog, Tanah eks UPTD Sirampog sebesar Rp12.000.000,00 dobel catat dengan Kecamatan Sirampog, dan Tanah eks UPTD Wanasari sebesar Rp12.000.000 dobel catat dengan SMPN 1 Wanasari (Dindikpora).

5.6.3.10 Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin

Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp163.625.000,00 merupakan pencatatan penilaian barang berlebih dan pencatatan hibah masuk tahun sebelumnya yang berasal dari dua SKPD dengan perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp187.550.000,00
Pengurangan	:	<u>Rp23.925.000,00</u>
Koreksi	:	<u>Rp163.625.000,00</u>

Adapun rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.236
Rincian Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Penambahan : Pencatatan penilaian barang berlebih	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	17.550.000,00
2.	Pencatatan Hibah Masuk Tahun Sebelumnya	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	170.000.000,00
	Jumlah Penambahan		187.550.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Nilai KDP	RSUD BUMIAYU	10.000.000,00
2.	Koreksi Penghapusan	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	13.925.000,00
	Jumlah Penambahan		23.925.000,00
	Jumlah Koreksi :		163.625.000,00

Penambahan:

Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih) sebesar Rp17.550.000,00 pada Dindikpora terdapat 17 unit barang berupa televisi, meja computer, overhead projector pada SD dan SMP.

Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya) sebesar Rp170.000.000,00 pada BPBD berupa 1 unit Pick Up hibah masuk dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Pengurangan :

Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun sebelumnya) sebesar Rp13.925.000,00 pada PPKD berupa 1 unit sepeda motor sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 050/806/2019 tanggal 23 Desember 2019. Dan Koreksi kurang nilai KDP sebesar Rp10.000.000,00 pada RSUD Bumiayu.

5.6.3.11 Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan

Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.272.089.521,00 merupakan pencatatan penilaian barang berlebih, pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi dan koreksi kurang catat hutang yang berasal dari enam SKPD, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp 3.272.089.521,00
Pengurangan	:	Rp 0,00
Koreksi	:	Rp 3.272.089.521,00

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.237

Rincian Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	Penambahan :		
1.	Pencatatan penilaian barang berlebih dan hasil inventarisasi	SEKRETARIAT DAERAH	186.296.000,00
2.	Pencatatan Penilaian Barang Hasil Inventarisasi	DINAS KESEHATAN	32.990.000,00



No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
3.	Pencatatan penilaian barang berlebih dan hasil inventarisasi	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.391.123.521,00
4.	Pencatatan Penilaian Barang Hasil Inventarisasi	KECAMATAN SALEM	69.990.000,00
5.	Pencatatan Penilaian Barang Hasil Inventarisasi	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	144.950.000,00
6.	Koreksi Kurang Catat Hutang	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	446.740.000,00
		Jumlah Koreksi	3.272.089.521,00

Penambahan:

Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang belum Tercatat/ Berlebih) sebesar Rp438.200.000,00 terdapat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp408.200.000,00 berupa 3 bangunan pagar sekolah, 2 sumur, 1 tandon air dan 3 rehab ruang kelas. Koreksi lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp30.000.000,00 berupa Sanggar Kesenian.

Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap) sebesar Rp2.387.149.521,00. Penilaian Gedung dan Bangunan dilakukan oleh Tim Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terdapat pada SKPD:

f) Dindikpora sebesar Rp1.982.923.521,00

g) Dinas Kesehatan sebesar Rp32.990.000,00

h) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar Rp144.950.000,00

i) Sekretariat Daerah sebesar Rp156.296.000,00

j) Kecamatan Salem sebesar Rp69.990.000,00

Koreksi Tambah karena kurang catat hutang sebesar Rp446.740.000,00 untuk penyambungan daya listrik pekerjaan pembangunan gedung pelayanan medik dan penunjang medik (IGD, laboratorium, VK Kebidanan, ICU/HCU dan IBS) yang dilaksanakan oleh PT Titian Usaha Graha Utama pada tahun 2019 dan baru dibayar tahun 2020.

5.6.3.12 Koreksi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

Koreksi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp397.660.000,00) merupakan koreksi hibah tahun lalu yang berasal dari Dinas Perikanan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp	0,00
Pengurangan	:	Rp397.660.000,00	
Koreksi	:	(Rp397.660.000,00)	

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 5.238

Rincian Koreksi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Penambahan :		-
	Jumlah Penambahan		-
	Pengurangan :		
	Koreksi Kurang Hibah Tahun Sebelumnya	DINAS PERIKANAN	397.660.000,00
	Jumlah Pengurangan		397.660.000,00
	Jumlah Koreksi		(397.660.000,00)

Pengurangan :

Koreksi kurang hibah keluar tahun sebelumnya sebesar Rp397.660.000,00 pada Dinas Perikanan berupa bangunan pengairan pasang surut.

5.6.3.13 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya

Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.069.470,00 merupakan koreksi hibah masuk pada Dinas Arsip dan Perpustakaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp 51.069.470,00
Pengurangan	:	Rp 0,00
Koreksi	:	Rp 51.069.470,00

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.239

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Penambahan :		
	Pencatatan Hibah Masuk	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	51.069.470,00
	Jumlah Koreksi :		51.069.470,00

Penambahan :

Koreksi Tambah Hibah Masuk tahun sebelumnya sebesar Rp51.069.470,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan berupa buku dari CV. Nara Mitra Sejahtera sebanyak 1.000 buku sesuai BAST (Berita Acara Serah Terima) Nomor: 3.2/KABKOTA-BAST/NMS.IX/2018.

5.6.3.14 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp546.966.933.041,00) merupakan koreksi penambahan atas koreksi saldo awal akumulasi penyusutan hampir di seluruh SKPD dengan uraian koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp1.919.637.339,00, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan (proses kapitalisasi) sebesar Rp87.493.336.841,00, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebesar



Rp1.922.631.304,00, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena salah catat sebesar Rp2.110.200,00 .

Koreksi pengurangan atas koreksi saldo awal akumulasi penyusutan hampir di seluruh SKPD dengan uraian koreksi saldo awal akumulasi penyusutan (koreksi kapitalisasi) sebesar Rp637.591.336.707,00 dan koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap Rp713.312.018,00, adapun rincian perhitungan koreksi nilai akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Penambahan : Rp91.337.715.684,00
 Pengurangan : Rp638.304.648.725,00
 Jumlah Koreksi : (Rp546.966.933.041,00)

Adapun Rincian Koreksi nilai akumulasi penyusutan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.240
 Rincian Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	Penambahan :		
1	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	86.755.405.797,00
2	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KESEHATAN	5.515.260,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS BREBES	25.606.313,00
4	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	141.355.886,00
5	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	130.935.776,00
6	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	2.870.767,00
7	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	62.281.097,00
8	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	1.148.072.102,00
9	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	655.229.539,00
10	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PEKERJAAN UMUM	61.870.060,00
11	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.960.012,00
12	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,00
13	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	708.590,00
14	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12,00
15	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS SOSIAL	7,00
16	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	10.373.988,00
17	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	407.569.126,00
18	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3,00
19	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6,00
20	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	109.546.078,00
21	Koreksi saldo awal akumulasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,	3,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	penyusutan	PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
22	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	153.580.161,00
23	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.469.285,00
24	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,00
25	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERHUBUNGAN	1.314.787.037,00
26	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERIKANAN	10,00
27	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	42,00
28	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.411.414,00
29	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	85.804,00
30	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN TANJUNG	4,00
31	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN LOSARI	22.790.435,00
32	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BANJARHARJO	2.507.760,00
33	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN LARANGAN	200.000,00
34	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BUMIAYU	3,00
35	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN SALEM	1,00
36	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM	1.318.350,00
37	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	SEKRETARIAT DPRD	335.884,00
38	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BREBES	3.990.691,00
39	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	INSPEKTORAT	600.007,00
40	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	65.259.949,00
41	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.022.991,00
42	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	12.925.002,00
43	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN SIRAMPOG	234.000,00
44	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BANTARKAWUNG	67.917.647,00
45	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN KETANGGUNGAN	160.817.393,00
46	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	161.387,00
Jumlah Penambahan :			91.337.715.684,00
Pengurangan :			
1.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	57.990.493,00
2.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KESEHATAN	351.910.510,00
3.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS BREBES	939.417.829,00
4.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	829.769.266,00
5.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	1.150.471.728,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
6.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	561.659.930,00
7.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	35.422.931,00
8.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	1.492.447.857,00
9.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	201.351.146,00
10.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PEKERJAAN UMUM	541.703.793.722,00
11.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	76.484.978.251,00
12.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	268.596.700,00
16.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	76.451.909,00
17.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS SOSIAL	20.134.042,00
18.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	70.561.342,00
19.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	3.834.214.269,00
20.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	78.909.021,00
21.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	676.515.896,00
23.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.661.139,00
24.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	669.160.923,00
25.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	161.020.692,00
26.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.631.203,00
27.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERHUBUNGAN	3.386.144.812,00
28.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERIKANAN	470.764.873,00
29.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	648.500.816,00
30.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	555.444.629,00
31.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	255.981.773,00
32.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN WANASARI	129.708.693,00
33.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN SONGGOM	240.365.728,00
34.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BULAKAMBA	220.595.341,00
35.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN TANJUNG	92.142.537,00
36.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN LOSARI	19.803.137,00
37.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN KERSANA	153.969.577,00
38.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN KETANGGUNGAN	101.296.551,00
39.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BANJARHARJO	138.604.500,00
40.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN LARANGAN	77.454.810,00
41.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN TONJONG	140.113.261,00
42.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BUMIAYU	129.640.754,00
43.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN PAGUYANGAN	100.740.015,00



No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
44.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BANTARKAWUNG	1,00
45.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN SALEM	188.458,00
46.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM	691.221.104,00
47.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	SEKRETARIAT DPRD	106.439.183,00
48.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN BREBES	272.563.913,00
49.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN JATIBARANG	121.093.012,00
50.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	INSPEKTORAT	75.542.194,00
51.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.342.002,00
52.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	146.037.155,00
53.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1,00
55.	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	KECAMATAN SIRAMPOG	154.609.186,00
Jumlah Pengurangan :			638.304.648.725,00
Jumlah Koreksi :			(546.966.933.041,00)

5.6.3.15 Koreksi Nilai Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset Lainnya sebesar (Rp3.922.812,00) merupakan koreksi yang berasal PPKD dan Dindikpora, Dinpermades, Dinas Kesehatan karena adanya koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang rusak berat/tidak ditemukan, koreksi saldo awal aset lainnya barang rusak berat/tidak ditemukan/hibah belum dihapus, dan koreksi saldo awal akumulasi penyusutan asset tidak berwujud, adapun perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp193.110.457,00
Pengurangan	:	Rp197.033.269,00
Koreksi	:	(Rp3.922.812,00)

Rincian lebih lanjut terkait koreksi aset lainnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.241

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1	Penambahan :		
	Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	23.655.457,00
2	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB) karena penghapusan tahun lalu	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	169.455.000,00
Jumlah Penambahan :			193.110.457,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1	Pengurangan : Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB) karena lebih catat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	694.995,00
2	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.883.274,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tidak berwujud (Aplikasi PSC 119 GARUDA Brebes dan Aplikasi online perizinan tenaga dan tenaga kefarmasian)	DINAS KESEHATAN	15.000.000,00
4	Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB) karena penghapusan tahun lalu	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	169.455.000,00
		Jumlah Koreksi :	197.033.269,00
		Jumlah Koreksi :	(3.922.812,00)

Penambahan:

Koreksi Nilai Aset lainnya yang berasal dari Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat berasal dari SKPD Dindikpora sebesar Rp23.655.457,00.

Koreksi Nilai Aset lainnya yang berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB karena penghapusan tahun lalu berasal dari PPKD sebesar Rp169.455.000,00.

Pengurangan:

Koreksi Nilai Aset lainnya yang berasal dari koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB) karena lebih catat berasal dari SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp694.995,00.

Koreksi Nilai Aset lainnya yang berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB) SKPD Dindikpora sebesar Rp11.883.274,00.

Koreksi Nilai Aset lainnya yang berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tidak berwujud SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp15.000.000,00.

Koreksi Nilai Aset lainnya yang berasal dari koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB) karena penghapusan tahun lalu berasal dari PPKD sebesar Rp169.455.000,00.

5.6.3.16 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.065,57 pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena salah perhitungan saldo Pendapatan diterima di muka tahun lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.242
Rincian Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	Penambahan :		-
1	Kesalahan perhitungan saldo Pendapatan diterima di muka tahun lalu	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.065,57
	Jumlah Penambahan :		2.065,57
	Pengurangan :		-
	0	0	-
	Jumlah Pengurangan :		-
	Jumlah Koreksi :		2.065,57

5.6.3.17 Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya
Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.158.786.321,00) berasal dari UPTD Puskesmas Tanjung dan PPKD, adapun perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp1.629.614.846,00
Pengurangan	:	<u>Rp470.828.525,00</u>
Koreksi	:	<u>Rp1.158.786.321,00</u>

Adapun rincian koreksi nilai utang jangka pendek lainnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.243
Rincian Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
1	Penambahan :		
1	Koreksi pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya karena karena ada perubahan nilai	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	10.000.000,00
2	Koreksi salah catat saldo awal Utang Lebih Bayar DBH seharusnya merupakan piutang kurang bayar	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.619.614.846,00
	Jumlah Penambahan :		1.629.614.846,00
	Pengurangan :		
1	Koreksi kurang catat hutang lebih bayar DBH	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	24.088.525,00
2	Koreksi kurang catat Utang Jangka Pendek Lainnya (hutang Penyambungan Daya Listrik pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Medik dan Penunjang Medik)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	446.740.000,00
	Jumlah Pengurangan :		470.828.525,00
	Jumlah Koreksi :		1.158.786.321,00

**Penambahan:**

Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Bumiayu sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari koreksi pencatatan utang jangka pendek lainnya karena adanya perubahan nilai.

Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada PPKD sebesar Rp1.619.614.846,00 berasal dari koreksi salah catat saldo awal utang lebih bayar DBH yang seharusnya merupakan piutang kurang bayar.

Pengurangan:

Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada PPKD sebesar Rp24.088.525,00 merupakan Koreksi kurang catat hutang lebih bayar DBH
Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Bumiayu sebesar Rp446.740.000,00 berasal dari koreksi pencatatan utang jangka pendek lainnya ((hutang penyambungan daya listrik pekerjaan Pembangunan gedung pelayanan medik dan penunjang medik).

5.6.3.18 Koreksi Utang Belanja

Koreksi Nilai Utang Belanja sebesar (Rp4.530.012.387,00) merupakan koreksi saldo awal utang yang berasal dari 5 SKPD, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Penambahan :	Rp5.462.226,00
Pengurangan :	<u>Rp4.535.474.613,00</u>
Koreksi :	<u>(Rp4.530.012.387,00)</u>

Adapun rincian koreksi utang belanja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.244
Rincian Koreksi Nilai Utang Belanja

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
Penambahan :			
1	Koreksi saldo awal utang beban jasa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	89.754,00
2	Koreksi saldo awal utang beban pegawai	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	372.472,00
3	Koreksi saldo awal utang beban pegawai	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	5.000.000,00
Jumlah Penambahan :			5.462.226,00
Pengurangan :			
1	Koreksi saldo awal utang beban jasa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	10.000,00
2	Koreksi saldo awal utang beban jasa	DINAS KESEHATAN	18.482.697,00
3	Koreksi saldo awal utang beban pegawai	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25.627.250,00
4	Koreksi eliminasi utang beban jasa	DINAS KESEHATAN	4.491.158.666,00



No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
5	Koreksi saldo awal utang beban barang	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	196.000,00
	Jumlah Pengurangan :		4.535.474.613,00
	Jumlah Koreksi :		(4.530.012.387,00)

Penambahan:

Untuk koreksi utang belanja pada RSUD Brebes sebesar Rp89.754,00 berasal dari koreksi saldo awal utang beban jasa karena salah perhitungan.

Untuk koreksi utang belanja pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp372.472,00 berasal dari koreksi saldo awal utang beban pegawai karena salah perhitungan.

Untuk koreksi utang belanja pada UPTD Puskesmas Paguyangan sebesar Rp5.000.000,00 berasal dari koreksi saldo awal utang beban pegawai karena salah perhitungan.

Pengurangan:

Untuk koreksi utang belanja pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisti sebesar Rp10.000,00 merupakan koreksi saldo awal utang beban jasa karena adanya denda keterlamabatan pada PDAM

Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.482.697,00 merupakan koreksi saldo awal utang beban jasa karena kurang catat th 2017 biaya SKTM di RSUD Margono sebesar Rp8.831.499,00, kurang catat th 2018 biaya SKTM di RSUD Waled sebesar Rp4.718.543,00, kurang catat th 2019 biaya SKTM di RSUD Waled sebesar Rp4.932.655,00.

Untuk koreksi utang belanja pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp25.627.250,00 merupakan koreksi saldo awal utang beban jasa karena salah perhitungan, jumlah yang dibayarkan berbeda dengan pencatatan saldo utang belanja.

Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.491.158.666,00 merupakan koreksi saldo awal utang beban jasa karena pencatatan kembali utang biaya SKTM tahun 2019 di RSUD Brebes sebesar Rp4.332.142.468,00, utang biaya MCU tahun 2019 di RSUD Brebes sebesar Rp35.493.360,00, dan utang biaya SKTM tahun 2019 di RSUD Bumiayu sebesar Rp123.522.838,00

Untuk koreksi utang belanja pada UPTD Puskesmas Bumiayu sebesar Rp196.000,00 merupakan koreksi saldo awal utang beban barang persediaan karena salah catat.

5.6.3.19 Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap

Koreksi Nilai Mutasi SKPD Aset Tetap nihil, berikut perhitungan koreksi mutasi SKPD Aset tetap:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penambahan	:	Rp21.390.787.342,00
Pengurangan	:	Rp21.390.787.342,00
Koreksi	:	Rp-

Adapun rincian lebih lanjut koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.245
Rincian Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap

No	Uraian	SKPD	Nilai(Rp)
	Penambahan :		
1	Mutasi masuk aset dari SEKRETARIAT DAERAH, DINDIKPORA, BPPKAD	BKPSDMD	42.075.000,00
2	Mutasi masuk aset dari SEKRETARIAT DAERAH	BPPKAD	274.850.000,00
3	Mutasi masuk aset dari SEKRETARIAT DAERAH, Diperwaskim, UPTD BLUD TANJUNG	DINDIKPORA	361.060.000,00
4	Mutasi masuk aset tetap dari KECAMATAN BREBES, SEKRETARIAT DAERAH	DINKES	934.376.000,00
5	Mutasi masuk aset dari SEKRETARIAT DAERAH	DINKOMINFOTIK	235.995.050,00
6	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	DINKOPUMDAG	12.240.000,00
7	Mutasi masuk aset tetap dari KECAMATAN BREBES, DPU	DINPERWASKIM	3.578.488.400,00
8	Mutasi masuk aset tetap dari DKK	DINSOS	1.400.000,00
9	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	Dishub	6.840.000,00
10	Mutasi masuk aset tetap dari BNK, DINAS PETERNAKN DAN KESEHATAN HEWAN, KECAMATAN BREBES, Diperwaskim	DLHPS	124.886.275,00
11	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	DPKH	9.520.000,00
12	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	DPKP	4.120.000,00
13	Mutasi masuk aset tetap dari DINKOMINFOTIK	DPMPSTP	322.960.000,00
14	Mutasi masuk aset tetap dari SEKRETARIAT DPRD, Diperwaskim	DPSDAPR	205.020.000,00
15	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	DPU	894.489.000,00
16	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	KECAMATAN BUMIAYU	2.720.000,00
17	Mutasi masuk aset tetap dari Diperwaskim	KECAMATAN KETANGGUNGAN	1.360.000,00
18	Mutasi masuk aset tetap dari SETDA dan Diperwaskim	KECAMATAN BANTARKAWUNG	252.720.000,00
19	Mutasi masuk aset tetap dari SETDA	KECAMATAN PAGUYANGAN	250.000.000,00
20	Mutasi masuk aset tetap dari SETDA dan Diperwaskim	KECAMATAN SALEM	258.160.000,00
21	Mutasi masuk aset tetap dari SETDA	KECAMATAN TONJONG	250.000.000,00
22	Mutasi masuk aset tetap dari DKK, Diperwaskim	RSUD Brebes	212.720.000,00
23	Mutasi masuk aset tetap dari DKK	RSUD Bumiayu	105.000.000,00
24	Mutasi masuk aset tetap dari SETDA dan BPBD	SATPOL PP	95.750.000,00
25	Mutasi masuk aset tetap dari KECAMATAN TONJONG, KECAMATAN PAGUYANGAN, Diperwaskim, KECAMATAN BANTARKAWUNG, KECAMATAN SALEM	SEKRETARIAT DAERAH	747.360.000,00
26	Mutasi masuk aset tetap dari DKK, Diperwaskim	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	4.020.167.548,00
27	Mutasi masuk aset tetap dari DKK, Diperwaskim	UPTD PUSKESMAS BREBES	656.005.941,00
28	Mutasi masuk aset tetap dari DKK	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	1.070.572.310,00
29	Mutasi masuk aset tetap dari DKK, Diperwaskim	UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	4.545.722.195,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	SKPD	Nilai(Rp)
30	Mutasi masuk aset tetap dari DKK	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	388.959.629,00
31	Mutasi masuk aset tetap dari KEC. BREBES	DLHPS	4.000.000,00
32	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	KECAMATAN BREBES	4.000.000,00
33	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	12.650.000,00
34	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.925.000,00
35	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	16.380.000,00
36	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	62.142.855,00
37	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	65.848.775,00
38	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	KECAMATAN TONJONG	128.571.430,00
39	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	KECAMATAN PAGUYANGAN	128.571.430,00
40	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	KECAMATAN BANTARKAWUNG	128.571.430,00
41	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	KECAMATAN SALEM	128.571.430,00
42	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	SEKRETARIAT DPRD	139.700.000,00
43	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	BAGIAN UMUM	184.402.289,00
44	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	185.955.355,00
45	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	322.960.000,00
Jumlah Penambahan :			21.390.787.342,00
Pengurangan :			
1	Mutasi keluar aset tetap ke DLHPS	BNK	65.848.775,00
2	Mutasi keluar aset tetap ke SATPOL PP	BPBD	87.000.000,00
3	Mutasi keluar aset tetap ke DLHPS	DINAS PETERNAKN DAN KESEHATAN HEWAN	50.000.000,00
4	Mutasi keluar aset tetap ke BKPSDMD	DINDIKPORA	12.925.000,00
5	Mutasi keluar aset tetap ke DPMPSTP	DINKOMINFOTIK	322.960.000,00
6	Mutasi keluar aset tetap ke DPU, DPKP, DPSDAPR, Kec. Bumiayu, Dindikpora, Dishub, DPKH, KECAMATAN BANTARKAWUNG, KECAMATAN SALEM, SEKRETARIAT DAERAH, UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN, UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO, UPTD PUSKESMAS BREBES, DINKOPUMDAG, Kec. Ketanggungan, RSUD Brebes, DLHPS	DINPERWASKIM	800.762.500,00
7	Mutasi keluar aset tetap ke RSUD Brebes, RSUD Bumiayu, DINSOS, UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO, UPTD PUSKESMAS BREBES,, UPTD PUSKESMAS BUMIAYU, UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN, UPTD PUSKESMAS TANJUNG	DKK	10.984.227.623,00
8	Mutasi keluar aset tetap ke DINPERWASKIM	DPU	480.489.700,00
9	Mutasi keluar aset tetap ke SETDA	KECAMATAN BANTARKAWUNG	180.000.000,00
10	Mutasi keluar aset tetap ke DLHPS, DINPERWASKIM, DINKES, DPU,	KECAMATAN BREBES	4.146.498.700,00
11	Mutasi keluar aset tetap ke SETDA	KECAMATAN PAGUYANGAN	180.000.000,00
12	Mutasi keluar aset tetap ke SETDA	KECAMATAN SALEM	180.000.000,00



No	Uraian	SKPD	Nilai(Rp)
13	Mutasi keluar aset tetap ke SETDA	KECAMATAN TONJONG	180.000.000,00
14	Mutasi keluar aset tetap ke BKPSDMD	BPPKAD	12.650.000,00
15	Mutasi keluar aset tetap ke DINDIKPORA, KECAMATAN TONJONG, KECAMATAN PAGUYANGAN, KECAMATAN BANTARKAWUNG, KECAMATAN SALEM, BPPKAD, DINKES, BKPSDMD, SATPOL PP, DINKOMINFOTIK	SEKRETARIAT DAERAH	2.026.095.050,00
16	Mutasi keluar aset tetap ke DPSDAPR	SEKRETARIAT DPRD	139.700.000,00
17	Mutasi keluar aset tetap ke DINDIKPORA	UPTD BLUD TANJUNG	16.380.000,00
18	Mutasi keluar aset tetap ke DLHPS	KEC. BREBES	4.000.000,00
19	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.380.000,00
20	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	25.575.000,00
21	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	69.848.775,00
22	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70.892.855,00
23	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	139.700.000,00
24	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	175.652.289,00
25	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	185.955.355,00
26	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	322.960.000,00
27	Pencatatan Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk	BAGIAN UMUM	514.285.720,00
Jumlah Pengurangan :			21.390.787.342,00
Jumlah Koreksi :			-

5.6.3.20 Koreksi Awal Aset Tetap

Tidak ada koreksi awal asset tetap per 31 Desember 2020.

5.6.3.21 Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tidak ada koreksi awal akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020

5.6.3.22 Koreksi Awal Aset Lain-Lain

Tidak ada koreksi awal asset tetap per 31 Desember 2020

5.6.3.23 Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain

Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp12.207.570.035.66 merupakan koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)/Hibah belum dihapus dengan perhitungan sebagai berikut:



Penambahan	:	Rp12.438.483.300,00
Pengurangan	:	Rp230.913.264,34
Koreksi	:	<u>Rp12.207.570.035,66</u>

Adapun rincian awal penyusutan aset lain-lain disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.246

Rincian Awal Penyusutan Aset Lain-Lain

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
Penambahan :			
1	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	695.000,00
2	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	DINAS PEKERJAAN UMUM	12.429.038.300,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	BAGIAN UMUM	8.750.000,00
Jumlah Penambahan :			12.438.483.300,00
Pengurangan :			
1	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	2,00
2	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	SEKRETARIAT DPRD	1.073.000,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	BAGIAN UMUM	6.770.000,00
4	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	2.999.999,34
5	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	DINAS KESEHATAN	211.860.263,00
6	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD)	DINAS PERIKANAN	8.210.000,00
Jumlah Pengurangan :			230.913.264,34
Jumlah Koreksi :			12.207.570.035,66

Penambahan:

Untuk SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp695.000,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp12.429.038.300,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp8.750.000,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).



Pengurangan:

Untuk SKPD RSUD Brebes Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk SKPD Sekretariat DPRD Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp1.073.000,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp6.770.000,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk UPTD Puskesmas Banjarharjo Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.999.999,34 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk SKPD Dinas Kesehatan Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp211.860.263,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

Untuk SKPD Dinas Perikanan Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp8.210.000,00 berasal dari koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD).

5.6.3.24 Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya

Tidak ada koreksi mutasi SKPD Aset Lainnya per 31 Desember 2020.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Merupakan Saldo Ekuitas Awal ditambah surplus-LO atau dikurangi defisit LO dan ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Laporan Neraca. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.737.989.000.162,55. dibandingkan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.111.337.984.341,77 terdapat penurunan sebesar 9,08%.



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Umum

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Brebes berkedudukan tetap di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141, Brebes, Jawa Tengah, Kode Pos 52212.

b. Letak Geografis



Gambar 6.1
Peta Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian Utara paling Barat, diantara 108°41'37,7" – 109°11'28,92" Bujur Timur dan 6°44'56,5" – 7°20'51,48" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Brebes meliputi Laut Jawa di sebelah Utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah Timur, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah Selatan, serta Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) di sebelah Barat.

Wilayah terendah adalah Kecamatan Wanasari (1 m diatas permukaan air laut) dan Kecamatan Brebes dengan ketinggian 3 M dari permukaan laut, dan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Sirampok dengan ketinggian 875 M dari permukaan



laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030, pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1) Kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Brebes ditetapkan seluas ± 6.261 ha. Sebagian besar terdapat di wilayah selatan Kabupaten Brebes, yaitu Kecamatan Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung dan di wilayah tengah Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya.

Kawasan ini berfungsi untuk melindungi kawasan di bawahnya sehingga dapat menjamin terselenggaranya fungsi hidrolis bagi kegiatan pemanfaatan lahan. Kawasan ini meliputi kawasan resapan air. Di Kabupaten Brebes, kawasan resapan air dengan luas $\pm 21.564,1$ ha meliputi :

- a. Kecamatan Banjarharjo (± 1.170 ha);
- b. Kecamatan Bantarkawung (± 2.813 ha);
- c. Kecamatan Bumiayu ($\pm 0,1$ ha);
- d. Kecamatan Ketanggungan (± 1.043 ha);
- e. Kecamatan Larangan (± 372 ha);
- f. Kecamatan Paguyangan (± 2.041 ha);
- g. Kecamatan Salem (± 10.550 ha);
- h. Kecamatan Sirampog (± 3.375 ha);
- i. Kecamatan Tonjong (± 200 ha).

3) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan ini terdiri dari :

- a. Sempadan pantai, terdapat di sepanjang pantai utara dari Kecamatan Brebes sampai Kecamatan Losari dengan luas areal ± 722 ha;
- b. Sempadan sungai, dengan luas areal ± 1.963 ha yang tersebar di sepanjang sungai-sungai di Kabupaten Brebes;
- c. Pengelolaan kawasan sempadan waduk, berada di Waduk Malahayu Kecamatan Banjarharjo dengan luas ± 925 ha dan Waduk Penjalin Kecamatan Paguyangan dengan luas ± 125 ha;
- d. Ruang Terbuka Hijau, proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas perkotaan. Di Kabupaten Brebes untuk Ruang Terbuka Hijau meliputi Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, dan Bumiayu dengan luas ± 3.247 ha. Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau adalah 30% dari luas tersebut yaitu sekitar ± 974 ha;
- e. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :

e.1. Kawasan cagar alam;

Kawasan cagar alam di Kabupaten Brebes ditetapkan di Telaga



Ranjeng yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan dengan luas $\pm 48,50$ ha;

e.2. Kawasan muara sungai (estuari);

Kawasan muara sungai yang ditetapkan di Kabupaten Brebes, yaitu :

- Muara Sungai Kaligangsa dan muara Sungai Pemali di Kecamatan Brebes;
- Muara Sungai Balaikambang dan muara Sungai Luwungmalang di Kecamatan Wanasari;
- Muara Sungai Bangsri, muara Sungai Pakijangan, muara Sungai Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
- Muara Sungai Babakan, muara Sungai Kabuyutan, muara Sungai Sinung, muara Sungai Tanjung di Kecamatan Tanjung;
- Muara Sungai Bancang dan muara Sungai Cisanggarung di Kecamatan Losari;

e.3. Kawasan pantai berhutan bakau;

Berfungsi sebagai penahan dan pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi air laut. Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari;

e.4. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

Tersebar di beberapa Kecamatan, seperti Pendopo Kabupaten dan Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes, Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Fosil Kalijurang di Kecamatan Tonjong, dan masih banyak lainnya.

Selanjutnya kawasan budidaya di Kabupaten Brebes adalah :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes yaitu hutan yang berada dalam pengawasan KPH Pekalongan Barat dan KPH Balapulang, serta hutan rakyat. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes mencapai $\pm 43.860,98$ ha atau 26,04% dari luas wilayah Kabupaten Brebes di bawah pengawasan KPH. Untuk pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Brebes $\pm$ seluas 23.651 ha, sementara kawasan hutan produksi terbatas $\pm$ seluas 20.210 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian;

Terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian hortikultura. Untuk pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dilakukan di seluruh Kecamatan se Kabupaten Brebes dengan luas lahan ± 60.634 ha. Sedangkan untuk pertanian lahan kering dibutuhkan penanganan yang optimal dengan menonjolkan tanaman pertanian lahan kering yang menjadi andalan Kabupaten Brebes. Luas lahan pengembangan mencapai ± 23.561 ha. Dan untuk pertanian hortikultura yang didasarkan pada luas lahan dan produktifitasnya, dikembangkan pada semua Kecamatan di Kabupaten Brebes dengan rencana pengembangan seluas ± 17.632 ha.



- 3) Kawasan peruntukan perkebunan;
Luas areal kawasan perkebunan di Kabupaten Brebes mencapai ± 14.593 ha dimana 4% merupakan perkebunan P.T Perkebunan Negara (PTPN) sedangkan 96% merupakan perkebunan rakyat. Kabupaten Brebes mempunyai komoditas andalan tanaman perkebunan yang bersifat tahunan, yaitu : nilam, cengkeh, dan kapas. Daerah penghasil nilam dan cengkeh berada di wilayah selatan seperti Kecamatan Paguyangan, Bantarkawung, Sirampog, dan Salem. Sedangkan untuk kapas dihasilkan oleh Kecamatan Ketanggungan, Losari, dan Bulakamba.
- 4) Kawasan peruntukan perikanan;
Dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan. Kawasan perikanan tangkap merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk wilayah pesisir Kabupaten Brebes, dimana diharapkan mampu mendorong tingkat perekonomian wilayah. Sedangkan untuk kawasan budidaya perikanan terbagi menjadi budidaya perikanan tambak dan budidaya perikanan air tawar. Untuk budidaya perikanan tambak berada di sepanjang pantai wilayah pesisir Kabupaten Brebes yang terbentang di 5 Kecamatan pesisir dengan luas areal ± 12.748 ha. Untuk budidaya perikanan air tawar dengan luas kolam ± 114 ha berada di Kecamatan Bantarkawung, Salem, Banjarharjo, Bumiayu, Ketanggungan, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong.
- 5) Kawasan peruntukan peternakan;
Kawasan peternakan di Kabupaten Brebes merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan dan atau padang penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Kawasan ini berada hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes.
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan;
Kawasan pertambangan di Kabupaten Brebes mencakup :
 - a. Eksploitasi bahan galian berupa pasir sungai, trass, batu pasir, andesit, lempung grabah, bentonit, gypsum dan batu gamping. Tersebar hampir merata di wilayah Kecamatan se Kabupaten Brebes.
 - b. Studi dan eksplorasi tambang batu gamping meliputi Kecamatan Songgom dan Larangan. Emas, perak, dan platina di Kecamatan Salem, minyak bumi dan pirit (Fes) di Kecamatan Bantarkawung, batubara di Kecamatan Salem dan Bantarkawung, serta pasir besi di Kecamatan Brebes.
 - c. Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Sirampog, Paguyangan, Bumiayu dan Bantarkawung.
- 7) Kawasan peruntukan industri;
Pengembangan industri di Kabupaten Brebes dengan membentuk kawasan atau zona sebagai berikut :
 - a. Kawasan industri menengah dan besar yang dikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang mencakup wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Kersana maupun daerah Brebes Pantura yang dilalui oleh Jalan Tol Pejagan sampai dengan Pintu Keluar Tol Brebes Timur di Banjaranyar;



- b. Kawasan industri menengah dengan sifat kegiatan agro industri sekitar jalan arteri Kecamatan Paguyangan dengan pengawasan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) yang ketat.
 - c. Pembentukan sentra-sentra industri kecil seperti industri rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu, batik tulis di Desa Bentar dan Desa Bentarsari Kecamatan Salem, keramik dan tembikar di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo, telor asin di beberapa desa di bagian pantai utara Kabupaten Brebes dan lain sebagainya.
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata;
- Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
- a. Potensi pariwisata alam, meliputi :
 - a.1. Wisata Alam Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan;
 - a.2. Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan;
 - a.3. Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo;
 - a.4. Pantai Randusanga Indah di Kecamatan Brebes;
 - a.5. Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten di Kecamatan Sirampog;
 - a.6. Kawasan Perkebunan Kaligua di Kecamatan Paguyangan;
 - a.7. Kawasan Arum Jeram di Kecamatan Salem.
 - a.8. Kawasan Wisata Hutan Mangrove Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes
 - a.9. Kawasan Gunung Nyapa Desa Karangbale Kecamatan Larangan
 - b. Potensi pariwisata buatan, meliputi :
 - b.1. Pemandian air panas Cipanas Buaran di Kecamatan Bantarkawung;
 - b.2. Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng di Kecamatan Paguyangan.
- 9) Kawasan peruntukan permukiman
- Kawasan permukiman di alokasikan pada lahan-lahan yang kurang produktif dan memiliki kemiringan lereng di bawah 15°. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan.
- Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi kegiatan-kegiatan yang memiliki skala pelayanan lokal hingga regional. Pengembangan sistem pusat pelayanan di Kabupaten Brebes pada wilayah kota Kecamatan di sepanjang jalur pantai utara meliputi ibukota-ibukota kecamatan di Brebes, Wanasari, Tanjung, Bulakamba, dan Losari memerlukan rencana yang terpadu sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada;
- c. Demografi
- Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwasanya untuk data kependudukan yang digunakan semua keperluan pelaksanaan pemerintahan bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2020 jumlah penduduk yang ada



mencapai 1.966.385 jiwa yang terdiri dari 50,78% penduduk laki-laki atau sebanyak 998.614 jiwa dan 49,22% penduduk perempuan atau sebanyak 967.771 jiwa. Dengan demikian angka perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) di Kabupaten Brebes sebesar 103,19, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 103 orang penduduk laki-laki. Selain itu angka sex ratio pada tahun 2020 di setiap kecamatan di Kabupaten Brebes juga berkisar diatas angka 100, hal ini mengindikasikan bahwa komposisi jumlah penduduk di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan, namun selisihnya tidak terlalu signifikan.

Selain itu angka kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 1.008 jiwa/km² yang artinya setiap 1 km² didiami oleh sekitar 1.008 orang penduduk Kabupaten Brebes. Kepadatan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Brebes, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Salem.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Brebes

Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak didalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan sebagai pengarah bagi stakeholder untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah:

" Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan"

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingindicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Makna filosofis dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Brebes Unggul

Frasa unggul diartikan sebagai "lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain". Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Brebes Sejahtera

Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah inklusif dan berkelanjutan, yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat dan dunia usaha.



3. Brebes Berkeadilan

Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara kewilayahan, tetapi juga hasil pembangunan mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender, lintas usia dan lintas generasi.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

3. Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Brebes meliputi 20 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 15 Bidang Urusan Wajib dan 5 Bidang Urusan Pilihan, meliputi 52 Unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Daftar Unit Organisasi di Kabupaten Brebes
Berdasarkan Urusan dan Bidang

URUSAN DAN BIDANG	UNIT ORGANISASI (SKPD)
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
a. Bidang Pendidikan	1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
b. Bidang Kesehatan	2) Dinas Kesehatan
	3) Rumah Sakit Umum (RSUD) Brebes
	4) Rumah Sakit Umum (RSUD) Bumiayu
c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5) Dinas Pekerjaan Umum
	6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

URUSAN DAN BIDANG	UNIT ORGANISASI (SKPD)
Permukiman e. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat f. Bidang Sosial	8) Satuan Polisi Pamong Praja 9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 10) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12) Dinas Sosial
2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak h. Bidang Lingkungan Hidup i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil j. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa k. Bidang Perhubungan l. Bidang Komunikasi dan Informatika m. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah n. Bidang Penanaman Modal o. Bidang Kebudayaan p. Bidang Kearsipan	13) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14) Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17) Dinas Perhubungan 18) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan 20) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu 21) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22) Dinas Arsip dan Perpustakaan
3. URUSAN PILIHAN q. Bidang Kelautan dan Perikanan r. Bidang Pertanian s. Bidang Perindustrian	23) Dinas Perikanan 24) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 25) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 26) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4. URUSAN FUNGSI PENUNJANG t. Bidang Administrasi Pemerintahan	27) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 28) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 29) Sekretariat Daerah 30) Sekretariat DPRD 31) Kecamatan Brebes 32) Kecamatan Jatibarang 33) Kecamatan Wanasari 34) Kecamatan Songgom 35) Kecamatan Bulakamba 36) Kecamatan Tanjung 37) Kecamatan Losari 38) Kecamatan Kersana 39) Kecamatan Ketanggungan 40) Kecamatan Banjarharjo 41) Kecamatan Larangan 42) Kecamatan Tonjong 43) Kecamatan Bumiayu 44) Kecamatan Paguyangan 45) Kecamatan Sirampog



URUSAN DAN BIDANG	UNIT ORGANISASI (SKPD)
u. Bidang Pengawasan	46) Kecamatan Bantarkawung
v. Bidang Perencanaan	47) Kecamatan Salem
	48) Inspektorat
w. Bidang Keuangan	49) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	50) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	51) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
x. Bidang Kepegawaian	52) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Lembaga teknis daerah berbentuk Badan, Dinas dan Kantor, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

5. Personalia

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Brebes terdiri dari 50 anggota, yang berasal dari berbagai unsur partai politik (Parpol) pemenang Pemilu. Adapun Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Brebes periode 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Nama-Nama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes

Nama	Jabatan
a. Mokhamad Taufiq, S.Sn	Ketua DPRD
b. Zubad Fahilatah, SE	Wakil Ketua DPRD
c. Teguh Wahid T, SH	Wakil Ketua DPRD
d. Wurja, SE	Wakil Ketua DPRD
e. Sukirso	Ket.Kom.I; Agt.B.Angg;
f. Nasikun Hms, SH	Ket.Kom.II; Agt.B.Angg; Agt.B.Perda
g. Achmad Mafrukhi, SE	Ket.Kom.III; Agt.B.Angg
h. Muhaimin Sadirun, S.H.,M.H.	Ket.Kom.IV; Agt.B.Angg

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah (KDh) Kabupaten Brebes disebut Bupati, yang untuk periode Tahun 2017-2022 dijabat oleh Hj. Idza Priyanti, SE.MH. dan Wakil Kepala Daerah (WKDh) dijabat oleh Narjo, SH.

c. Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 9.183 orang, terdiri dari pegawai Golongan I sebanyak 104 orang, Golongan II sebanyak 1.460 orang, Golongan III sebanyak 4.576 orang dan Golongan IV sebanyak 3.043 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 567 orang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

merupakan yang menduduki jabatan struktural, Tenaga Fungsional Pendidikan sebanyak 4.494 orang, Tenaga Fungsional Kesehatan sebanyak 1.253 orang, Tenaga Fungsional Lainnya sebanyak 129 orang dan Staf sebanyak 2.740 orang. Pegawai tersebut tersebar di 52 unit organisasi atau SKPD Kabupaten Brebes.



BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Brebes yang lebih baik.



BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI